



**PEMERINTAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

2024

**P-RKPD
2024**

**PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH
DAERAH**

**KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2023**

**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

**Jalan Kadar 12 Sidorejo, Temanggung 56221
Telepon : (0293) 492154 Faximile : (0293) 491801**



**BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 22 TAHUN 2024**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, pergeseran pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan dan perubahan Lokasi kegiatan, sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 123);
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 30).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 30) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun atas dasar hasil evaluasi RKPD Tahun 2024 Triwulan II;
- (2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi pedoman dalam:
 - a. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024;

- b. Penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024; dan
- c. Penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2024 disusun dengan sistematika berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
- b. BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024;
- BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
- c. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD;
- d. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; dan
- e. BAB VI : PENUTUP.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Perubahan RKPD Tahun 2024 terdiri atas:

- a. Narasi Perubahan RKPD Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I/Buku 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan bupati ini; dan
- b. Perubahan Rencana Program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II/Buku 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan bupati ini.

4. Ketentuan dalam Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan dalam Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 21 Juni 2024



Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 21 Juni 2024



BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR 22

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan.....	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3 Keterkaitan Antar Dokumen.....	I-5
1.4 Maksud dan Tujuan	I-6
1.5 Sistematika Penulisan.....	I-7

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2024	II-1
2.1 Evaluasi Kinerja Utama.....	II-1
2.2 Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-5
1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	II-5
2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	II-11
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	II-17
4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	II-20
5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.....	II-23
6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	II-30
2.3 Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	II-33
1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja.....	II-33
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-35
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	II-36
4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan.....	II-37
5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.....	II-38
6. Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	II-41
7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-42
8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	II-44
9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan.....	II-46
10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	II-47
11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	II-49
12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	II-51
13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga.....	II-53
14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik.....	II-54
16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	II-54
17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	II-56
18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	II-57
2.4 Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan Pilihan.....	II-58

1.	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	II-58
2.	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata.....	II-59
3.	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian.....	II-61
4.	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan.....	II-64
5.	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	II-66
2.5	Evaluasi Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	II-67
1.	Sekretariat Daerah.....	II-67
2.	Sekretariat DPRD	II-72
2.6	Evaluasi Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.....	II-73
1.	Perencanaan	II-73
2.	Keuangan.....	II-75
3.	Kepegawaian	II-78
4.	Pendidikan dan Pelatihan.....	II-80
5.	Penelitian dan Pengembangan.....	II-81
2.7	Evaluasi Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	II-82
1.	Inspektorat Daerah	II-82
2.8.	Evaluasi Kinerja Unsur Kewilayahan	II-85
2.9.	Evaluasi Kinerja Unsur Pemerintahan Umum	II-96
2.10	Identifikasi Permasalahan.....	II-99

BAB III

	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.1.1	Kondisi Perekonomian Nasional.....	III-1
3.1.2	Kondisi Perekonomian Jawa Tengah.....	III-2
3.1.3	Kondisi Perekonomian Kabupaten Temanggung.....	III-3
3.1.3.1	Pertumbuhan Ekonomi	III-3
3.1.3.2	Struktur Ekonomi.....	III-5
3.1.3.3	PDRB Perkapita	III-7
3.1.3.4	Inflasi	III-7
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-9
3.2.1	Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III-11
3.2.2	Kebijakan Belanja Daerah	III-15
3.2.2.1	Persentase Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah	III-19
3.2.2.2	Persentase Belanja Modal terhadap Belanja Daerah	III-20
3.2.2.3	Persentase Belanja Tidak Terduga terhadap Belanja Daerah	III-20
3.2.2.4	Persentase Belanja Transfer Terhadap Belanja Daerah	III-21
3.2.3	Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-21
3.3	Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	III-26

BAB IV

	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah 2024-2026.....	IV-1
4.2	Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2024	IV-11
4.2.1	Tema Pembangunan Tahun 2024	IV-11

4.2.2	Prioritas Pembangunan Tahun 2024	IV-11
4.3	Kontribusi Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 pada Tahun 2024	IV-64
4.4	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur pada Tahun 2024.....	IV-65
4.5	Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Pencapaian Target SDGs Kabupaten Temanggung.....	IV-66
4.6	Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG)	IV-68
4.7	Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Penanganan Stunting Kabupaten Temanggung	IV-72
4.8	Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim	IV-73
4.9	Fasilitasi Perubahan Iklim.....	IV-75
4.10	Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimum	IV-77
 BAB V		
	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
5.1	Rencana Kerja Daerah.....	V-1
5.1.1	Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Terhadap Arah Kebijakan RKP 2024	V-1
5.1.2	Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Terhadap Prioritas Nasional RKP 2024.....	V-24
5.1.3	Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2024	V-132
5.1.4	Kebijakan Pembangunan Daerah yang Menerapkan Konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS)	V-156
5.1.5	Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dalam Rangka Penanganan Dampak Pandemi.....	V-174
5.1.6	Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Terhadap Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur	V-176
5.1.7	Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Terhadap Pembangunan Pintu Tol Bawen-Yogyakarta..	V-179
5.1.8	Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Terhadap Aksi Konvergensi Stunting.....	V-179
5.1.9	Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Terhadap SDGs.....	V-181
5.1.10	Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Terhadap Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	V-190
5.2	Pendanaan Daerah.....	V-192
5.2.1	Kegiatan Prioritas Per Program Berdasarkan Urusan dan Bidang.....	V-192
5.2.2	Pagu Indikatif Per Program Berdasarkan Urusan dan Bidang.....	V-212
 BAB VI		
	PENUTUP	VI-1

DAFTAR TABEL

BAB I

PENDAHULUAN.....	I-1
------------------	-----

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN

TRIWULAN I TAHUN 2024	II-1
Tabel 2.1 Simbol dan Status Capaian Kinerja	II-1
Tabel 2.2 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I	II-2
Tabel 2.3 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I	II-6
Tabel 2.4 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I	II-12
Tabel 2.5 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I	II-18
Tabel 2.6 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I	II-21
Tabel 2.7 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerin- tahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlin- dungan Masyarakat Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I	II-24
Tabel 2.8 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I	II-29
Tabel 2.9 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I	II-30
Tabel 2.10 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I	II-33
Tabel 2.11 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberda- yaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I	II-35
Tabel 2.12 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I.....	II-37
Tabel 2.13 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I	II-38
Tabel 2.14 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I.....	II-39
Tabel 2.15 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I	II-41
Tabel 2.16 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I	II-42
Tabel 2.17 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pengenda- lian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024	

	sampai dengan Triwulan I	II-44
Tabel 2.18	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I.....	II-46
Tabel 2.19	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I	II-48
Tabel 2.20	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I	II-49
Tabel 2.21	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I.....	II-51
Tabel 2.22	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I.....	II-53
Tabel 2.23	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I	II-54
Tabel 2.24	Capaian Kinerja Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I	II-55
Tabel 2.25	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I.....	II-56
Tabel 2.26	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I	II-57
Tabel 2.27	Capaian Kinerja Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I	II-58
Tabel 2.28	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I	II-60
Tabel 2.29	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I	II-61
Tabel 2.30	Capaian Kinerja Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I	II-64
Tabel 2.31	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I.....	II-66
Tabel 2.32	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I	II-67
Tabel 2.33	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I	II-72
Tabel 2.34	Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I.....	II-74
Tabel 2.35	Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Keuangan Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I.....	II-75
Tabel 2.36	Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Kepegawaian Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I	II-79
Tabel 2.37	Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I	II-80
Tabel 2.38	Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	

	Penelitian dan Pengembangan Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I	II-81
Tabel 2.39	Capaian Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I	II-81
Tabel 2.40	Capaian Kinerja Unsur Kewilayahan Kecamatan Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I	II-85
Tabel 2.41	Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I	II-96
 BAB III		
	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
Tabel 3.1	Proyeksi Indikator Makro Nasional 2024	III-2
Tabel 3.2	Proyeksi Indikator Makro Jawa Tengah 2024.....	III-3
Tabel 3.3	Pertumbuhan Ekonomi Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024	III-5
Tabel 3.4	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Temanggung Atas Dasar harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen) 2018-1022	III-5
Tabel 3.5	PDRB Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2024	III-6
Tabel 3.6	PDRB per Kapita Kabupaten Temanggung Tahun 2023	III-8
Tabel 3.7	Target Inflasi Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023	III-9
Tabel 3.8	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2023	III-14
Tabel 3.9	Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Temanggung Perubahan RKPD Tahun 2024.....	III-15
Tabel 3.10	Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Perubahan RKPD tahun 2024.....	III-17
Tabel 3.11	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2020	III-18
Tabel 3.12	Realisasi Belanja Daerah terhadap Belanja Daerah Tahun 2019-2020	III-18
Tabel 3.13	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Perubahan RKPD Tahun 2024.....	III-19
Tabel 3.14	Persentase Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah Perubahan RKPD Tahun 2024.....	III-21
Tabel 3.15	Persentase Belanja Modal terhadap Belanja Daerah Perubahan RKPD Tahun 2024.....	III-22
Tabel 3.16	Persentase Belanja Modal terhadap Belanja Daerah Perubahan RKPD Tahun 2024.....	III-22
Tabel 3.17	Persentase Belanja Transfer terhadap Belanja Daerah Perubahan RKPD Tahun 2024.....	III-23
Tabel 3.18	Pembiayaan Daerah Kabupaten Temanggung Perubahan RKPD Tahun 2024	III-24
Tabel 3.19	Kerangka Pendanaan Kabupaten Temanggung Perubahan RKPD Tahun 2024.....	III-25
Tabel 3.20	Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung.....	III-27

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
Tabel 4.1 Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan, Indikator Sasaran per Misi dengan Urusan/Bidang	IV-9
Tabel 4.2 Tema Pembangunan Tahun 2024	IV-11
Tabel 4.3 Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahu 2024	IV-20
Tabel 4.4 Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Temanggung dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024	IV-23
Tabel 4.5 Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Temanggung dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024	IV-29
Tabel 4.6 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Temanggung Tahun 2024	IV-32
Tabel 4.7 Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung dengan Janji Tahunan Kepala Daerah dan Pokok-Pokok Pikiran Tahunan DPRD Tahun 2024	IV-51
Tabel 4.8 Keterkaitan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah, Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas	IV-54
Tabel 4.9 Sasaran, Prioritas, dan Program yang Mendukung Terwujudnya SDGs di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024	IV-66
Tabel 4.10 Sasaran dan Prioritas Daerah yang Mendukung Pengarus-Utamaan Gender di Kabupaten Temanggung Tahun 2024	IV-69
Tabel 4.11 Sasaran dan Prioritas Daerah yang Mendukung Penanganan Stunting	IV-72
Tabel 4.12 Sasaran dan Prioritas Daerah yang Mendukung Pengarus-Utamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim di Kabupaten Temanggung Tahun 2024	IV-74
Tabel 4.13 Sasaran dan Prioritas Daerah yang Mendukung Pemenuhan SPM di Kabupaten Temanggung Tahun 2024	IV-78

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
Tabel 5.1 Rekapitulasi Dukungan Program Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung terhadap Arah Kebijakan dalam RKP Tahun 2024	V-2
Tabel 5.2 Persentase Dukungan Program Prioritas Daerah RKP Kabupaten Temanggung terhadap Arah Kebijakan Nasional Tahun 2024	V-3
Tabel 5.3 Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap Arah Kebijakan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.....	V-4
Tabel 5.4 Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung	

	Terhadap Arah Kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan	V-9
Tabel 5.5	Dukungan Program Pritoritas Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap Arah Kebijakan Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan	V-15
Tabel 5.6	Dukungan Program Pritoritas Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap Arah Kebijakan Penguatan Daya Saing Usaha.....	V-16
Tabel 5.7	Dukungan Program Pritoritas Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap Arah Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi	V-17
Tabel 5.8	Dukungan Program Pritoritas Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap Arah Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas	V-18
Tabel 5.9	Dukungan Program Pritoritas Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap Arah Kebijakan Pemilihan Umum Tahun 2024	V-23
Tabel 5.10	Rekapitulasi Dukungan Program Kabupaten Temanggung Tahun 2024 terhadap Prioritas Nasional RKP Tahun 2024	V-25
Tabel 5.11	Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.....	V-27
Tabel 5.12	Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.....	V-33
Tabel 5.13	Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.....	V-35
Tabel 5.14	Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.....	V-50
Tabel 5.15	Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.....	V-52
Tabel 5.16	Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	V-61
Tabel 5.17	Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	V-64
Tabel 5.18	Dukungan Program Daerah Kabupaten Temanggung terhadap Program Prioritas/Kegiatan Prioritas dalam PN RKP Tahun 2024	V-78
Tabel 5.19	Dukungan Program Daerah dalm RKD Tahun 2024-2026 Dan Dukungan Program Daerah RKP Tahun 2024 terhadap Program Prioritas/Kegiatan Prioritas Masing-Masing PN RKP Tahun 2024.....	V-131
Tabel 5.20	Rekapitulasi Dukungan Program dan Anggaran Terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun	

	2024	V-132
Tabel 5.21	Dukungan Program Daerah Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung: Peningkatan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Perumahan dan Permukiman.....	V-133
Tabel 5.22	Dukungan Program Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung: Pemulihan Ekonomi	V-140
Tabel 5.23	Dukungan Program Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung: Pemantapan Reformasi Birokrasi.....	V-146
Tabel 5.24	Total Pagu Anggaran untuk Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024.....	V-154
Tabel 5.25	Keruntutan Kebijakan Pembangunan Daerah RKPD 2024 yang Menerapkan Konsep Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS).....	V-156
Tabel 5.26	Program yang Mendukung Pemulihan Ekonomi Dampak Pandemi Covid di Kabupaten Temanggung	V-173
Tabel 5.27	Program yang Mendukung Pengentasan Kemiskinan Dampak Pandemi Covid di Kabupaten Temanggung	V-174
Tabel 5.28	Dukungan Program dan Kegiatan Kabupaten Temanggung Terhadap Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Borobudur Tahun 2024	V-175
Tabel 5.29	Program Daerah yang Mendukung Aksi Konvergensi Stunting Tahun 2024	V-178
Tabel 5.30	Program Daerah yang Mendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dan Pengarusutamaan Gender	V-180
Tabel 5.31	Pemetaan Indikator SDGs dalam Dokumen Perencanaan Daerah	V-188
Tabel 5.32	Program Daerah yang Mendukung Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim.....	V-189
Tabel 5.33	Rekapitulasi Anggaran Per Urusan dan Per Bidang	V-211
Tabel 5.34	Rencana Pembiayaan Per Urusan dan Program	V-213
BAB VI		
	PENUTUP.....	VI-1

DAFTAR GAMBAR

BAB I	
PENDAHULUAN.....	I-1
Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen P-RKPD dengan Dokumen Lain	I-5
BAB II	
EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2024	II-1
Gambar 2.1 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Tahun 2024 Triwulan I.....	II-98
Gambar 2.2 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Program Tahun 2023 Triwulan II.....	II-99
BAB III	
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	III-4
BAB IV	
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
Gambar 4.1 Komponen penyusun RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024	IV-1
Gambar 4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2024	IV-12
BAB V	
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
BAB VI	
PENUTUP.....	VI-1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan

Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung 2024 merupakan sebuah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah resmi ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor ... Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 tanggal 20 Juni 2024. Dokumen ini sudah menjadi acuan resmi semua Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung dalam semester pertama Tahun 2024 ini. Namun karena munculnya beberapa permasalahan serta kebutuhan dalam dinamika pembangunan daerah yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan pembangunan di enam bulan pertama tahun 2024, Perubahan RKPD Tahun 2024 perlu untuk disesuaikan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan

Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sampai dengan triwulan II yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Penyesuaian alokasi anggaran kegiatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan perkembangan harga;
- b. Penghapusan kegiatan karena menyesuaikan kemampuan keuangan, penambahan kegiatan baru yang disesuaikan dengan nomenklatur DAK oleh

- Pusat, penambahan atau pengurangan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
- c. Penyesuaian saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk Tahun berjalan mempedomani hasil audit BPK atas laporan pertanggungjawaban LPP APBD Kabupaten Temanggung TA. 2023 Fokus kebijakan Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ditujukan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan, dengan prioritas sebagai berikut :
- a. Penguatan Ekonomi Kerakyatan untuk tercapainya percepatan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Optimalisasi Reformasi birokrasi (*good governance*);
 - c. Penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. Pemerataan pembangunan wilayah dan lingkungan hidup.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

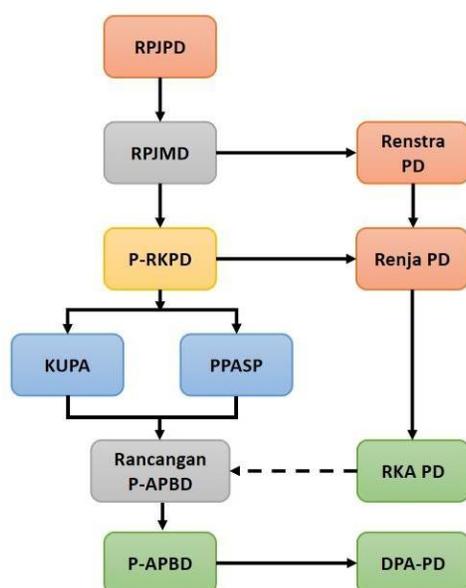
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang

- Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
 35. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2019 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 41. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

42. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
43. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM;
45. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
46. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
47. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024; dan
48. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.3 Keterkaitan Antar Dokumen

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 diperlukan untuk menjamin keselarasan, keterkaitan, dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang berdasarkan pada evaluasi capaian sampai dengan Triwulan II tahun 2024 pelaksanaan RKPD tahun 2024 dengan dan tetap berpedoman pada RPJPD, RPJMD, dan Renstra. Selain berdasarkan evaluasi capaian sampai dengan Triwulan II tahun 2024 dokumen Perbuahan RKPD juga disusun berdasarkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023 untuk penyesuaian struktur anggaran. Dokumen Perubahan RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) serta Penyusunan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) yang nantinya menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun renja, RKA, dan DPA Perangkat Daerah. Hubungan antar dokumen tersebut tergambar dalam bagan sebagai berikut.



Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen P-RKPD dengan Dokumen Lain

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah untuk melakukan penyesuaian perkembangan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, kerangka keuangan daerah, serta rencana program/kegiatan berdasarkan hasil evaluasi tahun 2024 triwulan II.

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam menyusun perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024; dan
- b. Menjadi pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2024 sebagai dasar penyusunan Rancangan Perda Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024.

Proses penyusunan dokumen perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 meliputi:

- a. Penyusunan rancangan perubahan RKPD;
- b. Perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan
- c. Penetapan perubahan RKPD. Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 menjadi pedoman perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024

meliputi sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang dan dasar pertimbangan perubahan, dasar hukum, maksud, tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan kinerja sasaran pembangunan dan program semua urusan dan bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2024 sampai dengan Triwulan II.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD

Memuat rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024 yang disesuaikan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

BAB VI PENUTUP

Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2023
SAMPAI DENGAN MEI TAHUN 2024

Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan dengan membandingkan target, realisasi dan capaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja sasaran dan indikator program terhadap target RPD 2024-2026 dengan mencantumkan status capaiannya. Adapun status capaian digambarkan dalam simbol penanda dengan bentuk dan warna yang berbeda untuk memudahkan evaluasi. Simbol penanda yang digunakan adalah sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Simbol dan Status Capaian Kinerja

Simbol	Status Capaian Kinerja RKPD	Status Capaian Kinerja RPD
	Telah Tercapai atau TT (34%-100%)	Telah Tercapai atau TT (34%-100%)
	Akan Tercapai atau AT (17%-33,99%)	Akan Tercapai atau AT (17%-33,99%)
	Upaya Keras atau UK (0%-16,99%)	Upaya Keras atau UK (0%-16,99%)

2.1 Evaluasi Kinerja Utama

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan RPD 2024-2026, bahwa indikator tujuan merupakan indikator kinerja utama penyelenggaraan pemerintah daerah. Berikut adalah capaian kinerja 8 indikator kinerja utama sampai dengan tahun 2024 (Sampai dengan Mei).

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 s.d bulan Mei 2024

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Terwujudnya masyarakat yang berkualitas dan berdaya	Indek Pembangunan Manusia (IPM)*	Angka	71,33	71,77	71,33	99,39		
	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,5	7,65	7,5	98,04		Dindikpora
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,61	12,6	12,61	100,00		Dindikpora
	Meningkatnya Pembangunan pemuda dan kebudayaan	Indek Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	3,98	3,56	3,98	100,00		Dindikpora
		Indeks Pembangunan Olahraga	Angka	2,97	0,30	2,97	100,00		Dindikpora
		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka	3,67	4,21	3,67	87,17		Dinbudpar
	Meningkatnya toleransi masyarakat	Indeks Toleransi	Angka	4,5	4,5	4,5	100,00		Kesbangpol
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	75,77	75,71	75,77	100,00		Dinkes
	Meningkatnya kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	95,99	96,75	95,99	99,21		DPPPAPPKB
2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,2	5,27	5,2	98,67		
	Meningkatnya perekonomian masyarakat	Pendapatan Per kapita	Ribu Rp	30,93	32,25	30,93	95,91		Dinkominfo

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat	Angka Kemiskinan	Angka	9,26	9,25-9,10	8,67	100,00		Dinkominfo
		Ketimpangan Pendapatan (Distribusi Pendapatan Berdasarkan Kriteria Bank Dunia)	Angka	19,52	18,8	19,52	100,00		Dinkominfo
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Angka	2,32	2,31	2,52	100,00		Dinkominfo
	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	%	0	74,95	0	0,00		DPUPR
		Indeks Kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Angka	74,83	65,41	74,83	100,00		DPRKPLH
		Indeks Rasa Aman	Angka	4,55	4,62	4,55	98,48		Satpol PP
3	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B	B	B	100,00		Bagian Organisasi
	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi.	IPKD	Angka	68,08	65,5	68,08	100,00		BPKPAD
	Meningkatnya kualitas SDM aparatur	Indeks Merit System	angka	0,62	0,5	0,62	100,00		BKPSDM
	Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Predikat	B	B	B	100,00		Bagian Organisasi

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat	84,97	76,61-88,30	84,97	100,00		Bagian Organisasi
RATA-RATA							93,48		

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024, data diolah

Rata-rata capaian pada indikator Kinerja Utama sampai dengan Mei Tahun 2024 yaitu 93,48% dengan status Telah Tercapai.

2.2 Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan terdiri dari 8 indikator kinerja sasaran dan 37 indikator kinerja program sebagaimana ditampilkan tabel berikut ini.

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan s.d Mei Tahun 2024

Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
				Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indikator Sasaran IKUPD								
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	Persentase PAUD terakreditasi minimal B	%	51	56,5	43,65	77,26	●	Dindikpora
	Persentase SD terakreditasi minimal B	%	96,97	98,16	76,73	78,17	●	Dindikpora
	Persentase SMP terakreditasi minimal B	%	97,2	90,36	82,56	91,37	●	Dindikpora
	Persentase Satuan Pendidikan Non Formal terakreditasi minimal B	%	na	28	23,08	82,43	●	Dindikpora
Meningkatnya Akses layanan pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 5-6 tahun	%	na	100	86,77	86,77	●	Dindikpora
	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 7-12 tahun	%	na	100	96,65	96,65	●	Dindikpora
	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 13-15 tahun	%	na	100	97,84	97,84	●	Dindikpora
	Persentase Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	13,49	100	13,49	13,49	▼	Dindikpora
RATA-RATA						78,00	●	

Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
				Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indikator Program								
Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase APM PAUD (5-6 tahun)	%	na	81,35	75,46	92,76	●	Dindikpora
	Persentase APK PAUD (0-6 tahun)	%	40,41	42,43	36,8	86,73	●	Dindikpora
	Persentase APK PAUD (4-6 tahun)	%	76,6	77,17	61,64	79,88	●	Dindikpora
	Persentase APK PAUD (5-6 tahun)	%	na	89,05	92,81	100,00	●	Dindikpora
	Persentase Pendidik PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4 Pendidikan Guru PAUD/Bimbingan Konseling/Psikologi	%	na	100	40,87	40,87	●	Dindikpora
	Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	%	47,47	49,14	64,97	100,00	●	Dindikpora
	Persentase Jumlah Kepala Satuan PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	%	na	100	52,7	52,70	●	Dindikpora
	Rasio Jumlah Pengawas dan Penilik PAUD	%	na	0,02	0,03	100,00	●	Dindikpora
	Persentase ruang kelas TK Negeri dalam kondisi baik	%	100	100	100	100,00	●	Dindikpora

Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
				Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Persentase APM SD Sederajat	%	98,3	98,5	88,58	89,93	●	Dindikpora
	Persentase APK SD Sederajat	%	105,05	104,48	98,44	94,22	●	Dindikpora
	Angka Putus Sekolah SD Sederajat	%	0,03	0,02	0,01	100,00	●	Dindikpora
	Rasio Siswa/Guru SD	angka	na	01:28	01:21	100,00	●	Dindikpora
	Rasio Siswa/Rombel SD	angka	na	01:28	01:26	100,00	●	Dindikpora
	Persentase Pendidik SD memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4	%	na	100	71,76	71,76	●	Dindikpora
	Persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	%	53,9	61,27	58,1	94,83	●	Dindikpora
	Persentase Kepala SD memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	%	na	100	94,24	94,24	●	Dindikpora
	Persentase tenaga penunjang lain di SD yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	%	na	100	25,92	25,92	▲	Dindikpora
	Rasio Jumlah Pengawas SD	%	na	0,1	0,03	30,00	●	Dindikpora
	Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	%	79,5	90,49	94,9	100,00	●	Dindikpora

Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
				Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Persentase APM SMP Sederajat	%	88	88,5	76,18	86,08	●	Dindikpora
	Persentase APK SMP Sederajat	%	98,59	98,7	97,34	98,62	●	Dindikpora
	Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	%	98,5	98,7	97,97	99,26	●	Dindikpora
	Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	angka	0,2	0,18	0,08	100,00	●	Dindikpora
	Rasio Siswa/Guru SMP	angka	na	0,0639	0,0583	91,30	●	Dindikpora
	Rasio Siswa/Rombel SMP	angka	na	0,0639	0,0701	100,00	●	Dindikpora
	Persentase Pendidik SMP memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4	%	na	100	72,92	72,92	●	Dindikpora
	Persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	%	63,21	66	61,05	92,50	●	Dindikpora
	Persentase Kepala SMP memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	%	na	100	93,02	93,02	●	Dindikpora

Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
				Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Persentase tenaga penunjang lain di SMP yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	%	na	100	40,33	40,33	●	Dindikpora
	Rasio Jumlah Pengawas SMP	%	na	0,07	0,06	85,71	●	Dindikpora
	Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	%	95,17	95,92	94,39	98,40	●	Dindikpora
	Persentase Pendidik Kesetaraan memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4 sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu	%	na	100	64,15	64,15	●	Dindikpora
	Persentase Kepala Satuan Pendidikan Non Formal memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4	%	na	100	96,15	96,15	●	Dindikpora
	Persentase tenaga penunjang lain di Satuan Pendidikan Non Formal yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	%	na	100	47,62	47,62	●	Dindikpora
	Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha (kesanggupan memenuhi indikator)	%	na	100	89,51	89,51	●	Dindikpora
	Persentase SDM lembaga kursus yang sudah mendapatkan pelatihan dari Dudi	%	na	17	51,06	100,00	●	Dindikpora
RATA-RATA						84,04	●	

Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
				Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata capaian sebesar 78,00% dengan status Telah Tercapai (TT). Bidang Pendidikan terdiri dari indikator 8 indikator sasaran, pada indikator sasaran masih ada 1 indikator yang perlu upaya keras, yaitu persentase tenaga penunjang lain di SD yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat Rasio Jumlah Pengawas SD. Faktor penghambat diantaranya adalah:

A. Kendala Internal :

- a) Rendahnya minat kemauan anak untuk bersekolah
- b) Ketidakmampuan dalam mengikuti pelajaran
- c) Anak terpaksa bekerja dan membantu orang tua

B. Kendala Eksternal :

- a) Faktor ekonomi keluarga, kurangnya perhatian orang tua, faktor budaya dan lokasi atau letak geografis
- b) kurangnya sosialisasi dan pemahaman orang tua terhadap pentingnya pendidikan.
- c) Faktor lingkungan (lingkungan sekolah, lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat)

Untuk mencapai target pada akhir tahun 2024 maka perlu dilaksanakan updating data kemudian dilakukan pemilahan dan peminatan. Kampanye Gerakan Kembali Ke Sekolah, Pendataan AUSTS dan Kebijakan.

Capaian rata-rata pada Indikator program sebesar 84,04% dengan status Telah Tercapai (TT). Pada indikator program bidang pendidikan ada 37 indikator, masih ada 1 indikator dengan status Akan Tercapai (AT) yaitu indikator persentase tenaga penunjang lain di SD yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat. Faktor penghambat adalah masih terdapat data personal yang belum dimutakhirkan, masih terdapat guru lama yang belum S1. Untuk mencapai target pada akhir tahun 2024 maka perlu melakukan sosialisasi pemutakhiran data personal pada dapodik.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan di Dinas Kesehatan terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 31 indikator kinerja program serta di RSUD terdiri dari 1 indikator kinerja program dengan capaian kinerja

sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan s.d Mei Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Indikator Sasaran IKUPD									
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Angka	na	0,13	0,19	100	●	Dinas Kesehatan
RATA-RATA							100	●	
Indikator Program Perangkat Daerah									
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	44,96	73	11,24	100	●	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 KH	13,04	13,5	2,7	100	●	Dinas Kesehatan
		Cakupan Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	%	0,31	0,5	0,3	23,56	▲	Dinas Kesehatan
		Prevalensi anemia pada ibu hamil	% maksimal	11,41	13,44	14,44	79,99	●	Dinas Kesehatan
		Cakupan Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%	100	100	23,19	23,19	▲	Dinas Kesehatan
		Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	100	100	23,19	23,19	▲	Dinas Kesehatan
		Persentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	%	100	100	23,19	23,19	▲	Dinas Kesehatan

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	22,75	22,75	▲	Dinas Kesehatan
		Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani	%	100	100	100	100	●	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Neonatal	per 1.000 KH	9,22	9,15	1,8	100	●	Dinas Kesehatan
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	100	●	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Balita	per 1.000 KH	16,1	15,6	2,81	100	●	Dinas Kesehatan
		Prevalensi ballita gizi buruk	%	0,22	0,31	0,19	100	●	Dinas Kesehatan
		Prevalensi Stunted (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-24 bulan)	% maksimal	11,59	14	11,2	100	●	Dinas Kesehatan
		Persentase bayi umur 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	% minimal	87,42	82,5	86,92	100	●	Dinas Kesehatan
		Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	9,68	9,68	▼	Dinas Kesehatan
		Persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	26,06	26,06	▲	Dinas Kesehatan

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Cakupan warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	29,06	29,06	▲	Dinas Kesehatan
		Persentase fasyankes yang memenuhi standar mutu	%	n.a	62	70	100	●	Dinas Kesehatan
		Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	21,76	21,76	▲	Dinas Kesehatan
		Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	42,13	42,13	●	Dinas Kesehatan
		Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	38,78	38,78	●	Dinas Kesehatan
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	26,8	26,8	▲	Dinas Kesehatan
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	23,99	23,99	▼	Dinas Kesehatan
		Incident Rate DBD (Demam Berdarah Dengue)	Maks per 100.000 penduduk	2,09	8	2,08	100	●	Dinas Kesehatan
		Presentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23	%	n.a	82	18,19	22,18	▲	Dinas Kesehatan

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		bulan							
		Persentase rumah sehat	%	85,99	82,3	85,19	100	●	Dinas Kesehatan
		Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	%	99,02	98,2	100	100	●	Dinas Kesehatan
		Persentase Puskesmas dengan SDM kesehatan yang memenuhi standar	%	n.a	23,1	15,38	66,6	●	Dinas Kesehatan
		Cakupan puskesmas melaksanakan pelayanan farmasi sesuai standar	%	100	85	100	100	●	Dinas Kesehatan
		Persentase Rumah Tangga Sehat (PHBS Rumah Tangga) Strata Utama dan Paripurna	%	96	84,01	0	0	▼	Dinas Kesehatan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan nilai akreditasi RSUD	%	100	100	100	100	●	RSUD
RATA-RATA							62,59	●	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, capaian rata-rata indikator sasaran pada bidang kesehatan sebesar 100% dengan status Telah Tercapai (TT). Rata-rata capaian pada indikator program bidang kesehatan sebesar 62,59% dengan status Telah Tercapai (TT).

Pada bidang kesehatan ada 32 indikator program, 19 indikator dengan status Telah Tercapai (TT), 10 indikator dengan status Akan Tercapai (AT) dan 3 indikator yang masih berstatus Upaya Keras(UK).

3 indikator yang masih berstatus Upaya Keras adalah :

- a) Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, dengan faktor penghambat adalah pelaksanaan penjangkaran berkala akan dilakukan pada sampai dengan Mei I saat penerimaan peserta didik baru. Upaya pencapaian target di akhir tahun 2024 adalah dengan melaksanakan kegiatan di sampai dengan Mei I tahun 2024.
- b) Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar, dengan faktor penghambat diantaranya adalah belum seluruh sasaran risiko HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV dan belum dilakukan kunjungan ke lokasi dengan kelompok resiko tertentu (RUTAN). Upaya pencapaian target di akhir tahun 2024 dengan pelayanan deteksi dini penderita HIV.
- c) Persentase Rumah Tangga Sehat (PHBS Rumah Tangga) Strata Utama dan Paripurna, dengan faktor penghambat yaitu Pendataan PHBS TW 1 belum dilaksanakan karena menunggu perubahan indikator dari provinsi dan akan dilaksanakan pada bulan April. Upaya pencapaian target di akhir tahun 2024 dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan dalam pelaksanaan pendataan PHBS.

Persentase Rumah Tangga Sehat (PHBS Rumah Tangga) Strata Utama dan Paripurna, dengan faktor penghambat yaitu pendataan PHBS TW 1 belum dilaksanakan karena menunggu perubahan indikator dari provinsi dan akan dilaksanakan pada bulan April. Upaya yang dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan dalam pelaksanaan pendataan PHBS.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang terdiri dari 2 indikator kinerja sasaran dan 11 indikator kinerja dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan 1 indikator program kinerja pada dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang s.d. Mei Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Indikator Sasaran IKUPD									
1.	Meningkatnya infrastruktur sarana dan prasarana -wilayah	Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	%	84,71	84,47	84,22	99,70	●	DPUPR
		Persentase Pemanfaatan Tata Ruang Sesuai rencana tata ruang	%	89,56	89,50	89,56	100	●	DPUPR
RATA-RATA							99,85	●	
Indikator Program Perangkat Daerah									
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	%	59,36	59,32	59,36	100	●	DPUPR
		Cakupan Area Layanan Daerah Irigasi	%	98,32	97,97	98,32	100	●	DPUPR
2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Penyediaan Air Minum	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	%	95,95	95,50	96,47	100	●	DPUPR
		Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	%	n.a	100	0	0	▼	DPUPR
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase saluran drainase kondisi baik	%	69,21	69,04	69,21	100	●	DPUPR
4.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase trotoar kondisi baik	%	66,66	73,93	66,66	90,17	●	DPUPR

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase terbangunnya gedung pemerintah	%	n.a	100	0	0	▼	DPUPR
5.	Program Penyelenggara Jalan	Persentase jalan Kabupaten kondisi mantap	%	89,16	89,29	87,87	98,41	●	DPUPR
		Persentase jembatan Kabupaten Kondisi baik	%	93,73	93,75	93,18	99,39	●	DPUPR
		Persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan	%	n.a	18,61	22,48	100	●	DPUPR
6.	Program Penyelenggaraan Penataan ruang	Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	%	89,56	89,50	89,56	100	●	DPUPR
7.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)	%	100	100	100	100	●	DPRKPLH
	RATA-RATA						82,33	●	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Rata-rata Capaian sampai dengan Mei Tahun 2024 pada indikator kinerja sasaran yaitu 98,85% dengan status Telah Tercapai (TT) dan rata-rata capaian indikator program sebesar 82,33%, bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang ada 12 indikator kinerja program, ada 10 indikator dengan status Telah Tercapai dan 2 indikator dengan status Upaya Keras yaitu :

- a) Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari, dengan faktor penghambat diantaranya adalah :
 1. Kontur geografi dan topografi wilayah dan tata kelola SPAM yang belum optimal di tingkat masyarakat;
 2. Adanya ego masing-masing desa/dusun dalam hal pemanfaatan sumber air minum;
 3. Konflik kepentingan antara Pengelola SPAM dan petani;
 4. Pendataan rinci di tingkat kelurahan/desa dan tidak memiliki akses langsung ke tingkat desa/kelurahan untuk memperoleh data kependudukan;
 5. Masyarakat belum memahami sepenuhnya mengenai air minum layak;
 6. Masih ada beberapa beberapa SPAM yang belum terkelola dengan baik;
 7. Belum ada CSR;
- b) Persentase terbangunnya gedung pemerintah, dengan faktor penghambat adalah keterbatasan anggaran APBD Kabupaten Temanggung. Upaya pencapaian target adalah berkoordinasi dengan PD lain agar pelaksanaan fisik segera dilaksanakan

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari 3 indikator kinerja sasaran dan 6 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman s.d. Mei Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Indikator Sasaran IKUPD									
1.	Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	Persentase perumahan dan Permukiman layak huni	%	99,12	99,02	99,12	100	●	DPRKPLH
2.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	64,07	52,70	64,07	100	●	DPRKPLH
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	85,10	83,82	85,10	100	●	DPRKPLH
RATA-RATA							100	●	
Indikator Program Perangkat Daerah									
1.	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	4,50	4,46	4,5	99,16	●	DPRKPLH
		Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	%	94,39	88,30	94,39	100	●	DPRKPLH
2.	Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah layak huni	%	94,5	95,54	95,5	100	●	DPRKPLH
		Persentase kawasan kumuh perkotaan	%	4,86	4,84	4,77	100	●	DPRKPLH
		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	0	0	▼	DPRKPLH

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	%	100	100	100	100		DPRKPLH
	RATA-RATA						83,19		

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Rata-rata capaian indikator sasaran dan program pada bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu 100% dengan status Telah Tercapai (TT). Capaian rata-rata indikator program yaitu 83,19% masih ada 1 indikator yang masih berstatus Upaya Keras (UK) yaitu persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni, dengan faktor penghambat adalah belum adanya pos anggaran pada DPRKPLH yang digunakan untuk menangani relokasi rumah yang menjadi korban apabila terjadinya bencana. Upaya tindak lanjut dalam rangka mencapai terger di akhrit tahun 2024 adalah penyediaan pos anggaran untuk penyediaan lahan relokasi serta melakukan mitigasi bencana pada area rawan bencana.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar bidang Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat terdiri dari 3 indikator kinerja sasaran dan 7 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
s.d Mei Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	%	na	100	100	100		Satpol PP Damkar
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	%	na	100	46,26	46,26		Satpol PP Damkar
		cakupan penanganan bencana non kebakaran kabupaten	Angka	na	310	85	27,42		Satpol PP Damkar
RATA-RATA							57,89		
1.	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Satlinmas yang terlatih	%	100	100	100	100		Satpol PP Damkar
		Persentase pengaduan yang berkaitan dengan Trantibum yang ditindaklanjuti	Rasio	1,42	1,62	1,407	86,85		Satpol PP Damkar
		Persentase penegakan Perda/Perbup	%	100	100	100	100		Satpol PP Damkar
2.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	n.a	3,46	100	100		Satpol PP Damkar

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	n.a	100	35,29	35,29	●	Satpol PP Damkar
		Persentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran oleh relawan kebakaran	%	n.a	100	0	100	●	Satpol PP Damkar
		Persentase Bangunan/Gedung/Lingkungan yang menjadi prioritas inspeksi	%	n.a	3,08	0,68	22,08	▲	Satpol PP Damkar
	RATA-RATA						77,75	●	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Rata – rata capaian kinerja sasaran yaitu 57,89% dan rata-rata indikator program yaitu 77,75% . Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat terdiri dari 3 indikator kinerja sasaran dengan capaian Telah Tercapai (TT) dan 7 indikator kinerja program. Pada kinerja sasaran, masih ada 1 indikator yang berstatus Akan Tercapai (AT) yaitu di indikator cakupan penanganan bencana non kebakaran kabupaten dikarenakan:

- a) APD dan sarpras yang dipergunakan dalam penanganan layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia di Kabupaten Temanggung belum sesuai standar Permendagri nomor 122 tahun 2018 tentang Standarisasi Sarpras Damkar di Daerah;
- b) Anggota damkar belum pernah mendapatkan diklat resmi dari pemerintah dalam penanganan layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia;
- c) Belum memiliki kendaraan khusus dalam penanganan layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia yang dialamnya sudah dilengkapi sarpras dan apd sesuai jenis kejadiannya.
- d) Letak geografis Temanggung yang menyulitkan untuk diakses saat penanganan kejadian tersebut.

Upaya yang akan dilakukan untuk mencapai targer pada akhir tahun 2024 dengan cara :

- a) Pemenuhan sarpras dan APD minimal yang siap dipergunakan di pos induk untuk mengcover seluruh wilayah Temanggung, idealnya di setiap pos tersedia sarparas dan APD untuk penanganan layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia; dan
- b) Mengadakan kegiatan peningkatan kompetensi dan pengetahuan anggota damkar baik PNS maupun non-PNS pelaksanaan operasi penanggulangan kebakaran khususnya saat dipergunakan dlm kondisi kecepatan tinggi, berisi air dan

jalan yang berliku, naik turun atau gelombang yang dapat membahayakan keselamatan orang yang ada di dalam kendaraan maupun yang berada di sekitar kendaraan. 2). kondisi pemukiman yang berkelompok serta akses jalan yang kecil, menyulitkan kendaraan pemadam untuk cepat sampai ke lokasi kejadian. 3). kompetensi anggota pemadam khususnya penerapan strategi pemadaman disesuaikan dengan objek yang terbakar dan lingkungan sekitarnya perlu ditingkatkan, karena setiap kebakaran memiliki strategi pemadaman yang berbeda agar proses pemadaman dapat cepat, efektif dan efisien. 4). kesadaran masyarakat saat terjadi kebakaran masih rendah, mulai dari masyarakat yang tidak memberi jalan untuk kendaraan pemadam meski sudah dinyalakan sirine maupun masyarakat yang berkerumun di lokasi kebakaran untuk foto atau nonton yang menghambat pergerakan anggota dan kendaraan pemadam dalam proses pemadaman. 5). kondisi peralatan pemadam kebakaran seperti (mesin pompa air, selang, dan koneksi, nozel, dll) yang sudah tua dan lapuk karena usia dan sering dipergunakan mengakibatkan proses pemadaman lambat, lama, tidak efektif dan efisien contohnya, selang yang bocor di beberapa titik, nozel yang semprotannya tidak sempurna.

- a) Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang disebabkan oleh 1) wilayah Kabupaten Temanggung yang berkontour pegunungan, portal, jalan sempit. 2). Lokasi Pos Pemadam Kebakaran yang terlalu jauh dari lokasi kebakaran. 3). Luasnya daerah layanan tidak sebanding dengan jumlah Pos Pembantu yang hanya berdiri di Pringsurat dan Candiroto serta minimnya sarana dan prasarana untuk pendukung penyelamatan dan evakuasi. 4). Terbatasnya Sumber air dan belum tersedianya sumber air (groundtank) di masing-masing wilayah.

Upaya dalam rangka pencapaian target kinerja Tahun 2024 dengan :

- a) Rasio Linmas per RT dengan mengadakan pembinaan linmas ke desa/kelurahan.
- b) Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten dengan cara peningkatan sarpras , peningkatan kompetensi pegawai dan pemberdayaan masyarakat.
- c) Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) dengan memberikan sosialisasi kepada warga agar cepat memberikan laporan bila terjadi kebakaran.
- d) Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan 1). Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan kebakaran 2). Pemenuhan sarana sumber air (groundtank) di Pos Damkar.

Urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat juga didukung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Capaian Kinerja Penyelenggaran Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Fungsi Penanggulangan Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran, dan 3 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana s.d Mei Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	Indek Resiko Bencana	angka	236,83	142	8,81	100		BPBD
RATA-RATA							100		
1.	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100		BPBD
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100		BPBD
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100		BPBD
RATA-RATA							100		

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Rata-rata capaian bidang Penyelenggaran Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Fungsi Penanggulangan Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada indikator sasaran dan program yaitu 100 %. Bidang Penyelenggaran Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Fungsi Penanggulangan Bencana terdiri dari 1 indikator Kinerja Sasaran dengan status Telah

Tercapai dan 3 indikator kinerja Program dengan capaian sampai dengan Mei tahun 2024 dengan status Telah Tercapai

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Sosial terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 13 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial s.d Mei Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2023 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan Perlindungan dan Jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	%	65,29	63	51,92	82,42	●	Dinas Sosial
RATA-RATA							82,42	●	
1.	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	●	Dinas Sosial
2.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah	%	100	100	100	100	●	Dinas Sosial

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2023 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal							
3.	Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	●	Dinas Sosial
		Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	●	Dinas Sosial
		Jumlah Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	●	Dinas Sosial
		Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100	100	100	100	●	Dinas Sosial
4.	Program perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	%	100	100	0	0	▼	Dinas Sosial
		Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	%	100	100	0	0	▼	Dinas Sosial
		Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	%	100	100	100	100	●	Dinas Sosial
		Persentase penerima UEP	%	10,2	50	100	100	●	Dinas

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2023 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		perorangan dan UEP KUBE yang berkelanjutan							Sosial
		Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	48	48	51,05	100		Dinas Sosial
5.	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	%	100	100	100	100		Dinas Sosial
6.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	%	100	100	100	100		Dinas Sosial
RATA-RATA							84,62		

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Rata-rata capaian urusan pemerintah bidang sosial pada indikator sasaran dan indikator program sampai dengan sampai dengan Mei Tahun 2024 belum tercapai 100%. Bidang sosial terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dengan rata-rata capaian 82,42% berstatus Telah Tercapai (TT) dan pada indikator kinerja program rata-rata capaian yaitu 84,62%, masih ada 2 indikator yang berstatus Upaya Keras (UK) yaitu :

- a) Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan social

Faktor penghambat diantaranya adalah adanya kondisi yang dinamis terkait data calon penerima sehingga terjadi perubahan jumlah sasaran yang mengakibatkan adanya perubahan dari perencanaan semula sehingga pencairan dilakukan menunggu APBD Perubahan dan bantuan belum bisa disalurkan pada bulan Mei namun akan disalurkan pada TW II. Upaya pencapaian target di akhir tahun 2024 dengan melakukan perubahan dan perbaikan data penerima bansos anak panti.

b) Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota

Faktor penghambat adalah pelaksanaan pendataan fakir miskin baru adakan dilaksanakan sesuai jadwal kegiatan pada triwulan 2. Upaya untuk mencapai target yaitu percepatan pelaksanaan kegiatan pendataan.

2.3 Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan bidang Ketenagakerjaan terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 10 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja s.d Mei Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya investasi sektor riil	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	76,01	76,15	75,80	99,55		Dinperi naker

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RATA-RATA							99,55		
1.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Presentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	65	35	21,33	60,95		Dinperi naker
		Persentase pencari kerja yang dilatih melalui perluasan kesempatan kerja	%	n.a	1	0	0		Dinperi naker
		Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	%	n.a	30	53,07	100		Dinperi naker
		Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang terfasilitasi sesuai prosedur	%	n.a	90	66,44	73,83		Dinperi naker
2.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	43,75	45	80	100		Dinperi naker
		Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	%	71,43	65	71,54	100		Dinperi naker
3.	Program Hubungan Industrial	Proporsi kepesertaan BPJS ketenagakerjaan	%	79	82,37	88,49	100		Dinperi naker
		Persentase perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	%	58	69,75	81,58	100		Dinperi naker
		Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja	%	n.a	45	67,54	100		Dinperi naker
		Persentase perselisihan hubungan industrial yang selesai melalui mediasi	%	100	100	100	100		Dinperi naker

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	RATA-RATA						70,99		

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, bidang tenaga kerja terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 10 indikator kinerja program. Capaian sampai dengan Mei tahun 2024 pada indikator kinerja sasaran berstatus telah tercapai, sedangkan dari 10 indikator kinerja program, 9 indikator dengan status telah tercapai dan 1 indikator dengan status upaya keras. Beberapa upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan status telah tercapai, yaitu :

a. Melaksanakan TNA (*Training Need Analized*) dengan benar, yaitu pelatihan yang dilaksanakan untuk kebutuhan apa, untuk memenuhi kebutuhan perusahaan mana dan bidang apa, ataukah untuk memenuhi usaha jasa

b. Memfasilitasi rekrutmen perusahaan

Beberapa faktor penghambat antara lain :

a. Lowongan pekerjaan tidak sebanding dengan pencari kerja *fresh graduate*;

b. Mata pencaharaian sebagian besar masyarakat Kabupaten Temanggung yang masih bergantung pada pertanian;

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari 2 indikator kinerja sasaran dan 8 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut

ini.

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak s.d Mei Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan keadilan dan kesejahteraan Gender	Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender	%	10,18	10,20	8,28	81,17	●	DPPP APPKB
RATA-RATA							81,17	●	
1.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Presentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	%	2,42	2,65	2,44	84,60	●	DPPP APPKB
		Rasio Perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan Renja	%	100	100	100	100	●	DPPP APPKB
2.	Program Perlindungan Perempuan	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	%	0,005	0,0029	0.0018	100	●	DPPP APPKB
		Persentase perempuan korban kekerasan	%	0,0017	0,0029	0.001	100	●	DPPP APPKB
3.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase desa sayang ibu dan bayi	%	100	62,28	100	100	●	DPPP APPKB
		Persentase pelayanan ramah anak di rumah sakit dan puskesmas	%	100	100	53,33	53,33	●	DPPP APPKB
4.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kabupaten Layak Anak	%	Madya	Nindya	Nindya	100	●	DPPP APPKB

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak	%	0,0035	0,004	0.0009	100	●	DPPP APPKB
RATA-RATA							92,24	●	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari 8 indikator kinerja program dengan capaian sampai dengan Mei tahun 2024 dengan status upaya keras dengan hanya satu indikator berstatus upaya keras. Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan status telah tercapai, yaitu Penguatan dan advokasi dan sosialisasi tentang GSI bersama mitra kerja. Ada faktor penghambatnya, antara lain masih rendahnya pemahaman masyarakat dan stakeholder terkait pentingnya pelayanan kesehatan yang ramah anak.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Pangan terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 4 indikator kinerja program sebagaimana ditampilkan tabel berikut.

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pangan s.d Mei Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Tahun 2024	Tingkat	Status	Perangkat
-----	-------------------	-------------------	--------	-----------	------------	---------	--------	-----------

				Tahun 2023	Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024	Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Capaian	Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kedaulatan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	-	93,5	78,50	93,5	100	●	DKPPP
RATA-RATA							100	●	
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rasio ketersediaan pangan	%	100	100	177,4	100	●	DKPPP
2.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan kerawanan pangan	%	n.a	100	100	100	●	DKPPP
3.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	90	90	90	90	●	DKPPP
RATA-RATA							96,66		

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, bidang pangan terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 3 indikator kinerja program. Capaian sampai dengan Mei tahun 2024 pada indikator kinerja sasaran berstatus telah tercapai dan indikator kinerja program dari 4 indikator telah berstatus tercapai.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan bidang pertanahan terdiri dari 1 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan s.d Mei Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Prosentase penyelesaian fasilitasi pertanahan	%	100	100	100	100		DPRKPLH
RATA-RATA							100		

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Status capaian telah tercapai. Namun demikian perlu upaya pencegahan konflik sosial terkait sengketa tanah di masyarakat, serta menjaga keberlanjutan koordinasi antara Perangkat Daerah dalam menyelesaikan sengketa tanah Garapan.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 14 indikator kinerja program daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.8
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup s.d Mei Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Program Perencanaan	Persentase dokumen	%	100	100	0	0		DPRKPLH

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lingkungan Hidup	perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup							
		Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	%	100	100	50	50	●	DPRKPLH
2.	Program Pengendalian dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Angka	52,22	46	52,22	100	●	DPRKPLH
		Indeks Kualitas Udara	Angka	83,82	86	83,82	97,47	●	DPRKPLH
		Persentase Luas Lahan Kritis Tertangani terhadap Total Luas Lahan Kritis	%	2,46	0,067	2,46	100	●	DPRKPLH
3.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Luas RTH Milik Pemerintah Daerah yang Tertangani	%	n.a	63,90	100	100	●	DPRKPLH
4.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase usaha yang memiliki persetujuan teknis pengelolaan limbah B3	%	100	100	100	100	●	DPRKPLH
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan hidup	%	100	100	2,00	2,00	▼	DPRKPLH

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan	%	27,87	28,6	27,87	100	●	DPRKPLH
7.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	%	100	100	0	0	▼	DPRKPLH
8.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	●	DPRKPLH
9.	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang tertangani	%	61,26	60,21	64,20	100	●	DPRKPLH
		Cakupan layanan persampahan	%	68,51	64,71	70,93	100	●	DPRKPLH
RATA-RATA							65,34	●	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, Bidang Lingkungan Hidup terdiri 13 indikator kinerja program, capaian sampai dengan Mei tahun 2024 pada indikator program ada 10 indikator telah tercapai, dan 3 indikator dengan status upaya keras. Faktor penghambatnya adalah sebagai berikut.

- a. Pengajuan persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan lingkungan hidup terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) yang berada di DPM sedangkan sistem

tersebut belum terintegrasi dengan sistem informasi Lingkungan Hidup

- b. Kegiatan pengawasan dan pembinaan Usaha dan/atau Kegiatan di Kabupaten Temanggung masih perlu menyesuaikan dengan SOP Pengawasan dari KLHK dan referensi Pengawasan dari DLHK Provinsi Jawa Tengah.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 4 indikator kinerja program, dengan capaian sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.9
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil s.d Mei Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	n.a	92,06	96.62	100	●	Dindukcapil
RATA-RATA							100	●	
1.	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan KK, KTP el, KIA	%	89,47	87,03	94,54	100	●	Dindukcapil
2.	Program Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	%	99,85	99,82	99,87	100	●	Dindukcapil
3.	Program pengelolaan	Persentase terpeliharanya	%	100	94,9	100	100	●	Dindukcapil

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	informasi administrasi kependudukan	Sarpras SIAK untuk pelayanan Administrasi Kependudukan							
	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase Pelaksanaan Aktifasi Identitas Kependudukan Digital	%	18,01	0,8	22,96	100		Dindukcapil
RATA-RATA							100		

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2024 data diolah

Berdasarkan tabel diatas bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari 1 indikator Kinerja Sasaran yang dengan capaian Telah Tercapai dan 4 indikator kinerja Program dengan capaian telah tercapai sampai dengan Mei tahun 2024.

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari 2 indikator kinerja sasaran dan 13 indikator kinerja program, dengan capaian sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.10
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa s.d Mei Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2023	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Persentase Desa Yang Berpredikat Mandiri	%	20,68	10,53	20,68	100	●	Dinper mades
RATA-RATA							100	●	
1.	Program Penataan Desa	Persentase Peraturan Desa tentang Pungutan yang sesuai dengan kewenangan desa	%	n.a	50	13,53	27,10	▲	Dinper mades
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES	%	n.a	8	33,33	100	●	Dinper mades
3.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase kepatuhan pelaporan Aset Desa dalam Aplikasi SIPADES	%	100	50	100	100	●	Dinper mades
		Persentase penyelenggaraan pemilihan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa	%	n.a	100	0	0	▼	Dinper mades
		Persentase laporan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh BPD	%	n.a	70	0	0	▼	Dinper mades
		Persentase pengisian kekosongan Perangkat Desa	%	n.a	37	7,14	19,3	▲	Dinper mades
		Persentase Desa Cepat Berkembang berdasarkan	%	36,84	38,34	43,61	100	●	Dinper mades

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2023	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Evaluasi Perkembangan Desa							
4.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Desa yang menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	%	100	35	4,89	100	●	Dinper mades
		Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum	%	n.a	50	21,01	42,02	●	Dinper mades
RATA-RATA							77,13	●	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dengan capaian sampai dengan Mei tahun 2024 dengan status telah tercapai dan 9 indikator kinerja program dengan capaian sampai dengan Mei tahun 2024 dengan status 7 indikator telah tercapai dan 2 indikator Upaya Keras. Hal tersebut dikarenakan pada TW I tahun 2024 belum terdapat Kepala desa yang masa jabatannya habis (Masa jabatan habis di bulan Desember) selain itu mengunggu Revisi UU Desa. Untuk laporan pengawasam pengelolaan keuangan desa oleh BPD masih berstatus upaya keras dikarenakan laporan pengawasan pengelolaan dilaksanakan pada akhir tahun.

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 9 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut

ini.

Tabel 2.11
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana s.d Mei Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,65	0,63	0,69	90,48	●	DPPP APPKB
	RATA-RATA						90,48	●	
1.	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Desa /kelurahan yang memiliki Data Mikro Keluarga	%	100	100	100	100	●	DPPP APPKB
		Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/ unmetneed	%	8,6	10,5	8,08	100	●	DPPP APPKB
		Persentase Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	%	1,02	2	0,74	100	●	DPPP APPKB
		Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 th (ASFR 15-19 th)	%	14,1	12,6	14,10	88,11	●	DPPP APPKB
2.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Presentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	%	80,14	75,75	80,71	100	●	DPPP APPKB
		Persentase kepesertaan KB aktif	%	45,77	76,21	77,96	100	●	DPPP APPKB
		Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	%	45,03	46,1	45,86	9,48	●	DPPP APPKB

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase kampung KB Berkembang dan mandiri	%	52,71	37,88	52,71	100	●	DPPP APPKB
3.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indek Pembangunan Keluarga	%	58,19	55,98	62,08	100	●	DPPP APPKB
RATA-RATA							88,62	●	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 9 indikator kinerja program. Capaian sampai dengan Mei tahun 2024 pada indikator kinerja sasaran berstatus telah tercapai, dan dari 9 indikator kinerja program berstatus telah tercapai.

9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan bidang terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 10 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.12
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Tahun s.d Mei Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya infrastruktur sarana dan Prasarana masyarakat	Persentase infrastruktur keselamatan jalan raya	%	38,65	41,55	41,55	100	●	Dishub
	Meningkatnya Layanan Perhubungan	Persentase Layanan Perhubungan	%	n.a	67,11	92,32	100	●	Dishub
	RATA-RATA						100	●	
1.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadahi	%	38,65	41,55	41,55	100	●	Dishub
		Persentase Angkutan umum yang memenuhi standar minimal pelayanan	%	n.a	100	47,31	47,31	●	Dishub
		Persentase potensi titik parkir yang tertangani	%	100	98,25	96,49	98,21	●	Dishub
		Persentase Terminal Tipe C yang Aktif	%	100	100	100	100	●	Dishub
		Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	●	Dishub
		Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	%	100	99,61	91,83	92,09	●	Dishub
		Persentase penerangan jalan di ruas jalan Kabupaten	%	14,26	33,48	32,49	97,05	●	Dishub
		Persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten	%	n.a	63,58	63,52	99,91	●	Dishub

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Temanggung							
RATA-RATA							91,82		

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, bidang perhubungan terdiri dari 2 indikator kinerja sasaran dengan status telah tercapai dan 8 indikator kinerja program dengan capaian sampai dengan Mei tahun 2024 dengan status telah tercapai.

10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari 2 indikator kinerja sasaran dan 5 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.13
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika s.d Mei Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kualitas pengembangan layanan Sitem Pemerintahan Secara Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,8	3,2	2,8	87,5		Dinas Kominfo
	Meningkatnya	Nilai Keterbukaan Informasi	Angka	97,38	89,95	97,38	92,01		Dinas

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Keterbukaan informasi publik	Publik							Kominfo
RATA-RATA							89,76		
1.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif	%	30	35	79	100		Dinas Kominfo
		Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik	%	n.a	100	32,60	32,60		Dinas Kominfo
		Persentase tindak lanjut laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo	%	80	85	100	100		Dinas Kominfo
2.	Program Aplikasi Informatika	Persentase kinerja infrastruktur TIK yang baik	%	n.a	100	98,55	98,55		Dinas Kominfo
		Persentase layanan publik secara elektronik	%	n.a	50	31,30	62,60		Dinas Kominfo
RATA-RATA							78,75		

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Berdasarkan tabel diatas Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari 2 indikator kinerja sasaran dan 5 indikator kinerja program. Capaian sampai dengan Mei tahun 2024 pada indikator kinerja sasaran 2 indikator telah tercapai dan. Capaian indikator program 5 indikator berstatus telah tercapai.

11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari 2 indikator kinerja sasaran dan 5 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.14
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah s.d Mei Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RP s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kinerja koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi sehat	%	n.a	30	5,70	18,99	▼	Dinkopdag
		Persentase UMKM yang difasilitasi	%	n.a	0,92	0,13	14,14	▼	Dinkopdag
	RATA-RATA						16,56	●	
1.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi sehat	%	27,47	22	28,82	100	●	Dinkopdag
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase kenaikan koperasi cukup sehat menjadi sehat	%	n.a	1,74	29,03	100	●	Dinkopdag
2.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi tidak aktif yang diusulkan untuk dibubarkan	%	n.a	100	2,17	2,17	▼	Dinkopdag
3.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif	%	75	91,43	18,99	20,77	▲	Dinkopdag
4.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Persentase UMKM berbasis Desa/Kelurahan	%	n.a	4,45	100	100	●	Dinkopdag

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RP s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(UMKM) Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang difasilitasi	%	n.a	0,92	0,13	14,44		Dinkopdag
RATA-RATA							56,23		

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah terdiri dari 2 indikator kinerja sasaran dan 6 indikator kinerja program. Capaian sampai dengan Mei tahun 2024 pada 2 indikator kinerja sasaran berstatus upaya keras. Sedangkan dari 6 indikator kinerja program, 3 indikator berstatus telah tercapai, 1 indikator berstatus akan tercapai dan 2 indikator kinerja dengan status upaya keras. Faktor penghambat belum tercapainya target indikator ini ialah karena masih banyak koperasi yang belum melaporkan laporan keuangan, kurangnya SDM Pengawas koperasi dan pendamping UMKM.

Guna merubah status upaya keras menjadi akan tercapai pada akhir tahun 2024 hal yang dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan adalah :

- a. melakukan fasilitasi pendataan, pendampingan dan penyuluhan terhadap koperasi untuk meningkatkan aset dan omset koperasi.
- b. Peningkatan kegiatan pengawasan koperasi
- c. Pembinaan dan sosialisasi terkait kewajiban untuk mengirimkan laporan tahunan dan triwulan secara berkala,
- d. Mendatangkan narasumber dalam pendidikan dan pelatihan perkoperasian yang ahli, kompeten dan memiliki kurikulum, proses dan capaian pembelajaran yang jelas

- e. Pelaksanaan Diklat serta tema dan materi yang dipilih lebih bervariasi, *up to date* dan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan koperasi

12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Kinerja penyelenggaran pelayanan umum Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 10 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.15
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Tahun 204 s.d Mei Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan	Pertumbuhan realisasi investasi	%	n.a	2,5	(74,87)	0	▼	DPM
RATA-RATA							0	▼	
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan	%	100	100	100	100	●	DPM
		Persentase perusahaan yang bermitra	%	n.a	50	0	0	▼	DPM
2.	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase promosi penanaman modal	%	n.a	100	0	0	▼	DPM
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan secara Elektronik	%	n.a	100	100	100	●	DPM

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Perizinan yang diterbitkan tepat waktu	%	100	100	100	100	●	DPM
		Persentase Pengaduan masyarakat yang tertangani	%	100	100	100	100	●	DPM
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pengendalian penanaman modal	%	n.a	100	100	100	●	DPM
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%	100	100	100	100	●	DPM
		Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	%	n.a	100	100	100	●	DPM
RATA-RATA							77,78	●	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Berdasarkan tabel diatas Bidang Penanaman Modal terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dengan status upaya keras dan dari 8 indikator kinerja Program capaian sampai dengan Mei tahun 2024 dengan 6 indikator status telah tercapai dan 2 indikator program yang masih berstatus upaya keras. Upaya yang dilakukan merubah status menjadi akan tercapai pada akhir tahun 2024 maka dibutuhkan Melakukan pendampingan perizinan usaha dan melakukan kolaborasi dengan OPD terkait untuk melakukan pembinaan dalam meningkatkan kualitas produk dan Melakukan promosi bersama pada CJIBF yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Prov. Jawa Tengah.

13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari 2 indikator kinerja sasaran dan 5 indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.16
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 sampai dengan Mei

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya prestasi pemuda	Persentase pemuda berprestasi	%	n.a	38	3,75	98,68	●	Dindikpora
	Meningkatnya Atlet berprestasi	Persentase atlet berprestasi	%	21	35	83,19	100	●	Dindikpora
RATA-RATA							99,34	●	
1.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	80,76	95	93,33	98,25	●	Dindikpora
2.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase pelatih olahraga bersertifikat	%	35,4	96,45	96,43	99,98	●	Dindikpora
		Persentase prestasi olah raga	%	59	60	70	100	●	Dindikpora
3.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase gugus depan yang aktif	%	92,89	100	100	100	●	Dindikpora
RATA-RATA							99,56	●	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, bidang kepemudaan dan olahraga terdiri dari 2 indikator kinerja sasaran dan 4 indikator kinerja program. Capaian sampai dengan Mei tahun 2024 pada indikator kinerja sasaran dengan rata-rata capaian 99,34% .Capaian 4 indikator kinerja program berstatus telah tercapai dengan rata-rata 99,56%.

14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Statistik terdiri dari 1 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.17
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik s.d Mei Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Ketersediaan data statistik sektoral	%	62	73,93	97,83	100		Dinas Kominfo
RATA-RATA							100		

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, bidang statistik terdiri dari 1 indikator kinerja program. Capaian sampai dengan Mei tahun 2024 pada indikator kinerja program dengan status telah tercapai.

15. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan terdiri dari 1 Indikator kinerja Sasaran dan 4

indikator kinerja program daerah sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.18
Capaian Kinerja Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan s.d Mei Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal	Persentase kelompok seni dan budaya yang aktif	%	3,67	3,51	3,67	100	●	Dinbudpar
RATA-RATA							100	●	
1.	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase kelompok Budaya yang Teregister	%	n.a	30	46,74	100	●	Dinbudpar
		Persentase kelompok kesenian yang produktif	%	n.a	38	0	0	▼	Dinbudpar
		Persentase pelestarian sejarah lokal	%	6,73	38	7,05	94,10	●	Dinbudpar
		Persentase pelestarian cagar budaya	%	5,18	9,18	5,18	56,44	●	Dinbudpar
RATA-RATA							62,64	▼	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, bidang kebudayaan terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dengan capaian sampai dengan Mei tahun 2024 sebesar 100% dan untuk indikator kinerja program dengan capaian sebesar 62,64% dengan 3 indikator kinerja program berstatus telah tercapai dan 1 indikator kinerja program berstatus upaya keras . Indikator program dengan status upaya keras yaitu Persentase kelompok kesenian yang produktif disebabkan kualitas SDM yang belum merata sehingga

diperlukan upaya peningkatan kualitas SDM dengan berbagai pelatihan.

16. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Kinerja penyelenggaran Bidang Perpustakaan terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 3 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.19
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan s.d Mei Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2023 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Angka	n.a	30,1	0	0	▼	Dinpusip
RATA-RATA							0		
1.	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase pertumbuhan jumlah pengunjung perpustakaan	%	n.a	0,025	(0,86)	0	▼	Dinpusip
		Persentase peminjam di perpustakaan	%	n.a	40	42	46	●	Dinpusip
		Persentase perpustakaan yang aktif	%	n.a	34	74,52	100	●	Dinpusip
2	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase penelusuran naskah kuno	%	n.a	100	0	0	▼	Dinpusip
RATA-RATA							36,50	●	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, bidang perpustakaan terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 3 indikator kinerja program. Capaian sampai dengan Mei tahun 2004 pada indikator kinerja sasaran berstatus upaya keras. Sedangkan dari 4 indikator kinerja program, 2 indikator kinerja berstatus telah tercapai dan 2 indikator kinerja dengan status upaya keras. Faktor penghambatnya antara lain dikarenakan kurangnya saran dan prasarana perpustakaan dan pengelola perpustakaan.

17. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Urusan Pemerintahan bidang Kearsipan terdiri dari 1 indikator sasaran dan 2 indikator, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.20
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan s.d Mei Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2023 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024I			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Indeks Manajemen Kearsipan	Angka	70,93	68	0	0	▼	Dinpusip
RATA-RATA							0	▼	
1.	Program pengelolaan dan pelestarian arsip daerah	Persentase arsip vital konvensional yang dialihmediakan	%	n.a	55	0	0	▼	Dinpusip
		Persentase arsip vital konvensional yang dialihmediakan	%	n.a	66,67	0	0	▼	Dinpusip
RATA-RATA							0	▼	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Dari 3 indikator Bidang Kearsipan, yang terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 2 indikator kinerja program dengan status upaya keras. Upaya untuk mencapai target pada tahun 2024 adalah terus melakukan pembinaan dan pembenahan arsip pada OPD.

2.4 Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Kinerja penyelenggaraan pelayanan umum Urusan Pemerintahan bidang perikanan terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 6 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.21
Capaian Kinerja Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan s.d Mei Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		Nilai Produksi Perikanan	Ribu Rp	n.a	349,364	121.228.375	100	●	DKPPP
	RATA-RATA						100	●	
1.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase nelayan perairan umum yang terbina	%	30	10	4,59	100	●	DKPPP
	Program pengelolaan perikanan budidaya	Produktivitas Ikan Nila	Kg/m ²	6	1,2	1,21	100	●	DKPPP

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.		Produktivitas Ikan Lele	Kg/m ²	14	12,6	12,50	100	●	DKPPP
3.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase peningkatan lokasi penebaran benih ikan	%	33	10	20,69	100	●	DKPPP
4.	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	kg/kapita/tahun	n.a	22,08	21,78	100	●	DKPPP
RATA-RATA							100	●	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, bidang perikanan terdiri dari 1 indikator kinerja perangkat daerah dan 5 indikator kinerja program. Capaian sampai dengan Mei Tahun 2024 semua indikator berstatus telah tercapai. Hal ini didorong oleh :

- a. Pelaksanaan sosialisasi terhadap pelarangan penggunaan alat dan bahan berbahaya dalam penangkapan ikan (setrum, bahan peledak);
- b. Peningkatan penerapan teknologi budidaya perikanan;
- c. Kesadaran masyarakat akan restocking ikan di perairan umum dengan mengajukan proposal untuk penebaran benih ikan di wilayahnya

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 6 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja berikut ini.

Tabel 2.22
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata s.d Mei Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5
1.		Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	Angka	n.a	2,02	n.a	0	▼	Dinbudpar
RATA-RATA							0	▼	
1.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	%	21	0,03	(84)	0	▼	Dinbudpar
		Lama tinggal wisatawan	Hari	1	1	1	100	●	Dinbudpar
		Persentase terlaksananya pembinaan desa wisata	%	100	100	75,00	75,00	●	Dinbudpar
		Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	9,02	9,5	1,64	17,26	▲	Dinbudpar
RATA-RATA							48,06	●	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Berdasarkan tabel diatas bidang Pariwisata terdiri dari 1 indikator kinerja perangkat daerah dan 4 indikator kinerja program. Capaian sampai dengan Mei Tahun 2024 pada 1 indikator kinerja perangkat daerah berstatus upaya keras. Sedangkan dari 4 indikator kinerja program, 2 indikator berstatus telah tercapai, 1 indikator berstatus akan tercapai dan 1

indikator dengan status upaya keras.

Adapun Permasalahan yang ada di bidang Pariwisata adalah :

- a) Perubahan (naik turun jumlah pengunjung) sangat tergantung pada faktor pelaku usaha;
- b) Masih rendahnya ketertarikan & pemahaman desa untuk membentuk desa wisatadan kurangnya SDM yang bisa mengelola Desa Wisata;
- c) Kurangnya fasilitas hotel yang mendukung untuk menerima tamu dalam jumlah besar seperti jumlah kamar, aula/ ruang pertemuan, & fasilitas pendukung acara lainnya. Promosi yang belum maksimal;
- d) Keterbatasan jumlah SDM dalam melakukan pendataan pelaku ekonomi Kreatif (ekraf) dan belum ada aturan secara detail yang menentukan pelaku ekraf.

Guna merubah status menjadi telah tercapai pada Tahun 2024 upaya sebagai berikut :

- a) Peningkatan kualitas sumber daya pengelola destinasi & manajemen event, penyediaan sarpras pendukung di destinasi, serta melakukan promosi yang intens terutama melalui media sosial.
- b) Peningkatan intensitas pembinaan/ pendampingan desa wisata.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan bidang pertanian terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 23 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.23
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian s.d Mei Tahun 2024

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5
1.		Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	22,94	23,38	22,94	100		DKPPP
RATA-RATA							100		
1.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas Padi	Kuintal / Ha	63,15	61,25	61,59	100		DKPPP
		Produktivitas Jagung	Kuintal / Ha	46,00	54,50	56,88	100		DKPPP
		Produktivitas Bawang Putih	Kuintal / Ha	79,60	60,50	65,00	100		DKPPP
		Produktivitas Bawang Merah	Kuintal / Ha	80,15	68,00	76,00	100		DKPPP
		Produktivitas Cabai Rawit	Kuintal / Ha	55,00	50,00	75,00	100		DKPPP
		Produktivitas Cabai Besar	Kuintal / Ha	69,50	65,00	76,00	100		DKPPP
		Produktivitas Tembakau	Kuintal / Ha	6,80	6,20	6,56	100		DKPPP
		Produktivitas Kopi Robusta	Kuintal / Ha	7,25	7,10	6,53	100		DKPPP
		Produktivitas Kopi Arabika	Kuintal / Ha	7,00	6,50	5,75	100		DKPPP
		Produktivitas Ternak Sapi	Kg / Ekor	177,60	177,40	177,60	100		DKPPP
		Produktivitas Ternak Domba	Kg / Ekor	13,71	13,70	13,71	100		DKPPP
		Produktivitas Ternak Kambing	Kg / Ekor	13,71	13,70	13,71	100		DKPPP
		Produktivitas Ternak Ayam Ras Pedaging	Kg / Ekor	0,75	0,75	0,75	100		DKPPP
		Produktivitas Ternak Ayam Petelur	Kg / Ekor	10,88	10,88	2,72	100		DKPPP
	Persentase Kelahiran Pedet	%	n.a	55,5	166,2	100		DKPPP	
2.	Program Penyediaan dan	Persentase Prasarana yang	%	100	100	100	100		DKPPP

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5
	Pengembangan Prasarana Pertanian	dimanfaatkan sesuai fungsinya							
3.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penanganan penyakit hewan	%	90	85	95,80	100	●	DKPPP
		Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	%	70	75	85,23	100	●	DKPPP
4.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian	%	n.a	41,00	109,29	100	●	DKPPP
5.	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yang naik kelas	%	0,98	1,3	1,48	100	●	DKPPP
RATA-RATA							100	●	

Berdasarkan tabel diatas, bidang pertanian terdiri dari 1 indikator kinerja perangkat daerah dan 20 indikator kinerja program. Capaian sampai dengan Mei Tahun 2024 pada indikator kinerja perangkat daerah dan indikator program berstatus telah tercapai.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan bidang perdagangan terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 8 indikator

kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.24
Capaian Kinerja Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan s.d Mei Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	20,14	20,79	20,95	100	●	Dinkopdag
	RATA-RATA						100	●	
1.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase fasilitasi pelaku usaha informal	%	na	13,71	3,43	25	▲	Dinkopdag
		Persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik	%	67	67	66,67	99,50	●	Dinkopdag
		Persentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital	%	na	1,5	1,20	79,80	●	Dinkopdag
		Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	%	70	75	70,34	93,79	●	Dinkopdag
2.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Ketersediaan informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	%	68,41	70	24,86	35,52	●	Dinkopdag
3.	Program Pengembangan ekspor	Cakupan pelaku usaha yang di bina	%	na	1,15	2,56	100	●	Dinkopdag
4.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang di tera ulang	%	95	98,37	8,87	9,01	▼	Dinkopdag

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase fasilitasi promosi produk dalam negeri	%	na	100	100	100	●	Dinkopdag
RATA-RATA							67,83	●	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2023 data diolah

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata capaian kinerja sasaran yaitu 100% berstatus Telah Tercapai (TT), dan rata-rata capaian indikator program yaitu 67,83%, masih ada 1 indikator yang berstatus Upaya Kersa(UK) yaitu pada indikator bidang perdagangan terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 7 indikator Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang di tera ulang, dengan faktor penghambat :

- a) Kesadaran pemilik alat ukur, takar, timbang dan perlegkapannya (UTTP) masih rendah
- b) Kurangnya alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tera ulang
- c) Kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam pelaksanaan tera ulang Guna

5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Kinerja penyelenggaran pelayanan umum Urusan Pemerintahan bidang perindustrian terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 2 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.25
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian s.d Mei Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya investasi sektor riil	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	%	27	27,2	25,92	95,29	●	Dinperi naker
RATA-RATA							95,29	●	
1.	Program Perencanaan dan Pengembangan Industri	Persentase IKM Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	%	35	71,62	25,92	58,90	●	Dinperi naker
2.	Program Pengendalian Ijin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan IKM Tembakau Lembutan	%	5,3	15,3	4,42	28,89	▲	Dinperi naker
RATA-RATA							56	●	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2023 data diolah

Berdasarkan tabel diatas capaian sampai dengan Mei tahun 2024 pada 1 indikator kinerja sasaran berstatus telah tercapai, sedangkan pada indikator kinerja program 1 bertatus telah tercapai dan 1 berstatus upaya keras. Guna merubah status menjadi telah tercapai pada akhir tahun 2023 dilakukan dengan melaksanakan fasilitasi pelatihan peningkatan kapasitas SDM IKM pertembakauan.

2.5 Evaluasi Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Kinerja penyelenggaraan Sekretariat Daerah terdiri dari 1 indikator kinerja tujuan pemda, 2 indikator kinerja sasaran pemda, 7 indikator kinerja perangkat daerah dan 22 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.26
Capaian Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah s.d Mei Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	69,05	B>60-70	69,05	100	●	Sekretariat Daerah
RATA-RATA							100	●	
1.	Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif , bersih dan melayani	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Level/ Nilai	65,17	B>60-70	65,17	100	●	Sekretariat Daerah
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat	84,97	B/76,61 - 88,30	84,97	100	●	Sekretariat Daerah
RATA-RATA							100	●	
1	Meningkatnya pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang terfasilitasi	Persentase kunjungan tamu kedinasan pimpinan daerah yang terfasilitasi pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan	%	na	100	100	100	●	Sekretariat Daerah
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai penyelenggaraan pelayanan publik	Predikat	B (3,65)	B (3,51-4,00)	B (3,65)	100	●	Sekretariat Daerah
3	Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual	Persentase rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual	%	n.a	100	40	40	●	Sekretariat Daerah

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5
4	Meningkatnya kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum	Persentase kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum	%	n.a	100	80,77	80,77	●	Sekretariat Daerah
5	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Angka	3,434	3,44	3,434	81,57	●	Sekretariat Daerah
		Indeks Tata Kelola PBJ	%	100	60	44	73,33	●	Sekretariat Daerah
6	Meningkatnya Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang terfasilitasi	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang terfasilitasi	%	n.a	100	100	100	●	Sekretariat Daerah
RATA-RATA							82,24	●	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pemenuhan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	100	100	100	●	Sekretariat Daerah
		Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Kepala Daerah	%	100	100	100	100	●	Sekretariat Daerah
		Persentase SAKIP Perangkat Daerah Berpredikat BB	%	26,09	17,39	26,09	100	●	Sekretariat Daerah
		Persentase pemenuhan pelayanan kedinasan Pimpinan	%	100	100	100	100	●	Sekretariat Daerah
2.	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase Kerjasama yang diimplementasikan	%	100	100	100	100	●	Sekretariat Daerah
		Persentase pelaporan SPM Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	●	Sekretariat Daerah

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5
		Tepat waktu							
		Persentase perangkat daerah yang menyampaikan LPPD dan LKPJ tepat waktu	%	n.a	100	100	100	●	Sekretariat Daerah
		Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	%	100	85	84	98,38	●	Sekretariat Daerah
		Persentase kegiatan keagamaan dan masyarakat yang difasilitasi	%	n.a	60	40	67,67	●	Sekretariat Daerah
		Persentase produk hukum yang difasilitasi	%	n.a	85	100	100	●	Sekretariat Daerah
		Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	%	100	100	23,08	23,08	▲	Sekretariat Daerah
		Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi	%	100	100	100	100	●	Sekretariat Daerah
		Persentase permasalahan hukum yang ditangani secara litigasi	%	100	100	100	100	●	Sekretariat Daerah
3.	Program perekonomian dan pembangunan	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	%	100	100	100	100	●	Sekretariat Daerah
		Persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	%	100	100	100	100	●	Sekretariat Daerah
		Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	%	83,33	83,33	83,33	100	●	Sekretariat Daerah
		Persentase paket pekerjaan selesai tepat waktu	%	99,81	100	1,23	1,23	▼	Sekretariat Daerah
		Persentase pelaporan kegiatan Perangkat Daerah /Unit Kerja tepat waktu	%	100	95	98,46	100	●	Sekretariat Daerah

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5
		Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	%	99,37	95	111	100	●	Sekretariat Daerah
		Persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (tender)	%	100	100	22,65	22,65	▲	Sekretariat Daerah
		Persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (PL > 100 juta)	%	100	100	2,08	2,08	▼	Sekretariat Daerah
		Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	%	100	100	7,32	7,32	▼	Sekretariat Daerah
RATA-RATA							78,29	●	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, unsur pendukung urusan pemerintahan Sekretariat Daerah, capaian indikator tujuan menunjukkan terdapat 1 indikator dengan status telah tercapai. Sedangkan pada capaian indikator sasaran, dapat dilihat terdapat 2 indikator sasaran dengan status telah tercapai. Di sisi lain, pada indikator kinerja program dimana capaian kinerja dengan status telah tercapai sejumlah 17 indikator, status akan tercapai 2 indikator dan status upaya keras sejumlah 3 indikator. Beberapa hal yang masih menjadi kendala antara lain:

- a) Penyetoran produk hukum dari setiap OPD yang masih lambat dan aplikasi yang belum mampu memenuhi

kebutuhan pendokumentasian beberapa produk hukum yang memiliki volume tebal. Hal tersebut ditindaklanjuti oleh Bagian Hukum Setda melalui upaya peningkatan ketertiban administrasi Perangkat Daerah yang mengusulkan Perda dan Perbup serta secepatnya menyampaikan dokumen tersebut yang sudah diundangkan ke Bagian Hukum untuk dapat diinput di JDIH sehingga indikator persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH dapat tercapai;

- b) Persiapan Perencanaan dari Perangkat Daerah dan kebijakan dari masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kegiatan;
- c) Kinerja Perangkat Daerah belum melaksanakan pengadaan EPL diatas 100 juta secara keseluruhan;
- d) Kinerja Perangkat Daerah belum melaksanakan pencatatan non-tender atas pelaksanaan pengadaan PL dibawah 100 juta.

2. Sekretariat DPRD

Kinerja penyelenggaran Sekretariat DPRD terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 4 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana berikut:

Tabel 2.27
Capaian Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD s.d Mei Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan	Persentase Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	na	100	35,92	35,92		Sekretariat DPRD

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RATA-RATA							35,92		
1.	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas	%	na	90	100	100		Sekretariat DPRD
		Persentase kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang dilaksanakan sesuai rencana	%	100	95	100	100		Sekretariat DPRD
		Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	%	58	100	19,6	19,6		Sekretariat DPRD
		Presentase kegiatan peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	na	100	100	33,33	33,33		Sekretariat DPRD
RATA-RATA							43,64		

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Berdasarkan pada tabel diatas, rata-rata capaian pada indikator sasaran yaitu 35,92% dan rata-rata indikator program yaitu 43,64%.

2.6 Evaluasi Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Kinerja penyelenggaran fungsi penunjang perencanaan terdiri dari 2 indikator kinerja sasaran, dan 6 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.28
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan s.d Mei Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Angka	4,5	4,5	4,5	100	●	BAPPEDA
		Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Angka	2,934	2,95	2,934	99,5	●	BAPPEDA
RATA-RATA							99,73	●	
1.	Program perencanaan, evaluasi, dan informasi pembangunan daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	%	100	100	100	100	●	BAPPEDA
		Persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu	%	100	95	100	100	●	BAPPEDA
2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pembangunan manusia	%	90	90	100	100	●	BAPPEDA
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%	90	90	96,46	100	●	BAPPEDA
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra	%	90	90	95,31	100	●	BAPPEDA

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2023		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		perangkat daerah sub bidang ekonomi dan Sumber Daya Alam							
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang infrastruktur	%	90	90	97,96	100	●	BAPPEDA
RATA-RATA							100	●	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata capaian indikator sasaran yaitu 99,73% berstatus Telah Tercapai (TT), rata-rata indikator program telah tercapai 100% berstatus Telah Tercapai(TT).

2. Keuangan

Kinerja penyelenggaran keuangan terdiri dari 2 indikator kinerja sasaran, dan 11 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.29
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan s.d Mei Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	16,59	100	●	BPKPAD
		Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah)	%	15	15,5	18,52	100	●	BPKPAD
RATA-RATA							100	●	
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD	%	89,96	91	100	100	●	BPKPAD
		Persentase Dokumen Penganggaran Tepat Waktu	%	100	100	100	100	●	BPKPAD
		Persentase Penerbitan SP2D Online yang Tepat Waktu	%	100	100	100	100	●	BPKPAD
		Cakupan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	%	na	100	100	100	●	BPKPAD
		Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tepat Waktu	%	na	100	100	100	●	BPKPAD
2.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyampaian Laporan Daftar Barang Milik Daerah Tepat Waktu	%	na	100	100	100	●	BPKPAD
		Persentase Pemanfaatan Aset di Satuan Kerja	%	99,1	80	91,1	100	●	BPKPAD
3.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Potensi Target Pajak Daerah	%	na	8	2,09	26,07	▲	BPKPAD
		Persentase Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tepat Waktu	%	100	100	100	100	●	BPKPAD

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	%	na	95	14,39	15,15	▼	BKPAD
		Penyampaian Laporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu	%	100	100	100	100	●	BKPAD
RATA-RATA							85,57	●	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2023 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata capaian indikator sasaran yaitu 100 % bestatus Telah Tercapai (TT), dan untuk rata-rata capaian indikator program yaitu 85,57%, masih ada 1 indikator yang berstatus Upaya Keras(UK) yaitu pada indikator Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah , faktor penghambat adalah kondisi pada sampai dengan Mei belum menggambarkan keseluruhan realisasi penerimaan pajak daerah dan akan tercapai pada tw IV.

3. Kepegawaian

Kinerja penyelenggaraan kepegawaian terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.30
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Kepegawaian s.d Mei Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Terwujudnya profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN	Angka	50			100	●	BKPSDM
RATA-RATA							100	●	
1.	Program Kepegawaian Daerah	Persentase penyusunan formasi pegawai	%	100	100	100	100	●	BKPSDM
		Persentase penyelesaian usulan pensiun PNS tepat waktu	%	100	100	100	100	●	BKPSDM
		Persentase penyelesaian usulan kenaikan pangkat tepat waktu	%	100	100	100	100	●	BKPSDM
		Persentase Keterisian Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas	%	86,51	80	87,89	100	●	BKPSDM
		Persentase Perempuan pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.	%	42,09	48	42,17	87,85	▼	BKPSDM
		Persentase pelanggaran disiplin ASN	%	0,02	0,2	0,08	100	●	BKPSDM
		Persentase penyelesaian kasus pelanggaran disiplin ASN	%	14,29	90	100	100	●	BKPSDM
		Persentase pelaksanaan updating data kepegawaian	%	100	95	100	100	●	BKPSDM
		Persentase penyelesaian pengangkatan dan kenaikan jabatan fungsional	%	100	100	100	100	●	BKPSDM

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 202 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	RATA-RATA						98,89	▼	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2023 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan 2 indikator kinerja sasaran dan 9 indikator kinerja program. Terdapat satu indikator kinerja yaitu Persentase Perempuan pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas, yang status capaiannya masih upaya keras. Faktor penghambatnya adalah keterbatasan SDM yang akan diproyeksikan untuk menduduki jabatan dan berkurangnya jumlah ASN perempuan yang menduduki jabatan struktural karena kebijakan penyederhanaan birokrasi dengan penyetaraan ke jabatan fungsional. Adapun upaya pencapaian target dilakukan dengan menambah kuota peserta diklatpim dan peningkatan kompetensi, khususnya bagi ASN perempuan.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan terdiri dari 1 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.31
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Pendidikan dan Pelatihan s.d Mei Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Cakupan Pembinaan SDM Aparatur	%	96,17	96,13	99,98	100		BKPSDM
RATA-RATA							100		

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Rata-rata capaian pada urusan pemerintahan pendidikan dan pelatihan yang diampu oleh Badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yaitu 100% dengan status Telah Tercapai (TT). Faktor pendorong tercapainya indikator tersebut adalah meningkatnya kepatuhan ASN/PNS terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian.

5. Penelitian dan Pengembangan

Kinerja penyelenggaran Fungsi penunjang penelitian dan pengembangan terdiri dari 2 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.32
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan s.d Mei Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian	%	100	100	0	0	▼	BAPPEDA
		Persentase kreativitas dan inovasi daerah yang diterapkan atau diimplementasikan	%	100	100	0	0	▼	BAPPEDA
RATA-RATA							0	▼	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2023 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, indikator kinerja presentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian masih berstatus upaya keras. Adapun faktor penghambatnya adalah kegiatan akan dilaksanakan pada TW IV Tahun 2024. Untuk mencapai target di akhir tahun dengan percepatan kegiatan pendukung di awal bulan Mei Tahun 2024.

2.7 Evaluasi Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Inspektorat Daerah

Kinerja pengawasan terdiri dari 5 indikator kinerja sasaran dan 4 indikator kinerja program daerah, dengan capaian kinerja tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.33
Capaian Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan s.d Mei Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Persentase Capaian Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK	%	na	93,7	93,05	99,31	●	Inspektorat
		Maturitas SPIP	Nilai	3	3,009	3	99,70	●	Inspektorat
		Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	Nilai	na	2,92	2,91	99,66	●	Inspektorat
		Kapabilitas APIP	level	na	3	3	100	●	Inspektorat
RATA-RATA							99,67	●	
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	%	100	61	71	100	●	Inspektorat
		Persentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	%	100	48	51	100	●	Inspektorat
		Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD dan pengadaan barang/jasa	%	100	63	106	100	●	Inspektorat
		Persentase penanganan	%	100	100	100	100	●	Inspektorat

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		aduan masyarakat							
		Persentase tindak lanjut hasil temuan	%	100	100	100	100	●	Inspektorat
2.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK	%	100	100	0	0	▼	Inspektorat
		Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	%	100	60	100	100	●	Inspektorat
		Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya	%	100	100	100	100	●	Inspektorat
		Kompilasi level komponen dukungan pengawasan dan komponen aktifitas pengawasan serta kualitas pengawasan	level	na	3	3	100	●	Inspektorat
RATA-RATA							88,89	●	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2023 data diolah.

Berdasarkan tabel diatas, kinerja pengawasan diimplementasikan oleh Inspektorat dengan 4 indikator kinerja sasaran dan 9 indikator kinerja program. Rata-rata indikator sasaran yaitu 99,67% dan rata-rata capaian kinerja program yaitu indikator Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK dengan faktor penghambat diantaranya:

- a) Kurangnya komitmen OPD untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas;
- b) Zona Intergritas merupakan kegiatan baru, sehingga masih dibutuhkan pendalaman dan pengembangan informasi ;
- 3.
- c) Adanya mutasi pegawai

2.8 Evaluasi Kinerja Unsur Kewilayahan

Capaian Kinerja Penyelenggaran Unsur Kewilayahan Urusan terdiri dari 1 indikator sasaran kinerja daerah dan 6 indikator kinerja program daerah pada kecamatan yang tidak ada kelurahannya, dan 8 indikator program pada kecamatan yang ada wilayah kelurahannya. Rata-rata capaian kinerja sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.34
Capaian Kinerja Unsur Kewilayahan Kecamatan s.d Mei Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indesk Kepuasan Masyarakat							
		Kecamatan Temanggung	%	85,98	B	B	100	●	Kecamatan Temanggung
		Kecamatan Tembarak	%	88,01	B	B	100	●	Kecamatan Tembarak
		Kecamatan Pringsurat	%	85,78	B	B	100	●	Kecamatan Pringsurat
		Kecamatan Kaloran	%	84	B	B	100	●	Kecamatan Kaloran
		Kecamatan Parakan	%	84,02	B	B	100	●	Kecamatan Parakan
		Kecamatan Bulu	%	86,88	B	B	100	●	Kecamatan Bulu

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kualitas	Indesk Kepuasan Masyarakat							
		Kecamatan Kedu	%	88,7	B	B	100	●	Kecamatan Kedu
		Kecamatan Kandangan	%	86,97	B	B	100	●	Kecamatan Kandangan
		Kecamatan Candiroto	%	84,28	B	B	100	●	Kecamatan Candiroto
		Kecamatan Ngadirejo	%	85,99	B	B	100	●	Kecamatan Ngadirejo
		Kecamatan Jumo	%	87,36	B	B	100	●	Kecamatan Jumo
		Kecamatan Wonoboyo	%	84,44	B	B	100	●	Kecamatan Wonoboyo
		Kecamatan Kranggan	%	82,08	B	B	100	●	Kecamatan Kranggan
		Kecamatan Bejen	%	86,2	B	B	100	●	Kecamatan Bejen
		Kecamatan Kledung	%	82,55	B	B	100	●	Kecamatan Kledung
		Kecamatan Bansari	%	84,22	B	B	100	●	Kecamatan Bansari
		Kecamatan Tlogomulyo	%	84,76	B	B	100	●	Kecamatan Tlogomulyo
		Kecamatan Selopampang	%	88,41	B	B	100	●	Kecamatan Selopampang
		Kecamatan Gemawang	%	79,28	B	B	100	●	Kecamatan Gemawang
		Kecamatan Tretep	%	85,3	B	B	100	●	Kecamatan Tretep
	RATA-RATA			86,14	B	B	100	●	
1.	Program Penyelenggaraan	Persentase Jumlah	%	n.a	100	100	100	●	Kecamatan

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kualitas Pemerintah dan Pelayanan Publik	Indesk Kepuasan Masyarakat penyelesaian Pelayanan masyarakat di kecamatan							
		Kecamatan Temanggung	%	n.a	100	100	100	●	Kecamatan Temanggung
		Kecamatan Tembarak	%	n.a	100	100	100	●	Kecamatan Tembarak
		Kecamatan Pringsurat	%	n.a	100	100	100	●	Kecamatan Pringsurat
		Kecamatan Kaloran	%	n.a	100	100	100	●	Kecamatan Kaloran
		Kecamatan Parakan	%	n.a	100	100	100	●	Kecamatan Parakan
		Kecamatan Bulu	%	n.a	100	100	100	●	Kecamatan Bulu
		Kecamatan Kedu	%	n.a	100	100	100	●	Kecamatan Kedu
		Kecamatan Kandangan	%	n.a	100	100	100	●	Kecamatan Kandangan
		Kecamatan Candiroto	%	n.a	100	100	100	●	Kecamatan Candiroto
		Kecamatan Ngadirejo	%	n.a	100	100	100	●	Kecamatan Ngadirejo
		Kecamatan Jumo	%	n.a	100	100	100	●	Kecamatan Jumo
		Kecamatan Wonoboyo	%	n.a	100	100	100	●	Kecamatan Wonoboyo
		Kecamatan Kranggan	%	n.a	100	100	100	●	Kecamatan Kranggan
		Kecamatan Bejen	%	n.a	100	100	100	●	Kecamatan Bejen

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kualitas	Indesk Kepuasan Masyarakat							
		Kecamatan Kledung	%	n.a	100	100	100	●	Kecamatan Kledung
		Kecamatan Bansari	%	n.a	100	100	100	●	Kecamatan Bansari
		Kecamatan Tlogomulyo	%	n.a	100	100	100	●	Kecamatan Tlogomulyo
		Kecamatan Selopampang	%	n.a	100	100	100	●	Kecamatan Selopampang
		Kecamatan Gemawang	%	n.a	100	100	100	●	Kecamatan Gemawang
		Kecamatan Tretep	%	n.a	100	100	100	●	Kecamatan Tretep
		Persentase realisasi penerimaan PBB	%	98,72	95	4,5	4,74	▼	Kecamatan
		Kecamatan Temanggung	%	91,93	95	6,12	6,44	▼	Kecamatan Temanggung
		Kecamatan Tembarak	%	99,85	95	0,15	0,16	▼	Kecamatan Tembarak
		Kecamatan Pringsurat	%	96,21	95	18,0	18,95	▼	Kecamatan Pringsurat
		Kecamatan Kaloran	%	100	95	1,60	1,69	▼	Kecamatan Kaloran
		Kecamatan Parakan	%	96,21	95	3,54	3,73	▼	Kecamatan Parakan
		Kecamatan Bulu	%	96,21	95	0,31	0,32	▼	Kecamatan Bulu
		Kecamatan Kedu	%	96,21	95	1,14	1,20	▼	Kecamatan Kedu
		Kecamatan Kandangan	%	96,21	95	14,61	15,37	▼	Kecamatan Kandangan

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kualitas	Indesk Kepuasan Masyarakat							
		Kecamatan Candiroto	%	100	95	0,05	0,06	▼	Kecamatan Candiroto
		Kecamatan Ngadirejo	%	96,21	95	0,43	0,45	▼	Kecamatan Ngadirejo
		Kecamatan Jumo	%	96,21	95	6,08	6,40	▼	Kecamatan Jumo
		Kecamatan Wonoboyo	%	96,21	95	10,50	11,06	▼	Kecamatan Wonoboyo
		Kecamatan Kranggan	%	96,21	95	11,01	11,58	▼	Kecamatan Kranggan
		Kecamatan Bejen	%	96,21	95	4,26	4,49	▼	Kecamatan Bejen
		Kecamatan Kledung	%	96,21	95	7,03	7,40	▼	Kecamatan Kledung
		Kecamatan Bansari	%	100	95	0,15	0,157	▼	Kecamatan Bansari
		Kecamatan Tlogomulyo	%	96,21	95	3,27	3,45	▼	Kecamatan Tlogomulyo
		Kecamatan Selopampang	%	100	95	1,63	1,72	▼	Kecamatan Selopampang
		Kecamatan Gemawang	%	96,21	95	0,11	0,11	▼	Kecamatan Gemawang
		Kecamatan Tretep	%	96,21	95	0,02	0,02	▼	Kecamatan Tretep
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang layak		92,39	79	75,5	95,57	●	Kecamatan
		Kecamatan Temanggung	%	90,79	79	75,50	95,57	●	Kecamatan Temanggung
		Kecamatan Kranggan	%	97,18	79	93,06	100	●	Kecamatan Kedu

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kualitas	Indesk Kepuasan Masyarakat							
		Kecamatan Ngadirejo	%	90,79	79	100	100	●	Kecamatan Ngadirejo
		Kecamatan Parakan	%	90,79	79	90,79	100	●	Kecamatan Jumo
		Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang terfasilitasi dan aktif	%	100	100	100	100	●	Kecamatan
		Kecamatan Temanggung	%	100	100	100	100	●	Kecamatan Temanggung
		Kecamatan Parakan	%	100	100	100	100	●	Kecamatan Parakan
		Kecamatan Ngadirejo	%	100	100	100	100	●	Kecamatan Ngadirejo
		Kecamatan Kranggan	%	100	100	100	100	●	Kecamatan Kranggan
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan laporan kejadian gangguan kantibnas dan bencana alam	%	100	100	100	100	●	Kecamatan
		Kecamatan Temanggung	%	100	100	100	100	●	Kecamatan Temanggung
		Kecamatan Tembarak	%	100	100	100	100	●	Kecamatan Tembarak
		Kecamatan Pringsurat	%	100	100	100	100	●	Kecamatan Pringsurat
		Kecamatan Kaloran	%	100	100	100	100	●	Kecamatan Kaloran
		Kecamatan Parakan	%	100	100	100	100	●	Kecamatan Parakan
		Kecamatan Bulu	%	100	100	100	100	●	Kecamatan Bulu

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kualitas	Indesk Kepuasan Masyarakat							
		Kecamatan Kedu	%	100	100	100	100	●	Kecamatan Kedu
		Kecamatan Kandangan	%	100	100	100	100	●	Kecamatan Kandangan
		Kecamatan Candiroto	%	100	100	100	100	●	Kecamatan Candiroto
		Kecamatan Ngadirejo	%	100	100	100	100	●	Kecamatan Ngadirejo
		Kecamatan Jumo	%	100	100	100	100	●	Kecamatan Jumo
		Kecamatan Wonobojo	%	100	100	100	100	●	Kecamatan Wonobojo
		Kecamatan Kranggan	%	100	100	100	100	●	Kecamatan Kranggan
		Kecamatan Bejen	%	100	100	100	100	●	Kecamatan Bejen
		Kecamatan Kledung	%	100	100	100	100	●	Kecamatan Kledung
		Kecamatan Bansari	%	100	100	100	100	●	Kecamatan Bansari
		Kecamatan Tlogomulyo	%	100	100	100	100	●	Kecamatan Tlogomulyo
		Kecamatan Selopampang	%	100	100	100	100	●	Kecamatan Selopampang
		Kecamatan Gemawang	%	100	100	100	100	●	Kecamatan Gemawang
		Kecamatan Tretep	%	100	100	100	100	●	Kecamatan Tretep
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan perangkat Desa	%	0	100	95	95	●	Kecamatan

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kualitas	Indesk Kepuasan Masyarakat							
		Kecamatan Temanggung	%	0	100	100	100	●	Kecamatan Temanggung
		Kecamatan Tembarak	%	0	100	100	100	●	Kecamatan Tembarak
		Kecamatan Pringsurat	%	0	100	100	100	●	Kecamatan Pringsurat
		Kecamatan Kaloran	%	0	100	100	100	●	Kecamatan Kaloran
		Kecamatan Parakan	%	0	100	100	100	●	Kecamatan Parakan
		Kecamatan Bulu	%	0	100	100	100	●	Kecamatan Bulu
		Kecamatan Kedu	%	0	100	100	100	●	Kecamatan Kedu
		Kecamatan Kandangan	%	0	100	100	100	●	Kecamatan Kandangan
		Kecamatan Candiroto	%	0	100	100	100	●	Kecamatan Candiroto
		Kecamatan Ngadirejo	%	0	100	100	100	●	Kecamatan Ngadirejo
		Kecamatan Jumo	%	0	100	100	100	●	Kecamatan Jumo
		Kecamatan Wonoboyo	%	0	100	0	0	▼	Kecamatan Wonoboyo
		Kecamatan Kranggan	%	0	100	100	100	●	Kecamatan Kranggan
		Kecamatan Bejen	%	0	100	100	100	●	Kecamatan Bejen
		Kecamatan Kledung	%	0	100	100	100	●	Kecamatan Kledung

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kualitas	Indesk Kepuasan Masyarakat							
		Kecamatan Bansari	%	0	100	100	100	●	Kecamatan Bansari
		Kecamatan Tlogomulyo	%	0	100	100	100	●	Kecamatan Tlogomulyo
		Kecamatan Selopampang	%	0	100	100	100	●	Kecamatan Selopampang
		Kecamatan Gemawang	%	0	100	100	100	●	Kecamatan Gemawang
		Kecamatan Tretep	%	0	100	100	100	●	Kecamatan Tretep
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%	100	100	100	100	●	Kecamatan
		Kecamatan Temanggung	%	100	100	100	100	●	Kecamatan Temanggung
		Kecamatan Tembarak	%	100	100	100	100	●	Kecamatan Tembarak
		Kecamatan Pringsurat	%	100	100	100	100	●	Kecamatan Pringsurat
		Kecamatan Kaloran	%	100	100	100	100	●	Kecamatan Kaloran
		Kecamatan Parakan	%	100	100	100	100	●	Kecamatan Parakan
		Kecamatan Bulu	%	100	100	100	100	●	Kecamatan Bulu
		Kecamatan Kedu	%	100	100	100	100	●	Kecamatan Kedu
		Kecamatan Kandangan	%	100	100	100	100	●	Kecamatan Kandangan
		Kecamatan Candiroto	%	100	100	100	100	●	Kecamatan Candiroto

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kualitas	Indesk Kepuasan Masyarakat							
		Kecamatan Ngadirejo	%	100	100	100	100	●	Kecamatan Ngadirejo
		Kecamatan Jumo	%	100	100	100	100	●	Kecamatan Jumo
		Kecamatan Wonobojo	%	100	100	100	100	●	Kecamatan Wonobojo
		Kecamatan Kranggan	%	100	100	100	100	●	Kecamatan Kranggan
		Kecamatan Bejen	%	100	100	100	100	●	Kecamatan Bejen
		Kecamatan Kledung	%	100	100	100	100	●	Kecamatan Kledung
		Kecamatan Bansari	%	100	100	100	100	●	Kecamatan Bansari
		Kecamatan Tlogomulyo	%	100	100	100	100	●	Kecamatan Tlogomulyo
		Kecamatan Selopampang	%	100	100	100	100	●	Kecamatan Selopampang
		Kecamatan Gemawang	%	100	100	100	100	●	Kecamatan Gemawang
		Kecamatan Tretep	%	100	100	100	100	●	Kecamatan Tretep
	RATA-RATA						90,04	●	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Berdasarkan Berdasarkan tabel diatas, rata-rata indikator kinerja sasaran Kecamatan yaitu 100% dengan status Telah Tercapai.

Rata-rata indikator program yaitu 90,04% dengan rincian indikator sebagaiberikut :

- 1) Persentase jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang layak dengan capaian 95,57%;
- 2) Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang terfasilitasi dan aktif dengan capaian 100%;
- 3) Persentase penanganan laporan kejadian gangguan kantibnas dan bencana alam dengan capaian 100%;
- 4) Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan perangkat Desa (95%);
- 5) Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dengan capaian 100%;

Untuk persentase Realisasi penerimaan PBB sampai dengan Mei tahun 2024 masih berstatus Upaya Keras (UK) sebesar 4,74%.

Berikut faktor penghambat dan upaya tindak lanjut pada indikator yang masih berstatus upaya keras yang dapat dilakukan untuk meningkatkan status indikator tersebut :

Pada indikator persentase realisasi penerimaan PBB, faktor yang menjadi

penghambat diantaranya adalah :

- 1) Adanya SPPT yang bermasalah, adanya keterlambatan penyampaian SPPT karena wajib pajak berada di luar kota, dan wajib pajak tidak ditemukan. Selain itu juga terdapat perusahaan yang sudah tidak beroperasi tapi masih diwajibkan membayar pajak dan mengalami kenaikan tarif pajak;
- 2) Adanya wajib pajak yang berdomisili di luar kota;
- 3) Masyarakat membayar PBB mendekati jatuh tempo;
- 4) Ketergantungan perekonomian masyarakat temanggung khususnya Kecamatan Kledung akan panen raya tembakau, sehingga masyarakat cenderung membayar PBB setelah panen raya tembakau;
- 5) Kurang intensifnya kinerja perangkat desa dalam penarikan PBB;
- 6) Terdapat masyarakat dengan kesadaran membayar pajak yang masih rendah Metode pelayanan yang masih bersifat manual;
- 7) Terdapat SPPT yang tidak diketahui Wajib Pajaknya.

2.9 Evaluasi Kinerja Unsur Pemerintahan Umum

Capaian Kinerja unsur pemerintahan umum diampu oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 5 indikator kinerja program daerah, dengan capaian kinerja sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.35
Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum s.d Mei Tahun 2024

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menurunnya konflik di masyarakat konflik di masyarakat	Persentase tertanganinya konflik di masyarakat	Angka	n.a	100	100	100		Bankes-bangpol
RATA-RATA							100		
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase sekolah yang mendapatkan pemahaman kebangsaan	%	n.a	80	92,86	100		Bankes-bangpol
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase pelaksanaan pendidikan politik	%	n.a	80	10	12,5		Bankes-bangpol
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan	%	n.a	13,33	4,2	31,48		Bankes-bangpol

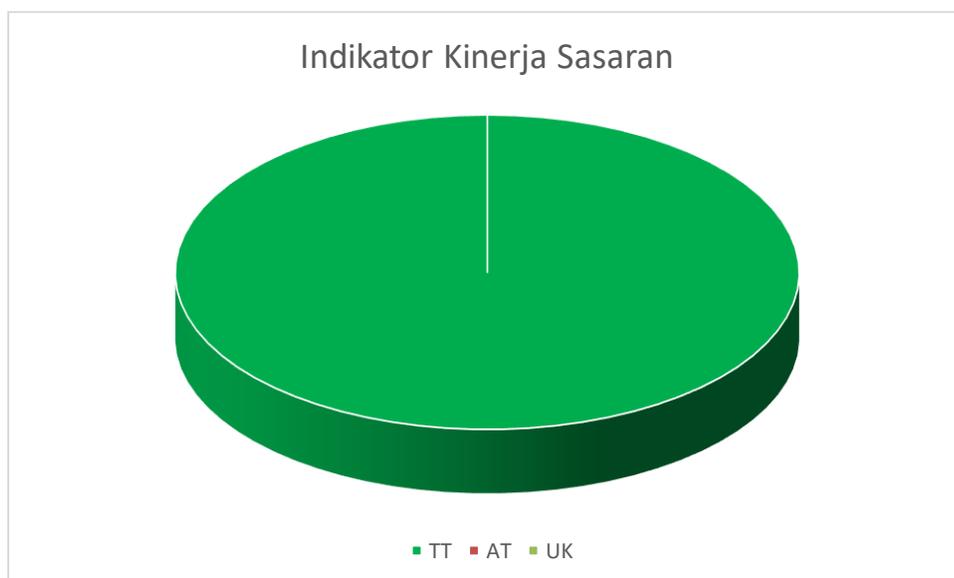
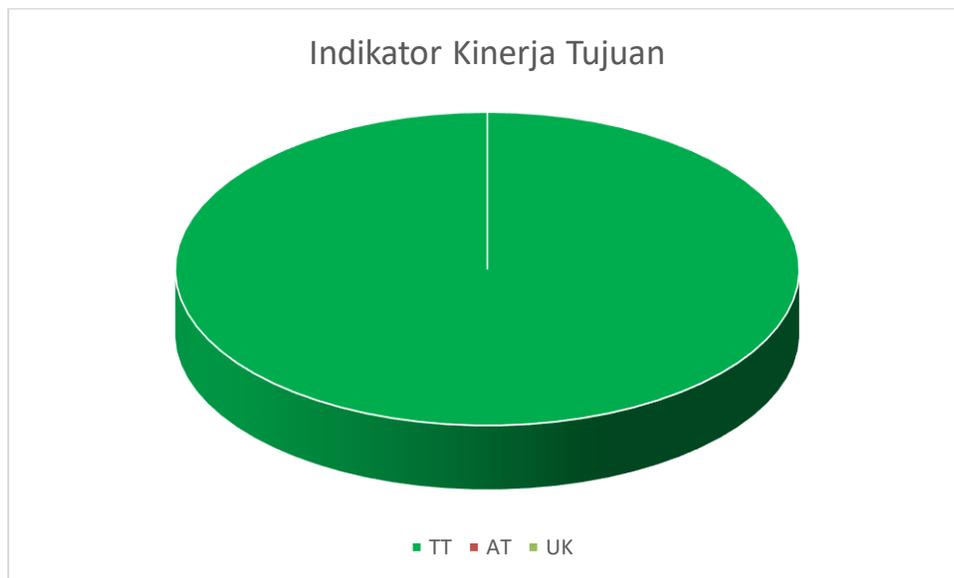
No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah
					Target 2024	Realisasi s.d Mei 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	n.a	100	0	0	▼	Bankes-bangpol
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik dan keamanan daerah	%	n.a	100	100	100	●	Bankes-bangpol
RATA-RATA							48,79	●	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata capaian indikator kinerja sasaran yaitu 100% dengan status Telah Tercapai (TT) dan rata-rata capaian indikator program yaitu 48,79%, masih ada 2 indikator yang berstatus Upaya Keras (UK) yaitu :

- a) Persentase pelaksanaan pendidikan politik, faktor penghambat baru akan terjadwal di sampai dengan Mei 2024. Upaya untuk mencapai target di akhir tahun 2024 dengan melaksanakan di sampai dengan Mei 2024.
- b) Persentase Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, faktor penghambat baru akan dijadwalkan di TW II dan IV, upaya pencapaian target di akhir tahun 2024 yaitu dengan dilaksanakan di sampai dengan TW II dan IV.

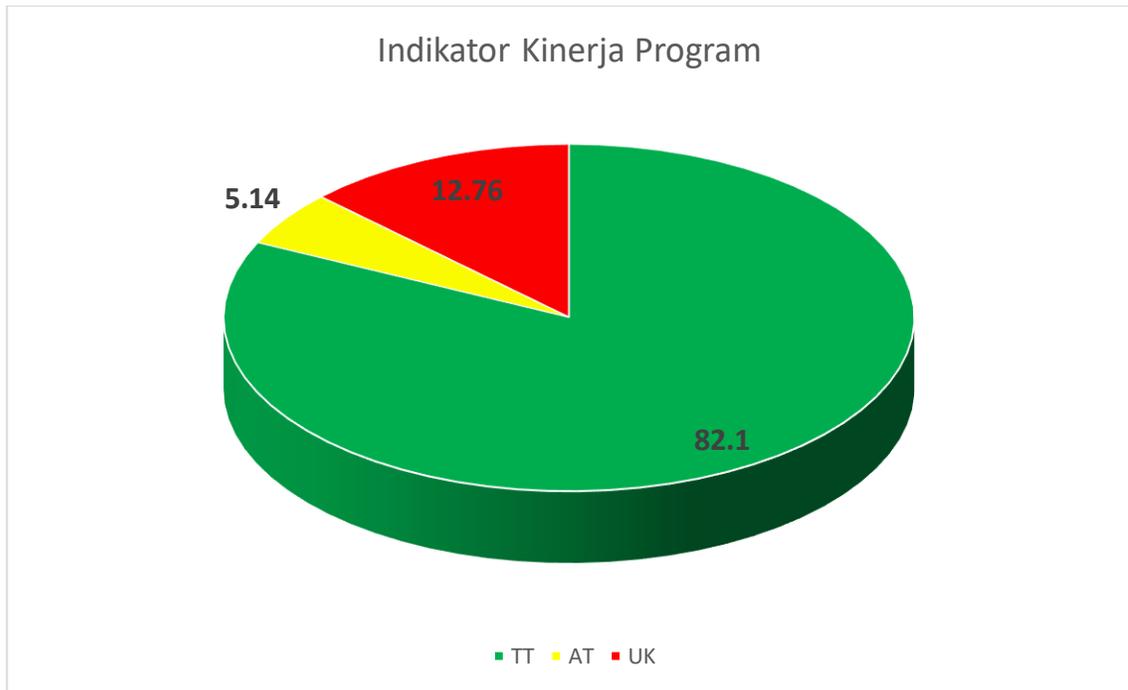
Capaian kinerja pada indikator kinerja utama Kabupaten Temanggung terdiri dari 3 indikator kinerja tujuan dan 19 indikator kinerja sasaran, rata-rata capaian pada indikator kinerja utama yang tergambar dalam diagram berikut ini.



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024

Gambar 2.1
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun 2024 Sampai dengan Mei

Selain itu, ada 525 indikator program yang terdiri dari 431 indikator berstatus Telah Tercapai (TT), 27 indikator berstatus Akan Tercapai (AT) dan 67 indikator yang berstatus perlu Upaya Keras (UK), sebagaimana tergambar dalam diagram berikut ini.



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022

Gambar 2.2
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Program Tahun 2023 Sampai dengan Mei I

2.10 Identifikasi Permasalahan

2.10.1. Identifikasi Permasalahan yang Berkaitan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Beberapa identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah diantaranya:

1. Belum optimalnya indek pembangunann manusia
2. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi
3. Belum optimalnya pendapatan per kapita
4. Belum optimalnya indeks Pembangunan infrastruktur
5. Belum optimalnya Tingkat keamanan
6. Masih adanya kasus stunting
7. Belum maksimalnya capaian angka rata-rata lama sekolah
8. Masih rendahnya indeks pembangunan olahraga
9. Belum optimalnya indeks Pembangunan kebudayaan
10. Belum optimlanya indeks Pembangunan gender

2.10.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

- 1) Bidang Pendidikan
 - a) Masih banyaknya masyarakat usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan.
- 2) Bidang Kesehatan
 - a) Masih terdapatnya anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
 - b) Belum optimalnya penanganan orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
- 3) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a) Masih kurangnya pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Gedung pemerintah
- 4) Bidang Sosial
 - a) Masih terdapat anak yatim piatu terlantar dalam panti yang belum mendapatkan bantuan jaminan sosial;
 - b) Belum optimalnya pendataan fakir miskin cakupan kabupaten.
- 5) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - a) Belum optimalnya layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
 - b) layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
 - 1) Bidang Tenaga Kerja
 - a) Belum optimalnya pembinaan pada Lembaga pelatihan kerja swasta;
 - b) Kurangnya pelatihan bagi pencari kerja ;
 - 2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a) Belum optimalnya predikat kabupaten layak anak.
 - 3) Bidang Lingkungan Hidup
 - a) Belum optimalnya dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b) Belum optimalnya pengahardaan bidang lingkungan hidup ;
 - c) Belum maksimalnya pembinaan dan pengawasan usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan hidup.
 - 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a) Belum optimalnya penyelenggaraan pemilihan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
- b) Belum optimalnya laporan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh BPD.
- 5) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - a) Masih kurangnya prosentase koperasi sehat di kabupaten Temanggung;
 - b) Belum terlaksananya koperasi tidak aktif yang disusulkan untuk dibubarkan
 - c) Belum optimalnya prosentase UMKM yang difasilitasi oleh pemerintah.
- 6) Bidang Penanaman Modal
 - a) Belum optimalnya realisasi investasi
 - b) Masih kurangnya Perusahaan
- 7) Bidang Kebudayaan
 - a) Masih terdapat kelompok kesenian yang kurang produktif.
- 8) Bidang Perpustakaan
 - a) Masih rendahnya pertumbuhan jumlah pengunjung perpustakaan
 - b) Belum optimalnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno
- 3. Urusan Pemerintahan Pilihan
 - 1) Bidang Pariwisata
 - a) Masih rendahnya pertumbuhan jumlah wisatawan;
 - 2) Bidang Perdagangan
 - a) Masih rendahnya cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang.
- 4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
 - 1) Fungsi Sekretariat Daerah
 - a) Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa masih ada yang melewati tenggat waktu;
- 5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
 - 1) Keuangan
 - a) Masih rendahnya penerimaan pajak daerah
 - 2) Penelitian dan Pengembangan
 - a) Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian.

- b) Belum optimalnya kreativitas dan inovasi daerah yang diterakpan atau diimplementasikan
- 6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
 - 1) Inspektorat Daerah
- 7. Masih terbatasnya Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
- 8. Unsur Kewilayahan
 - 1) Kecamatan
 - a) Masih rendahnya realisasi penerimaan PBB.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024 menggambarkan kebijakan perekonomian daerah yang diambil sebagai dasar pencapaian bagi sasaran indikator ekonomi makro daerah. Kerangka ekonomi ini memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kabupaten Temanggung yang dipengaruhi oleh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Selain itu dalam bab ini juga akan membahas kerangka pendanaan daerah agar dapat memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan daerah tahun 2024.

Kerangka ekonomi dan pendanaan daerah ini menjadi dasar kebijakan perencanaan anggaran agar dapat dialokasikan secara efektif dan berbasis program prioritas. Dengan demikian rancangan kerangka ekonomi dan pendanaan daerah Perubahan RKPD Tahun 2024 ini akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kabupaten Temanggung.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Kondisi Perekonomian Nasional

Memasuki tahun 2024 perekonomian global dan nasional semakin membaik dengan meningkatnya aktivitas sosial ekonomi serta pelonggaran perjalanan di seluruh dunia. Akan tetapi, tekanan geopolitik perang Rusia-Ukraina dan kawasan timur tengah memperlambat pemulihan ekonomi baik secara global dan nasional.

Konsekuensi dari perang tersebut menimbulkan lonjakan

harga komoditas global terutama komoditas energi dan pangan. Berbagai kebijakan fiskal telah dilakukan pemerintah dalam rangka menekan laju inflasi di antara lain kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) serta pemantauan harga kebutuhan pokok. Hal ini dilakukan pemerintah dalam upaya mendukung program pemulihan ekonomi nasional yang pada tahun ini menitikberatkan pada penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat.

Perekonomian nasional tahun 2023 5,05% menurun dibandingkan tahun 2022 sebesar 5,31%. Perekonomian nasional pada Triwulan I tahun 2024 tumbuh sebesar 5,11% (yoy). Sumber pertumbuhan tertinggi pertumbuhan ekonomi pada Triwulan 1 adalah Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 18,88 persen.

Inflasi tahun 2023 5,51% (yoy). Inflasi pada bulan April tahun 2024 adalah sebesar 3,00% (yoy) yang lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,05% (yoy). Kembalinya inflasi ke kisaran sasaran tersebut tidak terlepas dari konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah sehingga diharapkan target sebesar 3 ± 1 dapat tercapai.

Tabel 3.1
Proyeksi Indikator Makro Nasional 2024

No	Indikator	Proyeksi	
		RKPD 2024	Perub RKPD 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,30-5,70	5,30-5,70
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,0-5,70	5,0-5,70
3	IPM (%)	73,99 -74,02	73,99 -74,02
4	Inflasi (%)	3 +/- 1	3 +/- 1
4	Persentase Penduduk Miskin (%)	6,50-7,50	6,50-7,50

Sumber: BPS 2023

3.1.2 Kondisi Perekonomian Jawa Tengah

Pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah tahun 2023 adalah 4,98%, tumbuh melambat dibandingkan capaian pada tahun 2022 yang tumbuh 5,31%. Penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah bersumber dari sektor lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yaitu sebesar 11,24%.

Sedangkan pada tahun 2024 Triwulan 1 pertumbuhan ekonomi sebesar 4,97% (yoy). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh sebesar 13,64%.

Inflasi pada tahun 2023 di Jawa Tengah sebesar 2,89% lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yakni sebesar 5,63%. Sedangkan untuk Triwulan 1 2024 adalah sebesar 3,40% (yoy) dimana penyebab utama inflasi di Jawa Tengah adalah kenaikan kelompok makanan, minuman dan tembakau.

Tabel 3.2
Proyeksi Indikator Makro Jawa Tengah 2024

No	Indikator	Proyeksi	
		RKPD 2024	Perub RKPD 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,70 - 5,50	4,70 - 5,50
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,44 - 4,94	5,44 - 4,94
3	IPM (%)	73,43	73,43
4	Inflasi (%)	3,0+/- 1	3,0+/- 1
5	Persentase Penduduk Miskin (%)	9,06 - 8,96	9,06 - 8,96

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

3.1.3 Kondisi Perekonomian Kabupaten Temanggung

Kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Temanggung tetap diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pada potensi unggulan daerah terutama yang bertumpu pada sektor pertanian dan ketahanan pangan, pariwisata, sumber daya alam dan lingkungan

hidup. Sedangkan di sisi lain, pembangunan infrastruktur, pengembangan teknologi dan peningkatan sumber daya manusia diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan Angka Kemiskinan dengan target sebesar 9,25-9,10%, Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,31%, dan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 71,77.

Kondisi perekonomian Kabupaten Temanggung sebagaimana kondisi Jawa Tengah maupun Indonesia, diperkirakan mengalami kontraksi dan beberapa penurunan kinerja ekonomi terkait dengan tekanan geopolitik perang Rusia-Ukraina dan kawasan Timur Tengah. Salah satu upaya pemulihan ekonomi Pemerintah Kabupaten Temanggung adalah memberikan bantuan dan stimulus pada pelaku UMKM, diharapkan bantuan tersebut dapat meningkatkan jumlah dan kualitas produksi baik untuk sektor barang maupun jasa. Selain itu, dengan kembali dibukanya berbagai kegiatan diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian dan terjadi pemulihan ekonomi.

3.1.3.1 Pertumbuhan Ekonomi

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi mengalami tren yang berfluktuasi. Hal tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk segera melakukan langkah-langkah strategis yang memberikan *multiplier effect* bagi percepatan peningkatan ekonomi masyarakat agar tren pertumbuhan ekonomi meningkat secara stabil dengan target pertumbuhan ekonomi diperkirakan dapat mencapai 5,27% pada akhir tahun 2024.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung tahun 2023 5,00% tumbuh melambat jika dibandingkan tahun 2022 sebesar 5,20%. Pertumbuhan signifikan meliputi Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 12,49 persen, Informasi dan Komunikasi sebesar

11,25 persen, dan Jasa Lainnya sebesar 8,83 persen



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Gambar 3.1

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023

Sedangkan sebagai perbandingan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional ditampilkan pada tabel selanjutnya.

Tabel 3.3

Pertumbuhan Ekonomi Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2023

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (persen)		
	Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
2024	5,27	4,70 - 5,50	5,30-5,70
Perubahan 2024	5,27	4,70 - 5,50	5,30-5,70

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2024

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung Tahun 2024 tersebut mempertimbangkan asumsi optimisme pemulihan ekonomi di tingkat provinsi dan nasional, untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, maka strategi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Peningkatan investasi baik investasi fisik maupun modal manusia berupa pendidikan;
2. Penentuan daerah atau wilayah yang dikembangkan

- menjadi kawasan industri;
3. Menjamin keterlibatan sumberdaya lokal dalam mendukung pelaksanaan kegiatan industri;
 4. Mendukung Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri dengan membelanjakan pengeluaran pemerintah untuk pengadaan barang produksi dalam negeri;
 5. Peningkatan produktivitas sektor kearifan lokal seperti pertanian.

3.1.3.2 Struktur Ekonomi

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Temanggung atas dasar harga konstan selama jangka waktu lima (5) tahun terakhir menunjukkan pergerakan dan pergeseran di beberapa sub sektor. Struktur ekonomi Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2019 – 2023

	LAPANGAN USAHA	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.73	1.86	0.86	2,92	1.28
B	Pertambangan dan Penggalian	4.24	2.11	6.75	-3.94	3.12
C	Industri Pengolahan	4.39	-0.62	2.00	1,09	4.32
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4.22	2.87	4.84	5,26	5.86
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.74	2.02	5.62	0,22	4.36
F	Konstruksi	8.15	-2.01	7.54	3,72	7.77
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.39	-3.79	7.40	4,30	5.82
H	Transportasi dan Pergudangan	9.29	-30.59	2.37	65,39	7.90
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.41	-6.81	6.03	15,04	12.49
J	Informasi dan Komunikasi	15.69	14.14	5.98	2,24	11.25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.73	2.01	3.42	0,51	2.91
L	Real Estate	7.21	-0.10	2.32	5,80	8.36
M,N	Jasa Perusahaan	10.21	-6.32	3.01	5,65	8.82

	LAPANGAN USAHA	2019	2020	2021	2022	2023
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.41	-1.61	-0.26	1,60	5.11
P	Jasa Pendidikan	8.16	-0.19	0.54	1,63	6.96
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.22	7.70	0.59	2,59	8.32
R,S,T,U	Jasa lainnya	8.33	-6.22	0.98	10,95	8.83
	PDRB	5,05	-2,13	3,34	5,20	5.00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Tabel 3.5
PDRB Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)
Tahun 2019-2023

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3 269 024.29	3 329 888.06	3 358 511.42	3 456 661.43	3 500 841.43
B	Pertambangan dan Penggalian	116 306.62	118 761.08	126 773.50	121 773.50	125 573.50
C	Industri Pengolahan	3 971 384.65	3 946 892.95	4 025 967.87	4 069 848.88	4 245 849.88
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13 703.79	14 097.22	14 779.56	15 557.56	16 468.56
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12 742.62	13 000.27	13 731.13	13 761.13	14 361.13
F	Konstruksi	764 987.34	749 618.63	806 115.28	836 115.28	901 115.28
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3 445 113.33	3 314 676.74	3 559 938.30	3 712 938.30	3 928 938.30
H	Transportasi dan Pergudangan	771 939.79	535 841.17	548 561.30	907 261.30	978 951.30
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	267 278.44	249 087.02	264 107.30	303 837.30	341 787.30
J	Informasi dan Komunikasi	332 030.41	378 991.92	401 665.90	410 665.90	456 865.90
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	466 115.85	475 463.11	491 701.42	494 226.78	508 596.78
L	Real Estate	134 950.39	134 810.45	137 942.32	145 942.32	158 142.32
M,N	Jasa Perusahaan	58 367.58	54 679.05	56 325.26	59 505.26	64 755.26

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2019	2020	2021	2022*	2023**
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	402 523.56	396 025.71	395 009.86	401 329.86	421 829.86
P	Jasa Pendidikan	669 621.53	668 339.70	671 962.76	682 912.76	730 412.76
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	178 402.78	192 134.13	193 276.35	198 276.35	214 776.35
R,S,T, U	Jasa lainnya	339 565.90	318 448.25	321 560.92	356 760.92	388 260.92
PRODUK DOMESTIK		15.214.058,	148.890.75	15.387.930,	16.187.374.83	16.997.526.

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Struktur lapangan usaha Kabupaten Temanggung mulai tahun 2019 sedikit bergeser dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan ke lapangan usaha Industri Pengolahan. Hal ini dapat dilihat dari besarnya peranan lapangan usaha kategori Industri Pengolahan tahun 2019 sampai 2023 yang nilainya lebih besar dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Meningkatnya permintaan akan produk barang jadi dan barang setengah jadi baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional telah mendorong perkembangan Industri Pengolahan menjadi lapangan usaha yang terbesar kontribusinya dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto.

3.1.3.3 PDRB Perkapita

Untuk melihat perubahan pendapatan perkapita/PDRB per kapita Kabupaten Temanggung di tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6
PDRB per Kapita Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku (Ribu Rp)	
	RKPD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
2023	29.570.00	33.288,96

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Nilai PDRB perkapita mengalami kenaikan hal ini menunjukkan bahwa secara umum kesejahteraan penduduk Kabupaten Temanggung semakin membaik. Namun demikian data tersebut belum dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya, karena produk barang dan jasa yang dihasilkan di Kabupaten Temanggung tidak hanya dimiliki/dinikmati oleh warga Temanggung saja, akan tetapi ada juga yang dimiliki/dinikmati oleh penduduk dari luar Kabupaten Temanggung yang melakukan investasi di Kabupaten Temanggung.

3.1.3.4 Inflasi

Kondisi perekonomian makro suatu daerah dapat bergerak secara dinamis atau stagnan dapat terlihat secara umum dari besaran inflasi. Inflasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian makro. Inflasi yang tinggi akan berpengaruh terhadap daya beli konsumen, yakni turunnya tingkat daya beli masyarakat, sebaliknya jika tidak ada inflasi bahkan terjadi deflasi, hal ini juga tidak menguntungkan bagi para pelaku ekonomi dan bila terjadi deflasi terus menerus akan menyebabkan terjadinya stagnasi ekonomi dan bahkan bisa menimbulkan resesi ekonomi.

Tingkat inflasi atau perubahan harga yang terjadi mencerminkan kestabilan nilai jual dari mata uang rupiah. Hal ini bisa diamati dari kenaikan harga barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat. Artinya apabila dalam suatu periode tertentu tidak terjadi perubahan harga pada semua komoditas barang/jasa di tingkat konsumen, berarti selama periode waktu tersebut apabila seorang konsumen membelanjakan uangnya dalam besaran yang sama akan mendapatkan barang/jasa dalam jumlah maupun kualitas yang sama pula. Sebaliknya apabila terjadi kenaikan harga barang/jasa pada periode tertentu, maka barang/jasa yang diterima secara kuantitas akan berkurang atau jumlah yang diterima sama namun secara kualitas nilainya lebih rendah.

Pentingnya kestabilan harga dan pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Angka Inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat menurun sehingga standar hidup dari masyarakat juga akan menurun dan akan semakin menambah beban ekonomi masyarakat. Apabila tingkat inflasi dalam negeri lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai mata uang rupiah.

Sejak tahun 2020 BPS Kabupaten Temanggung hanya berwenang menghitung laju inflasi sampai level provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi daerah sampel. Untuk Kabupaten yang menjadi sampel dan dapat menjadi pembanding (*sister city*) untuk kabupaten Temanggung adalah Kota Purwokerto.

Inflasi *sister city* Kabupaten Temanggung tahun 2023 adalah sebesar 2,61 %(ytoy), dan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 sebesar 6,49% (ytoy). Pada Triwulan I 2024 inflasi *sister city* Kabupaten Temanggung adalah 2,96% (qtoq).

Tabel 3.7
Target Inflasi Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dan Nasional
Tahun 2023

Tahun	Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
RKPD 2024	3,0 +/- 1	3,0 +/- 1	2,0-4,0
Perubahan 2024	2,61	2,89	5,51

Sumber: Badan Pusat Statistik 2023

Berdasarkan kenaikan inflasi di tingkat nasional dan provinsi di Triwulan 1 Tahun 2024 dan mengingat keadaan perekonomian global yang saat ini mengalami lonjakan kenaikan harga komoditi bahan pangan dan energi akibat perang Geopolitik Ukraina dan Rusia serta kondisi di kawasan Timur Tengah, maka pemerintah Kabupaten Temanggung dapat melakukan beberapa upaya

untuk menjaga level inflasi dapat terjaga antara lain dengan:

1. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) melakukan sinergi, adaptasi dalam inovasi membuka kerjasama perdagangan antar daerah.
2. Sinergitas dapat ditunjukkan melalui program keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Dimana sinergitas salah satunya dapat dibangun dengan memperkuat infrastruktur sehingga kelancaran distribusi komoditi di Kabupaten Temanggung semakin meningkat.
3. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan harga, terutama harga bahan pokok.
4. Menjaga kesinambungan pasokan sepanjang waktu dan kelancaran distribusi komoditi di Kabupaten Temanggung.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan daerah diatur oleh pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah. Selain itu, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan daerah dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Keuangan Daerah disusun setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tuntutan akuntabilitas pengelolaan setiap entitas pemerintahan. Hal ini berarti setiap aspek pengelolaan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Untuk mewujudkan kondisi ini dan sejalan dengan

dinamika regulasi yang berlaku, maka setiap pemerintahan harus terus melakukan berbagai upaya pembaruan khususnya dalam pengelolaan keuangan, antara lain pemutakhiran produk perundang-undangan, penataan kelembagaan, pembenahan sistem dan prosedur, dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan.

Memperhatikan berbagai kondisi obyektif masyarakat dan aspirasi yang berkembang, perlu melahirkan beberapa agenda kunci pemerintahan daerah dalam penyiapan kebijakan pembangunan khususnya kebijakan keuangan daerah. Keberadaan agenda pemerintah daerah dimaksud merupakan hal yang penting, diantaranya sebagai tolok ukur dan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah. Penetapan agenda secara tepat merupakan langkah strategis dalam mengatasikrisis dan menjawab berbagai persoalan yang terjadi dewasa ini maupun tantangan yang mungkin akan timbul dimasa depan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi pedoman dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang berimplikasi pada kebijakan daerah dan desentralisasi fiskal sebagai akibat adanya pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan disertai pemberian sumber-sumber keuangan untuk mendanai urusan yang diserahkan kepada daerah. Tujuannya adalah untuk semakin meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, pelaksanaan pembangunan daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Desentralisasi fiskal dalam pelaksanaannya, menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Desentralisasi fiskal harus memperhatikan dan merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan negara. Hal ini merupakan konsekuensi dari pembagian

- kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah;
2. Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi adalah dengan memperhatikan stabilitas perekonomian nasional dan keseimbangan fiskal antara pusat dengan daerah dan antar daerah;
 3. Perimbangan keuangan negara antara pemerintah dan pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan atas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah dengan berdasarkan pada program (*money follow program*), penyelesaian isu strategis dan permasalahan di daerah, serta mendukung pencapaian target RPD tahun 2024-2026. APBD merupakan salah satu instrument penting kebijakan fiskal daerah, dimana kebijakan fiskal adalah kebijaksanaan pemerintah untuk mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi suatu daerah.

Kebijaksanaan fiskal pada umumnya bertujuan untuk mencapai kestabilan dalam perekonomian yang fungsi sebagai alat stabilisasi ekonomi, alat distribusi pendapatan, dan alat alokasi anggaran. Sebagai alat stabilisasi ekonomi, kebijakan fiskal memainkan perannya dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan laju inflasi yang pada gilirannya berpengaruh positif dalam pencapaian ekspansi ekonomi tinggi. Sebagai alat distribusi pendapatan, fungsi kebijakan fiskal tercermin sebagai media dalam penarikan pajak dari masyarakat dimana

masyarakat dengan penghasilan yang lebih banyak akan membayar pajak lebih tinggi dibandingkan masyarakat berpenghasilan rendah. Sedangkan fungsi kebijakan fiskal sebagai alat alokasi anggaran tercermin dari besaran belanja dalam APBD. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan fiskal dari pusat ke daerah, maka pemerintah pusat melakukan kebijakan desentralisasi fiskal ke daerah dengan maksud untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Keuangan daerah dengan demikian merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemampuan daerah akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya.

Kebijakan keuangan daerah erat kaitannya dengan keberhasilan program pembangunan daerah. Oleh karena itu kebijakan keuangan daerah harus sesuai dengan arah kebijakan pembangunan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan itu sendiri. Untuk mengurangi ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat, dan APBD yang sebagian besar hanya untuk membiayai pengeluaran rutin dan biaya operasional lainnya, maka pada tahun anggaran 2024 kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan penerimaan daerah, dan penajaman alokasi belanja serta upaya-upaya untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dari pemerintah pusat maupun provinsi.

3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah. Pengalihan pengelolaan beberapa jenis pajak dan retribusi yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah pusat yang diberikan kepada daerah melalui Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi potensi sumber-sumber yang ada.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah meliputi:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan transfer yang meliputi transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-daerah;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah.

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan berfluktuasi, seiring dengan peningkatan yang terjadi di masing-masing pos pendapatan/komponen pendapatan daerah. Dalam rangka mewujudkan kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan PAD, Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melakukan upaya- upaya antara lain melalui:

- a. Melakukan pemutakhiran data subyek/obyek sumber pendapatan asli daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memperbaiki sistem, mekanisme, dan prosedur pengelolaan dan pelayanan pendapatan asli daerah
- c. Membangun berbagai macam inovasi kemudahan pelayanan pendapatan daerah berupa Pembayaran pajak dan retribusi daerah secara online baik lewat

- mobile banking mauput ATM;
- d. Melakukan review atas peraturan yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah dan melakukan kajian guna mengembangkan dan menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah;
 - e. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia pemungut dan pengelola pendapatan asli daerah;
 - f. Meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi, serta memberikan penghargaan dan sanksi guna meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak;
 - g. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan;
 - h. Memperbaiki sistem pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi yang dilakukan pihak lain;
 - i. Peningkatan pendayagunaan aset milik pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan daerah;
 - j. Meningkatkan tata kelola dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
 - k. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal dengan perangkat daerah pengelola Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat berjalan efektif.
 - l. Meningkatkan pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah;
 - m. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar Perangkat Daerah yang menangani pendapatan daerah;
 - n. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat.

Sedangkan gambaran rinci realisasi pendapatan daerah dalam kurun waktu tiga tahun terakhir sebagaimana tabel 3.8 berikut:

Tabel 3.8
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2021-2023

URAIAN	TAHUN ANGGARAN		
	REALISASI 2021	REALISASI 2022	APBD 2023
PENDAPATAN DAERAH	1.971.005.990.029	1.895.472.010.883	1.920.329.183.722
1. Pendapatan Asli Daerah	363.128.342.571	308.693.982.914	303.730.612.722
a. Pajak Daerah	52.832.020.942	74.191.559.232	69.510.000.000
b. Retribusi Daerah	9.400.033.763	9.643.158.066	10.468.040.000
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	19.633.082.917	21.426.146.839	20.922.771.777
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	281.263.204.949	203.433.118.777	202.829.800.945
2. Pendapatan Transfer	1.537.846.595.458	1.585.778.027.969	1.616.598.571.000
a. Transfer Pemerintah Pusat	1.385.928.637.379	1.448.787.218.335	1.475.532.443.000
1) Dana Perimbangan	1.120.897.599.379	1.223.724.012.200	1.240.191.603.000
a) Dana Transfer Umum-DBH	66.832.564.275	50.975.465.200	67.611.875.000
b) Dana Transfer Umum-DAU	753.140.119.000	753.174.275.000	779.535.375.000
c) Dana Transfer Khusus-DAK Fisik	131.534.286.845	153.727.447.000	118.890.309.000
d) Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik	169.390.629.259	265.846.825.000	274.154.044.000
2) Dana Insentif Daerah	17.149.213.000	2.438.134.000	0
3) Dana Otonomi Khusus	0	0	0
4) Dana Keistimewaan	0	0	0
5) Dana Desa	247.881.825.000	245.879.771.000	235.340.840.000
b. Transfer antar Daerah	151.917.958.079	136.990.809.634	141.066.128.000
1) Pendapatan Bagi Hasil	114.087.366.818	117.486.242.600	127.861.128.000
2) Bantuan Keuangan	37.830.591.261	15.975.000.000	13.205.000.000
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	70.031.052.000	1.000.000.000	0
a. Hibah	571.300.000	1.000.000.000	0
b. Dana Darurat	0	0	0
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	69.459.752.000	0	0

Sumber: BPKPAD Tahun 2024

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Temanggung sampai dengan Perubahan RKPD tahun 2024 masih bertumpu pada sumber daya keuangan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dan transfer antar-daerah, belum mampu bertumpu pada kekuatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Perbandingan data pendapatan daerah Kabupaten Temanggung pada RKPD Tahun 2024, APBD Tahun Anggaran 2024 dan proyeksi Perubahan RKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9
Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Temanggung Perubahan RKPD Tahun 2024

URAIAN	RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024
PENDAPATAN DAERAH	2.139.513.842.692	1.961.368.868.951	2.012.926.874.802
1. Pendapatan Asli Daerah	308.302.105.739	329.883.442.623	329.883.442.623
a. Pajak Daerah	74.193.662.309	76.510.647.700	76.510.647.700
b. Retribusi Daerah	9.643.158.066	11.264.340.000	11.264.340.000
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	21.426.146.839	22.109.728.797	22.109.728.797
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	203.039.138.525	219.998.726.126	219.998.726.126
2. Pendapatan Transfer	1.831.211.736.953	1.631.485.426.328	1.683.043.432.179
a. Transfer Pemerintah Pusat	1.693.443.497.324	1.501.341.698.149	1.493.238.688.000
1) Dana Perimbangan	1.458.102.657.324	1.245.002.504.149	1.236.899.494.000
a) Dana Transfer Umum-DBH	72.695.149.149	70.916.484.149	62.813.474.000
b) Dana Transfer Umum-DAU	781.873.981.125	820.750.031.000	820.750.031.000
c) Dana Transfer Khusus-DAK Fisik	329.522.296.050	71.224.680.000	71.224.680.000
d) Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik	274.011.231.000	282.111.309.000	282.111.309.000
2) Insentif Fiskal		17.018.618.000	17.018.618.000
3) Dana Otonomi Khusus			
4) Dana Keistimewaan			
5) Dana Desa	235.340.840.000	239.320.576.000	239.320.576.000
b. Transfer antar Daerah	137.768.239.629	130.143.728.179	189.804.744.179
1) Pendapatan Bagi Hasil	122.143.728.179	130.143.728.179	130.143.728.179
2) Bantuan Keuangan	15.624.511.450	-	59.661.016.000
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0		
a. Hibah	0		
b. Dana Darurat	0		
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0		

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2024

Perubahan kebijakan Pendapatan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024 disebabkan karena:

- a. Penyesuaian proyeksi Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Target APBD Tahun Anggaran 2024;
- b. Penyesuaian proyeksi Pendapatan Transfer RKPD Tahun 2024 pada rekening pendapatan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah, dan Dana Desa berdasarkan penetapan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- c. Penyesuaian proyeksi Pendapatan Transfer RKPD Tahun 2024 pada rekening Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan bermotor dan Bantuan Keuangan dari Daerah Provinsi berdasarkan ketetapan alokasi Belanja Transfer Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan di Kabupaten Temanggung masih sangat kecil yaitu berkisar pada angka 14,41% pada RKPD 2024 atau 16,82% pada APBD 2024 dan 16,39% pada Perubahan RKPD 2024, sehingga diperlukan upaya-upaya khusus agar bisa lebih meningkat. Realisasi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah pada RKPD Tahun 2024, Penetapan APBD Tahun Anggaran 2024 dan proyeksi Perubahan RKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah
Perubahan RKPD Tahun 2024

URAIAN	RKPD 2024	PENETAPAN APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
Pendapatan Asli Daerah	308.302.105.739	329.883.442.623	329.883.442.623
Total Pendapatan Daerah	2.139.513.842.692	1.961.368.868.951	2.012.926.874.802
Persentase	14,41	16,82	16,39

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2024

3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Kebijakan alokasi belanja daerah berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Belanja Daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Realisasi belanja daerah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Gambaran rinci realisasi belanja daerah dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.11
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2020

URAIAN	TAHUN ANGGARAN	
	REALISASI 2019	REALISASI 2020
Belanja Tidak Langsung	1.168.792.735.222	1.213.213.275.176
Belanja pegawai	700.110.120.312	671.072.509.371
Belanja bunga		
Belanja subsidi		
Belanja hibah	62.473.200.000	68.809.177.692
Belanja bantuan sosial	23.579.612.500	7.162.252.000
Belanja bagi hasil kepada pemerintah desa / kelurahan	5.290.146.750	6.410.600.000
Belanja bantuan keuangan	376.839.655.660	409.802.732.000
Belanja tidak terduga	500.000.000	49.956.004.113
Belanja langsung	777.872.643.706	569.915.627.775
Belanja pegawai	108.344.310.197	122.876.914.568
Belanja barang dan jasa	407.120.036.216	344.955.658.684
Belanja modal	262.408.297.293	102.083.054.523
Total Jumlah Belanja	1.946.665.378.928	1.783.128.902.951

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2024

Tabel 3.12
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2021-2023

URAIAN	TAHUN ANGGARAN		
	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023
BELANJA DAERAH	1.877.969.167.294	2.005.470.211.214	2.063.276.383.157
1. Belanja Operasi	1.232.194.234.987	1.314.615.499.764	1.459.427.281.030
a. Belanja Pegawai	681.107.527.533	739.381.293.467	809.500.064.847

URAIAN	TAHUN ANGGARAN		
	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023
b. Belanja Barang dan Jasa	458.561.990.957	486.001.435.629	530.680.423.533
c. Belanja Bunga	0	0	0
d. Belanja Subsidi	0	0	0
e. Belanja Hibah	89.546.728.997	71.337.288.350	112.836.920.650
f. Belanja Bantuan Sosial	2.977.987.500	17.895.482.318	6.409.872.000
2. Belanja Modal	235.995.614.408	257.495.125.454	203.643.575.194
a. Belanja Tanah	58.015.740	0	1.000.000.000
b. Belanja Peralatan dan Mesin	75.015.739.240	99.830.914.103	74.726.723.446
c. Belanja Bangunan dan Gedung	83.641.790.248	115.718.010.011	52.073.140.248
d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	71.894.050.162	36.364.351.340	69.744.111.000
e. Belanja modal aset tetap lainnya	5.309.106.018	5.581.850.000	6.015.223.000
a. Belanja modal aset lainnya	76.913.000	0	84.377.500
3. Belanja Tidak Terduga	5.779.500.000	17.004.350.000	2.293.680.126
4. Belanja Transfer	403.999.817.899	416.355.235.996	397.911.846.807
a. Belanja Bagi Hasil	5.656.124.477	6.901.000.000	7.997.804.000
b. Belanja Bantuan Keuangan	398.343.693.422	409.454.235.996	389.914.042.807

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2024

Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah Perubahan RKPD Tahun 2024 digunakan fokus pada program-program prioritas yang akan dicapai, antara lain:

1. Melaksanakan program prioritas sesuai visi dan misi daerah;
2. Melaksanakan program prioritas yang mendukung arah kebijakan Prioritas Nasional dan prioritas Provinsi Jawa Tengah;
3. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
4. Pemenuhan belanja daerah yang bersifat wajib untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat; dan
5. Melaksanakan program dalam rangka pelaksanaan standar pelayanan minimal;

Proyeksi belanja daerah Kabupaten Temanggung RKPD tahun 2023, Penetapan APBD Tahun 2024, dan proyeksi Perubahan RKPD Tahun 2024 secara lengkap terinci pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Temanggung
Perubahan RKPD Tahun 2024

URAIAN	TAHUN ANGGARAN		
	RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024
BELANJA DAERAH	2.504.411.660.270	2.098.911.972.717	2.155.377.732.617
1. Belanja Operasi	1.612.177.601.872	1.567.384.486.681	1.580.090.954.857
a. Belanja Pegawai	794.819.179.190	891.973.887.571	888.517.588.347
b. Belanja Barang dan Jasa	582.511.246.032	552.080.765.984	569.466.333.252
c. Belanja Subsidi	90.000.000		
e. Belanja Hibah	204.493.173.650	111.182.630.126	111.478.025.258
f. Belanja Bantuan Sosial	30.264.003.000	12.147.203.000	10.629.008.000
2. Belanja Modal	488.050.473.465	128.746.154.911	175.455.746.635
a. Belanja Tanah	520000000		
b. Belanja Peralatan dan Mesin	37.037.433.547	38.311.179.922	83.221.904.134
c. Belanja Bangunan dan Gedung	360.803.860.970	43.104.932.470	41.372.622.880
d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	89.436.073.948	39.674.426.000	43.092.828.082
e. Belanja modal aset tetap lainnya	249.605.000	7.609.116.519	7.697.896.539
a. Belanja modal aset lainnya	3500000	46.500.000	70.495.000
3. Belanja Tidak Terduga	2.293.680.126	2.850.000.000	1.150.000.000
4. Belanja Transfer	401.889.904.807	399.931.331.125	398.681.031.125
a. Belanja Bagi Hasil	7.997.804.000	8.777.498.770	8.777.498.770
b. Belanja Bantuan Keuangan	393.892.100.807	391.153.832.355	389.903.532.355

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2024

Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung pada Perubahan RKPD Tahun 2024 disebabkan karena:

- a. Penyesuaian prioritas belanja berdasarkan kemampuan Keuangan APBD Tahun Anggaran 2024;
- b. Penyesuaian belanja pada kegiatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Dana Alokasi Khusus berdasarkan penetapan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
- c. Penyesuaian belanja pada kegiatan yang bersumber dana dari Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan bermotor dan Bantuan Keuangan dari Daerah Provinsi berdasarkan ketetapan alokasi Belanja Transfer Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran

2024.

Belanja Pegawai pada Perubahan RKPD tahun 2024 meningkat dibandingkan RKPD tahun 2024 dan menurun dibandingkan pada Penetapan APBD 2024 yaitu dari Rp. 794.819.179.190 pada RKPD 2024, dan APBD Tahun 2023 menjadi Rp.891.973.887.571 dan pada Perubahan RKPD tahun 2024 menjadi Rp.888.517.588.347. Peningkatan belanja pegawai tersebut dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan gaji staf pendukung.

Belanja Barang dan Jasa pada Perubahan RKPD tahun 2024 ditargetkan meningkat dibandingkan penetapan APBD 2024 yaitu dari Rp.552.080.765.984 pada APBD Tahun 2024 menjadi Rp. 569.466.333.252 pada Perubahan RKPD tahun 2024. Peningkatan belanja barang dan jasa tersebut didominasi oleh peningkatan belanja dari kegiatan yang antara lain digunakan untuk belanja pemeliharaan kendaraan dinas, belanja pemeliharaan gedung kantor, belanja Bahan bakar kendaraan, dan belanja makanan dan minuman rapat.

Belanja Hibah pada Perubahan RKPD tahun 2024 menurun dibandingkan penetapan APBD 2024 yaitu dari Rp. 111.182.630.126 pada APBD Tahun 2024 menjadi Rp. 111.478.025.258 pada Perubahan RKPD tahun 2024.

Belanja Bantuan Sosial pada Perubahan RKPD tahun 2024 menurun dibandingkan penetapan APBD 2024 yaitu dari Rp.12.147.203.000 pada APBD Tahun 2024 menjadi Rp.10.629.008.000 pada Perubahan RKPD tahun 2024. Penurunan bantuan sosial tersebut disebabkan oleh pengalihan belanja pemberian bantuan sosial ke belanja barang dan jasa.

Belanja Modal pada Perubahan RKPD tahun 2024 ditargetkan meningkat dibandingkan penetapan APBD 2024 yaitu dari Rp. 128.746.154.911 pada APBD Tahun 2024 menjadi Rp. 167.880.969.051 pada Perubahan RKPD tahun 2024. Peningkatan belanja modal tersebut disebabkan oleh tambahan kegiatan untuk belanja pengadaan Peralatan dan Mesin dan peningkatan jalan.

Belanja Tidak terduga pada Perubahan RKPD tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan penetapan APBD 2024. Belanja transfer pada Perubahan RKPD tahun 2024 juga mengalami penurunan dibandingkan penetapan APBD 2024.

3.2.2.1 Persentase Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Persentase realisasi belanja operasi terhadap belanja daerah Kabupaten Temanggung RKPD tahun 2024, APBD Tahun 2024, dan proyeksi Perubahan RKPD Tahun 2024 secara lengkap terinci pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Persentase Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah Perubahan RKPD Tahun 2024

Uraian	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
Belanja Operasi	1.612.177.601.872	1.567.384.486.681	1.580.090.954.857
Belanja Daerah	2.504.411.660.270	2.098.911.972.717	2.155.377.732.617
Persentase	64,37	74,68	73,31

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2024

3.2.2.2 Persentase Belanja Modal terhadap Belanja Daerah

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya dan aset lainnya.

Persentase Belanja Modal terhadap Belanja Daerah Kabupaten Temanggung RKPD tahun 2024, APBD Tahun 2024, dan proyeksi Perubahan RKPD Tahun 2024 secara

lengkap terinci pada tabel berikut:

Tabel 3.13
Persentase Belanja Modal terhadap Belanja Daerah
Perubahan RKPD Tahun 2024

Uraian	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
Belanja Modal	488.050.473.465	128.746.154.911	175.455.746.635
Belanja Daerah	2.504.411.660.270	2.098.911.972.717	2.155.377.732.617
Persentase	19,49	6,13	8,14

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2024

3.2.2.3 Persentase Belanja Tidak terduga terhadap Belanja Daerah

Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Persentase Belanja Tidak terduga terhadap Belanja Daerah Kabupaten Temanggung RKPD tahun 2024, APBD Tahun 2024, dan proyeksi Perubahan RKPD Tahun 2024 secara lengkap terinci pada tabel berikut:

Tabel 3.14
Persentase Belanja Tidak Terduga terhadap
Belanja Daerah Perubahan RKPD Tahun
2024

Uraian	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
Belanja Tidak terduga	2.293.680.126	2.850.000.000	1.150.000.000
Belanja Daerah	2.504.411.660.270	2.098.911.972.717	2.145.403.855.502
Persentase	0,092	0,136	0,054

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2024

3.2.2.4 Persentase Belanja Transfer terhadap Belanja Daerah

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya

dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Persentase belanja transfer terhadap Belanja Daerah Kabupaten Temanggung RKPD tahun 2024, APBD Tahun 2024, dan proyeksi Perubahan RKPD Tahun 2024 secara lengkap terinci pada tabel berikut:

Tabel 3.14
Persentase Belanja Transfer terhadap Belanja Daerah Perubahan RKPD Tahun 2024

Uraian	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
Belanja Transfer	401.889.904.807	399.931.331.125	398.681.031.125
Belanja Daerah	2.504.411.660.270	2.098.911.972.717	2.145.403.855.502
Persentase	16,047	19,054	18,583

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2024

3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang digunakan untuk menutup kekurangan defisit APBD atau untuk memanfaatkan surplus APBD. Anggaran defisit adalah anggaran belanja lebih besar daripada anggaran pendapatan, dan sebaliknya anggaran surplus adalah manakala anggaran belanja lebih kecil daripada anggaran pendapatan. Kebijakan pembiayaan adalah sebagai berikut.

a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) Besarnya SiLPA yang diperhitungkan dalam pembiayaan Tahun Anggaran berkenaan adalah hasil perhitungan SiLPA pada pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran sebelumnya setelah diaudit BPK

dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

2) Penerimaan pinjaman daerah

Manakala terjadi defisit anggaran, sedangkan SiLPA dan pencairan dana cadangan tidak dapat menutup keseluruhan defisit, maka akan dicukupi dengan penerimaan pinjaman daerah. Pinjaman daerah dapat bersumber dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah lain, maupun dari pihak ketiga.

3) Penerimaan pembiayaan yang lain

Penerimaan pembiayaan yang lain dapat berupa penerimaan kembali atas investasi non permanen dan penerimaan perhitungan pihak ketiga berupa retensi.

b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan dapat berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok hutang, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan yang lain. Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah sebagai berikut:

1) Penyertaan modal pemerintah daerah

Penyertaan modal pemerintah daerah merupakan investasi yang akan dilakukan pemerintah daerah adalah investasi jangka panjang yang bersifat permanen, yaitu bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Penyertaan modal berupa uang dan atau barang daerah disesuaikan sesuai dengan *roadmap* penyertaan modal daerah.

2) Pembayaran pokok hutang

Pembayaran pokok hutang merupakan pengeluaran pembiayaan guna pembayaran pokok hutang pemerintah daerah.

3) Pengeluaran pembiayaan yang lain

Pengeluaran pembiayaan yang lain merupakan pengeluaran perhitungan pihak ketiga berupa retensi atas pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya.

Proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Temanggung RKPD tahun 2024, APBD Tahun 2024, dan proyeksi Perubahan RKPD Tahun 2024 secara lengkap terinci pada tabel berikut:

Tabel 3.15
Pembiayaan Daerah Kabupaten Temanggung Perubahan RKPD
Tahun 2024

URAIAN	TAHUN ANGGARAN		
	RKPD 2024	APBD 2024	P-RKPD 2024
PEMBIAYAAN DAERAH	16.000.000.000	137.543.103.766	137.543.103.766
1. Penerimaan Pembiayaan	25.000.000.000	137.543.103.766	137.543.103.766
a. SiLPA	5.000.000.000	134.088.073.766	134.088.073.766
b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0	0	0
c. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0	0	0
d. Pencairan Dana Cadangan	20.000.000.000	3.455.030.000	3.455.030.000
2. Pengeluaran Pembiayaan	9.000.000.000	0	0
a. Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
b. Penyertaan Modal Daerah	9.000.000.000	0	0
c. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
PEMBIAYAAN NETTO	16.000.000.000	137.543.103.766	137.543.103.766

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung, 2024

Penerimaan pembiayaan RKPD 2024 lebih tinggi dibandingkan APBD Tahun 2024, sedangkan pada Perubahan RKPD tahun 2024 tidak mengalami perubahan dibandingkan APBD tahun 2024. Perbedaan angka penerimaan pembiayaan terletak pada komponen rekening Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang disesuaikan berdasarkan data yang ada pada Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023.

Pengeluaran pembiayaan pada Perubahan RKPD tahun

2024 ditargetkan sama dengan angka penetapan APBD 2024 yaitu dari Rp. 0.

Dari uraian tersebut diatas maka perubahan kerangka pendanaan untuk pembangunan daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.16
Kerangka Pendanaan Kabupaten Temanggung
Perubahan RKPD Tahun 2024

URAIAN	TAHUN ANGGARAN		
	RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024
PENDAPATAN DAERAH	2.139.513.842.692	1.961.368.868.951	2.012.926.874.802
1. Pendapatan Asli Daerah	308.302.105.739	329.883.442.623	329.883.442.623
a. Pajak Daerah	74.193.662.309	76.510.647.700	76.510.647.700
b. Retribusi Daerah	9.643.158.066	11.264.340.000	11.264.340.000
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	21.426.146.839	22.109.728.797	22.109.728.797
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	203.039.138.525	219.998.726.126	219.998.726.126
2. Pendapatan Transfer	1.831.211.736.953	1.631.485.426.328	1.683.043.432.179
a. Transfer Pemerintah Pusat	1.693.443.497.324	1.501.341.698.149	1.493.238.688.000
1) Dana Perimbangan	1.458.102.657.324	1.245.002.504.149	1.236.899.494.000
a) Dana Transfer Umum-DBH	72.695.149.149	70.916.484.149	62.813.474.000
b) Dana Transfer Umum-DAU	781.873.981.125	820.750.031.000	820.750.031.000
c) Dana Transfer Khusus-DAK Fisik	329.522.296.050	71.224.680.000	71.224.680.000
d) Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik	274.011.231.000	282.111.309.000	282.111.309.000
2) Insentif Fiskal	-	17.018.618.000	17.018.618.000
5) Dana Desa	235.340.840.000	239.320.576.000	239.320.576.000
b. Transfer antar Daerah	137.768.239.629	130.143.728.179	189.804.744.179
1) Pendapatan Bagi Hasil	122.143.728.179	130.143.728.179	130.143.728.179
2) Bantuan Keuangan	15.624.511.450	-	59.661.016.000
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	-
a. Hibah	-	-	-
b. Dana Darurat	-	-	-
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-
BELANJA DAERAH	2.504.411.660.270	2.098.911.972.717	2.145.403.855.502
1. Belanja Operasi	1.612.177.601.872	1.567.384.486.681	1.577.691.855.326
a. Belanja Pegawai	794.819.179.190	891.973.887.571	888.527.348.347

URAIAN	TAHUN ANGGARAN		
	RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024
b. Belanja Barang dan Jasa	582.511.246.032	552.080.765.984	567.423.368.671
c. Belanja Subsidi	90.000.000		
e. Belanja Hibah	204.493.173.650	111.182.630.126	111.169.130.308
f. Belanja Bantuan Sosial	30.264.003.000	12.147.203.000	10.572.008.000
2. Belanja Modal	488.050.473.465	128.746.154.911	167.880.969.051
a. Belanja Tanah	520.000.000		
b. Belanja Peralatan dan Mesin	37.037.433.547	38.311.179.922	76.119.593.632
c. Belanja Bangunan dan Gedung	360.803.860.970	43.104.932.470	41.402.622.880
d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	89.436.073.948	39.674.426.000	42.614.356.000
e. Belanja modal aset tetap lainnya	249.605.000	7.609.116.519	7.697.896.539
a. Belanja modal aset lainnya	3.500.000	46.500.000	46.500.000
3. Belanja Tidak Terduga	2.293.680.126	2.850.000.000	1.150.000.000
4. Belanja Transfer	401.889.904.807	399.931.331.125	398.681.031.125
a. Belanja Bagi Hasil	7.997.804.000	8.777.498.770	8.777.498.770
b. Belanja Bantuan Keuangan	393.892.100.807	391.153.832.355	389.903.532.355
b. Belanja Bantuan Keuangan	405.359.693.636	389.914.042.807	390.714.042.807
SURPLUS/DEFISIT	(364.897.817.578)	(137.543.103.766)	(132.476.980.700)
PEMBIAYAAN DAERAH	16.000.000.000	137.543.103.766	137.543.103.766
1. Penerimaan Pembiayaan	25.000.000.000	137.543.103.766	137.543.103.766
a. SiLPA	5.000.000.000	134.088.073.766	134.088.073.766
b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	-	-
d. Pencairan Dana Cadangan	20.000.000.000	3.455.030.000	3.455.030.000
2. Pengeluaran Pembiayaan	9.000.000.000	-	-
a. Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
b. Penyertaan Modal Daerah	9.000.000.000	-	-
c. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	(348.897.817.578)	-	5.066.123.066

Sumber: BPKPAD Kab Temanggung 2024

3.3 Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung selama 11 (sembilan) tahun dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 3.16
Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung

Tahun	Opini BPK-RI
2012	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2013	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2014	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelasan
2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2023	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: BPPKAD Kabupaten Temanggung, 2024

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung yaitu 12 (dua belas) kali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan 1 (satu) kali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelasan.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah 2024-2026

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Rencana Pembangunan Daerah atau RPD Tahun 2024-2026 memperhatikan keberlanjutan dan keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025. Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 adalah “Temanggung Makin Maju, Mandiri, Aman, Adil dan Sejahtera”, yang dijabarkan melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah yaitu:

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM;
2. Mewujudkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan keagamaan dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan batin;
3. Mewujudkan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah, dan cluster usaha tingkat pedesaan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah;
4. Mewujudkan ketersediaan dan pemerataan prasarana dan sarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi dan non ekonomi, pengembangan kawasan serta pengurangan kesenjangan antar wilayah;
5. Mewujudkan pembangunan daerah secara berkelanjutan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara lestari berbasis pada partisipasi aktif segenap pemangku kepentingan dan memperhatikan dimensi tata ruang.

Sebagai ukuran tercapainya visi “Temanggung yang makin maju, mandiri, aman, adil dan sejahtera”, maka pembangunan daerah dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut:

1. Sasaran misi pertama:

- a. Makin mantapnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dalam era otonomi daerah yang bersendikan pada pemahaman dan aplikasi prinsip-prinsip good governance secara optimal.
- b. Makin mantapnya kemampuan, kemandirian dan kapasitas pemerintah daerah dalam berbagai aspek seperti kewenangan, kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, keuangan dan aset daerah, data informasi berbasis e- government, dan pengawasan.
- c. Makin kuat dan berkembangnya kerjasama dan jejaring (networking) antara pemerintah daerah dengan berbagai kelompok usaha dan masyarakat, baik pada tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional.
- d. Makin optimalnya kinerja pelayanan publik yang diberikan oleh birokrasi dan aparatur pemerintah berbasis pada standar pelayanan minimum sehingga makin meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan pemerintah.
- e. Makin mantap dan konsistennya kebijakan dan regulasi yang ditetapkan pemerintah daerah dalam rangka ikut serta menjaga kondusifitas dan kestabilan pelaksanaan pembangunan berbagai bidang, khususnya politik dan hukum.
- f. Makin matangnya kepemimpinan lokal yang mampu membawa dan menciptakan suasana politik daerah yang demokratis dan kondusif bagi pelaksanaan pembangunan.
- g. Makin mantapnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju tegaknya supremasi hukum dan HAM.
- h. Makin berkurangnya angka kriminalitas dan konflik vertikal dan horizontal. Makin mantapnya kelembagaan lokal yang mampu

mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah.

2. Sasaran misi kedua:

- a. Makin mantap dan kondusifnya suasana perikehidupan bermasyarakat yang berasaskan pada nilai-nilai luhur budaya bangsa, nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Makin tumbuhnya masyarakat yang berkarakter, kompetitif, berbudi luhur, bermoral, berbudaya, beretos kerja, dinamis, menghormati dan menghargai serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.
- c. Makin mantapnya kualitas masyarakat secara lahir dan batin.

3. Sasaran misi ketiga:

- a. Makin mantapnya kondisi perekonomian daerah yang ditopang oleh kuatnya struktur ekonomi daerah yang berbasis pada sektor atau lapangan usaha unggulan daerah.
- b. Makin mantapnya prioritas pengembangan ekonomi daerah yang menekankan pada peran strategis pelaku ekonomi kerakyatan (usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi) dan makin berkembangnya sinergitas antara pelaku ekonomi.
- c. Makin kuatnya peranan sektor basis daerah yang tumbuh dalam model (linkage) sebagai suatu keunggulan kompetitif dan dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, berdaya saing global, menjadi motor penggerak perekonomian.
- d. Makin berkembangnya kawasan-kawasan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru pada tingkat pedesaan yang berbasis cluster usaha secara terintegrasi dari hilir ke hulu.

4. Sasaran misi keempat:

- a. Makin mantapnya kuantitas dan kualitas penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan berbagai prasarana dan sarana publik, terutama prasarana dan sarana pelayanan dasar masyarakat yang berdampak pada peningkatan kualitas sumber

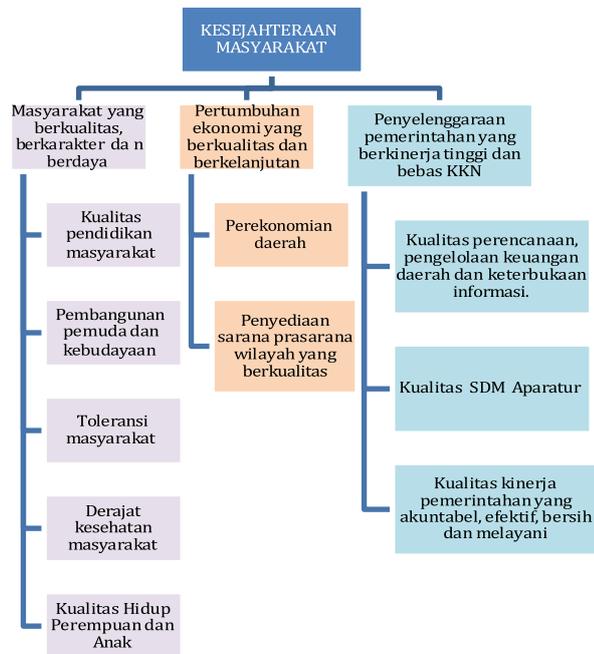
daya manusia.

- b. Makin kuatnya kemampuan daerah didukung dengan makin besarnya peran serta swasta dan masyarakat dalam penyediaan dan pembangunan prasarana dan sarana publik.
- c. Makin mantapnya pengembangan prasarana dan sarana pada pusat-pusat ekonomi untuk mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi masyarakat, yang berdampak pada pengurangan tingkat kesenjangan antar wilayah.

5. Sasaran misi kelima:

- a. Makin meningkatnya kesadaran dan partisipasi aktif dari semua komponen masyarakat pelaku pembangunan akan pentingnya pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada pada pengawalan yang ketat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan fungsi lingkungan hidup;
- b. Makin mantapnya peranan dokumen rencana tata ruang yang terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah disertai dengan langkah-langkah yang tegas dan konsisten dalam penegakkan hukum.
- c. Makin meningkatnya kualitas pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi dan seimbang
- d. Makin meningkatnya upaya mempertahankan fungsi daya dukung lahan pertanian terkait dengan kebijakan tanah lestari.

Berdasarkan isu strategis daerah yang telah dirumuskan sebelumnya, dan dengan memperhatikan RPJPD Tahun 2005- 2025, maka dibangun *logframe* kinerja Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung untuk Tahun 2024-2026 sebagai berikut:



Gambar 5.1
 Logframe Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan
 Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

Logframe tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Temanggung yang akan didukung oleh 3 tujuan kinerja utama yang didukung oleh 10 sasaran kinerja yaitu:

1. Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya dengan sasaran meliputi:
 - a. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat;
 - b. Meningkatnya pembangunan pemuda dan kebudayaan;
 - c. Meningkatnya toleransi masyarakat;
 - d. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
 - e. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak.
2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, dengan sasaran meliputi:
 - a. Meningkatnya perekonomian daerah;
 - b. Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas.
3. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan

bebas KKN, dengan sasaran meliputi:

- a. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi;
- b. Meningkatnya kualitas SDM aparatur;
- c. Meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani.

Dalam rangka pencapaian tujuan daerah maka sasaran daerah yang akan diwujudkan yaitu:

1. Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya

Sumber daya manusia Kabupaten Temanggung yang berkualitas, berkarakter dan berdaya diharapkan mampu menjawab dinamika dan tuntutan dalam era disrupsi, globalisasi, megatrend dan geopolitik yang tidak menentu tanpa mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi ciri khas Kabupaten Temanggung. Kompetisi di era *Industry* 4.0 dan *Society* 5.0 membutuhkan SDM yang mampu berkompetisi dan memiliki daya saing tinggi, namun tetap memiliki nilai sikap perilaku berbudaya yang berlandaskan nilai agama dan kearifan lokal yang ditandai dengan meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat, meningkatnya pembangunan pemuda dan kebudayaan, meningkatnya toleransi masyarakat, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak.

Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia yang didukung oleh indikator sasarnya adalah Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), Indeks Pembangunan Pemuda, Indeks Pembangunan Olahraga, Indeks Pembangunan Kebudayaan, Indeks Toleransi, Angka Harapan Hidup, Indeks Pembangunan Gender, Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Dalam menyikapi perkembangan ekonomi global dan nasional yang tidak menentu, sasaran yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan serta tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan tata ruang wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan

meningkatkan pendapatan perkapita sehingga terwujud peningkatan kesejahteraan masyarakat, penurunan pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung.

Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai sumber kehidupan dan penghidupan manusia menjadi salah satu kondisi kinerja yang harus diwujudkan, karena keberlanjutan proses pembangunan akan dipengaruhi oleh daya dukung dan daya tampung, yang dapat terwujud hanya apabila sumber daya alam dan lingkungan hidup dijaga, dipelihara, dan dilestarikan. Ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup fokus pada ketahanan sumber daya air, kualitas lingkungan hidup, penataan ruang, dan pengelolaan risiko bencana.

Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang didukung oleh indikator sasarnya yaitu meningkatnya Pendapatan Perkapita, turunnya Angka Kemiskinan, Distribusi Pendapatan Berdasarkan Kriteria Bank Dunia, menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), meningkatnya Indeks Pembangunan Infrastruktur, meningkatnya Indeks Kualitas lingkungan hidup (IKLH) dan Indeks Rasa Aman.

2. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik didukung dengan reformasi birokrasi dengan melakukan penataan dan perbaikan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Yang dimaksud pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani adalah pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, dan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara murah, cepat, tepat, dan profesional. Dalam tataran pelaksanaan, pelaksanaan Reformasi Birokrasi banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan.

Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya Indeks Reformasi birokrasi yang didukung oleh meningkatnya Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), meningkatnya Indeks Merit System, meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP),

meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Masing-masing sasaran pada setia misi telah diukur dengan indikator sasaran yang secara rinci dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Keterkaitan Antara Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan, Indikator Sasaran per Misi dengan Urusan/Bidang

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET PERUBAHAN 2024	Perangkat Daerah
1	2	3	4	6	10
1.	Terwujudnya masyarakat yang berkualitas dan berdaya	Indek Pembangunan Manusia (IPM)*	Angka	71,77	
	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,85	<i>Dindikpora</i>
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,6	<i>Dindikpora</i>
	Meningkatnya Pembangunan pemuda dan kebudayaan	Indek Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	3,56	<i>Dindikpora</i>
		Indeks Pembangunan Olahraga	Angka	3,61	<i>Dindikpora</i>
		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka	4,21	<i>Dinbudpar</i>
	Meningkatnya toleransi masyarakat	Indeks Toleransi	Angka	4,5	<i>Kesbangpol</i>
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	75,71	<i>Dinkes</i>
	Meningkatnya kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	96,75	<i>DPPPAPPKB</i>
2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,27	
	Meningkatnya perekonomian masyarakat	Pendapatan Per kapita	Ribu Rp	32,25	<i>Dinkominfo</i>
	Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat	Angka Kemiskinan	Angka	9,25-9,10	<i>Dinkominfo</i>

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET PERUBAHAN 2024	Perangkat Daerah
1	2	3	4	6	10
		Ketimpangan Pendapatan (Distribusi Pendapatan Berdasarkan Kriteria Bank Dunia)	Angka	18,8	Dinkominfo
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Angka	2,52	Dinkominfo
	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	%	74,95	DPUPR
		Indeks Kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Angka	63,47	DPRKPLH
		Indeks Rasa Aman	Angka	4,62	Satpol PP
3	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B	Bagian Organisasi
	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi.	IPKD	Angka	65,5	BPKPAD
	Meningkatnya kualitas SDM aparatur	Indeks Merit System	angka	0,5	BKPSDM
	Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Predikat	B	Bagian Organisasi
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat	76,61-88,30	Bagian Organisasi

4.2 Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2024

4.2.1 Tema Pembangunan Tahun 2024

Tabel 4.2
Tema Pembangunan Tahun 2024

Tema RKP Nasional Tahun 2024	Tema RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	Tema RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024
Mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Peningkatan perekonomian yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia, pemulihan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024

Berdasarkan tabel tersebut, tema pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2024 selaras dengan tema pembangunan baik RKP Nasional dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024. Tema pembangunan Kabupaten Temanggung tahun 2024 bersumber dari arah kebijakan pembangunan RPD 2024-2026 yaitu **“Meningkatkan kualitas pembangunan manusia, pemulihan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik.”**

4.2.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2024

4.2.2.1 Prioritas Nasional dalam RKP 2024

Kebijakan di tahun 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan 7 Prioritas Nasional (7 PN) yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN 1);
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (PN 2);
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing (PN 3);
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan (PN 4);
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar (PN 5);
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim (PN 6);

7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik (PN 7).

4.2.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana berikut:

- 1) Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada:
 - a) Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memberbesar rasio pendapatan asli daerah, didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah, melalui:
 - i. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata, serta meningkatkan daya saing dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
 - ii. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kelautan dan perikanan, berbasis korporasi;
 - iii. Peningkatan produktivitas pertambangan yang berwawasan lingkungan;
 - iv. Peningkatan iklim penanaman modal berbasis sektor unggulan, pengembangan industri berbasis *green investment*, pengembangan Kawasan Industri/Kawasan Peruntukan Industri (KI/KPI), pemetaan potensi sumberdaya pendukung industri berbasis wilayah, penguatan rantai pasok sektor unggulan, pemenuhan infrastruktur keras dan lunak yang memadai, serta pemberian kemudahan dan insentif penanaman modal di daerah;
 - v. Optimalisasi sumber-sumber dan potensi pendapatan

- daerah, peningkatan pengelolaan keuangan daerah, serta optimalisasi sumber pembiayaan alternatif;
- vi. Peningkatan ketenteraman dan ketertiban wilayah dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah;
- b) Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar melalui:
- i. Peningkatan pelayanan perijinan, akses permodalan, subsidi bunga, jaminan usaha, dan akses pasar bagi pelaku rintisan usaha (ultra mikro), serta penciptaan lapangan kerja yang layak;
 - ii. Peningkatan rumah layak huni, peningkatan kualitas kawasan permukiman, fasilitasi SPAM kabupaten/kota, pembangunan SPAM desa, dan fasilitasi pengelolaan air limbah domestik kabupaten/kota;
 - iii. Pemenuhan kebutuhan layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), pemenuhan secara bertahap kebutuhan SDM pekerja sosial, rehabilitasi sarana prasarana panti, peningkatan kemandirian penerima manfaat dalam panti, peningkatan ketepatan sasaran penyelenggaraan perlindungan sosial, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyelenggaraan peningkatan pendapatan kelompok fakir miskin, dan peningkatan kapasitas petugas Puskesmas;
 - iv. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah dan kewilayahan;
- c) Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;

- d) Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai dunia usaha dan dunia industri (DUDI), pemberdayaan angkatan kerja, penempatan tenaga kerja, dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta kompensasi;
 - e) Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan database petani dan peningkatan kompetensi dan keterampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran;
- 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata, dengan fokus pada:
- a) Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang inklusif dan merata melalui perluasan akses layanan pendidikan berbasis pada identifikasi pemetaan kebutuhan dan pendataan yang akurat, serta cakupan pembiayaan pendidikan terutama bagi siswa miskin, Anak Tidak Sekolah (ATS), serta inklusi; peningkatan tata kelola pendidikan didukung dengan penguatan koordinasi secara lintas stakeholder, serta optimalisasi peran fungsi instansi/lembaga/satuan pendidikan dan masyarakat; peningkatan kualitas kebijakan melalui penguatan 15 regulasi berorientasi pada akses mutu dan relevansi pendidikan yang berpihak pada kelompok rentan termasuk ATS;
 - b) Meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan dengan pemenuhan sarana prasarana, pemenuhan jumlah dan distribusi SDM kesehatan secara Rancangan Awal bertahap, penyusunan kebijakan, perbaikan baseline data, pemenuhan SOP; pemberdayaan masyarakat dalam penanganan permasalahan kesehatan; penguatan implementasi digitalisasi layanan di faskes primer dan rujukan yang terhubung dengan sistem layanan provinsi; identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas SDM kesehatan; peningkatan dukungan kabupaten/kota dalam

upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular khususnya malaria dan DBD, penyakit tidak menular khususnya jantung dan stroke, masalah kesehatan jiwa serta KLB/krisis kesehatan; pemetaan kapasitas fasyankes dalam pemberian layanan prioritas untuk perluasan cakupan kesehatan semesta; revitalisasi pelaksanaan pemanfaatan pekarangan untuk pemenuhan gizi keluarga; serta pendampingan keluarga dalam penyediaan dan pengolahan pangan bergizi dan berkualitas;

- c) Meningkatkan kesadaran dan peningkatan literasi masyarakat untuk hidup bugar, penyediaan ruang terbuka publik ramah aktivitas olahraga, serta pemetaan potensi atlet;
- d) Meningkatkan dan memperluas akses layanan literasi dengan pemetaan dan pendataan yang valid;
- e) Meningkatkan jiwa kepemimpinan, kepeloporan, serta pemberdayaan pemuda;
- f) Meningkatkan nilai-nilai budaya masyarakat melalui pemeliharaan nilai agama dan kearifan lokal, peningkatan ketersediaan data dan informasi kebudayaan yang akurat, peningkatan tata kelola kebudayaan, serta penguatan koordinasi, fasilitasi dengan kabupaten/kota, dan sinergi dengan pemerintah pusat;
- g) Meningkatkan pembangunan berbasis gender melalui peningkatan kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai aspek dengan didukung ketersediaan data pilah gender;
- h) Meningkatkan ketahanan keluarga dengan penurunan kekerasan berbasis gender, serta meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak melalui fasilitasi pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) kabupaten/kota, penguatan jejaring penyelenggaraan pelayanan terpadu milik provinsi, peningkatan pemahaman aparat mengenai penanganan restoratif bagi pelaku dan korban kekerasan berbasis gender, pendidikan anti kekerasan sejak usia dini,

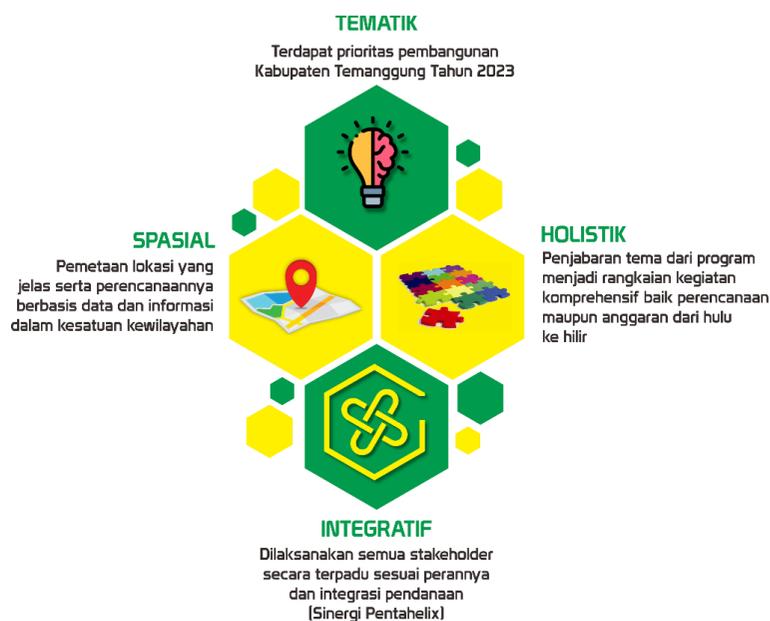
- pengecehan perkawinan anak melalui intervensi lintas sektor, peningkatan kualitas penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), serta peningkatan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 3) Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung, dengan fokus pada:
- a) Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dalam rangka mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan pemantauan terhadap badan air dan kualitas udara ambient, penyediaan sarana prasarana pengolahan limbah dan persampahan (TPST Regional, TPS 3R, IPAL Komunal), peningkatan pengawasan terhadap sumber pencemar air dan udara, peningkatan konservasi dan rehabilitasi hutan lahan berbasis masyarakat, peningkatan edukasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim pada lokasi super prioritas kerentanan iklim, penguatan sinergi implementasi pembangunan rendah karbon, dan penyusunan perencanaan tata ruang, serta optimalisasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b) Meningkatkan ketahanan energi untuk mewujudkan transisi energi yang terjangkau dan inklusif melalui pengembangan energi berkelanjutan, perluasan akses untuk masyarakat terhadap listrik dan energi, serta edukasi masyarakat tentang pemanfaatan energi alternatif;
 - c) Meningkatkan ketahanan sumber daya air melalui pemanfaatan sumber daya air dan pengendalian sumber daya air secara berkelanjutan, peningkatan konservasi air tanah melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah mengacu pada peta zona konservasi cekungan air tanah (CAT) Jawa Tengah, serta pembangunan sarana

- prasarana konservasi air tanah, pengembangan SPAM Regional, serta pengurangan luasan genangan banjir, penanganan rob, dan degradasi pesisir;
- d) Menurunkan risiko bencana melalui penyediaan kebijakan penanggulangan bencana dan dokumen perencanaan penanggulangan bencana di provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana, perluasan kemitraan untuk mobilisasi sumber daya penanggulangan bencana, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyediaan sumber literasi kebencanaan, sistem peringatan dini/*Early Warning System* (EWS), pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana, serta Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif, peningkatan kesiapan klaster penanggulangan bencana provinsi dan kabupaten/kota, penyusunan kebijakan mekanisme transfer risiko dalam pengurangan kerugian akibat bencana, penyusunan kebijakan perlindungan sosial adaptif, serta penguatan kebijakan pengendalian penduduk utamanya di wilayah risiko bencana tinggi;
- 4) Perbaiki tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif, dengan fokus pada:
- a) Mewujudkan birokrasi yang adaptif termasuk di dalamnya penyempurnaan peta proses bisnis pemerintahan berbasis teknologi informasi, evaluasi struktur organisasi berdasarkan peta proses bisnis, pengembangan kompetensi dan kinerja ASN, penataan ASN sesuai dengan kebutuhan organisasi, memetakan kesejangan kompetensi dan kinerja, penyelenggaraan pengembangan kompetensi tematik, serta penguatan manajemen organisasi berbasis risiko dan riset didukung dengan penyediaan data pembangunan berbasis IT;
- b) Mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif melalui perluasan jejaring dan kerjasama antarpemerintah, dan pemerintah dengan lembaga non-pemerintah.

4.2.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Prioritas pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2024 disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratik, dan politik. Proses perencanaan partisipatif, teknokratik dan politik merupakan hal yang sangat penting dimana usulan perencanaan mulai dari Musrenbang maupun Forum Khusus dengan penyelarasan dan sinkronisasi dengan pokok pikiran DPRD (aspirasi DPRD) dalam mencapai tujuan pembangunan sesuai arahan peraturan perundangan yang berlaku.

Selain itu, prioritas pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2024 juga disusun dengan menerapkan konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Dalam perencanaan pembangunan perlu merumuskan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tema pembangunan dalam jangka waktu 1 tahun. Selanjutnya, penjabaran tema dari program ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif dari hulu ke hilir (dalam sebuah kegiatan). Tidak luput pula, perencanaan pembangunan juga melibatkan beberapa pemangku kepentingan seperti Perangkat Daerah maupun stakeholder non Perangkat Daerah dalam sebuah sinergi untuk pelaksanaan perencanaan prioritas pembangunan. Tersedianya lokasi dari prioritas pembangunan tersebut juga harus jelas dengan menerapkan kesatuan kewilayahan sehingga satu lokasi dengan lainnya saling berkaitan erat.



Gambar 4.3

Konsep THIS dalam Prioritas Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Oleh karena itu, pembangunan tahun 2024 ditujukan untuk

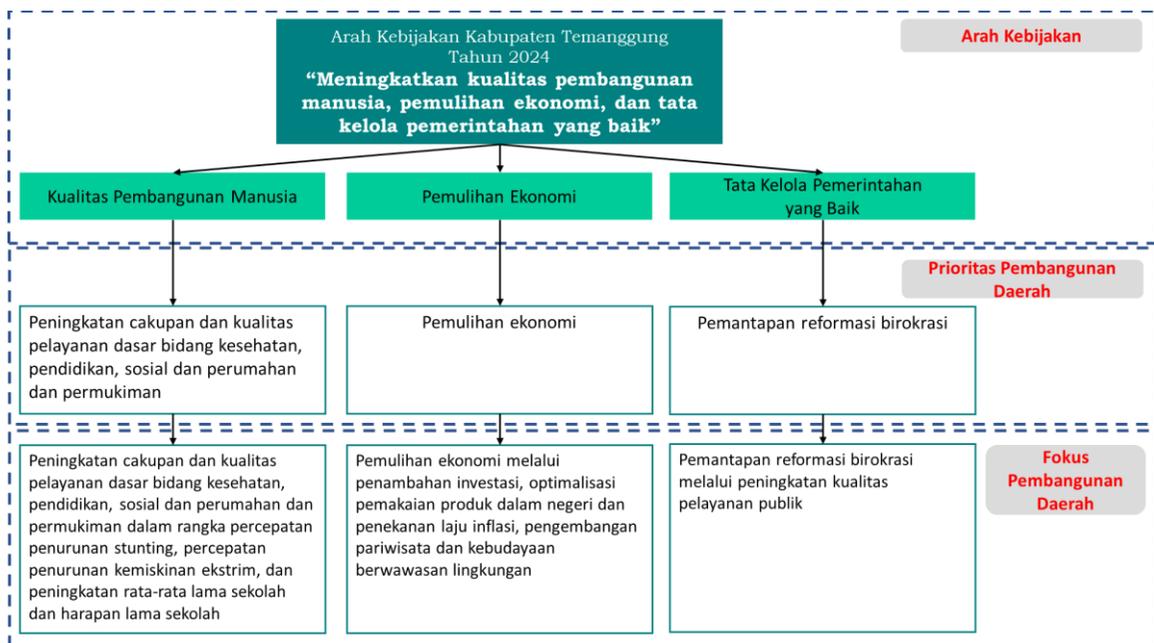
meningkatkan kualitas pembangunan manusia, pemulihan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik dengan **prioritas pembangunan** sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.3
Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten Temanggung	Fokus Pembangunan Kabupaten Temanggung
1	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan perumahan dan permukiman	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang Kesehatan, Pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, dan peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah
2	Pemulihan ekonomi	Pemulihan ekonomi melalui penambahan investasi, optimalisasi pemakaian produk dalam negeri, dan penekanan laju inflasi; pengembangan pariwisata dan kebudayaan berwawasan lingkungan
3	Pemantapan reformasi birokrasi	Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024

Keterkaitan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan arah kebijakan Perubahan RPD 2024-2026 dapat dijelaskan melalui gambar berikut:



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2023

Gambar 4.4

Keterkaitan dan Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Temanggung dengan Arah Kebijakan Perubahan RPJMD

Prioritas pembangunan Kabupaten dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 terkait erat dan selaras dengan arah kebijakan tahun 2024 pada Perubahan RPD 2024-2026. Prioritas pembangunan Kabupaten Temanggung dalam Perubahan RKPD 2024 sejumlah 3 prioritas seluruhnya terkait dan mendukung pada penjabaran masing-masing dari arah kebijakan meningkatkan kualitas pembangunan manusia, pemulihan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tingkat kesesuaian prioritas pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam Perubahan RKPD 2024 dengan arah kebijakan Perubahan RPD 2024-2026 dapat dilihat pada gambar 4.2 bahwa seluruh prioritas pembangunan daerah mendukung arah kebijakan RPD yang telah ditetapkan pada tahun 2024, dimana arah kebijakan menjadi pedoman dan acuan penentuan prioritas pembangunan daerah.

Perumusan prioritas Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dengan mempertimbangkan prioritas nasional, prioritas Provinsi Jawa Tengah, permasalahan pembangunan/isu strategis Kabupaten Temanggung, janji politik kepala daerah dan pokok-pokok pikiran DPRD. Secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Keselarasan dan keterkaitan dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Tengah

Sebagaimana penjelasan diatas, arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2024 secara nasional dituangkan ke dalam 7 Prioritas Nasional yang secara rinci dijabarkan sasaran pada masing-masing PN. Keterkaitan sasaran indikator sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam RKPD 2023 dengan sasaran PN RKP 2023 dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.4
Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Temanggung dengan
Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

No	Sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP *)	Sasaran RKPD Temanggung **)	Indikator Sasaran RKPD Temanggung
PN 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			
1	Terwujudnya transisi energi dan peningkatan kualitas sumber daya ekonomi sebagai pendukung pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya perekonomian daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan per Kapita • Angka Kemiskinan • Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia • Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
		Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pembangunan Infrastruktur • Indeks Kualitas lingkungan hidup (IKLH) • Indeks Rasa Aman
2	Terwujudnya percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui upaya revitalisasi industri dan penguatan daya saing usaha	Meningkatnya perekonomian daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan per Kapita • Angka Kemiskinan • Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia • Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
		Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pembangunan Infrastruktur • Indeks Kualitas lingkungan hidup (IKLH) • Indeks Rasa Aman
PN 2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan			
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI)	Tidak ada (karena Kabupaten Temanggung berada di Kawasan Barat Indonesia)	Tidak ada (karena Kabupaten Temanggung berada di Kawasan Barat Indonesia)
2	Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI)	Meningkatnya perekonomian Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan per Kapita • Angka Kemiskinan • Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia

No	Sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP *)	Sasaran RKPD Temanggung **)	Indikator Sasaran RKPD Temanggung
			<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
		Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata Lama Sekolah (RLS) • Harapan Lama Sekolah (HLS)
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Angka Harapan Hidup (AHH)
		Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pembangunan Gender (IPG)
PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing			
1	Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Angka Harapan Hidup (AHH)
		Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) • Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Angka Harapan Hidup (AHH)
		Meningkatnya perekonomian Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Angka Kemiskinan
3	Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata Lama Sekolah (RLS) • Harapan Lama Sekolah (HLS)
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Angka Harapan Hidup (AHH)
4	Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pembangunan Gender (IPG)
		Meningkatnya pembangunan pemuda dan kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) • Indeks Pembangunan Olahraga • Indeks Pembangunan Kebudayaan
5	Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan	Meningkatnya perekonomian Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan per Kapita • Angka Kemiskinan • Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia • Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

No	Sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP *)	Sasaran RKPD Temanggung **)	Indikator Sasaran RKPD Temanggung
		Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pembangunan Infrastruktur • Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
6	Meningkatnya produktivitas dan daya saing	Meningkatnya perekonomian Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan per Kapita • Angka Kemiskinan • Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia • Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
		Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata Lama Sekolah (RLS) • Harapan Lama Sekolah (HLS)
PN 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan			
1	Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya	Meningkatnya toleransi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Indek Toleransi
		Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Indek Rasa Aman
2	Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan	Meningkatnya pembangunan pemuda dan kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
3	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial	Meningkatnya toleransi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Indek Toleransi
		Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Indek Rasa Aman
4	Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	Meningkatnya toleransi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Indek Toleransi
		Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Indek Rasa Aman
5	Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata Lama Sekolah (RLS) • Harapan Lama Sekolah (HLS)
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Angka Harapan Hidup (AHH)

No	Sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP *)	Sasaran RKPD Temanggung **)	Indikator Sasaran RKPD Temanggung
6	Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata Lama Sekolah (RLS) • Harapan Lama Sekolah (HLS)
		Meningkatnya pembangunan pemuda dan kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) • Indeks Pembangunan Olahraga • Indeks Pembangunan Kebudayaan
PN 5 : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar			
1	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pembangunan Infrastruktur • Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
2	Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pembangunan Infrastruktur
3	Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pembangunan Infrastruktur • Indeks Kualitas lingkungan hidup (IKLH)
4	Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pembangunan Infrastruktur • Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
5	Meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi.	<ul style="list-style-type: none"> • IPKD
		Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) • Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
PN 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim			
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pembangunan Infrastruktur • Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
2	Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pembangunan Infrastruktur • Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
3	Meningkatkan capaian penurunan emisi	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pembangunan Infrastruktur

No	Sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP *)	Sasaran RKP Temanggung **)	Indikator Sasaran RKP Temanggung
	dan intensitas emisi (Gas Rumah Kaca) GRK terhadap <i>baseline</i>	wilayah yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
PN 7 : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik			
1	Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas Lembaga-lembaga demokrasi dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi.	<ul style="list-style-type: none"> IPKD
		Meningkatnya pengelolaan SDM aparatur	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Merit System
		Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	<ul style="list-style-type: none"> Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2	Optimalnya kebijakan luar negeri	Meningkatnya perekonomian daerah	<ul style="list-style-type: none"> Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Pendapatan per Kapita
3	Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap	Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	<ul style="list-style-type: none"> Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi.	<ul style="list-style-type: none"> IPKD
		Meningkatnya pengelolaan SDM aparatur	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Merit System
		Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	<ul style="list-style-type: none"> Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
5	Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	Meningkatnya toleransi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Indek Toleransi
		Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	<ul style="list-style-type: none"> Indek Rasa Aman

Sumber: *) Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022

**) RPD Kabupaten Temanggung 2024-2026 BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024

Sebagaimana telah tercantum pada RPD Kabupaten Temanggung 2024-2026 bahwa sasaran pembangunan daerah berjumlah 10 sasaran. Sedangkan, sasaran tiap prioritas nasional tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 yang berjumlah 29 sasaran. Melihat kepada penjelasan keterkaitan sasaran pada tabel diatas, maka dapat disimpulkan dari 10 sasaran pembangunan Kabupaten Temanggung terkait dan sesuai dengan 28 sasaran prioritas nasional tahun 2023. Terdapat 1 sasaran prioritas nasional yang tidak dapat didukung oleh sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung yaitu ‘meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI)’ pada PN 2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Hal ini dikarenakan secara kewilayahan Kabupaten Temanggung berada di wilayah barat Indonesia. Secara persentase tingkat keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah Perubahan RKPD dengan sasaran PN RKP Tahun 2024 sebesar 100% dikarenakan keseluruhan sasaran Perubahan RKPD terkait dengan sasaran PN RKP Tahun 2024 meskipun terdapat 1 sasaran PN tidak terkait dikarenakan kewilayahan.

Keselarasan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam Perubahan RKPD 2024 dengan prioritas nasional dan prioritas Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.5
Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Temanggung dengan
Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Prioritas Pembangunan
Nasional Tahun 2023

No	Prioritas Nasional 2024	Prioritas Provinsi Jawa Tengah 2024	Prioritas Kabupaten Temanggung 2024
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas	1. Pemulihan ekonomi
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman 2. Pemulihan ekonomi
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 2. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman 2. Pemantapan reformasi birokrasi
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan	1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman

No	Prioritas Nasional 2024	Prioritas Provinsi Jawa Tengah 2024	Prioritas Kabupaten Temanggung 2024
		berkualitas 2. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	2. Pemulihan ekonomi
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan perumahan dan permukiman 2. Pemulihan ekonomi 3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	1. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa prioritas pembangunan daerah Kabupaten Temanggung tahun 2024 yang berjumlah 3 prioritas selaras dengan 7 prioritas nasional dan prioritas Provinsi Jawa Tengah. Tingkat keselarasan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dengan prioritas nasional RKP tahun 2024 dapat dinilai 100% (karena keseluruhan prioritas pembangunan daerah selaras dengan prioritas nasional).

2. Konsistensi dengan Permasalahan/Isu Strategis

Permasalahan pembangunan Kabupaten Temanggung telah diidentifikasi berdasarkan kaitan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Sedangkan isu strategis Kabupaten Temanggung memperhatikan gambaran kondisi daerah dan permasalahan, capaian indikator kinerja serta arah kebijakan. Penyusunan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Temanggung berdasarkan isu strategis yang ada. Adapun permasalahan pembangunan/isu strategis telah tertuang pada bab II. Selanjutnya, permasalahan pembangunan tersebut diklasifikasikan kembali menurut masing-masing isu strategis yang ada guna pemetaan konsistensi terhadap prioritas pembangunan, strategi, dan arah kebijakan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.6

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
1	Penurunan Kemiskinan Ekstrem	<ul style="list-style-type: none"> Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung Masih adanya masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan pemerlu jaminan dan perlindungan sosial Pendataan PPKS belum optimal 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan perumahan dan permukiman Pemulihan ekonomi 	<ol style="list-style-type: none"> Penyempurnaan kebijakan bantuan sosial, keberpihakan kepada masyarakat miskin, rentan dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Meningkatkan pemberdayaan PPKS 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan cakupan sasaran pemberdayaan PPKS melalui bantuan sosial usaha ekonomi produktif dan kelompok usaha bersama
		<ul style="list-style-type: none"> Masih tingginya angka stunting di Kabupaten Temanggung Masih adanya kasus gizi buruk 		<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kesehatan keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pelayanan kesehatan primer Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan Peningkatan sistem ketahanan kesehatan rujukan Peningkatan sistem pembiayaan kesehatan Peningkatan sumber daya kesehatan
		<ul style="list-style-type: none"> Pertumbuhan ekonomi yang belum optimal 		<ol style="list-style-type: none"> Pemberdayaan ekonomi keluarga Meningkatkan pemberdayaan berbasis masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) Penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui BUMDes
		<ul style="list-style-type: none"> Masih adanya pengangguran 		<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kompetensi angkatan kerja Meningkatkan kinerja koperasi dan UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dan

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
				8. Meningkatkan laju berinvestasi dan kualitas pelayanan perizinan 9. Meningkatkan nilai usaha industri 10. Pemberdayaan ekonomi keluarga	pengoptimalan keberadaan UMKM serta kemauan berwirausaha ➤ Peningkatan pelayanan dan promosi investasi ➤ Peningkatan kelembagaan, permodalan dan pemberdayaan industri ➤ Pengembangan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)
		<ul style="list-style-type: none"> Masih adanya angka putus sekolah SD sederajat dan SMP sederajat Masih terdapat Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (AUSTS) 		11. Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang memadai ➤ Pemenuhan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ➤ Pengintegrasian pendidikan karakter dalam kurikulum ➤ Peningkatan peran masyarakat dalam pendidikan karakter
		<ul style="list-style-type: none"> Masih adanya infrastruktur dalam kondisi kurang baik seperti jembatan dan jaringan irigasi Masih adanya RTLH Masih diperlukannya upaya untuk meningkatkan akses sanitasi layak menuju akses sanitasi aman 		12. Meningkatkan infrastruktur dan sarana prasarana wilayah	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi infrastruktur dan sarana prasarana wilayah ➤ Pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana wilayah
		<ul style="list-style-type: none"> Masih diperlukan upaya-upaya untuk tetap mencukup ketersediaan pangan di Kabupaten Temanggung 		13. Meningkatkan kedaulatan dan kemandirian pangan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peningkatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan ➤ Peningkatan ketersediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		<ul style="list-style-type: none"> Diversifikasi pangan masih banyak menemui masalah 			<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan penyediaan dan distribusi pangan pokok atau pangan lainnya Peningkatan sertifikasi keamanan pangan
2	Penurunan Stunting	<ul style="list-style-type: none"> Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung 	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, Pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	<ol style="list-style-type: none"> Penyempurnaan kebijakan bantuan sosial, keberpihakan kepada masyarakat miskin, rentan dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Meningkatkan pemberdayaan PPKS 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan cakupan sasaran pemberdayaan PPKS melalui bantuan sosial usaha ekonomi produktif dan kelompok usaha bersama
		<ul style="list-style-type: none"> Masih tingginya angka stunting di Kabupaten Temanggung Masih adanya kasus gizi buruk Masih tingginya kasus kematian ibu Masih adanya kasus kematian bayi dan balita Masih perlunya peningkatan layanan ibu hamil, ibu bersalin dan kesehatan balita sesuai standar Masih adanya fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah yang belum terakreditasi utama 		<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kesehatan keluarga Optimalisasi intervensi spesifik percepatan penurunan stunting 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pelayanan kesehatan primer Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan Peningkatan sistem ketahanan kesehatan rujukan Peningkatan sistem pembiayaan kesehatan Peningkatan sumber daya kesehatan Peningkatan intervensi spesifik percepatan penurunan stunting melalui sinergi perangkat daerah
		<ul style="list-style-type: none"> Masih terdapat Anak Usia Sekolah Tidak 		<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang memadai Pemenuhan kualitas dan kuantitas

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>Sekolah (AUSTS)</p> <ul style="list-style-type: none"> Masih adanya angka putus sekolah SD sederajat dan SMP sederajat 			<p>tenaga pendidik dan tenaga kependidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengintegrasian pendidikan karakter dalam kurikulum Peningkatan peran masyarakat dalam pendidikan karakter
		<ul style="list-style-type: none"> Masih adanya rumah tidak sehat Masih adanya RTLH Masih diperlukannya upaya untuk meningkatkan akses sanitasi layak menuju akses sanitasi aman 		6. Meningkatkan infrastruktur dan sarana prasarana wilayah	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi infrastruktur dan sarana prasarana wilayah Pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana wilayah
		<ul style="list-style-type: none"> Masih diperlukan upaya-upaya untuk tetap mencukupi ketersediaan pangan di Kabupaten Temanggung Diversifikasi pangan masih banyak menemui masalah 		7. Meningkatkan kedaulatan dan kemandirian pangan	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan Peningkatan ketersediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan Peningkatan penyediaan dan distribusi pangan pokok atau pangan lainnya Peningkatan sertifikasi keamanan pangan
		<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya pelaksanaan gerakan sayang ibu dan bayi 		8. Meningkatkan kebijakan responsive gender	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas PUG dan perlindungan perempuan dan anak
3	Kualitas Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> Masih tingginya angka stunting di Kabupaten Temanggung Masih adanya kasus gizi buruk Masih tingginya kasus kematian ibu 	1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kesehatan keluarga Optimalisasi intervensi spesifik percepatan penurunan stunting 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pelayanan kesehatan primer Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan Peningkatan sistem ketahanan kesehatan rujukan Peningkatan sistem pembiayaan kesehatan

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		<ul style="list-style-type: none"> Masih adanya kasus kematian bayi dan balita Masih perlunya peningkatan layanan ibu hamil, ibu bersalin, dan kesehatan balita sesuai standar Masih tingginya angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup Masih adanya sasaran <i>unmetneed</i> 	perumahan dan permukiman 2. Pemulihan ekonomi		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peningkatan sumber daya kesehatan ➤ Peningkatan intervensi spesifik percepatan penurunan stunting melalui sinergi perangkat daerah
		<ul style="list-style-type: none"> Perlunya peningkatan penanganan persampahan di Kabupaten Temanggung Masih tingginya lahan potensial kritis Perlunya peningkatan konservasi lingkungan hidup Masih adanya lahan potensial kritis yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung Adanya fenomena perubahan iklim yang berpotensi memberikan dampak merugikan 		3. Optimalisasi pemanfaatan kawasan sesuai peruntukannya 4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Optimalisasi pemanfaatan budidaya ➤ Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan lingkungan hidup sebagai dasar pengelolaan lingkungan hidup ➤ Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup ➤ Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup ➤ Peningkatan pengelolaan sampah
		<ul style="list-style-type: none"> Angka rata-rata lama sekolah belum mencapai Wajar Dikdas 9 Tahun Masih adanya angka 		5. Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang memadai ➤ Pemenuhan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>putus sekolah SD sederajat dan SMP sederajat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya fasilitas pendidikan ruang kelas dalam kondisi kurang baik • Masih terdapat SMP yang belum terakreditasi minimal • Masih adanya peserta pendidikan kesetaraan yang belum lulus • Masih adanya penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan • Masih terdapat Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (AUSTS) • Belum optimalnya cakupan anak usia sekolah dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 			<p>kependidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengintegrasian pendidikan karakter dalam kurikulum ➤ Peningkatan peran masyarakat dalam pendidikan karakter
		<ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya tenaga kerja yang belum memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan 		6. Meningkatkan kompetensi angkatan kerja	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan dan Pelatihan

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pemberdayaan terhadap perempuan • Belum optimalnya pemenuhan hak anak 		7. Meningkatkan kebijakan responsif gender	➤ Peningkatan kapasitas PUG dan perlindungan perempuan dan anak
		<ul style="list-style-type: none"> • Masih minimnya prestasi bidang Kepemudaan dan Olah Raga • Atlet berprestasi dari tahun ke tahun cenderung menurun • Masih rendahnya capaian peminjam buku di perpustakaan • Belum optimalnya upaya pelestarian koleksi nasional dan koleksi naskah kuno di Temanggung 		8. Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga 9. Meningkatkan literasi masyarakat 10. Meningkatkan pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal	➤ Peningkatan pembinaan dan pemenuhan sarana prasarana pemuda dan olahraga ➤ Peningkatan sarana dan kapasitas sumber daya manusia perpustakaan ➤ Pembudayaan gemar membaca di masyarakat ➤ Peningkatan pembinaan pelaku seni budaya dan pengelolaan cagar / warisan budaya
4	Percepatan Pemulihan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan ekonomi yang belum optimal 	1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman 2. Pemulihan ekonomi	3. Pemberdayaan ekonomi keluarga 4. Meningkatkan pemberdayaan berbasis masyarakat	➤ Pengembangan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) ➤ Penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui BUMDes
		<ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya infrastruktur dalam 		5. Meningkatkan infrastruktur dan sarana prasarana wilayah	➤ Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi infrastruktur dan sarana prasarana wilayah

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>kondisi kurang baik seperti jembatan dan Jaringan irigasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Masih adanya RTLH 			<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana wilayah
		<ul style="list-style-type: none"> Penanganan bencana kebakaran belum optimal Tingkat waktu taggap dalam merespon setiap laporan kejadian bencana juga perlu ditingkatkan, termasuk penanganan korban pasca bencana Masih diperlukan peningkatan penanganan bencana untuk mencapai target risiko bencana, cakupan desa tangguh bencana, desa mitigasi terhadap desa rawan bencana 		6. Meningkatkan perlindungan dan keamanan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas sumberdaya dan partisipasi masyarakat dalam upaya memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan
		<ul style="list-style-type: none"> Masih adanya pengangguran 		<p>7. Meningkatkan kompetensi angkatan kerja</p> <p>8. Meningkatkan kinerja koperasi dan UMKM</p> <p>9. Meningkatkan laju berinvestasi dan kualitas pelayanan perizinan</p> <p>10. Meningkatkan nilai usaha industri</p> <p>11. Pemberdayaan ekonomi keluarga</p>	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dan pengoptimalan keberadaan UMKM serta kemauan berwirausaha Peningkatan pelayanan dan promosi investasi Peningkatan kelembagaan, permodalan dan pemberdayaan industri Pengembangan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana perhubungan Masih ditemukannya kendaraan bermoto yang tidak laik jalan serta masih adanya terminal tipe C dalam kondisi kurang baik 		12. Meningkatkan layanan perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas SDM dan sarpras layanan perhubungan
		<ul style="list-style-type: none"> Masih terdapat koperasi tidak sehat yang memerlukan pengawasan Banyak usaha kecil dan menengah muncul namun tidak naik kelas Masih diperlukannya penguatan dalam pembinaan, pendidikan dan Pelatihan dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif Pelunya peningkatan pemberian dukungan fasilitasi pengembangan usaha bagi usaha mikro Masih rendahnya investasi penanaman modal asing (PMA) Perkembangan jumlah pelaku/ kelompok seni dan budaya belum berbanding lurus dengan penyelenggaraan 		13. Meningkatkan nilai usaha perdagangan 14. Meningkatkan jumlah pendapatan sektor pariwisata 15. Meningkatkan nilai usaha industry 16. Meningkatkan laju investasi dan kualitas pelayanan perizinan 17. Meningkatkan kinerja koperasi dan UMKM 18. Pemberdayaan ekonomi keluarga 19. Meningkatkan pemberdayaan berbasis masyarakat 20. Meningkatkan pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi sistem dan Jaringan perdagangan Peningkatan akses pemasaran dan penggunaan produk lokal Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata Peningkatan kapasitas masyarakat pengelola destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif Peningkatan kelembagaan, permodalan, dan pemberdayaan industri Peningkatan pelayanan dan promosi investasi Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan koperasi Pengembangan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) Penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui pemberdayaan BUMDes Peningkatan pembinaan pelaku seni budaya dan pengelolaan cagar / warisan budaya

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>even-even seni dan budaya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kualitas SDM yang belum merata • Masih ditemukan kelompok kesenian yang tidak produktif • Masih belum optimalnya pembinaan sejarah Kabupaten Temanggung • Perkembangan objek wisata kurang optimal • Masih rendahnya ketertarikan dan pemahaman desa untuk membentuk desa wisata • Masih rendahnya sumber daya pelaku wisata dan ekonomi kreatif pendukung wisata • Kualitas sarana dan prasarana pasar belum kompetitif untuk bersaing dengan pasar modern • Ketertiban pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan masih kurang • Diperlukan perbaikan pada sarana prasarana pendukung pasar • Belum optimalnya pembinaan industri 			

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		penghasil cukai			
		<ul style="list-style-type: none"> • Perlu peningkatan produksi perikanan tangkap di perairan umum • Masih perlunya peningkatan swasembada pada ikan konsumsi • Masih perlunya peningkatan pembinaan nelayan perairan umum • Penurunan luas panen tanaman pangan • Penurunan produksi tanaman pangan • Produktivitas tanaman pangan mengalami penurunan berbanding lurus dengan berkurangnya jumlah produksi dan luas panen • Produktivitas hasil peternakan mengalami penurunan • Terbatasnya pengetahuan petani dalam pengendalian OPT 		<ol style="list-style-type: none"> 21. Meningkatkan produksi hasil pertanian dan peternakan 22. Meningkatkan kedaulatan dan kemandirian pangan 23. Meningkatkan produksi perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Peningkatan pemenuhan penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pertanian dan peternakan ➢ Peningkatan pengendalian kesehatan hewan, kesehatan, masyarakat veteriner, dan penanggulangan bencana pertanian dan peternakan ➢ Peningkatan dan pembinaan sumber daya manusia pertanian dan peternakan ➢ Peningkatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan ➢ Peningkatan ketersediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan ➢ Peningkatan penyediaan dan distribusi pangan pokok atau pangan lainnya ➢ Peningkatan sertifikasi keamanan pangan ➢ Peningkatan kapasitas pembudidaya ikan ➢ Peningkatan mutu dan keamanan hasil perikanan ➢ Peningkatan pengendalian dan pengawasan penyediaan benih ikan
5	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil harus dijaga selalu konsistensinya 	Pemantapan reformasi birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan tertib administrasi kependudukan 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Peningkatan kapasitas SDM dan sarpras administrasi kependudukan

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		<ul style="list-style-type: none"> Masih adanya penduduk yang belum memiliki KTP El 			
		<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya pelayanan komunikasi dan informatika untuk masyarakat Masih terdapat area publik yang belum mendapat fasilitasi akses internet dari sejumlah area publik yang ada Masih adanya PPID Badan Publik yang tidak aktif Masih adanya dualisme data statistik yang berasal dari kegiatan sektoral yang dikelola Pemkab dan data statistik yang sama yang dikelola BPS dari kegiatan statistik dasar Perlu peningkatan pengelolaan data statistik sektoral Perlu peningkatan validitas data produsen Perlunya peningkatan koordinasi dalam pengumpulan data dari produsen data di luar Pemkab Temanggung 		<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan keterbukaan informasi publik Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel Meningkatkan kualitas pengembangan layanan sistem pemerintahan secara elektronik Meningkatkan kualitas pelayanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan layanan pemerintah berbasis teknologi informasi Peningkatan upaya pendampingan dan asistensi pada perangkat daerah Optimalisasi integrasi layanan Sistem Pemerintahan secara elektronik Peningkatan kapasitas pengelola layanan Sistem Pemerintah secara elektronik Peningkatan kapasitas SDM dan sarpras pelayanan publik

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya kualitas keamanan informasi Pemerintah Daerah • Belum optimalnya jumlah sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan dan penilaian resiko 			
		<ul style="list-style-type: none"> • Diperlukan peningkatan perbaikan dalam pengelolaan arsip 		6. Meningkatkan pengelolaan kearsipan	➤ Peningkatan tata kelola arsip daerah
		<ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya Peraturan Daerah yang belum ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati • Dokumentasi perundangan melalui JDIH belum berjalan dengan efektif • Upaya implementasi Reformasi Birokrasi masih perlu ditingkatkan • Kualitas pelayanan publik oleh masing-masing perangkat daerah belum optimal • Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung masih memerlukan perbaikan dan 		7. Meningkatkan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD 8. Meningkatkan kualitas kebijakan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual 9. Meningkatkan kualitas bantuan hukum, layanan hukum dan layanan informasi pelayanan hukum 10. Meningkatkan kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi 11. Meningkatkan pelayanan kerumahtanggan dan keprotokolan yang terfasilitasi	➤ Pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD ➤ Peningkatan kualitas kebijakan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual ➤ Peningkatan kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum ➤ Peningkatan kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan ➤ Peningkatan dukungan pelayanan kerumahtanggan dan keprotokolan

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>peningkatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih terdapat pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang terhambat • Belum seluruh BUMD yang mendapatkan opini WTP atas pemeriksaan KAP • Diperlukan pengoptimalan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa • Diperlukan pengoptimalan dalam penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan • Perlunya peningkatan pencatatan non tender atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa • Pengesahan raperda yang tepat waktu cenderung menurun • Masih rendahnya jumlah perda inisiatif dibandingkan dengan raperda yang diusulkan oleh eksekutif • Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan aspirasi sesuai dengan yang direncanakan 			

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		<ul style="list-style-type: none"> • Perlunya peningkatan keoptimalan persentase ketercapaian kinerja pembangunan daerah • Perlunya peningkatan konsistensi kegiatan rencana pembangunan • Perlunya peningkatan kualitas pengendalian monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan 		<p>12. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan inovasi daerah</p> <p>13. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Peningkatan kualitas sumber daya perencanaan ➢ Peningkatan peran serta pentahelix dalam perencanaan pembangunan ➢ Peningkatan budaya inovasi di lingkungan perangkat daerah dan masyarakat ➢ Peningkatan upaya pendampingan dan asistensi pada perangkat daerah
		<ul style="list-style-type: none"> • Perlu peningkatan indeks pengelolaan keuangan daerah (IKPD) • Perlunya peningkatan penyusunan dokumen penganggaran tepat waktu • Perlu peningkatan konsistensi penganggaran terhadap perencanaan 		14. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pengelolaan Barang Milik Daerah
		<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya penerapan sistem merit dalam pengelolaan kepegawaian di Kabupaten Temanggung • Perlu peningkatan keterwakilan jumlah perempuan dalam JPT, JA, dan JP dalam rangka 		15. Mewujudkan SDM aparatur yang berkinerja tinggi	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Peningkatan tata kelola manajemen ASN berdasarkan sistem merit

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>pengarusutamaan gender</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pelaksanaan updating data kepegawaian • Belum optimalnya pengikutsertaan ASN dalam diklat • Belum adanya sumber daya manusia khususnya fungsional peneliti bidang penelitian dan pengembangan 			
		<ul style="list-style-type: none"> • Upaya peningkatan indeks persepsi anti korupsi • Perlu peningkatan optimalisasi maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah • Perlu peningkatan pengawasan baik perencanaan, keuangan maupun penyelenggaraan kinerja 		16. Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	➤ Peningkatan kualitas dan kuantitas APIP
		<ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya sarana dan prasarana lokal kelurahan di kecamatan dalam kondisi baik • Masih ditemukan lembaga masyarakat kelurahan yang tidak 		17. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 18. Meningkatkan perlindungan dan keamanan masyarakat	➤ Peningkatan kapasitas SDM dan sarpras pelayanan publik ➤ Peningkatan kapasitas sumberdaya dan partisipasi masyarakat dalam upaya memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
		aktif <ul style="list-style-type: none"> • Perlu pengoptimalan kualitas layanan publik di kecamatan • Perlunya upaya untuk mendorong masyarakat melakukan pembayaran PBB tepat waktu 			
		<ul style="list-style-type: none"> • Diperlukan peningkatan cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan • Pencegahan penyalahgunaan narkoba • Sumber daya pengelola yang masih rendah • Potensi desa masih dipandang rendah dan belum mampu menopang hidup 		19. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peningkatan kapasitas sumber daya dan partisipasi masyarakat dalam upaya memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024

3. Pokok-Pokok Pikiran Tahunan DPRD

Berdasarkan amanat Pasal 178 Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

Pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran, selanjutnya hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan.

Dalam rangka memberikan masukan terhadap Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024, DPRD Kabupaten Temanggung memberikan sumbangan pokok-pokok pikiran yang harus diperhatikan dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024 yang selaras dengan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Temanggung.

DPRD memberikan penekanan khususnya pada isu strategis percepatan penanganan stunting dan percepatan penurunan kemiskinan ekstrem sesuai target Presiden 0% pada tahun 2024 serta pemulihan ekonomi, percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi agar dilakukan secara sinergi antar Perangkat Daerah, Perangkat Daerah dengan masyarakat, maupun sinergi yang kuat antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah di atasnya (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi), di samping itu, juga dilakukan dukungan terhadap pengembangan potensi sumber daya unggulan lokal (hortikultura, Kopi, Tembakau, Panili, Ternak dan lain-lain) dan peningkatan jejaring pemasaran yang selama ini masih menjadi kendala dari pengembangan potensi unggulan lokal tersebut.

Keterkaitan prioritas pembangunan Kabupaten Temanggung yang memuat janji tahunan kepala daerah dan pokok-pokok pikiran

tahunan DPRD sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.7

Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung dengan Janji Tahunan Kepala Daerah dan Pokok-Pokok Pikiran Tahunan DPRD Tahun 2024

NO	ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN	POKOK-POKOK PIKIRAN TAHUNAN DPRD
1.	Penurunan Kemiskinan Ekstrim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman 2. Pemulihan ekonomi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi 2. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem 3. Percepatan Penanganan Stunting 4. Pengembangan Potensi Sumber Daya Unggulan Lokal (Holtikultura, Kopi, Tembakau, Panili, Ternak Dan Lain-Lain) 5. Peningkatan Jejaring Pemasaran
2.	Stunting	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman 	
3.	Kualitas pembangunan manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman 2. Pemulihan ekonomi 	
4.	Pemulihan Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman 2. Pemulihan ekonomi 	
5.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan reformasi birokrasi 	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 selanjutnya dijabarkan menjadi **program prioritas** sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
4. Program Penyelenggaraan Jalan
5. Program Kawasan Permukiman
6. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
8. Program Peningkatan Kerjasama Desa
9. Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
10. Program Perlindungan Perempuan
11. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
12. Program Pengelolaan Persampahan
13. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
14. Program Informasi dan Komunikasi Publik
15. Program Aplikasi Informatika
16. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
17. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
18. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
19. Program Pengembangan Kebudayaan
20. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
21. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
22. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
23. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
24. Program Kepegawaian Daerah
25. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
26. Program Penyelenggaraan Pengawasan

27. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
28. Program Peningkatan Ketenteraman, dan Ketertiban Umum
29. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter
Kebangsaan

Program prioritas merupakan program yang diselenggarakan untuk mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Tabel 4.8
Keterkaitan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah, Prioritas
Pembangunan dan Program Prioritas

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Prioritas	Penanggung Jawab (OPD)	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,85	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan perumahan dan permukiman	Program Pengelolaan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase APM PAUD (5-6 tahun) • Persentase APK PAUD (0-6 tahun) • Persentase APK PAUD (4-6 tahun) • Persentase APK PAUD (5-6 tahun) • Persentase Pendidik PAUD • Berkualifikasi Akademik minimal S1/D4 Pendidikan Guru PAUD/Bimbingan Konseling/Psikologi • Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik • Persentase Jumlah Kepala Satuan PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak • Rasio Jumlah Pengawas dan Penilik PAUD • Persentase ruang kelas TK Negeri dalam kondisi baik • Persentase APM SD Sederajat • Persentase APK SD Sederajat • Angka Putus Sekolah SD Sederajat • Rasio Siswa/Guru SD • Rasio Siswa/Rombel SD • persentase Pendidik SD memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4 • persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik • persentase Kepala SD memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak • persentase tenaga penunjang lain di SD yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat • Rasio Jumlah Pengawas SD 	Dindikpora	<p>Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN 3)</p> <p>Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan pelayanan Dasar (PN 5)</p>
	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,55					

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Prioritas	Penanggung Jawab (OPD)	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
					<ul style="list-style-type: none"> Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik Persentase APM SMP Sederajat Persentase APK SMP Sederajat Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat Angka Putus Sekolah SMP Sederajat Rasio Siswa/Guru SMP Rasio Siswa/Rombel SMP Persentase Pendidik SMP memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4 Persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik Persentase Kepala SMP memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak Persentase tenaga penunjang lain di SMP yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat Rasio Jumlah Pengawas SMP Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik Persentase Pendidik Kesetaraan memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4 sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu Persentase Kepala Satuan Pendidikan Non Formal memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4 Persentase tenaga penunjang lain di Satuan Pendidikan Non Formal yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SDM lembaga kursus yang sudah mendapatkan pelatihan dari DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri) 		
Meningkatnya pembangunan pemuda dan	Indek Pembangunan Pemuda (IPP)	4,18	1. Peningkatan cakupan dan kualitas	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Dindikpora	Revolusi Mental dan Pembangunan

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Prioritas	Penanggung Jawab (OPD)	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
kebudayaan	Indeks Pembangunan Olahraga	3,61	pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman 2. Pemulihan ekonomi				Kebudayaan (PN 4) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN 3)
	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	4,21		Program Pengembangan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kelompok Budaya yang Teregister Persentase kelompok kesenian yang produktif Persentase pelestarian Sejarah Lokal Persentase Pelestarian Cagar Budaya 	Dinbudpar	
Meningkatnya toleransi masyarakat	Indeks Toleransi	4,2	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan 	Kesbangpol	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN 4) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN 7)
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	75,66	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Bayi (AKB) Cakupan Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar Prevalensi anemia pada ibu hamil Cakupan Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Persentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang 	Dinkes	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan pelayanan Dasar (PN 5)

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Prioritas	Penanggung Jawab (OPD)	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
					<p>ditangani</p> <ul style="list-style-type: none"> • Angka Kematian Neonatal • Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar • Angka Kematian Balita • Prevalensi ballita gizi buruk • Prevalensi Stunted (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-24 bulan) • Persentase bayi umur 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif • Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar • Persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar • Cakupan warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar • Persentase fasyankes rujukan yang memenuhi standar mutu • Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar • Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar • Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar • Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar • Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar <i>Incident Rate</i> DBD (Demam Berdarah Dengue) • Presentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan • Persentase rumah sehat • Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan 		
Meningkatnya kualitas hidup	Indeks Pembangunan	95,75	Peningkatan cakupan dan	Program Perlindungan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase kasus kekerasan terhadap anak perempuan 	DPPPAPKB	Meningkatkan Sumber Daya

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Prioritas	Penanggung Jawab (OPD)	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
perempuan dan anak	Gender (IPG)		kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman		<ul style="list-style-type: none"> Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan 		Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN 3)
				Program Pemenuhan Hak Anak	<ul style="list-style-type: none"> Kabupaten Layak Anak 		
Meningkatnya perekonomian Daerah	Pendapatan per Kapita	29,57	Pemulihan ekonomi	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> Produktivitas padi Produktivitas jagung Produktivitas bawang putih Produktivitas bawang merah Produktivitas cabai rawit Produktivitas cabai besar Produktivitas tembakau Produktivitas kopi robusta Produktivitas kopi arabika Produktivitas ternak sapi Produktivitas ternak domba Produktivitas ternak kambing Produktivitas ternak ayam ras pedaging Produktivitas ternak ayam petelur Persentase kelahiran pedet 	DKPPP	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN 1)
				Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase fasilitasi promosi produk dalam negeri	Dinkopdag	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN 1)
				Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	<ul style="list-style-type: none"> Persentase IKM Industri berbasis pada komoditas unggulan Persentase pembinaan IKM Tembakau Lembutan 		
				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Lama tinggal wisatawan Persentase peningkatan desa wisata Persentase peningkatan pelaku Ekraf 	Dinbudpar	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN 1)

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Prioritas	Penanggung Jawab (OPD)	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan Persentase perusahaan yang bermitra 	DPM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN 1)
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM berbasis Desa/Kelurahan	Dinkopdag	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN 1)
	Angka Kemiskinan	9,25-9,10%	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman Pemulihan ekonomi 	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota Persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang berkelanjutan Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar 	Dinsos	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN 1)
	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	18,8	Pemulihan ekonomi	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase desa yang melakukan kerja sama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES	Dinpermades	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN 1)
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,31%	Pemulihan ekonomi	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina 	Dinperinaker	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Prioritas	Penanggung Jawab (OPD)	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
							(PN 1)
	Indeks Pembangunan Infrastruktur	74,95	1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman dan 2. Pemulihan ekonomi	Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	<ul style="list-style-type: none"> Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari 	DPUPR	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan pelayanan Dasar (PN 5)
				Program Penyelenggaraan Jalan	<ul style="list-style-type: none"> persentase jalan Kondisi Mantap persentase jembatan dalam kondisi baik persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan 	DPUPR	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN 2) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan pelayanan Dasar (PN 5)
Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas				Program Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> persentase rumah layak huni persentase kawasan kumuh perkotaan persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM) persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM) 	DPUPR	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN 2) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan pelayanan Dasar (PN 5)

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Prioritas	Penanggung Jawab (OPD)	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,47	1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman 1. Pemulihan ekonomi	Program Pengelolaan Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase sampah yang tertangani Cakupan layanan persampahan 	DPRKPLH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN 6)
	Indeks Rasa Aman	4,62	1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman 1. Pemulihan ekonomi	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan laporan kejadian gangguan kamtibmas dan bencana alam	Satpol PP	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN 6) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN 7)
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi.	IPKD	65,5	Pemantapan reformasi birokrasi	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu Persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu 	BAPPEDA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN 7)
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD Persentase dokumen penganggaran tepat waktu Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu 	BPKPAD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Prioritas	Penanggung Jawab (OPD)	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
					<ul style="list-style-type: none"> Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu 		Publik (PN 7)
				Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik Persentase tindak lanjut laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo 	Dinkominfo	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN 7)
Meningkatnya pengelolaan SDM aparatur	<i>Indeks Merit System</i>	0,4	Pemantapan reformasi birokrasi	Program Kepegawaian Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Cakupan Pengembangan SDM Aparatur Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur dan layanan Aparatur 	BKPSDM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN 7)
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	B (level)	Pemantapan reformasi birokrasi	Program Penyelenggaraan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi Persentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD dan pengadaan barang/jasa Persentase penanganan aduan masyarakat Persentase tindak lanjut hasil temuan 	Inspektorat	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN 7)
				Program Aplikasi Informatika	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kinerja infrastruktur TIK yang baik Persentase layanan publik secara elektronik 	Dinkominfo	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN 7)
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B (predikat)	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> Persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di kecamatan Persentase pelunasan pembayaran PBB tepat waktu 	Kecamatan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN 7)	

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Prioritas	Penanggung Jawab (OPD)	Keterkaitan dengan Prioritas Nasional
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase terpeliharanya sarpras SIAK untuk pelayanan administrasi kependudukan Persentase pelaksanaan aktivasi identitas kependudukan digital 	Dindikcapil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN 7)

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024

Berdasarkan tabel di atas, keterkaitan indikator sasaran prioritas pembangunan dengan indikator kinerja program prioritas dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator kinerja program prioritas terkait dengan indikator sasaran prioritas pembangunan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa tingkat keterkaitan indikator sasaran prioritas pembangunan dengan indikator kinerja program prioritas sebesar 100%. Sebagaimana tabel di atas pula, dapat terlihat bahwa indikator dampak digunakan sebagai indikator kinerja sasaran pembangunan daerah. Selain itu, keseluruhan program prioritas mempunyai indikator kinerja di mana indikator tersebut menggunakan indikator hasil. Tingkat penggunaan indikator hasil sebagai indikator kinerja program prioritas daerah sebesar 100%.

4.3 Kontribusi Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 pada Tahun 2024

Pemerintah Kabupaten Temanggung mendukung terlaksananya Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal–Semarang–Salatiga– Demak–Grobogan, Kawasan Purworejo–Wonosobo–Magelang–Temanggung dan Kawasan Brebes–Tegal–Pemalang. Kabupaten Temanggung masuk dalam percepatan Kawasan Puwomanggung. Program kegiatan yang direncanakan dalam mendukung percepatan tersebut melalui:

1. Peningkatan sektor ketenagakerjaan, di antaranya melalui:
 - a. Penciptaan/perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi SDM ketenagakerjaan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha khususnya di sektor perdagangan dan jasa (handycraft, makanan minuman, produk hasil pertanian) serta pariwisata;
 - b. Penguatan lembaga pelatihan kerja baik milik swasta dan pemerintah untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas daya tampung pelatihan, serta mendorong jumlah pelatihan yang terakreditasi
 - c. *Upskilling* terhadap instruktur dan upgrading sarana prasarana BLK dan SMK
 - d. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui program kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

2. Pemanjapan ketahanan pangan, di antaranya melalui: pembangunan jaringan irigasi usaha tani, Pengembangan Food Estate dimana aspek hilirisasi yang sudah dilakukan yaitu peningkatan kapasitas jalan Bansari, pelatihan penyimpanan komoditas, dan pengawalan oftaker.
3. Peningkatan daya saing pariwisata, di antaranya melalui: Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui berbagai pelatihan dan sertifikasi kompetensi
4. Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif, di antaranya melalui:
 - a. Pendampingan promosi dan pengemasan produk, serta jaminan kualitas kelayakan produk;
 - b. Kemudahan perolehan/penyediaan bahan baku dan akses permodalan
 - c. Pelatihan UMKM dan ekonomi kreatif berbasis digital;
 - d. Pendampingan pelatihan digital marketing bagi pelaku UMKM
5. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah, di antaranya melalui peningkatan sistem jaringan jalan.

4.4 Perencanaan Pembangunan Infrastruktur pada Tahun 2024

Program pembangunan infrastruktur pada RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 difokuskan untuk mendukung terwujudnya peningkatan kualitas pembangunan manusia, pemulihan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Pembangunan infrastuktur yang direncanakan tidak sebatas bidang pekerjaan umum, tetapi juga bidang kesehatan, pendidikan, dan pertanian.

Perencanaan pembangunan infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertujuan meningkatkan kualitas jalan sehingga memperlancar arus transportasi yang akan berdampak dalam pergerakan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan, meningkatkan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan daya saing daerah. Selain itu, pembangunan infrastruktur diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kesesuaian rencana tata ruang.

Perencanaan pembangunan infrastruktur di Dinas Kesehatan bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat melalui

puskesmas dan diarahkan mendukung peningkatan kualitas pembangunan manusia, khususnya pencegahan stunting.

Perencanaan pembangunan infrastruktur di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan bertujuan meningkatkan produktivitas pangan, pertanian, dan perikanan dan diarahkan mendukung prioritas peningkatan kualitas pembangunan manusia dan pemulihan ekonomi.

4.5 SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH DALAM PENCAPAIAN TARGET SDGS KABUPATEN TEMANGGUNG

Pemerintah Kabupaten Temanggung sepenuhnya mendukung dan berkomitmen dalam mendukung terwujudnya tujuan SDGs sejumlah 17 (tujuh belas) tujuan melalui beberapa program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Temanggung. Terdapat satu tujuan yaitu tujuan 10 yang tidak secara langsung berkontribusi karena hal tersebut merupakan kewenangan pusat.

Tabel 4.9
Sasaran, Prioritas dan Program Yang Mendukung Terwujudnya SDGs di Kabupaten Temanggung Pada Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN DAERAH	PRIORITAS DAERAH
1	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat - Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat - Meningkatnya perekonomian Daerah - Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas pembangunan manusia - Pemulihan Ekonomi
2	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat - Meningkatnya perekonomian daerah - Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas pembangunan manusia - Pemulihan Ekonomi
3	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat - Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas pembangunan manusia - Pemulihan Ekonomi

NO	TUJUAN	SASARAN DAERAH	PRIORITAS DAERAH
4	Menjamin pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan belajar sepanjang hayat	- Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat - Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi	- Meningkatkan kualitas pembangunan manusia - Tata kelola pemerintahan yang baik
5	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia
6	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	- Pemulihan Ekonomi - Meningkatkan kualitas pembangunan manusia
7	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern	Tidak ada indikator di Pemerintah Kabupaten Temanggung karena ESDM bukan kewenangan kabupaten/kota	
8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua	- Meningkatnya perekonomian daerah - Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	- Pemulihan Ekonomi - Meningkatkan kualitas pembangunan manusia
9	Membangun infrastruktur yang tangguh meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi	Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	- Pemulihan Ekonomi - Meningkatkan kualitas pembangunan manusia
10	Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara	- Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak - Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	- Meningkatkan kualitas pembangunan manusia - Pemulihan Ekonomi
11	Menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	- Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia

NO	TUJUAN	SASARAN DAERAH	PRIORITAS DAERAH
12	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	- Meningkatnya perekonomian Daerah - Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	- Meningkatkan kualitas pembangunan manusia - Pemulihan Ekonomi
13	Mengatasi langkah segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia
14	Melakukan konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut, samudera dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan	Tidak ada indikator di Pemerintah Kabupaten Temanggung karena tidak mempunyai laut	
15	Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan	Tidak ada indikator di Pemerintah Kabupaten Temanggung karena bukan merupakan indikator di tingkat kabupaten/kota	
16	Mewujudkan Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh	Meningkatnya toleransi masyarakat	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global	- Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi. - Meningkatnya pengelolaan SDM aparatur - Meningkatkan kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Tata kelola pemerintahan yang baik

4.6 SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH DALAM MENDUKUNG PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)

Strategi pengarusutamaan gender di Kabupaten Temanggung tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 tahun 2018 tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Temanggung. Sesuai Perbup ini, seluruh perangkat daerah dan desa wajib menyusun perencanaan penganggaran responsive gender pada semua program dan kegiatan secara bertahap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada menggunakan Teknik analisis gender berupa GAP (*Gender Analysis Pathway*) dan GBS (*Gender Budget*

Statement). Adapun penyusunan perencanaan penganggaran responsif gender dilaksanakan setiap tahun sebelum penyusunan rencana kerja anggaran.

Tabel 4.10
Sasaran dan Prioritas Daerah yang Mendukung
Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Temanggung Tahun 2024

NO	SASARAN DAERAH	PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman	Indeks Pembangunan Gender	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	DPPAPPPKB
				Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DPPAPPPKB
				Program Perlindungan Perempuan	DPPAPPPKB
				Program Pengendalian Penduduk	DPPAPPPKB
				Program Pembinaan Keluarga Berencana	DPPAPPPKB
				Program Pembinaan dan Fasilitas Perencanaan, Evaluasi, Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa	DINPERMADES
				Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat/Desa dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan	DINPERMADES
				Program Pendaftaran Penduduk	DINDUKCAPIL
				Program Pencatatan Sipil	DINDUKCAPIL
				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	DINKOPDAG
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	DINKOPDAG
				Program	DINKOPDAG

				Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro	DINKOPDAG
				Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	DINPERINAKER
				Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	BPBD
				Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	SETDA
				Program Perekonomian dan Pembangunan	SETDA
				Program Pembinaan Perpustakaan	DINPUSIP
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM
				Program Pendidikan Politik Masyarakat	KESBANGPOL
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	INSPEKTORAT
				Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	BAPPEDA
				Program Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	BAPPEDA
				Program Perencanaan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	BAPPEDA
				Program Pelayanan Penanaman Modal	DPM
				Program Penanganan Fakir Miskin	DINSOS
				Program	DINSOS

				Pemberdayaan Sosial	
				Program Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik	DINKOMINFO
				Program pemeliharaan Kentetraman Dan Ketertiban Umum	SATPOL PP DAMKAR
				Program Pengelolaan Pendidikan	DINDIKPORA
				Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	DINKES
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
				Program Pengembangan Permukiman	DPUPR
				Pogram Pengembangan Perumahan	DPRKPLH
				Program Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh	DPRKPLH

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung, 2024

4.7 SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH DALAM MENDUKUNG PENANGANAN STUNTING KABUPATEN TEMANGGUNG

Pemerintah telah menetapkan stunting menjadi isu prioritas nasional dengan target 14% pada tahun 2024 terlebih lagi capaian stunting tahun 2022 di angka 28,9, tentunya hal tersebut masih jauh dedengan target nasional.

Kabupaten Temanggung sangat berkomitmen untuk mencapai target nasional tersebut, hal ini ditunjukkan dengan arah kebijakan pada RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2024.

Sasaran, prioritas daerah dan program dalam mendukung Penanganan Stunting Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut dalam tabel berikut

Tabel 4.11
Sasaran dan Prioritas Pembangunan, dan Program yang mendukung Penanganan Stunting

NO	Sasaran	Prioritas Pembangunan	PROGRAM	PELAKSANA
1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia	Program Pengelolaan Pendidikan	Dindikpora
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
3	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia	Program Pengembangan Perumahan	DPRKPLH
4	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia	Program Kawasan Permukiman	DPRKPLH
5	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPRKPLH
6	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia	Program Pengelolaan Persampahan	DPRKPLH
7	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
8	Meningkatnya kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	DPPPAPPKB
9	Meningkatnya kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	
10	Meningkatnya kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
11	Meningkatnya kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
12	Meningkatnya kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia	Program Perlindungan Khusus Anak	DPPPAPPKB
13	Meningkatnya perekonomian Daerah	Pemulihan ekonomi	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	DKPPP
14	Meningkatnya perekonomian Daerah	Pemulihan ekonomi	Program Pengawasan Keamanan Pangan	DKPPP
15	Meningkatnya perekonomian Daerah	Pemulihan ekonomi	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	DKPPP

NO	Sasaran	Prioritas Pembangunan	PROGRAM	PELAKSANA
16	Meningkatnya perekonomian Daerah	Pemulihan ekonomi	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	DKPPP
17	Meningkatnya perekonomian Daerah	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
18	Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Tata kelola pemerintahan yang baik	Program Pencatatan Sipil	Dindukcapil

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024

4.8 SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH DALAM Mendukung Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim

Sesuai Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana. Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 01 Tahun 2012 termuat definisi desa/kelurahan tangguh bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Hal tersebut sangat berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, RPD Kabupaten Temanggung pada tahun 2024-2026 menempatkan pengarusutamaan kerentanan bencana dan perubahan iklim pada tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan pada sasaran meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas.

Sasaran dalam mendukung pengarusutamaan kerentanan bencana dan perubahan iklim yaitu meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas. Hal tersebut terlihat dari indikator sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Hal tersebut dijabarkan pada salah satu Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2024 yaitu meningkatkan kualitas pembangunan manusia, pemulihan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sasaran, prioritas daerah, dan program dalam mendukung pengarusutamaan kerentanan bencana dan perubahan iklim sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

Tabel 4.12

Sasaran dan Prioritas Daerah yang Mendukung Pengarusutamaan
Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim di Kabupaten Temanggung
Tahun 2024

NO	SASARAN DAERAH	PRIORITAS DAERAH	STRATEGI	PROGRAM
1.	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kualitas pembangunan manusia b. Tata kelola pemerintahan yang baik 	<ul style="list-style-type: none"> a. meningkatnya infrastruktur dan sarana dan prasarana wilayah b. optimalisasi pemanfaatan kawasan sesuai peruntukannya c. optimalisasi pemanfaatan Kawasan sesuai kewenangan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat b. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan c. Program Penanganan Kerawanan Pangan d. Program Pengawasan Keamanan Pangan e. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian f. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian g. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian h. Program Penyuluhan Pertanian i. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner j. Program Perencanaan Lingkungan Hidup k. Program Pengendalian Pencemaran l. Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup m. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024

4.9 FASILITASI PERUBAHAN IKLIM

Dalam upaya melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional dan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim, berikut beberapa hal yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Temanggung:

1. Gas Rumah Kaca

Perubahan iklim global yang terjadi disebabkan karena terganggunya keseimbangan energi antara bumi dan atmosfer. Keseimbangan tersebut dipengaruhi antara lain oleh peningkatan gas-gas asamarang atau karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄) dan nitrous oksida (NO) yang lebih dikenal dengan gas rumah kaca (GRK).

Perubahan iklim global tersebut telah mendorong sektor pemerintahan untuk berperan aktif dalam upaya penurunan emisi GRK. Pada tingkat Provinsi Jawa Tengah capaian kinerja penurunan emisi GRK tahun 2021 sebesar 6.028,02 ton CO₂eq (CO₂ *equivalen*) yang berasal dari sektor pengelolaan limbah. Kabupaten Temanggung dalam konteks perubahan iklim menghasilkan GRK dari kegiatan ekonomi, utamanya dari kegiatan penggunaan energi, industri, pertanian, peternakan, kehutanan dan pengelolaan limbah.

Pada tahun 2018 Kabupaten Temanggung memulai untuk melakukan inventarisasi GRK dan ditindaklanjuti pada Tahun 2020 melalui *updating* data dan analisis. Penyusunan dokumen ini dilakukan dengan melibatkan unsur dari berbagai pemangku kepentingan dan mempertimbangkan karakteristik, potensi emisi serta prioritas rencana pembangunan daerah. Pelibatan OPD di Kabupaten Temanggung sejak dari awal proses sampai dengan akhir dimaksudkan sebagai upaya menjaga kualitas dan akurasi data sumber emisi GRK.

2. Sabuk Gunung

Sabuk Gunung merupakan gerakan konservasi penanaman pohon di lereng Gunung Sumbing, Sindoro, dan Prahu. Konservasi ini merupakan upaya menanggulangi kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung dinilai kritis. terdapat 13.000 hektare lahan di lereng Gunung Sumbing, Sindoro, dan Prahu masuk dalam kategori lahan kritis mengakibatkan banyak mata air yang mulai mati dan berkurang debitnya. Hal ini menyebabkan permintaan bantuan air bersih ke desa-desa yang terus meningkat setiap tahunnya.

Mulai akhir tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menanam pohon konservasi sekurangnya ada 500 ribu pohon dan dari non pemerintah 220 ribu pohon. Kebutuhan riil pohon untuk penanaman ini di atas 15 juta bibit pohon untuk seluruh Kabupaten Temanggung, sebagai upaya dalam penataan lingkungan hidup sehingga dengan konservasi lahan, diharapkan dapat

meminimalkan polusi dan pencemaran lainnya, sehingga bumi ini menjadi lestari.

3. Komitmen Adaptasi Perubahan Iklim melalui Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim

Pemerintah Kabupaten Temanggung merupakan salah satu kabupaten yang rentan terhadap dampak perubahan iklim mempengaruhi kualitas kehidupan masyarakat maka pada tahun 2022 melalui fasilitasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Temanggung berkomitmen terhadap kegiatan adaptasi perubahan iklim.

Sebagai langkah awal, Pemerintah Kabupaten Temanggung sedang menyusun Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim. Selain itu, pada tahun 2020 di Temanggung telah dilaksanakan kegiatan Sekolah Lapang mitigasi perubahan iklim yang difasilitasi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Temanggung.

4.10 SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Prioritas pembangunan Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 juga dalam mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), hal ini sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dan komitmen Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Pemerintah Kabupaten Temanggung memprioritaskan pemenuhan SPM dalam menyelenggarakan pelayanan dasar melalui beberapa program di perangkat daerah dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju *Good Governance*. Pemenuhan SPM juga diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat karena terkait dengan pelayanan dasar dan memprioritaskan penyediaan layanan dasar sesuai target SPM tidak hanya dalam hal jenis melainkan juga mutu (kuantitas dan kualitas

layanan).

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Program yang mendukung terlaksananya pemenuhan SPM sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

Tabel 4.13
Sasaran, Prioritas Daerah dan Program yang Mendukung
Pemenuhan SPM di Kabupaten Temanggung Tahun 2024

NO	SPM BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	SASARAN DAERAH	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM
1	Pendidikan	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia	Program pengelolaan pendidikan
		Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan			
		Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD			
2	Kesehatan	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat - Meningkatkan kualitas Hidup Perempuan dan Anak 	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia	a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan balita	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan Dasar	Presentase anak usia pendidikan dasar yang sesuai mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Cakupan warga negara indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Cakupan warga negara indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Presentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai			

NO	SPM BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	SASARAN DAERAH	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM
			standar			
		Pelayanan kesehatan penderita DM	Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan ODGJ berat	Presentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan pada orang terduga tuberkulosis	Presentase orang terduga TBC mendapatkan Pelayanan TBC sesuai standar			
		Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan			
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	- Indeks Pembangunan Infrastruktur	Pemulihan ekonomi	a. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	- Indeks Kualitas lingkungan hidup (IKLH)		b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Persentase warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Pemulihan ekonomi	a. Program Kawasan Permukiman.
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	Persentase warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni			
5	Ketenteraman dan ketertiban umum	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	- Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Pemulihan ekonomi	a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		Pelayanan informasi	Persentase warga Negara yang			b. Program Penanggulangan

NO	SPM BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	SASARAN DAERAH	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM
	dan perlindungan masyarakat	rawan bencana	memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	- Meningkatnya toleransi masyarakat		Bencana
		Pelayanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			
6	Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Meningkatnya perekonomian Daerah	Pemulihan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Pemberdayaan Sosial; b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan; c. Program Rehabilitasi Sosial; d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; e. Program Penanganan Bencana.
		Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti			
		Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti			
		Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis rehabilitasi di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti			
		Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial			

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2024

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 RENCANA KERJA DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 serta seiring dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah. RKPD disusun dengan mensinkronkan perencanaan dan penganggaran melalui tiga langkah yaitu pertama, melanjutkan implementasi *money follows program*, dengan cara mengintegrasikan sumber pendanaan untuk pencapaian sasaran pembangunan. Kedua, memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, pemerintah provinsi maupun pusat. Ketiga, memperkuat kendali program dengan melakukan pengendalian, monitoring serta evaluasi.

Tahapan penyusunan program merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan analisis dan metodologi perumusan sasaran pembangunan daerah. Indikasi rencana program disusun untuk menjabarkan sasaran pembangunan daerah dan dalam rangka pencapaian indikator sasaran serta dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Pemerintah pusat menyatakan bahwa upaya pemerataan pembangunan yang dilakukan pemerintah di tahun 2024 ini ditempuh dengan menetapkan 7 prioritas nasional dalam RKP 2024. Tema yang diusung dalam RKP 2024 yaitu “Mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”. Seiring dengan RKP 2024 yang ditetapkan pemerintah pusat, maka RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 menyelaraskan programnya sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas dalam RKP 2024.

5.1.1 Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Terhadap Arah Kebijakan RKP 2024

Pemerintah Kabupaten Temanggung sepenuhnya mendukung terhadap 8 Arah Kebijakan Pemerintah Pusat yang tercantum dalam RKP Tahun 2024 melalui dukungan beberapa program beserta anggarannya. Dukungan program dan anggaran dalam RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 terhadap Arah Kebijakan RKP 2024 sebagaimana tercantum dalam tabel 5.1 – 5.9.

Tabel 5. 1
Rekapitulasi Dukungan Program Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap Arah Kebijakan dalam RKP Tahun 2024

No	Arah Kebijakan RKP 2024	Jumlah Program Yang Mendukung Arah Kebijakan RKP Tahun 2024	Pagu Anggaran	Perubahan Anggaran	Perangkat Daerah
1	Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	8	726.782.351.850	477.695.912.094	1. Dindikpora
					2. Dinas Kesehatan
					3. DPUPR
					4. DPRKPLH
					5. Dinas Sosial
					6. DKPPP
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan	12	729.887.369.800	479.558.838.044	1. Dindikpora
					2. Dinas Kesehatan
					3. DPUPR
					4. Dinsos
					5. DPRKPLH
					6. DKPPP
					7. BKPSDM
3	Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan	4	2.661.370.000	1.613.999.400	1. Bappeda
					2. Dinperinaker
					3. Dinkopdag
4	Penguatan Daya Saing Usaha	13	12.418.107.700	6.671.514.100	1. DPM
					2. Dinperinaker
					3. DKPPP
					4. Dinkopdag
					5. Dinbudpar
5	Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi	5	2.949.999.950	2.778.693.950	1. DPRKPLH

No	Arah Kebijakan RKP 2024	Jumlah Program Yang Mendukung Arah Kebijakan RKP Tahun 2024	Pagu Anggaran	Perubahan Anggaran	Perangkat Daerah
6	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas	8	799.610.162.960	501.356.621.789	1. DPUPR
					2. DPRKPLH
					3. Dinas Kesehatan
					4. Dindikpora
					5. Dinhub
					6. Dinkominfo
7	Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara	-			-
8	Pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024	6	59.314.304.550	38.204.513.100	1. Satpol PP Damkar
					2. Dinkominfo
					3. Kesbang
					4. Dindukcapil
JUMLAH		56	2.333.623.666.810	1.507.880.092.477	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2023, data diolah.

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa total program daerah Kabupaten Temanggung yang mendukung Arah Kebijakan Nasional Tahun 2024 sejumlah 56 program. Rekapitulasi secara persentase dukungan program daerah RKP terhadap arah kebijakan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5. 2
Persentase Dukungan Program Daerah RKP Kabupaten Temanggung terhadap Arah Kebijakan Nasional Tahun 2024

No	Arah Kebijakan	Jumlah Program Yang Mendukung Arah Kebijakan Tahun 2024	Persentase (%)
1	Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	8	14,28
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan	12	21,43
3	Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan	4	7,14
4	Penguatan Daya Saing Usaha	13	23,21
5	Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi	5	8,90
6	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas	8	14,28

7	Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara	-	
8	Pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024	6	
Jumlah		56	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2023, data diolah.

Tabel 5. 3
Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap Arah Kebijakan Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

No	Arah Kebijakan RKP 2024	Program Yang Mendukung Arah Kebijakan RKP Tahun 2024	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Anggaran	Anggaran Perubahan	Perangkat Daerah
1	Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	Program Pengelolaan Pendidikan	persentase APM PAUD (5-6 tahun)	81,35	%	215.448.883.450	189.348.476.380	Dindikpora
			persentase APK PAUD (0-6 tahun)	42,43	%			
			persentase APK PAUD (4-6 tahun)	77,17	%			
			persentase APK PAUD (5-6 tahun)	89,05	%			
			persentase Pendidik PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4 Pendidikan Guru PAUD/ Bimbingan Konseling/ Psikologi	100	%			
			persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	49,14	%			
			persentase Jumlah Kepala Satuan PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%			
			Rasio Jumlah Pengawas dan Penilik PAUD	0,02	Angka			
			persentase ruang kelas TK Negeri dalam kondisi baik	100	%			
			persentase APM SD Sederajat	98,5	%			
			persentase APK SD Sederajat	100	%			
			Angka Putus Sekolah SD Sederajat	0,02	Angka			

No	Arah Kebijakan RKP 2024	Program Yang Mendukung Arah Kebijakan RKP Tahun 2024	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Anggaran	Anggaran Perubahan	Perangkat Daerah
			Rasio Siswa/Guru SD	1:28	Angka			
			Rasio Siswa/Rombel SD	1:28	Angka			
			persentase Pendidik SD memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4	100	%			
			persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	55	%			
			persentase Kepala SD memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%			
			persentase tenaga penunjang lain di SD yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%			
			Rasio Jumlah Pengawas SD	0,1	Angka			
			persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	90,49	%			
			persentase APM SMP Sederajat	88,5	%			
			persentase APK SMP Sederajat	98,7	%			
			Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	98,7	%			
			Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	0,18	Angka			
			Rasio Siswa/Guru SMP	1:32	Angka			
			Rasio Siswa/Rombel SMP	1:32	Angka			

No	Arah Kebijakan RKP 2024	Program Yang Mendukung Arah Kebijakan RKP Tahun 2024	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Anggaran	Anggaran Perubahan	Perangkat Daerah
			persentase Pendidik SMP memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4	100	%			
			persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	66	%			
			persentase Kepala SMP memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%			
			persentase tenaga penunjang lain di SMP yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%			
			Rasio Jumlah Pengawas SMP	0,07	Angka			
			persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	95,92	%			
			persentase Pendidik Kesetaraan memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4 sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu	100	%			
			persentase Kepala Satuan Pendidikan Non Formal memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4	100	%			
			persentase tenaga penunjang lain di Satuan Pendidikan Non Formal yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%			

No	Arah Kebijakan RKP 2024	Program Yang Mendukung Arah Kebijakan RKP Tahun 2024	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Anggaran	Anggaran Perubahan	Perangkat Daerah
			persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	88	%			
			persentase SDM lembaga kursus yang sudah mendapatkan pelatihan dari DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri)	17	%			
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	73	per 100.000 KH	470.446.155.500	249.485.207.909	Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan RSUD
			Angka Kematian Bayi (AKB)	13,5	per 1000 KH			
			Cakupan Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	100	%			
			Prevalensi anemia pada ibu hamil	15,8	% maksimal			
			Cakupan Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100	%			
			Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100	%			
			persentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	100	%			
			persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%			
			Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani	100	%			
			Angka Kematian Neonatal	10,5	per 1.000 KH			

No	Arah Kebijakan RKP 2024	Program Yang Mendukung Arah Kebijakan RKP Tahun 2024	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Anggaran	Anggaran Perubahan	Perangkat Daerah
			Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	%			
			Angka Kematian Balita	16	per 1.000 KH			
			Prevalensi ballita gizi buruk	0,5	%			
			Prevalensi Stunted (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-24 bulan)	14	% maksimal			
			persentase bayi umur 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	82,5	% minimal			
			persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%			
			persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%			
			Cakupan warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%			
			persentase fasyankes rujukan yang memenuhi standar mutu	62	%			

No	Arah Kebijakan RKP 2024	Program Yang Mendukung Arah Kebijakan RKP Tahun 2024	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Anggaran	Anggaran Perubahan	Perangkat Daerah
			persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%			
			persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%			
			persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	%			
			persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	%			
			persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	%			
			Incident Rate DBD (Demam Berdarah Dengue)	8	Maks per 100.000 penduduk			
			Presentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	82	%			
			persentase rumah sehat	82,3	%			
			persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	100	%			
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	95,5	%	9.929.055.750	8.645.297.000	DPUPR

No	Arah Kebijakan RKP 2024	Program Yang Mendukung Arah Kebijakan RKP Tahun 2024	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Anggaran	Anggaran Perubahan	Perangkat Daerah
		Penyediaan Air Minum	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	100	%			
		Program Pengembangan Perumahan	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	88,3	%	1.201.800.000	962.076.200	DPRKPLH
		Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah layak huni	95,54	%	8.560.738.800	6.597.124.790	DPRKPLH
			Persentase kawasan kumuh perkotaan	4,48	%			
			Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100	%			
		Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	888.694.000	874.667.400	Dinas Sosial
			Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%			
			Jumlah Warga negara lanjut usia terlanter yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%			
			Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100	%			

No	Arah Kebijakan RKP 2024	Program Yang Mendukung Arah Kebijakan RKP Tahun 2024	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Anggaran	Anggaran Perubahan	Perangkat Daerah
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	100	%	19.307.024.350	21.783.062.415	Dinas Sosial
			persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	100	%			
			Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	100	%			
			persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang berkelanjutan	50	%			
			persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	48	%			
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rasio ketersediaan Pangan	100	%	1.000.000.000	0	DKPPP
JUMLAH						726.782.351.850	477.695.912.094	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2023, data diolah

Tabel 5. 4
Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap Arah Kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan

No	Arah Kebijakan RKP 2024	Program Yang Mendukung Arah Kebijakan RKP Tahun 2024	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Anggaran	Anggaran Perubahan	Perangkat Daerah
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	persentase APM PAUD (5-6 tahun)	81,35	%	215.448.883.450	189.348.476.380	Dindikpora
			persentase APK PAUD (0-6 tahun)	42,43	%			
			persentase APK PAUD (4-6 tahun)	77,17	%			
			persentase APK PAUD (5-6 tahun)	89,05	%			

No	Arah Kebijakan RKP 2024	Program Yang Mendukung Arah Kebijakan RKP Tahun 2024	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Anggaran	Anggaran Perubahan	Perangkat Daerah
			persentase Pendidik PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4 Pendidikan Guru PAUD/Bimbingan Konseling/Psikologi	100	%			
			persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	49,14	%			
			persentase Jumlah Kepala Satuan PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%			
			Rasio Jumlah Pengawas dan Penilik PAUD	0,02	Angka			
			persentase ruang kelas TK Negeri dalam kondisi baik	100	%			
			persentase APM SD Sederajat	98,5	%			
			persentase APK SD Sederajat	100	%			
			Angka Putus Sekolah SD Sederajat	0,02	Angka			
			Rasio Siswa/Guru SD	1:28	Angka			
			Rasio Siswa/Rombel SD	1:28	Angka			
			persentase Pendidik SD memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4	100	%			
			persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	55	%			
			persentase Kepala SD memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%			

No	Arah Kebijakan RKP 2024	Program Yang Mendukung Arah Kebijakan RKP Tahun 2024	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Anggaran	Anggaran Perubahan	Perangkat Daerah
			persentase tenaga penunjang lain di SD yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%			
			Rasio Jumlah Pengawas SD	0,1	Angka			
			persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	90,49	%			
			persentase APM SMP Sederajat	88,5	%			
			persentase APK SMP Sederajat	98,7	%			
			Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	98,7	%			
			Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	0,18	Angka			
			Rasio Siswa/Guru SMP	1:32	Angka			
			Rasio Siswa/Rombel SMP	1:32	Angka			
			persentase Pendidik SMP memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4	100	%			
			persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	66	%			
			persentase Kepala SMP memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%			
			persentase tenaga penunjang lain di SMP yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%			
			Rasio Jumlah Pengawas SMP	0,07	Angka			
			persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	95,92	%			
			persentase Pendidik Kesetaraan memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4 sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu	100	%			

No	Arah Kebijakan RKP 2024	Program Yang Mendukung Arah Kebijakan RKP Tahun 2024	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Anggaran	Anggaran Perubahan	Perangkat Daerah
			persentase Kepala Satuan Pendidikan Non Formal memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4	100	%			
			persentase tenaga penunjang lain di Satuan Pendidikan Non Formal yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%			
			persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	88	%			
			persentase SDM lembaga kursus yang sudah mendapatkan pelatihan dari DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri)	17	%			
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	73	per 100.000 KH	470.446.155.500	249.485.207.909	Dinas Kesehatan
			Angka Kematian Bayi (AKB)	13,5	per 1000 KH			
			Cakupan Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	100	%			
			Prevalensi anemia pada ibu hamil	15,8	% maksimal			
			Cakupan Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100	%			
			Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100	%			
			persentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	100	%			
			persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%			
			Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani	100	%			
			Angka Kematian Neonatal	10,5	per 1.000 KH			

No	Arah Kebijakan RKP 2024	Program Yang Mendukung Arah Kebijakan RKP Tahun 2024	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Anggaran	Anggaran Perubahan	Perangkat Daerah
			Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	%			
			Angka Kematian Balita	16	per 1.000 KH			
			Prevalensi ballita gizi buruk	0,5	%			
			Prevalensi <i>Stunted</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-24 bulan)	14	% maksimal			
			persentase bayi umur 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	82,5	% minimal			
			persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%			
			persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%			
			Cakupan warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%			
			persentase fasyankes rujukan yang memenuhi standar mutu	62	%			
			persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%			
			persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%			
			persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	%			
			persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	%			

No	Arah Kebijakan RKP 2024	Program Yang Mendukung Arah Kebijakan RKP Tahun 2024	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Anggaran	Anggaran Perubahan	Perangkat Daerah
			persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	%			
			Incident Rate DBD (Demam Berdarah Dengue)	8	Maks per 100.000 penduduk			
			Presentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	82	%			
			persentase rumah sehat	82,3	%			
			persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	100	%			
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	persentase Puskesmas dengan SDM kesehatan yang memenuhi standar	23,1	%	2.000.000.000	1.327.703.000	Dinas Kesehatan
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Cakupan puskesmas melaksanakan pelayanan farmasi sesuai standar	100	%	472.419.000	445.344.000	Dinas Kesehatan
		Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah layak huni	95,54	%	8.560.738.800	6.597.124.790	DPRKPLH
			Persentase kawasan kumuh perkotaan	4,84	%			
			Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100	%			
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	95,5	%	9.929.055.750	8.645.297.000	DPUPR
			Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	100	%			
		Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	888.694.000	874.667.400	Dinas Sosial
			Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%			

No	Arah Kebijakan RKP 2024	Program Yang Mendukung Arah Kebijakan RKP Tahun 2024	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Anggaran	Anggaran Perubahan	Perangkat Daerah
			Jumlah Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%			
			Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100	%			
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	100	%	19.307.024.350	21.783.062.415	Dinas Sosial
			persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	100	%			
			Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	100	%			
			persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang berkelanjutan	50	%			
			persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	48	%			
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	52,7	Angka	799.999.950	442.955.150	DPRKPLH
			Indeks Kualitas Udara	83,82	Angka			
			Persentase Luas Lahan Kritis Tertangani terhadap Total Luas Lahan Kritis	0,067	%			
		Program Pengendalian Bahan berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase usaha yang memiliki Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3	100	%	15.000.000	0	DPRKPLH
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman	90	%	75.000.000	0	DKPPP
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Cakupan Pembinaan SDM Aparatur	96,18	%	1.944.399.000	609.000.000	BKPSDM
			JUMLAH			729.887.369.800	479.558.838.044	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2023, data diolah

Tabel 5. 5
Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap Arah Kebijakan Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan

No	Arah Kebijakan RKP 2024	Program Yang Mendukung Arah Kebijakan RKP Tahun 2024	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Anggaran	Perubahan Anggaran	Perangkat Daerah
3	Revitalisasi Industri Dan Penguatan Riset Terapan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian	100	%	1.170.000.000	353.999.400	Bappeda
			persentase kreativitas dan inovasi daerah yang diterapkan atau diimplementasikan	100	%			
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase IKM industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	71,62	%	310.000.000	410.000.000	Dinperinaker
			persentase Pembinaan IKM Tembakau Lembutan	15,36	%			
		Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang difasilitasi	0,92	%	331.370.000	50.000.000	Dinkopdag
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	72	%	850.000.000	800.000.000	Dinperinaker
Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina	80		%					
JUMLAH						2.661.370.000	1.613.999.400	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2023, data diolah

Tabel 5. 6
Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap Arah Kebijakan Penguatan Daya Saing Usaha

No	Arah Kebijakan RKP 2024	Program Yang Mendukung Arah Kebijakan RKP Tahun 2024	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Anggaran	Anggaran Perubahan	Perangkat Daerah
4	Penguatan Daya saing Usaha	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan	100	%	20.000.000	7.000.000	DPM
			Persentase perusahaan yang bermitra	50	%			
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase promosi penanaman modal	25	%	60.000.000	7.000.000	DPM

No	Arah Kebijakan RKP 2024	Program Yang Mendukung Arah Kebijakan RKP Tahun 2024	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Anggaran	Anggaran Perubahan	Perangkat Daerah
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan secara Elektronik	100	%	3.350.000.000	3.246.999.800	DPM
			Persentase Perizinan yang diterbitkan tepat waktu	100	%			
			Persentase Pengaduan masyarakat yang tertangani	100	%			
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pengendalian penanaman modal	12	%	415.200.000	404.961.000	DPM
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	72	%	850.000.000	800.000.000	Dinperinaker
			Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina	80	%			
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	22,08	kg/kapita /tahun	623.783.000	0	DKPPP
		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang naik kelas	1,3	%	4.549.896.400	250.000.000	DKPPP
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase fasilitasi pelaku usaha informal	13,71	%	1.161.303.300	1.161.303.300	Dinkopdag
			Persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik	67	%			
			Persentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital	1,5	%			
			Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	75	%			

No	Arah Kebijakan RKP 2024	Program Yang Mendukung Arah Kebijakan RKP Tahun 2024	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Anggaran	Anggaran Perubahan	Perangkat Daerah
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Ketersediaan informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	70	%	220.000.000	210.000.000	Dinkopdag
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang	98,37	%	190.000.000	20.000.000	Dinkopdag
		Program Pengembangan ekspor	Cakupan pelaku usaha yang di bina	1,15		100.000.000	0	Dinkopdag
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase IKM industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	35	%	310.000.000	410.000.000	Dinperinaker
		Program Peningkatan Daya Tarik destinasi Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	0,03	%	567.925.000	154.250.000	Dinbudpar
			Lama Tinggal Wisatawan	1	Hari			
			Persentase Peningkatan Desa	13,26	%			
			Wisata					
			Persentase Peningkatan pelaku Ekraft	4,9	%			
JUMLAH						12.418.107.700	6.671.514.100	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2023, data diolah.

Tabel 5. 7
Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap Arah Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon Dan Transisi Energi

No	Arah Kebijakan RKP 2024	Program Yang Mendukung Arah Kebijakan RKP Tahun 2024	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Anggaran	Perubahan Anggaran	Perangkat Daerah
5	Pembangunan Rendah Karbon Dan Transisi Energi	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang Dokumen Lingkungan Hidup	100	%	50.000.000	35.738.800	DPRKPLH

No	Arah Kebijakan RKP 2024	Program Yang Mendukung Arah Kebijakan RKP Tahun 2024	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Anggaran	Perubahan Anggaran	Perangkat Daerah
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	100	%	750.000.000	200.000.000	DPRKPLH
			Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	100	%			
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	52,7	Angka	799.999.950	442.955.150	DPRKPLH
			Indeks Kualitas Udara	83,82	Angka			
			Persentase Luas Lahan Kritis Tertangani terhadap Total Luas Lahan Kritis	0,067	%			
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Luas RTH Milik Pemerintah Daerah yang Tertangani	63,9	%	1.300.000.000	2.050.000.000	DPRKPLH
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	100	%	50.000.000	50.000.000	DPRKPLH
JUMLAH						2.949.999.950	2.778.693.950	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2023, data diolah.

Tabel 5. 8
Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap Arah Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas

No	Arah Kebijakan RKP 2024	Program Yang Mendukung Arah Kebijakan RKP Tahun 2024	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Anggaran	Anggaran Perubahan	Perangkat Daerah
6	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	95,5	%	9.929.055.750	8.645.297.000	DPUPR

No	Arah Kebijakan RKP 2024	Program Yang Mendukung Arah Kebijakan RKP Tahun 2024	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Anggaran	Anggaran Perubahan	Perangkat Daerah
			Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	100	%			
		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Kondisi Mantap	89,29	%	60.930.827.100	33.003.168.000	DPUPR
			Persentase Jembatan dalam kondisi baik	93,75	%			
			persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan	18,61	%			
		Program Pengembangan Perumahan	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	88,3	%	1.201.800.000	962.076.200	DPRKPLH
		Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah layak huni	95,54	%	8.560.738.800		DPRKPLH
			persentase kawasan kumuh perkotaan	4,84	%			
			persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100	%			
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Presentase rumah tangga yang memiliki jamban	83,84	%	470.446.155.500	249.485.207.909	Dinas Kesehatan
		Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase APM PAUD (5-6 tahun)	81,35	%	215.448.883.450	189.348.476.380	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
			Persentase APK PAUD (0-6 tahun)	42,43	%			
			Persentase APK PAUD (4-6 tahun)	77,17	%			
			Persentase APK PAUD (5-6 tahun)	89,05	%			

No	Arah Kebijakan RKP 2024	Program Yang Mendukung Arah Kebijakan RKP Tahun 2024	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Anggaran	Anggaran Perubahan	Perangkat Daerah
			Persentase Pendidik PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4 Pendidikan Guru PAUD/ Bimbingan Konseling / Psikologi	100	%			
			Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	49,14	%			
			Persentase jumlah kepala satuan PAUD berkualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%			
			Rasio Jumlah Pengawas dan Penilik PAUD	0,02	Angka			
			Persentase ruang kelas TK Negeri dalam kondisi baik	100	%			
			Persentase APM SD Sederajat	98,5	%			
			persentase APK SD Sederajat	104,87	%			
			Angka Putus Sekolah SD Sederajat	0,02	Angka			
			Rasio Siswa/Guru SD	1:28	Angka			
			Rasio Siswa/Rombel SD	1:28	Angka			
			persentase Pendidik SD memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4	100	%			

No	Arah Kebijakan RKP 2024	Program Yang Mendukung Arah Kebijakan RKP Tahun 2024	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Anggaran	Anggaran Perubahan	Perangkat Daerah
			Persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	61,27	%			
			Persentase Kepala SD memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%			
			persentase tenaga penunjang lain di SD yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%			
			Rasio Jumlah Pengawas SD	0,1	Angka			
			persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	90,49	%			
			Persentase APM SMP Sederajat	88,5	%			
			persentase APK SMP Sederajat	98,7	%			
			Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	98,7	%			
			Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	0,18	Angka			
			Rasio Siswa/Guru SMP	1:32	Angka			
			Rasio Siswa/Rombel SMP	1:32	Angka			

No	Arah Kebijakan RKP 2024	Program Yang Mendukung Arah Kebijakan RKP Tahun 2024	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Anggaran	Anggaran Perubahan	Perangkat Daerah
			persentase Pendidik SMP memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4	100	%			
			Persentase Pendidik	66	%			
			SMP yang memiliki sertifikat pendidik					
			persentase Kepala SMP memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%			
			persentase tenaga penunjang lain di SMP yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%			
			Rasio Jumlah Pengawas SMP	0,07	Angka			
			Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	95,92	%			
			persentase Pendidik Kesetaraan memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4 sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu	100	%			

No	Arah Kebijakan RKP 2024	Program Yang Mendukung Arah Kebijakan RKP Tahun 2024	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Anggaran	Anggaran Perubahan	Perangkat Daerah
			persentase Kepala Satuan Pendidikan Non Formal memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4	100	%			
			persentase tenaga penunjang lain di Satuan Pendidikan Non Formal yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%			
			persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	88	%			
			persentase SDM lembaga kursus yang sudah mendapatkan pelatihan dari DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri)	17	%			
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	persentase ruas jalan yang didukung sarana	41,55	%	24.177.304.000	17.865.464.000	Dinas perhubungan
	prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai							
	persentase Angkutan umum yang memenuhi standar minimal pelayanan		30	%				
	persentase Terminal Tipe C Yang Aktif		100	%				
	persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik		100	%				

No	Arah Kebijakan RKP 2024	Program Yang Mendukung Arah Kebijakan RKP Tahun 2024	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Anggaran	Anggaran Perubahan	Perangkat Daerah
			persentase penerangan jalan di ruas jalan kabupaten	33,48	%			
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Presentase Kinerja Infrastruktur TIK yang baik	100	%	8.915.398.360	2.046.932.300	Dinkominfo
			Presentase Layanan Publik secara Elektronik	100	%			
JUMLAH						799.610.162.960	501.356.621.789	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2023, data diolah.

Pemerintah Kabupaten Temanggung tidak ada keterkaitan langsung dengan arah kebijakan Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara sehingga tidak ada program dan indikator kinerja di Perangkat Daerah yang mendukungnya.

Tabel 5. 9
Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap Arah Kebijakan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024

No	Arah Kebijakan RKP 2024	Program Yang Mendukung Arah Kebijakan RKP Tahun 2024	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Anggaran	Perubahan Anggaran	Perangkat Daerah
8	Pelaksanaan Pemilu 2024	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase Satlinmas yang terlatih	3,46	%	2.540.064.400	3.480.713.000	Satpol PP Damkar
			Persentase pengaduan yang berkaitan dengan Trantibum yang ditindaklanjuti	100	%			
			persentase penegakan Perda/Perbup	100	%			
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik	35	%	4.035.570.500	3.243.331.100	Dinas Kominfo

No	Arah Kebijakan RKP 2024	Program Yang Mendukung Arah Kebijakan RKP Tahun 2024	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Anggaran	Perubahan Anggaran	Perangkat Daerah
			persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik	100	%			
			persentase tindak lanjut laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo	85	%			
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	persentase pelaksanaan pendidikan politik	80	%	51.468.669.650	30.460.469.000	Kesbang
		Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan KK, KTP el, KIA	87	%	750.000.000	750.000.000	Dindikcapil
		Program Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	99,82	%	20.000.000	0	
		Program Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan	persentase terpeliharanya Sarpras SIAK untuk pelayanan Administrasi Kependudukan	94,9	%	500.000.000	270.000.000	
			persentase Pelaksanaan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital	0,8	%			
JUMLAH						59.314.304.550	38.204.513.100	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2023, data diolah.

5.1.2 Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Terhadap Prioritas Nasional RKP 2024

Pemerintah Kabupaten Temanggung sepenuhnya mendukung terhadap 7 Prioritas Pemerintah Pusat yang tercantum dalam RKP 2024 melalui dukungan beberapa program beserta anggarannya. Dukungan program beserta anggaran tersebut juga mendukung tema RKP 2024 berkaitan dengan Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan

Berkelanjutan dimana hal tersebut salah satunya untuk kebijakan penguatan ekonomi dan pemulihan ekonomi dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19. Dukungan program dan anggaran dalam RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 terhadap Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 5. 10
Rekapitulasi Dukungan Program Kabupaten Temanggung Tahun 2024
Terhadap Prioritas Nasional RKP Tahun 2024

No	Prioritas Nasional RKP tahun 2024	Jumlah Program Yang Mendukung Prioritas RKP Tahun 2024	Pagu Anggaran	Perubahan Anggaran	Perangkat Daerah
1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	27	72.078.630.949	44.641.379.476	1. DKPPP
					2. Dinpermades
					3. Dinkopdag
					4. DPM
					5. DKPPP
					6. Dinbudpar
					7. Dinperinaker
					8. Sekretariat Daerah
					9. Bappeda
2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	2	72.078.630.949	490.569.333.339	1. Kecamatan
					2. DPUPR
3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	12	786.668.633.993	515.841.901.604	1. Dindikpora
					2. Dinas Kesehatan
					3. Dinas Sosial
					4. Dinpermades
					5. Dinas Perhubungan
					6. Dinas Kominfo
					7. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					8. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					9. Dinperinaker
					10. Sekretariat DPRD
					11. BKPSDM

No	Prioritas Nasional RKP tahun 2024	Jumlah Program Yang Mendukung Prioritas RKP Tahun 2024	Pagu Anggaran	Perubahan Anggaran	Perangkat Daerah
					12. DPPPAPPKB
4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	5	49.388.321.700	41.712.973.600	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. BKPSDM 3. Inspektorat Daerah
5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	12	843.274.170.760	547.144.332.079	1. Dinas Kesehatan 2. DPUPR 3. DPRKPLH 4. DKPPP 5. Dinas Perhubungan
6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	4	44.844.301.350	37.188.393.650	1. DPUPR 2. Satpol PP Dan Damkar 3. BPBD 4. Dinas Sosial 5. DPRKPLH
7	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	40	591.962.808.926	540.125.543.359	1. Dinas Sosial 2. Dindikpora 3. DPPPAPPKB 4. Dindukcapil 5. Dinpermades 6. Dinas Perhubungan 7. Dinas Kominfo 8. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 9. Sekretariat Daerah 10. Sekretariat DPRD 11. Bappeda 12. BPKPAD 13. BKPSDM 14. Inspektorat 15. Kecamatan 16. Bakesbangpol
JUMLAH			2.460.295.498.627	2.217.223.857.107	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah

Tabel 5. 11

Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran
1	DKPPP	1	Pangan	1	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman	90	%	75.000.000	0
2	Dinpermades	2	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase desa yang menetapkan peraturan desa (Perdesa) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	3,7	%	507.000.000	523.500.000
						Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang berbadan hukum	50	%		
3	Dinkopdag	3	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3	Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang difasilitasi	0,92	%	331.370.000	50.000.000
				4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM berbasis Desa/Kelurahan	4,45	%	204.500.000	25.000.000
		4	Perdagangan	5	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase fasilitasi pelaku usaha informal	13,71	%	1.161.303.300	1.161.303.300
				Persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik	67	%				

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	
					Persentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital	1,5	%			
					Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	75	%			
				6	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Ketersediaan informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	70	%	220.000.000	210.000.000
				7	Program Pengembangan Ekspor	Cakupan pelaku usaha yang di bina	1,15	%	100.000.000	0
				8	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang	98,37	%	190.000.000	20.000.000
4	DPM	4	Penanaman Modal	9	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan	100	%	20.000.000	7.000.000
					Persentase perusahaan yang bermitra	50	%			
				10	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase promosi penanaman modal	25	%	60.000.000	7.000.000
				11	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan secara Elektronik	100	%	3.350.000.000	3.246.999.800

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	
					Persentase Perizinan yang diterbitkan tepat waktu	100	%			
					Persentase Pengaduan masyarakat yang tertangani	100	%			
				12	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pengendalian penanaman modal	12	%	415.200.000	404.961.000
				13	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	persentase Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	100	%	10.000.000	0
5				14	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	persentase nelayan perairan umum yang terbina	10	%	90.000.000	0
				15	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produktivitas ikan nila	1,2	kg/m2	1.980.383.000	150.000.000
						Produktivitas ikan lele	12,6	kg/m2		
				16	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	persentase peningkatan lokasi penebaran benih ikan	10	%	20.000.000	0
17	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	22,08	kg/kapita/tahun	623.783.000	0				

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	
		6	Pertanian	18	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas padi	61,25	kuintal/ha	22.029.320.649	17.007.101.143
						Produktivitas jagung	54,5	kuintal/ha		
						Produktivitas bawang putih	60,5	kuintal/ha		
						Produktivitas bawang merah	68	kuintal/ha		
						Produktivitas cabai rawit	50	kuintal/ha		
						Produktivitas cabai besar	65	kuintal/ha		
						Produktivitas tembakau	6,2	kuintal/ha		
						Produktivitas kopi robusta	7,1	kuintal/ha		
						Produktivitas kopi arabika	6,5	kuintal/ha		
						Produktivitas ternak sapi	177,4	Kg/Ekor		
						Produktivitas ternak domba	13,7	Kg/Ekor		
						Produktivitas ternak kambing	13,7	Kg/Ekor		
						Produktivitas ternak ayam ras pedaging	0,75	Kg/Ekor		
						Produktivitas ternak ayam ras petelur	10,88	Kg/Ekor		

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	
					Persentase kelahiran pedet	55,5	%			
				19	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana yang dimanfaatkan sesuai fungsinya	100	%	11.560.933.900	8.317.730.900
				20	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penanganan penyakit hewan	85	%	350.575.000	721.500.000
						Persentase pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	75	%		
				21	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian	41	%	550.000.000	0
				22	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yang naik kelas	1,3	%	4.549.896.400	250.000.000
6	Dinbudpar	8	Pariwisata	23	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	0,03	%	567.925.000	154.250.000
						Lama Tinggal Wisatawan	1	hari		
						Persentase Peningkatan Desa Wisata	13,26	%		

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	
					Persentase Peningkatan pelaku Ekraf	9,5	%			
7	Dinperinaker	9	Perindustrian	21	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase IKM industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	71,62	%	310.000.000	410.000.000
						Persentase Pembinaan IKM Tembakau Lembutan	15,36	%		
8	Sekretariat Daerah	11	Sekretariat Daerah	22	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	100	%	1.585.452.900	1.386.327.133
						Persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	100	%		
						Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	80	%		
						Persentase pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang selesai tepat waktu	100	%		
						Prosentase pengadaan barang dan jasa yang berhasil dilaksanakan	100	%		

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	
					Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	100	%			
					Persentase kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan Non-Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	100	%			
					Persentase pelaporan kegiatan Perangkat Daerah dan Unit Kerja tepat waktu	100	%			
					Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	95	%			
9	Bappeda	12	Penelitian dan Pengembangan	23	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian	100	%	1.170.000.000	353.999.400
						Persentase kreativitas dan inovasi daerah yang diterapkan atau diimplementasikan	100	%		
10	DPUPR	13	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	24	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	59,32	%	20.045.987.800	10.234.706.800
						Cakupan area layanan daerah irigasi	97,97	%		

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran
Jumlah							72.078.630.949	44.641.379.476

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2023, data diolah

Tabel 5. 12
Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran
1	Dinas Kesehatan	1 Kesehatan	1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	persentase rumah sehat	87,5	%	470.446.155.500	249.485.207.909
2	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	2 Pendidikan	2 Program Pengelolaan Pendidikan	persentase ruang kelas TK Negeri dalam kondisi baik	100	%	215.448.883.450	189.348.476.380
				persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	90,49	%		
				persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	95,92	%		
3	Kecamatan	3 Kecamatan	3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana lokal kelurahan yang layak	100	%	18.462.970.900	9.800.404.850

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	
					Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang terfasilitasi dan aktif	100	%			
4	DPRKPLH	4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	4	Program Pengembangan Perumahan	88,3	%	1.201.800.000	962.076.200	
5	DPUPR	5	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5	Program Penataan Bangunan Gedung	100	%	16.928.046.000	4.200.000.000	
				6	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	73,93	%	3.210.000.000	2.820.000.000	
				7	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap	89,29	%	60.930.827.100	33.003.168.000
						Persentase jembatan kabupaten kondisi baik	93,75	%		
8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang	89,5	%	629.974.000	950.000.000				
Jumlah								787.258.656.950	490.569.333.339	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2023, data diolah.

Tabel 5. 13

Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	
1	Dindikpora	1	Pendidikan	1	Program Pengelolaan Pendidikan	persentase APM PAUD (5-6 tahun)	81,35	%	215.448.883.450	189.348.476.380
						persentase APK PAUD (0-6 tahun)	42,43	%		
						persentase APK PAUD (4-6 tahun)	77,17	%		
						persentase APK PAUD (5-6 tahun)	89,05	%		
						persentase Pendidik PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4 Pendidikan Guru PAUD/ Bimbingan Konseling/Psikologi	100	%		
						persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	49,14	%		
						Persentase jumlah Kepala Satuan PAUD berkualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%		

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran
				Rasio jumlah pengawas dan penilik PAUD	0,02	angka		
				Persentase ruang kelas TK Negeri dalam kondisi baik	100	%		
				Persentase APM SD Sederajat	98,5	%		
				Persentase APK SD Sederajat	104,87	%		
				Angka putus sekolah SD sederajat	0,02	angka		
				Rasio siswa/guru SD	1:28	angka		
				Rasio siswa/rombel SD	1:28	angka		
				Persentase pendidik SD memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4	100	%		
				Persentase jumlah Kepala SD memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%		

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran
				Persentase tenaga penunjang lain di SD yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%		
				Rasio jumlah pengawas SD	0,1	angka		
				Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	90,49	%		
				Persentase APM SMP Sederajat	88,5	%		
				Persentase APK SMP Sederajat	98,7	%		
				Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	98,7	%		
				Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	0,18	Angka		
				Rasio Siswa/Guru SMP	1:32	Angka		
				Rasio Siswa/Rombel SMP	1:32	Angka		
				persentase Pendidik SMP memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4	100	%		
				persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	66	%		

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran
				persentase Kepala SMP memilikikualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%		
				persentase tenaga penunjang lain di SMP yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%		
				Rasio Jumlah Pengawas SMP	0,07	Angka		
				persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	95,92	%		
				persentase Pendidik Kesetaraan memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4 sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu	100	%		

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran		
				persentase Kepala Satuan Pendidikan Non Formal memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4	100	%				
				persentase tenaga penunjang lain di Satuan Pendidikan Non Formal yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%				
				persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	88	%				
				persentase SDM lembaga kursus yang sudah mendapatkan pelatihan dari DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri)	17	%				
		2	Kepemudaan dan Olahraga	2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	95	%	920.000.000	200.000.000
				3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Prosentase pelatih olahraga bersertifikat	45,62	%	7.465.000.000	3.070.000.000
					Persentase prestasi olah raga	60	%			

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	
2	Dinas Kesehatan	3	Kesehatan	4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	73	per 100.000 KH	470.446.155.500	249.485.207.909
						Angka Kematian Bayi (AKB)	13,5	per 1000 KH		
						Cakupan Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	100	%		
						Prevalensi anemia pada ibu hamil	15,8	% maksimal		
						Cakupan Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100	%		
						Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100	%		
						persentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	100	%		
						persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%		
						Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani	100	%		

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran
				Angka Kematian Neonatal	10,5	per 1.000 KH		
				Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	%		
				Angka Kematian Balita	16	per 1.000 KH		
				Prevalensi ballita gizi buruk	0,5	%		
				Prevalensi Stunted (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-24 bulan)	14	% maksimal		
				persentase bayi umur 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	82,5	% minimal		
				persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%		
				persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%		

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran
				Cakupan warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%		
				persentase fasyankes rujukan yang memenuhi standar mutu	62	%		
				persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%		
				persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%		
				persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	%		
				persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	%		

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran
				persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	%		
				Incident Rate DBD (Demam Berdarah Dengue)	8	Maks per 100.000 penduduk		
				Presentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	82	%		
				persentase rumah sehat	82,3	%		
				persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	100	%		
			5 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Cakupan puskesmas melaksanakan pelayanan farmasi sesuai standar	85	%	472.419.000	445.344.000

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	
3	Dinas Sosial	3	Sosial	6	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	100	%	200.000.000	190.000.000
				7	Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	888.694.000	874.667.400
						Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%		
						Jumlah Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%		
						Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100	%		

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran		
			8	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	100	%	19.307.024.350	21.783.062.415	
					Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	100	%			
					Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	100	%			
					Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan	50	%			
					Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	48	%			
9	Program Penanganan Bencana	persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	100	%	270.000.000	1.770.000.000				
4	DPPPAPKB	4	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki data mikrokeluarga	100	%	406.000.000	423.256.000

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	
				Persentase Pasangan Usia Subur yang Ingin BerKB yang Tepenuhi (unmetneed)	10,5	%			
				Persentase Pasangan Usia Subur yang Istrinya dibawah Usia 20 Tahun	2	%			
				Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19 tahun)	12,6	%			
			11	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Pasangan Usia Subur(PUS) yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	88,5	%	6.621.917.000	7.301.754.000
				Pesentase Kepesertaan KB Aktif	75,75	%			
				Persenatase Keberhasilan Pemakaian Kontrasepsi Jangka Panjang	46,1	%			
				Persentase Kampung KB Berkembang dan Mandiri	37,88	%			

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran		
			12	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks pembangunan keluarga	55,98	%	4.420.900.000	4.273.400.000	
5	Dindikcapil	5	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan KK, KTP el, KIA	87	%	750.000.000	750.000.000
				14	Program Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	99,82	%	20.000.000	
6	Dinpermades	6	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	15	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	persentase Desa yang menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	3,7	%	507.000.000	523.500.000
						persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum	50	%		
7	Dinas perhubungan	7	Perhubungan	16	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai	41,55	%	24.177.304.000	17.865.464.000
						Persentase potensi titik parkir yang tertangani	98,25	%		
						Persentase kendaraan bermotor yang laik jalan	99,61	%		

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran
					Persentase angkutan umum yang memenuhi standar minimal pelayanan	30	%		
					Persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Temanggung	63,58	%		
					Persentase Terminal Tipe C Yang Aktif	100	%		
					Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	100	%		
					Persentase Penerangan jalan di ruas jalan kabupaten	33,48	%		
8	Dinas Kominfo	8	Komunikasi dan Informatika	17	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik			4.035.570.500	3.243.331.100
					persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif	35	%		
					persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik	100	%		
					persentase tindak lanjut laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo	85	%		

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	
9	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	9	Kebudayaan	18	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase kelompok seni budaya yang produktif	80,64	%	11.076.226.500	10.855.000.000
						10	Pariwisata	19	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	persentase pertumbuhan jumlah wisatawan
		Lama Tinggal Wisatawan	1	%						
		persentase Peningkatan Desa Wisata	13,26	%						
		persentase Peningkatan pelaku Ekraft	9,5	%						
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	11	Perpustakaan	20	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase pertumbuhan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan	0,025	%	405.000.000	1.181.189.000
						persentase pertumbuhan jumlah peminjam perpustakaan	0,05			
						Persentase perpustakaan yang aktif	34	%		
11	Dinperinaker	12	Tenaga kerja	21	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	72	%	850.000.000	800.000.000

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	
			Tenaga kerja	22	Program Penempatan Tenaga Kerja	persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina	80	%	
						persentase pencari kerja yang ditempatkan	35	%	160.000.000
						persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	30		
						persentase pencari kerja yang dilatih melalui perluasan kesempatan kerja	1	%	
						persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur	90	%	
12	Dinkopdag	13	Perdagangan	23	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	persentase Ketersediaan informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	70	%	220.000.000
				24	Program Pengembangan Ekspor	cakupan pelaku usaha yang di bina	1.15	%	100.000.000
		14	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	26	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	persentase UMKM berbasis Desa/Kelurahan	4.45	%	204.500.000
									440.000.000
									210.000.000
									0

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran		
			27	Program Pengembangan UMKM	persentase UMKM yang difasilitasi	0.92	%	331,370,000	50.000.000	
13	BAPPEDA	15	Penelitian dan Pengembangan	28	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian	100	%	1.170.000.000	353.999.400
						persentase kreativitas dan inovasi daerah yang diterapkan atau diimplementasikan	100	%		
14	DPPPAPKB	16	Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak	29	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	persentase desa sayang ibu dan bayi	62,28	%	25.000.000	35.000.000
						persentase pelayanan ramah anak di rumah sakit dan puskesmas	100	%		
				30	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kabupaten Layak Anak	Nindya	Kategori	60.000.000	10.000.000
				31	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	2,65	%	35.000.000	35.000.000
Rasio Perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan renja PD	100	%								
			32	Program Perlindungan Perempuan	persentase kasus kekerasan terhadap anak perempuan	0,0029	%	60.000.000	75.000.000	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran
					persentase kasus kekerasan terhadap perempuan	0,0029	%		
				33	Program Perlindungan Khusus Anak	0,004	%	425.000.000	95.000.000
Jumlah								772.046.889.30	515.841.901.604

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2023, data diolah

Tabel 5. 14
Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	
1	Dinas Kebudayaan dan pariwisata	1	Kebudayaan	1	Program Pengembangan Kebudayaan	persentase kelompok Budaya yang Teregister	4,1	%	11.076.226.500	10.855.000.000
						persentase kelompok kesenian yang produktif	38	%		
						persentase pelestarian Sejarah Lokal	7,49	%		
						persentase Pelestarian Cagar Budaya	9,18	%		
2	BKPSDM	2	Kepegawaian	2	Program Kepegawaian Daerah	Cakupan Pengembangan SDM Aparatur	41,39	%	1.848.770.500	433.999.500
						Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur dan layanan Aparatur	86,5	%		

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	
3	Sekretariat Daerah	3	Sekretariat Daerah	3	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	persentase Kerjasama yang diimplementasikan	100	%	33.673.324.700	28.473.785.700
						persentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat Waktu	100	%		
						persentase perangkat daerah yang menyampaikan LPPD dan LKPJ tepat waktu	100	%		
						persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	90	%		
						persentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	60	%		
						persentase produk hukum yang difasilitasi	100	%		
						persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	100	%		
						persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi	100	%		

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	
				8	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Penelusuran Naskah Kuno	100	%	15.000.000	-
6	Bappeda	6	Penelitian dan Pengembangan	9	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian	100	%	1.170.000.000	353.999.400
						persentase kreativitas dan inovasi daerah yang diterapkan atau diimplementasikan	100	%		
Jumlah								49.388.321.700	41.712.973.600	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2023, data diolah.

Tabel 5. 15
Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN:5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	
1	Dinas Kesehatan	1	Kesehatan	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka kematian ibu	73	Per 100.000 kelahiran hidup	470.446.155.500	249.485.207.909
						Angka kematian bayi	13,5	Per 1000 kelahiran hidup		

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran
				Cakupan Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	100	%		
				Prevalensi anemia pada ibu hamil	15,8	% maksimal		
				Cakupan Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100	%		
				Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100	%		
				persentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	100	%		
				persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%		
				Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani	100	%		

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran
				Angka Kematian Neonatal	10,5	per 1.000 KH		
				Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	%		
				Angka Kematian Balita	16	per 1.000 KH		
				Prevalensi ballita gizi buruk	0,5	%		
				Prevalensi Stunted (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-24 bulan)	14	% maksimal		
				persentase bayi umur 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	82,5	% minimal		
				persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%		
				persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%		

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran
				Cakupan warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%		
				persentase fasyankes rujukan yang memenuhi standar mutu	62	%		
				persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%		
				persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%		
				persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	%		
				persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	%		

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran		
				persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	%				
				Incident Rate DBD (Demam Berdarah Dengue)	8	Maks per 100.000 penduduk				
				Presentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	82	%				
				persentase rumah sehat	82,3	%				
				persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	100	%				
2	DPUPR	2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	59,32	%	20.045.987.800	10.234.706.800
						Cakupan area layanan daerah irigasi	97,97	%		
				3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	95,5	%	9.929.055.750	8.645.297.000
						Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	100	%		

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran		
			4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	persentase saluran drainase kondisi baik	69,04	%	1.850.000.000	1.351.000.000	
			5	Program Penataan Bangunan Gedung	persentase terbangunnya gedung pemerintah	100	%	16.928.046.000	4.200.000.000	
			6	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase Trotoar kondisi baik	73,93	%	3.210.000.000	2.820.000.000	
			7	Program Penyelenggaraan Jalan	persentase Jalan Kondisi Mantap	89,29	%	60.930.827.100	33.003.168.000	
					persentase Jembatan dalam kondisi baik	93,75	%			
					persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan	18,61	%			
			8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	89,5	%	629.974.000	950.000.000	
3	DPRKPLH	3	Perumahan dan Kawasan Permukiman	9	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	4,46	%	1.201.800.000	962.076.200
						Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	88,3	%		
				#	Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah layak huni	95,54	%	8.560.738.800	6.597.124.790

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	
					Persentase kawasan kumuh perkotaan	4,84	%			
					Persentase warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	%			
					Persentase warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100	%			
		4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	#	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)	100	%	5.000.000.000	10.469.879.000
		5	Lingkungan Hidup	#	Program Pengelolaan Persampahan	persentase sampah yang tertangani	60.21	%	17.871.980.000	9.164.999.700
					Cakupan layanan persampahan	64.71	%			
4	Dinas perhubungan	6	Perhubungan	#	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai	41,55	%	24.177.304.000	17.865.464.000

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran		
				persentase Angkutan umum yang memenuhi standar minimal pelayanan	30	%				
				persentase potensi titik parkir yang tertangani	98,25	%				
				persentase Terminal Tipe C Yang Aktif	100	%				
				persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	100	%				
				persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	99,61	%				
				persentase penerangan jalan di ruas jalan kabupaten	33,48	%				
				persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Temanggung	63,58	%				
5	Dinkominfo	7	Komunikasi dan Informatika	#	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	persentase kinerja infrastruktur TIK yang baik	100	%	8.915.398.360	2.046.932.300
						persentase layanan publik secara elektronik	50	%		
6	Dinas Pendidikan	8	Pendidikan	#		persentase APM PAUD (5-6 tahun)	81,35	%	215.448.883.450	189.348.476.380

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran
			Program Pengelolaan Pendidikan	persentase APK PAUD (0-6 tahun)	42,43	%		
				persentase APK PAUD (4-6 tahun)	77,17	%		
				persentase APK PAUD (5-6 tahun)	89,05	%		
				persentase Pendidik PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4 Pendidikan Guru PAUD/Bimbingan Konseling/Psikologi	100	%		
				persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	49,14	%		
				persentase Jumlah Kepala Satuan PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%		
				Rasio Jumlah Pengawas dan Penilik PAUD	0,02	Angka		

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran
				persentase ruang kelas TK Negeri dalam kondisi baik	100	%		
				persentase APM SD Sederajat	98,5	%		
				persentase APK SD Sederajat	100	%		
				Angka Putus Sekolah SD Sederajat	0,02	Angka		
				Rasio Siswa/Guru SD	1:28	Angka		
				Rasio Siswa/Rombel SD	1:28	Angka		
				persentase Pendidik SD memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4	100	%		
				persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	55	%		
				persentase Kepala SD memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%		

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran
				persentase tenaga penunjang lain di SD yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%		
				Rasio Jumlah Pengawas SD	0,1	Angka		
				persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	90,49	%		
				persentase APM SMP Sederajat	88,5	%		
				persentase APK SMP Sederajat	98,7	%		
				Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	98,7	Angka		
				Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	0,18	Angka		
				Rasio Siswa/Guru SMP	1:32	Angka		
				Rasio Siswa/Rombel SMP	1:32	Angka		
				persentase Pendidik SMP memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4	100	%		
				persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	66	%		

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran
				persentase Kepala SMP memilikikualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%		
				persentase tenaga penunjang lain di SMP yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%		
				Rasio Jumlah Pengawas SMP	0,07	Angka		
				persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	95,92	%		
				persentase Pendidik Kesetaraan memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4 sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu	100	%		
				persentase Kepala Satuan Pendidikan Non Formal memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4	100	%		

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran
				persentase tenaga penunjang lain di Satuan Pendidikan Non Formal yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%		
				persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	88	%		
				persentase SDM lembaga kursus yang sudah mendapatkan pelatihan dari DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri)	17	%		
Jumlah							865.146.150.760	547.144.332.079

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2023, data diolah

Tabel 5. 16

Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran
1	DPUPR	1 Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	59,32	%	20.045.987.800	10.234.706.800
				Cakupan area layanan daerah irigasi	97,97	%		

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran		
2	Satpol PP Dan Damkar	2	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (<i>Respon Time Rate</i>) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	75	%	1.963.333.600	1.602.679.000
						persentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100	%		
						persentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran oleh relawan kebakaran	100	angka		
						persentase Bangunan/Gedung/Lingkungan yang menjadi prioritas inspeksi	3,08	%		
3	BPBD	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	3	Program Penanggulangan Bencana	persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	%	1.728.000.000	1.203.174.000	
					persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	%			
					persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	%			

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	
4	Dinas Sosial	3	Sosial	4	Program Penanganan Bencana	persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	100	%	270.000.000	1.770.000.000
5	DPRKPLH	4	Lingkungan Hidup	5	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	100	%	750.000.000	200.000.000
					Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	100	%		
				6	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	52,7	Angka	799.999.950	442.955.150
						Indeks Kualitas Udara	83,82	Angka		
						persentase Luas Lahan Kritis Tertangani terhadap Total Luas Lahan Kritis	0,067	%		
7	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	persentase Luas RTH Milik Pemerintah Daerah yang Tertangani	63,9	%	1.300.000.000	2.050.000.000				
8	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	persentase usaha yang memiliki Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3	100	%	15.000.000	-				

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	
			9	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	100	%	50.000.000	
			10	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	100	%	50.000.000	50.000.000
			11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang tertangani	60,21	%	17.871.980.000	9.164.999.700
				Cakupan layanan persampahan	64,71	%			
			12	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan	28.6	%	100.000.000	0
			13	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100	%	10.000.000	0
		5	14	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)	100	%	5.000.000.000	10.469.879.000

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran
Jumlah							#####	37.188.393.650

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2023, data diolah.

Tabel 5. 17

Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 7: Memperkuat Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran
1	Dinas Sosial	1 Sosial	1 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	100	%	200.000.000	200.000.000
2	Dindikpora	2 Kepemudaan dan Olah Raga	2 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	95	%	920.000.000	200.000.000
3	DPPPAPPKB	3 Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	3 Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	2,65	%	35.000.000	35.000.000
				Rasio perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan renja PD	100	%		

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	
				4	Program Perlindungan Perempuan	persentase kasus kekerasan terhadap anak perempuan	0,0029	%	60.000.000	75.000.000
						persentase kasus kekerasan terhadap perempuan	0,0029	%		
				5	Program Perlindungan Khusus Anak	Presentase kasus kekerasan terhadap anak	0,004	%	425.000.000	95.000.000
		4	Pengendalian Penduduk Dan KB	6	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki data mikrokeluarga	100	%	406.000.000	423.256.000
						Persentase Pasangan Usia Subur yang Ingin BerKB yang Tepenuhi (<i>unmetneed</i>)	10,5	%		
						Persentase Pasangan Usia Subur yang Istrinya dibawah Usia 20 Tahun	2	%		
						Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19 tahun)	12,6	%		

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	
				7	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	88,5	%	6.621.917.000	7.301.754.000
						Persentase kepesertaan KB aktif	75,75	%		
						Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	46,1	%		
						Persentase Kampung KB Berkembang dan Mandiri	33,9	%		
				8	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks pembangunan keluarga	55,98	%	4.420.900.000	4.273.400.000
4	Dindikcapil	5	Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil	9	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan KK, KTP el, KIA	87	%	750.000.000	750.000.000
				10	Program Pelayanan dan Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	99,82	%	20.000.000	0

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran																	
				11	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	persentase terpeliharanya Sarpras SIAK untuk pelayanan Administrasi Kependudukan	94,9	%	500.000.000	270.000.000																
						persentase Pelaksanaan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital	0,8	%			5	Dinpermades	6	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	12	Program Penataan Desa	Persentase Peraturan Desa Tentang Pungutan yang sesuai dengan Kewenangan Desa	60	%	25.000.000	15.000.000	13	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kepatuhan Pelaporan Aset Desa dalam Aplikasi Sipades	50	%
5	Dinpermades	6	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	12	Program Penataan Desa	Persentase Peraturan Desa Tentang Pungutan yang sesuai dengan Kewenangan Desa	60	%	25.000.000	15.000.000																
						13	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kepatuhan Pelaporan Aset Desa dalam Aplikasi Sipades	50	%					420.000.000	3.848.000.000										
				Persentase laporan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh BPD	70			%																		
Persentase penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	100	%																								

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	
					persentase pengisian kekosongan Perangkat Desa	37	%			
					persentase Desa Cepat Berkembang berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa	38,34	%			
6	Dinas Perhubungan	7	Perhubungan	14	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai	41,55	%	24.177.304.000	17.865.464.000
						persentase Angkutan umum yang memenuhi standar minimal pelayanan	30	%		
						persentase potensi titik parkir yang tertangani	98,25	%		
						persentase Terminal Tipe C Yang Aktif	100	%		
						persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	100	%		
						persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	99,61	%		
						persentase penerangan jalan di ruas jalan kabupaten	33,48	%		

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	
					persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Temanggung	63,58	%			
7	Dinas Kominfo	8	Komunikasi Dan Informatika	15	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif	35	%	4.035.570.500	3.243.331.100
					persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik	100	%			
					persentase tindak lanjut laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo	85	%			
				16	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase kinerja infrastruktur TIK yang baik	100	%	8.915.398.360	2.046.932.300
		Persentase layanan publik secara elektronik	50			%				
9	Statistik	17	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Ketersediaan data statistik sektoral	100	%	127.833.000	102.832.800		

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	
		10	Persandian	18	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	persentase penilaian resiko keamanan informasi	33,3	%	70.000.000	100.000.000
						persentase pelaksanaan prosedur pengamanan informasi pada perangkat daerah	30	%		
8	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	11	Kearsipan	19	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase penelusuran naskah kuno	100	%	15.000.000	-
				20	Program Pengelolaan Arsip	Persentase arsip vital konvensional yang dialih mediakan	55	%	420.000.000	199.300.000
Persentase audit internal kearsipan	66,67	%								
9	Sekretariat Daerah	12	Sekretariat Daerah	21	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	persentase Kerjasama yang diimplementasikan	100	%	33.673.324.700	28.473.785.700
						persentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat Waktu	100	%		
						persentase perangkat daerah yang menyampaikan LPPD dan LKPJ tepat waktu	100	%		
						persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan	90	%		

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran
					kegamaan kondisi baik				
					persentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	60	%		
					persentase produk hukum yang difasilitasi	100	%		
					persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	100	%		
					persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi	100	%		
					persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi	100	%		
			22	Program Perekonomian Dan Pembangunan	persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	100	%	1.585.452.900	1.386.327.133
					persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	100	%		
					persentase BUMD dengan opini WTP	80	%		

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran
				atas pemeriksaan KAP				
				persentase paket pekerjaan selesai tepat waktu	100	%		
				persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu	100	%		
				persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	100	%		
				persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (tender)	100	%		
				persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (PL > 100 juta)	100	%		
				persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	50	%		

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	
10	Sekretariat DPRD	13	Sekretariat DPRD	23	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	persentase jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas	90	%	12.854.445.193	21.380.881.151
						persentase kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang dilaksanakan sesuai rencana	95	%		
						persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	100	%		
						persentase kegiatan peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	100	%		
11	Bappeda	14	Perencanaan	24	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	100	%	1.069.782.500	1.189.782.500
						Persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu	95	%		
				25	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat	90	%	1.715.000.000	543.500.000

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	
					daerah sub bidang pembangunan manusia					
					Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	90	%			
					Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang ekonomi dan sumber daya alam	90	%			
					Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang infrastruktur	90	%			
12	BPKPAD	15	Keuangan	26	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan pengalokasian anggaran belanja mandatory spending dalam APBD	100	%	409.278.434.633	401.392.972.125

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	
				persentase dokumen penganggaran tepat waktu	100	%			
				persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	100	%			
				Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu	100	%			
			27	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyampaian Laporan Daftar Barang Milik Daerah tepat waktu	100	%	1.215.148.000	1.100.551.400
					persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	80	%		
			28	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	persentase Peningkatan Potensi Target Pajak Daerah	8	%	710.187.000	675.509.500
					persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	100	%		
					persentase realisasi penerimaan pajak daerah	95	%		
					Penyampaian Laporan Pendapatan Daerah tepat waktu	100	%		

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	
					Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	95	%			
13	BKPSDM	16	Kepegawaian	29	Program Kepegawaian Daerah	Cakupan Pengembangan SDM Aparatur	38,11	%	1.848.770.500	433.999.500
						Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur dan layanan Aparatur	86,32	%		
14	Inspektorat	17	Inspektorat Daerah	30	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut hasil temuan	100	%	550.215.000	662.215.000
						Persentase penanganan aduan masyarakat	100	%		
						Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	61	%		
						Prosentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah	48	%		

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	
				dan tuntutan atas kerugian negara					
				Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa	63	%			
			31	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya Nilai maturitas SPIP	20	%	380.921.000	363.000.000
				Persentase perangkat daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) / Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	100	%			
				Persentase tindak lanjut aduan <i>Whistle blowing</i> , Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	100	%			

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran	
					Kompilasi level komponen dukungan pengawasan dan komponen aktifitas pengawasan serta kualitas pengawasan Nilai Survey Penilaian Integritas	3	Level			
15	Kecamatan	18	Kecamatan	32	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di kecamatan	100	%	2.039.868.490	255.000.300
						persentase realisasi penerimaan PBB	100	%		
				33	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang layak	100	%	18.462.970.900	9.800.404.850
						Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang terfasilitasi dan aktif	100	%		
				34	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	persentase penanganan laporan kejadian gangguan kantibnas dan bencana alam	100	%	340.789.900	18.200.000
36	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase penyelesaian pelanggaran disiplin	100	%	408.905.700	27.175.000				

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran
					kepala desa dan perangkat desa				
					Persenatase jumlah desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu	100	%		
					persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKPDes tepat waktu	100	%		
16	Bankesbangpol	19	Kesatuan Bangsa Dan Politik	37	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	62	%	850.000.000	415.000.000
				38	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	80	%	51.468.669.650	30.460.469.000
				39	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	13,33	%	30.000.000	0
				40	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	100	%	320.000.000	185.000.000

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	Perubahan Anggaran
			41 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik dan keamanan daerah	100	%	595.000.000	317.500.000
Jumlah							591.962.808.926	540.125.543.359

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2023, data diolah.

Tabel 5. 18

Dukungan Program Daerah dalam RKD/RKPD Kabupaten Temanggung terhadap Program Prioritas/Kegiatan Prioritas dalam PN RKP 2024

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah dalam RPD/RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
1	PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan					
	Program Prioritas 1.1: Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)					
	Kegiatan Prioritas 1.1: 1. Akselerasi pengembangan pembangkit energi baru terbarukan 2. Peningkatan pasokan bahan bakar nabati 3. Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi 4. Peningkatan pemenuhan energi domestik 5. Pengembangan industri pendukung EBT	(Energi bukan kewenangan Kabupaten)	-	-	-	-

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah dalam RPD/RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
Program Prioritas 1.2: Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi						
	Kegiatan Prioritas 1.2: 1. Pemantapan kawasan berfungsi lindung 2. Pengelolaan hutan berkelanjutan 3. Penyediaan air untuk pertanian 4. Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas 5. Pemeliharaan, pemulihan dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau 6. Pengembangan waduk multiguna	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	59,32	%	20.045.987.800
			Cakupan area layanan daerah irigasi	97,97	%	
Program Prioritas 1.3: Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan						
	Kegiatan Prioritas 1.3: 1. Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi Pangan 2. Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan hasil laut secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok 3. Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar 4. Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman	90	%	75.000.000
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	persentase nelayan perairan umum yang terbina	10	%	90.000.000
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produktivitas ikan nila	1,2	kg/m ²	1.980.383.000
			Produktivitas ikan lele	12,6	kg/m ²	
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase tersedianya data dan informasi produksi olahan hasil perikanan	100	%	10.000.000
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	persentase peningkatan lokasi pennebaran benih ikan	10	%	20.000.000
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas padi	61,25	kuintal/ha	22.029.320.649
			Produktivitas jagung	54,5	kuintal/ha	
Produktivitas bawang putih	60,5		kuintal/ha			
Produktivitas bawang merah	68		kuintal/ha			
	Produktivitas cabai rawit	50	kuintal/ha			

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah dalam RPD/RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
5.	Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional		Produktivitas cabai besar	65	kuintal/ha	
			Produktivitas tembakau	6,2	kuintal/ha	
			Produktivitas kopi robusta	7,1	kuintal/ha	
			Produktivitas kopi arabika	6,5	kuintal/ha	
			Produktivitas ternak sapi	177,4	Kg/Ekor	
			Produktivitas ternak domba	13,7	Kg/Ekor	
			Produktivitas ternak kambing	13,7	Kg/Ekor	
			Produktivitas ternak ayam ras pedaging	0,75	Kg/Ekor	
			Produktivitas ternak ayam ras petelur	10,88	Kg/Ekor	
			Persentase kelahiran pedet	55,5	%	
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana yang dimanfaatkan sesuai fungsinya	100	%	11.560.933.900
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penanganan penyakit hewan	85	%	350.575.000
			Persentase pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	75	%	
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian	41	%	550.000.000		
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yang naik kelas	1,3	%	4.549.896.400		
Program Prioritas 1.4: Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan						
1.	Peningkatan pengelolaan wilayah Pengelolaan perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produktivitas ikan nila	1,2	kg/m2	1.980.383.000
			Produktivitas ikan lele	12,6	kg/m2	
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	persentase nelayan perairan umum yang terbina	10	%	90.000.000

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah dalam RPD/RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
	zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	persentase peningkatan lokasi pennebaran benih ikan	10	%	20.000.000
	2. Peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	22,08	kg/kapita/tahun	623.783.000
	3. Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan					
	4. Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap Pengelolaan sumber daya					
	5. Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan					
Program Prioritas 1.5: Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi						
	Kegiatan Prioritas 1.5: 1. Peningkatan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar	Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang difasilitasi	0,92	%	331.370.000
	2. Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM berbasis Desa/Kelurahan	4,45	%	204.500.000
	3. Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase desa yang menetapkan peraturan desa (Perdesa) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	3,7	%	507.000.000
	4. Peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha		Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang berbadan hukum	50	%	
	5. Peningkatan nilai tambah usaha sosial		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase fasilitasi pelaku usaha informal	67	
			Persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik	70	%	1.161.303.300

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah dalam RPD/RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	
			Persentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital	90	%		
			Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	34	%		
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Ketersediaan informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	70	%	220.000.000	
		Program Pengembangan Ekspor	Cakupan pelaku usaha yang di bina	1,15	%	100.000.000	
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang	98,37	%	190.000.000	
Program Prioritas 1.6: Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi							
	Kegiatan Prioritas 1.6: 1. Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman dan non-agro yang terintegrasi hulu-hilir 2. Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar jawa 3. Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok 4. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase IKM industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	71,62	%	310.000.000	
			Persentase Pembinaan IKM Tembakau Lembutan	15,36	%		
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	0,03	%	331.172.000
				Lama Tinggal Wisatawan	1	hari	
				Persentase Peningkatan Desa Wisata	13,26	%	
				Persentase Peningkatan pelaku Ekraf	9,5	%	
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan	100	%	20.000.000
				Persentase perusahaan yang bermitra	50	%	
			Program Promosi Penanaman Modal	Persentase promosi penanaman modal	25	%	60.000.000

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah dalam RPD/RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
5. Perbaiki iklim usaha dan Peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan 6. Pengembangan industri halal		Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan secara Elektronik	100	%	3.350.000.000
			Persentase Perizinan yang diterbitkan tepat waktu	100	%	
			Persentase Pengaduan masyarakat yang tertangani	100	%	
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pengendalian penanaman modal	12	%	415.200.000
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	persentase Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	100	%	10.000.000
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	100	%	3.023.138.500
			Persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	100	%	
			Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	80	%	
			Persentase pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang selesai tepat waktu	100	%	
			Prosentase pengadaan barang dan jasa yang berhasil dilaksanakan	100	%	
			Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	100	%	
Persentase kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan Non-Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	100		%			

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah dalam RPD/RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
			Persentase pelaporan kegiatan Perangkat Daerah dan Unit Kerja tepat waktu	100	%	
			Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	95	%	
Program Prioritas 1.7:						
Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)						
	Kegiatan Prioritas 1.7:	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase IKM industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	71,62	%	310.000.000
	1. Peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa		Persentase Pembinaan IKM Tembakau Lembutan	15,36	%	
	2. Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	0,03	%	567.925.000
	3. Pengelolaan impor		Lama Tinggal Wisatawan	1	hari	
	4. Peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif		Persentase Peningkatan Desa Wisata	13,26	%	
	5. Peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global		Persentase Peningkatan pelaku Ekraf	9,5	%	
	6. Peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan destinasi branding, dan produk kreatif		Lama tinggal wisatawan	1	hari	
	7. Peningkatan efektivitas <i>Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)</i> dan diplomasi ekonomi	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Ketersediaan informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	70	%	220.000.000
		Program Pengembangan Ekspor	Cakupan pelaku usaha yang di bina	1,15	%	100.000.000
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang	98,37	%	190.000.000
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	100	%	3.023.138.500
			Persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	100	%	

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah dalam RPD/RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
			Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	80	%	
			Persentase pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang selesai tepat waktu	100	%	
			Persentase pengadaan barang dan jasa yang berhasil dilaksanakan	100	%	
			Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	100	%	
			Persentase kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan Non-Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	100	%	
			Persentase pelaporan kegiatan Perangkat Daerah dan Unit Kerja tepat waktu	100	%	
			Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	95	%	
Program Prioritas 1.8: Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing						
	Kegiatan Prioritas 1.8: 1. Peningkatan pendalaman sektor keuangan 2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0 3. Peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga 4. Peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase IKM industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	71,62	%	310.000.000
			Persentase Pembinaan IKM Tembakau Lembutan	15,36	%	
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	0,03	%	567.925.000
			Lama Tinggal Wisatawan	1	hari	
			Persentase Peningkatan Desa Wisata	13,26	%	

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah dalam RPD/RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
5. Reformasi fiskal 6. Peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital			Persentase Peningkatan pelaku Ekraf	9,5	%	
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Ketersediaan informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	70	%	220.000.000
		Program Pengembangan Ekspor	Cakupan pelaku usaha yang di bina	1,15	%	100.000.000
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang	98,37	%	190.000.000
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	100	%	3.023.138.500
			Persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	100	%	
			Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	80	%	
			Persentase pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang selesai tepat waktu	100	%	
			Prosentase pengadaan barang dan jasa yang berhasil dilaksanakan	100	%	
			Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	100	%	
			Persentase kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan Non-Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	100	%	
Persentase pelaporan kegiatan Perangkat Daerah dan Unit Kerja tepat waktu	100	%				

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah dalam RPD/RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
			Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	95	%	
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan	100	%	20.000.000
			Persentase perusahaan yang bermitra	50	%	
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase promosi penanaman modal	25	%	60.000.000
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pengendalian penanaman modal	12	%	415.200.000
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian	100	%	382.452.000
			Persentase kreativitas dan inovasi daerah yang diterapkan atau diimplementasikan	100	%	
2	PN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan					
	Program Prioritas 2.1: Pembangunan Wilayah Sumatera	(Kabupaten Temanggung berada di Wilayah Jawa)	-	-	-	-
	Program Prioritas 2.2: Pembangunan Wilayah Jawa-Bali					
	Kegiatan Prioritas 2.2: 1. Pengembangan kawasan strategis 2. Pengembangan sektor unggulan 3. Pengembangan kawasan perkotaan 4. Pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, dan transmigrasi 5. Kelembagaan dan keuangan daerah	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana lokal kelurahan yang layak	100	%	18.462.970.900
			Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang terfasilitasi dan aktif	100	%	
		Program Pengembangan Perumahan	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	88,3	%	1.201.800.000
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	persentase rumah sehat	87,5	%	470.446.155.500

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah dalam RPD/RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
		Program Pengelolaan Pendidikan	persentase ruang kelas TK Negeri dalam kondisi baik	100	%	215.448.883.450
			persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	90,49	%	
			persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	95,92	%	
		Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase gedung pemerintah kondisi baik	100	%	16.928.046.000
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Trotoar kondisi baik	73,93	%	3.210.000.000
		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap	89,29	%	60.930.827.100
			Persentase jembatan kabupaten kondisi baik	93,75	%	
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang	89,5	%	629.974.000
	Program Prioritas 2.3: Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara	(Kabupaten Temanggung berada di Wilayah Jawa)	-	-	-	-
	Program Prioritas 2.4: Pembangunan Wilayah Kalimantan	(Kabupaten Temanggung berada di Wilayah Jawa)	-	-	-	-
	Program Prioritas 2.5: Pembangunan Wilayah Sulawesi	(Kabupaten Temanggung berada di Wilayah Jawa)	-	-	-	-
	Program Prioritas 2.6: Pembangunan Wilayah Maluku	(Kabupaten Temanggung berada di Wilayah Jawa)	-	-	-	-
	Program Prioritas 2.7: Pembangunan Wilayah Papua	(Kabupaten Temanggung berada di Wilayah Jawa)	-	-	-	-
3	PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing					
	Program Prioritas 3.1: Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan					
	Kegiatan Prioritas 3.1:	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki data mikrokeluarga	100	%	406.000.000

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah dalam RPD/RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	
	1. Percepatan cakupan administrasi kependudukan 2. Integrasi sistem administrasi kependudukan 3. Pendampingan dan layanan terpadu 4. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk		Persentase Pasangan Usia Subur yang Ingin BerKB yang Tepenuhi (unmetneed)	10,5	%	6.621.917.000	
			Persentase Pasangan Usia Subur yang Istrinya dibawah Usia 20 Tahun	2	%		
			Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19 tahun)	12,6	%		
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	88,5	%		
			Persentase Kepesertaan KB Aktif	75,75	%		
			Persentase Keberhasilan Pemakaian Kontrasepsi Jangka Panjang	46,1	%		
			Persentase Kampung KB Berkembang dan Mandiri	37,88	%		
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks pembangunan keluarga	55,98	%		4.420.900.000
		Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan KK, KTP el, KIA	87	%		750.000.000
		Program Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	99,82	%		20.000.000
Program Prioritas 3.2:							
Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial							
	Kegiatan Prioritas 3.2:	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	100	%	200.000.000	
	1. Sistem jaminan sosial nasional						
	2. Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran						
	3. Perlindungan sosial adaptif						

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah dalam RPD/RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
4.	Kesejahteraan sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	888.694.000
			Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	
			Jumlah Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	
			Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100	%	
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	100	%	19.307.024.350
			Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	100	%	
			Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	100	%	
			Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan	50	%	
			Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	48	%	
		Program Penanganan Bencana	persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	100	%	270.000.000
		Program Prioritas 3.3:				
Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan						

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah dalam RPD/RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
	Kegiatan Prioritas 3.3: 1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi 2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat 3. Peningkatan pengendalian penyakit 4. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) 5. Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	73	per 100.000 KH	470.446.155.500
			Angka Kematian Bayi (AKB)	13,5	per 1000 KH	
			Cakupan Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	100	%	
			Prevalensi anemia pada ibu hamil	15,8	% maksimal	
			Cakupan Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100	%	
			Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100	%	
			persentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	100	%	
			persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
			Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani	100	%	
			Angka Kematian Neonatal	10,5	per 1.000 KH	
			Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	%	
			Angka Kematian Balita	16	per 1.000 KH	
			Prevalensi ballita gizi buruk	0,5	%	
			Prevalensi Stunted (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-24 bulan)	14	% maksimal	
			persentase bayi umur 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	82,5	% minimal	
			persentase anak pada usia pendidikan dasar yang	100	%	

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah dalam RPD/RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
			mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
			persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%	
			Cakupan warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%	
			persentase fasyankes rujukan yang memenuhi standar mutu	62	%	
			persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
			persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
			persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	%	
			persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	%	
			persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	%	
			Incident Rate DBD (Demam Berdarah Dengue)	8	Maks per 100.000 penduduk	
			Presentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	82	%	

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah dalam RPD/RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
			persentase rumah sehat	82,3	%	
			persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	100	%	
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Cakupan puskesmas melaksanakan pelayanan farmasi sesuai standar	85	%	472.419.000
Program Prioritas 3.4: Peningkatan pemerataan layanan Pendidikan berkualitas						
	Kegiatan Prioritas 3.4: 1. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran 2. Afiriasi akses dan percepatan wajib belajar 12 tahun 3. Peningkatan Pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan 4. Penjaminan mutu Pendidikan 5. Peningkatan tata Kelola Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	persentase APM PAUD (5-6 tahun)	81,35	%	215.448.883.450
			persentase APK PAUD (0-6 tahun)	42,43	%	
			persentase APK PAUD (4-6 tahun)	77,17	%	
			persentase APK PAUD (5-6 tahun)	89,05	%	
			persentase Pendidik PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4 Pendidikan Guru PAUD/ Bimbingan Konseling/Psikologi	100	%	
			persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	49,14	%	
			Persentase jumlah Kepala Satuan PAUD berkualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%	
			Rasio jumlah pengawas dan penilik PAUD	0,02	angka	
			Persentase ruang kelas TK Negeri dalam kondisi baik	100	%	
			Persentase APM SD Sederajat	98,5	%	
			Persentase APK SD Sederajat	104,87	%	
			Angka putus sekolah SD sederajat	0,02	angka	
			Rasio siswa/guru SD	1:28	angka	

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah dalam RPD/RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
			Rasio siswa/rombel SD	1:28	angka	
			Persentase pendidik SD memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4	100	%	
			Persentase jumlah Kepala SD memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%	
			Persentase tenaga penunjang lain di SD yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%	
			Rasio jumlah pengawas SD	0,1	angka	
			Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	90,49	%	
			Persentase APM SMP Sederajat	88,5	%	
			Persentase APK SMP Sederajat	98,7	%	
			Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	98,7	%	
			Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	0,18	Angka	
			Rasio Siswa/Guru SMP	1:32	Angka	
			Rasio Siswa/Rombel SMP	1:32	Angka	
			persentase Pendidik SMP memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4	100	%	
			persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	66	%	
			persentase Kepala SMP memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat	100	%	

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah dalam RPD/RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
			pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak			
			persentase tenaga penunjang lain di SMP yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%	
			Rasio Jumlah Pengawas SMP	0,07	Angka	
			persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	95,92	%	
			persentase Pendidik Kesetaraan memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4 sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu	100	%	
			persentase Kepala Satuan Pendidikan Non Formal memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4	100	%	
			persentase tenaga penunjang lain di Satuan Pendidikan Non Formal yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%	
			persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	88	%	
			persentase SDM lembaga kursus yang sudah mendapatkan pelatihan dari DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri)	17	%	
		Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase pertumbuhan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan	0,025	%	405.000.000

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah dalam RPD/RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
			persentase pertumbuhan jumlah peminjam perpustakaan	0,05	%	
			Persentase perpustakaan yang aktif	34	%	
Program Prioritas 3.5: Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda						
	Kegiatan Prioritas 3.5: 1. Pemenuhan hak dan perlindungan anak 2. Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan 3. Kualitas pemuda	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	persentase desa sayang ibu dan bayi	62,28	%	25.000.000
			persentase pelayanan ramah anak di rumah sakit dan puskesmas	100	%	
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kabupaten Layak Anak	Nindya	Kategori	60.000.000
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	2,65	%	35.000.000
			Rasio Perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan renja PD	100	%	
		Program Perlindungan Perempuan	persentase kasus kekerasan terhadap anak perempuan	0,0029	%	60.000.000
			persentase kasus kekerasan terhadap perempuan	0,0029	%	
		Program Perlindungan Khusus Anak	persentase kasus kekerasan terhadap anak	0,004	%	425.000.000
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	95	%	920.000.000	
Program Prioritas 3.6: Pengentasan kemiskinan						
	Kegiatan Prioritas 3.6: 1. Akselerasi penguatan ekonomi keluarga 2. Keperantaraan usaha dan dampak sosial 3. Reforma agraria	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	persentase Desa yang menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	3,7	%	507.000.000
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	0,03	%	567.925.000

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah dalam RPD/RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	
4.	Perhutanan sosial		Lama Tinggal Wisatawan	1	%		
			persentase Peningkatan Desa Wisata	13,26	%		
			persentase Peningkatan pelaku Ekraft	9,5	%		
			Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase kelompok seni budaya yang produktif	80,64	%	11.076.226.500
			Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	100	%	200.000.000
			Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	888.694.000
				Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	
				Jumlah Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	
				Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100	%	
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	100	%	19.307.024.350
				Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	100	%	
				Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	100	%	

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah dalam RPD/RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
			Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan	50	%	
			Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	48	%	
		Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang difasilitasi	0,92	%	331.370.000
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM berbasis Desa/Kelurahan	4,45	%	204.500.000
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Ketersediaan informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	70	%	220.000.000
		Program Pengembangan Ekspor	Cakupan pelaku usaha yang di bina	1,15	%	100.000.000
Program Prioritas 3.7: Peningkatan produktivitas dan daya saing						
	Kegiatan Prioritas 3.7: 1. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri 2. Penguatan Pendidikan tinggi berkualitas 3. Peningkatan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi 4. Prestasi olahraga	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	72	%	850.000.000
			persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina	80	%	
		Program Penempatan Tenaga Kerja	persentase pencari kerja yang ditempatkan	35	%	160.000.000
			persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	30		
			persentase pencari kerja yang dilatih melalui perluasan kesempatan kerja	1	%	
			persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur	90	%	

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah dalam RPD/RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Prosentase pelatih olahraga bersertifikat	45,62	%	7.465.000.000
			Persentase prestasi olah raga	60	%	
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian	100	%	382.452.000
			Persentase kreativitas dan inovasi daerah yang diterapkan atau diimplementasikan	100	%	
4	PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan					
Program Prioritas 4.1: Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern dan berkarakter						
	Kegiatan Prioritas 4.1: 1. Revolusi mental dalam sistem Pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong dan budi pekerti 2. Revolusi mental dalam tata Kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani dan responsife 3. Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter 4. Penguatan pusat-pusat perubahan Gerakan revolusi mental 5. Pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	persentase Kerjasama yang diimplementasikan	100	%	33.673.324.700
			persentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat Waktu	100	%	
			persentase perangkat daerah yang menyampaikan LPPD dan LKPJ tepat waktu	100	%	
			persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	90	%	
			persentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	60	%	
			persentase produk hukum yang difasilitasi	100	%	
			persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	100	%	
			persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi	100	%	

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah dalam RPD/RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
6.	Pembinaan ideologi Pancasila, Pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme		persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi	100	%	
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	80	%	850.000.000
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	persentase Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100	%	320.000.000
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan	13,33	%	30.000.000
		Program Kepegawaian Daerah	Cakupan Pengembangan SDM Aparatur	41,39	%	1.848.770.500
			Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur dan layanan Aparatur	86,5	%	
Program Prioritas 4.2: Meningkatkan kemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memengaruhi arah perkembangan peradaban dunia						
1. 2. 3. 4.	Kegiatan Prioritas 4.2: 1. Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal 2. Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat 3. Perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif 4. Pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh	Program Pengembangan Kebudayaan	persentase kelompok Budaya yang Teregister	4,1	%	11.076.226.500
			persentase kelompok kesenian yang produktif	38	%	
			persentase pelestarian Sejarah Lokal	7,49	%	
			persentase Pelestarian Cagar Budaya	9,18	%	
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	persentase Kerjasama yang diimplementasikan	100	%	33.673.324.700
			persentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat Waktu	100	%	

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah dalam RPD/RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
5.	Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia Pengembangan tata Kelola pembangunan kebudayaan		persentase perangkat daerah yang menyampaikan LPPD dan LKPJ tepat waktu	100	%	
			persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	90	%	
			persentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	60	%	
			persentase produk hukum yang difasilitasi	100	%	
			persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	100	%	
			persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi	100	%	
			persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi	100	%	
Program Prioritas 4.3: Memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial						
1. 2. 3.	Penguatan cara pandang, sikap dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama Penyelarasan relasi agama dan budaya	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	persentase Kerjasama yang diimplementasikan	100	%	33.673.324.700
			persentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat Waktu	100	%	
			persentase perangkat daerah yang menyampaikan LPPD dan LKPJ tepat waktu	100	%	
			persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	90	%	

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah dalam RPD/RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
4. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama 5. Pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan			persentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	60	%	
			persentase produk hukum yang difasilitasi	100	%	
			persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	100	%	
			persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi	100	%	
			persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi	100	%	
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	persentase Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100	%	320.000.000
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	80	%	850.000.000
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	persentase ormas yang mendapatkan pembinaan	13,33	%	30.000.000
Program Prioritas 4.4: Peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter						
1. Peningkatan budaya literasi 2. Pengembangan, pembinaan dan perlindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah serta sastra 3. Pengembangan budaya iptek, inovasi, kreativitas dan daya cipta 4. Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi		Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase pertumbuhan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan	0,025	%	405.000.000
			persentase pertumbuhan jumlah peminjam perpustakaan	0,05	%	
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase perpustakaan yang aktif	34	%	15.000.000

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah dalam RPD/RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian	100	%	382.452.000
			Persentase kreativitas dan inovasi daerah yang diterapkan atau diimplementasikan	100	%	
5	PN 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar					
	Program Prioritas 5.1: Infrastruktur pelayanan dasar					
	Kegiatan Prioritas 5.1: 1. Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau 2. Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman 3. Pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan 4. Keselamatan dan keamanan transportasi 5. Ketahanan kebencanaan infrastruktur 6. Waduk <i>multipurpose</i> dan modernisasi irigasi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka kematian ibu	73	Per 100.000 kelahiran hidup	470.446.155.500
			Angka kematian bayi	13,5	Per 1000 kelahiran hidup	
			Cakupan Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	100	%	
			Prevalensi anemia pada ibu hamil	15,8	% maksimal	
			Cakupan Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100	%	
			Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100	%	
			persentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	100	%	
			persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
			Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani	100	%	
			Angka Kematian Neonatal	10,5	per 1.000 KH	

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah dalam RPD/RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
			Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	%	
			Angka Kematian Balita	16	per 1.000 KH	
			Prevalensi ballita gizi buruk	0,5	%	
			Prevalensi Stunted (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-24 bulan)	14	% maksimal	
			persentase bayi umur 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	82,5	% minimal	
			persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
			persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%	
			Cakupan warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%	
			persentase fasyankes rujukan yang memenuhi standar mutu	62	%	
			persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
			persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
			persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	%	

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah dalam RPD/RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
			persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	%	
			persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	%	
			Incident Rate DBD (Demam Berdarah Dengue)	8	Maks per 100.000 penduduk	
			Presentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	82	%	
			persentase rumah sehat	82,3	%	
			persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	100	%	
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	59,32	%	20.045.987.800
			Cakupan area layanan daerah irigasi	97,97	%	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	95,5	%	9.929.055.750
			Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	100	%	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	persentase saluran drainase kondisi baik	69,04	%	1.850.000.000
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	89,5	%	629.974.000
		Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	4,46	%	1.201.800.000
			Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	88,3	%	

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah dalam RPD/RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
		Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah layak huni	95,54	%	8.560.738.800
			Persentase kawasan kumuh perkotaan	4,84	%	
			Persentase warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	%	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)	100	%	5.000.000.000
		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang tertangani	60,21	%	17.871.980.000
			Cakupan layanan persampahan	64,71	%	
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai	41,55	%	24.177.304.000
			persentase Angkutan umum yang memenuhi standar minimal pelayanan	30	%	
			persentase potensi titik parkir yang tertangani	98,25	%	
			persentase Terminal Tipe C Yang Aktif	100	%	
			persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	100	%	
			persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	99,61	%	
			persentase penerangan jalan di ruas jalan kabupaten	33,48	%	
			persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Temanggung	63,58	%	

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah dalam RPD/RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
			persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai	41,55	%	
Program Prioritas 5.2: Infrastruktur ekonomi						
	Kegiatan Prioritas 5.2: 1. Konektivitas jalan 2. Konektivitas kereta api 3. Konektivitas laut 4. Konektivitas udara 5. Konektivitas darat	Program Penyelenggaraan Jalan	persentase Jalan Kondisi Mantap	89,29	%	60.930.827.100
			persentase Jembatan dalam kondisi baik	93,75	%	
			persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan	18,61	%	
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai	41,55	%	24.177.304.000
			persentase Angkutan umum yang memenuhi standar minimal pelayanan	30	%	
			persentase potensi titik parkir yang tertangani	98,25	%	
			persentase Terminal Tipe C Yang Aktif	100	%	
			persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	100	%	
			persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	99,61	%	
			persentase penerangan jalan di ruas jalan kabupaten	33,48	%	
persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Temanggung	63,58	%				
Program Prioritas 5.3:						

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah dalam RPD/RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
	Infrastruktur perkotaan					
	Kegiatan Prioritas 5.3: 1. Transportasi perkotaan 2. Infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Trotoar kondisi baik	73,93	%	3.210.000.000
		Program Penataan Bangunan Gedung	persentase terbangunnya gedung pemerintah	100	%	16.928.046.000
		Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah layak huni	95,54	%	8.560.738.800
			Persentase kawasan kumuh perkotaan	4,84	%	
			Persentase warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	%	
			Persentase warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100	%	
		Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	4,46	%	1.201.800.000
			Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	88,3	%	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	95,5	%	9.929.055.750
			Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	100	%	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)	100	%	5.000.000.000
		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang tertangani	60,21	%	17.871.980.000
			Cakupan layanan persampahan	64,71	%	

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah dalam RPD/RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	
		Program Penyelenggaraan Jalan	persentase Jalan Kondisi Mantap	89,29	%	60.930.827.100	
			persentase Jembatan dalam kondisi baik	93,75	%		
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan	18,61	%	24.177.304.000	
			persentase Angkutan umum yang memenuhi standar minimal pelayanan	30	%		
			persentase potensi titik parkir yang tertangani	98,25	%		
			persentase Terminal Tipe C Yang Aktif	100	%		
			persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	100	%		
			persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	99,61	%		
			persentase penerangan jalan di ruas jalan kabupaten	33,48	%		
			persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Temanggung	63,58	%		
		Program Aplikasi Informatika	persentase kinerja infrastruktur TIK yang baik	100	%		8.915.398.360
			persentase layanan publik secara elektronik	50	%		
	Program Prioritas 5.4: Energi dan ketenagalistrikan						
	Kegiatan Prioritas 5.4: 1. Keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan	(Energi bukan kewenangan Kabupaten)	-	-	-	-	

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah dalam RPD/RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
	2. Akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan 3. Kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik					
Program Prioritas 5.5: Transformasi Digital						
	Kegiatan Prioritas 5.5: 1. Penuntasan infrastruktur TIK 2. Pemanfaatan infrastruktur TIK 3. Fasilitas pendukung transformasi digital	Program Aplikasi Informatika	persentase kinerja infrastruktur TIK yang baik	100	%	8.915.398.360
			persentase layanan publik secara elektronik	50	%	
		Program Pengelolaan Pendidikan	persentase APM PAUD (5-6 tahun)	81,35	%	215.448.883.450
			persentase APK PAUD (0-6 tahun)	42,43	%	
			persentase APK PAUD (4-6 tahun)	77,17	%	
			persentase APK PAUD (5-6 tahun)	89,05	%	
			persentase Pendidik PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4 Pendidikan Guru PAUD/Bimbingan Konseling/Psikologi	100	%	
			persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	49,14	%	
			persentase Jumlah Kepala Satuan PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%	
			Rasio Jumlah Pengawas dan Penilik PAUD	0,02	Angka	
			persentase ruang kelas TK Negeri dalam kondisi baik	100	%	
	persentase APM SD Sederajat	98,5	%			

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah dalam RPD/RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
			persentase APK SD Sederajat	100	%	
			Angka Putus Sekolah SD Sederajat	0,02	Angka	
			Rasio Siswa/Guru SD	1:28	Angka	
			Rasio Siswa/Rombel SD	1:28	Angka	
			persentase Pendidik SD memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4	100	%	
			persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	55	%	
			persentase Kepala SD memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%	
			persentase tenaga penunjang lain di SD yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%	
			Rasio Jumlah Pengawas SD	0,1	Angka	
			persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	90,49	%	
			persentase APM SMP Sederajat	88,5	%	
			persentase APK SMP Sederajat	98,7	%	
			Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	98,7	Angka	
			Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	0,18	Angka	
			Rasio Siswa/Guru SMP	1:32	Angka	
			Rasio Siswa/Rombel SMP	1:32	Angka	
			persentase Pendidik SMP memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4	100	%	

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah dalam RPD/RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
			persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	66	%	
			persentase Kepala SMP memilikikualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%	
			persentase tenaga penunjang lain di SMP yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%	
			Rasio Jumlah Pengawas SMP	0,07	Angka	
			persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	95,92	%	
			persentase Pendidik Kesetaraan memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4 sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu	100	%	
			persentase Kepala Satuan Pendidikan Non Formal memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4	100	%	
			persentase tenaga penunjang lain di Satuan Pendidikan Non Formal yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%	
			persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	88	%	
			persentase SDM lembaga kursus yang sudah mendapatkan	17	%	

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah dalam RPD/RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
			pelatihan dari DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri)			
6	PN 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim					
	Program Prioritas 6.1: Peningkatan Kualitas lingkungan hidup					
	Kegiatan Prioritas 6.1: 1. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup 2. Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup 3. Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup 4. Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	100	%	750.000.000
			Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	100	%	
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	52,7	Angka	799.999.950
			Indeks Kualitas Udara	83,82	Angka	
			persentase Luas Lahan Kritis Tertangani terhadap Total Luas Lahan Kritis	0,067	%	
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	persentase Luas RTH Milik Pemerintah Daerah yang Tertangani	63,9	%	1.300.000.000
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase usaha yang memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3	100	%	15.000.000
	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan yang memiliki Dokumen Hidup Lingkungan Hidup	100	%	50.000.000	

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah dalam RPD/RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
		Program Penghargaan Lingkungan untuk Masyarakat	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	100	%	50.000.000
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan	28,6	%	100.000.000
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100	%	10.000.000
		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang tertangani	60,21	%	70.981.702.300
			Cakupan layanan persampahan	64,71	%	
Program Prioritas 6.2: Peningkatan ketahanan bencana dan iklim						
	Kegiatan Prioritas 6.2: 1. Penanggulangan bencana 2. Peningkatan ketahanan iklim	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	%	1.728.000.000
			Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	%	
			Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	%	
		Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	75	%	1.963.333.600
			persentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100	%	

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah dalam RPD/RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
			persentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran oleh relawan kebakaran	100	angka	
			persentase Bangunan/Gedung/Lingkungan yang menjadi prioritas inspeksi	3,08	%	
		Program Penanganan Bencana	persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	100	%	270.000.000
Program Prioritas 6.3: Pembangunan rendah karbon						
	Kegiatan Prioritas 6.3: 1. Pembangunan energi berkelanjutan 2. Pemulihan lahan berkelanjutan 3. Pengelolaan limbah 4. Pengembangan industri hijau 5. Rendah karbon pesisir dan laut	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang tertangani	60,21	%	70.981.702.300
			Cakupan layanan persampahan	64,71	%	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)	100	%	5.000.000.000
7	PN 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik					
Program Prioritas 7.1: Konsolidasi demokrasi						
	Kegiatan Prioritas 7.1: 1. Penguatan kapasitas Lembaga demokrasi 2. Penguatan kesetaraan dan kebebasan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	95	%	920.000.000
				Persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	2,65	%

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah dalam RPD/RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran	
3.	Peningkatan kualitas komunikasi publik	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rasio perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan dokumen perencanaan	100	%		
		Program Perlindungan Perempuan	persentase kasus kekerasan terhadap anak perempuan	0,0029	%	60.000.000	
			persentase kasus kekerasan terhadap perempuan	0,0029	%		
		Program Perlindungan Khusus Anak	Presentase kasus kekerasan terhadap anak	0,004	%	425.000.000	
		Program Pengendalian Penduduk	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki data mikrokeluarga	100	%	406.000.000	
			Persentase Pasangan Usia Subur yang Ingin BerKB yang Tepenuhi (<i>unmetneed</i>)	10,5	%		
			Persentase Pasangan Usia Subur yang Istrinya dibawah Usia 20 Tahun	2	%		
			Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19 tahun)	12,6	%		
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	Persentase kepesertaan KB aktif	75,75	%	6.621.917.000
				Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	46,1	%	
				Persentase Kampung KB Berkembang dan Mandiri	33,9	%	
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks pembangunan keluarga	55,98	%	4.420.900.000	

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah dalam RPD/RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
		Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan KK, KTP el, KIA	87	%	750.000.000
		Program Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	99,82	%	20.000.000
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	persentase terpeliharanya Sarpras SIAK untuk pelayanan Administrasi Kependudukan	94,9	%	500.000.000
			persentase Pelaksanaan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital	0,8	%	
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif	35	%	4.035.570.500
			persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik	100	%	
			persentase tindak lanjut laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo	85	%	
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase kinerja infrastruktur TIK yang baik	100	%	8.915.398.360
			Persentase layanan publik secara elektronik	50	%	
		Program Perekonomian dan Pembangunan	persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	100	%	1.585.452.900
			persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	100	%	
			persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	80	%	
			persentase paket pekerjaan selesai tepat waktu	100	%	

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah dalam RPD/RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
			persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu	100	%	
			persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	100	%	
			persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (tender)	100	%	
			persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (PL > 100 juta)	100	%	
			persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	50	%	
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	persentase pelaksanaan pendidikan politik	80	%	51.468.669.650
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	persentase ormas yang mendapatkan pembinaan	13,33	%	30.000.000
Program Prioritas 7.2: Optimalisasi kebijakan luar negeri						
	Kegiatan Prioritas 7.2: 1. Penguatan Integritas NKRI dan perlindungan WNI di luar negeri 2. Penguatan Kerjasama pembangunan internasional 3. Peningkatan citra positif di dunia internasional	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	62	%	850.000.000

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah dalam RPD/RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
	4. Peningkatan peran Indonesia di tingkat regional dan global					
Program Prioritas 7.3: Penegakan hukum nasional						
	Kegiatan Prioritas 7.3: 1. Penataan regulasi 2. Perbaikan sistem hukum pidana dan perdata 3. Penguatan sistem anti korupsi 4. Peningkatan akses terhadap keadilan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut hasil temuan	100	%	550.215.000
			Persentase penanganan aduan masyarakat	100	%	
			Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	61	%	
			Prosentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	48	%	
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya	20	%	380.921.000
			Nilai maturitas SPIP	3,009	Nilai	
			Persentase perangkat daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) / Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	100	%	
			Persentase tindak lanjut aduan Whistle blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	100	%	
			Kompilasi level komponen dukungan pengawasan dan	3	Level	

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah dalam RPD/RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
			komponen aktifitas pengawasan serta kualitas pengawasan Nilai Survey Penilaian Integritas			
Program Prioritas 7.4: Reformasi birokrasi dan tata Kelola						
	Kegiatan Prioritas 7.4: 1. Transformasi Manajemen SDM Aparatur 2. Transformasi pelayanan publik 3. Penataan kelembagaan dan proses bisnis 4. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja pembangunan	Program Penataan Desa	Persentase Peraturan Desa Tentang Pungutan yang sesuai dengan Kewenangan Desa	60	%	25.000.000
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kepatuhan Pelaporan Aset Desa dalam Aplikasi Sipades	50	%	420.000.000
			Persentase laporan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh BPD	70	%	
			Persentase penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	100	%	
			persentase pengisian kekosongan Perangkat Desa	37	%	
			persentase Desa Cepat Berkembang berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa	38,34	%	
			Persentase penelusuran naskah kuno	100	%	
		Program Pengelolaan Arsip	Persentase arsip vital konvensional yang dialih mediakan	55	%	420.000.000
			Persentase audit internal kearsipan	66,67	%	
			persentase Kerjasama yang diimplementasikan	100	%	
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	persentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat Waktu	100	%	
persentase perangkat daerah yang menyampaikan LPPD dan LKPJ tepat waktu	100		%			

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah dalam RPD/RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
			persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	90	%	
			persentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	60	%	
			persentase produk hukum yang difasilitasi	100	%	
			persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	100	%	
			persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi	100	%	
			persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi	100	%	
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	persentase jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas	90	%	12.854.445.193
			persentase kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang dilaksanakan sesuai rencana	95	%	
			persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	100	%	
			persentase kegiatan peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	100	%	
		Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	100	%	1.069.782.500
			Persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu	95	%	
			Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah	90	%	1.715.000.000

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah dalam RPD/RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pembangunan manusia			
			Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	90	%	
			Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang ekonomi dan sumber daya alam	90	%	
			Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang infrastruktur	90	%	
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan pengalokasian anggaran belanja mandatory spending dalam APBD	100	%	409.278.434.633
			persentase dokumen penganggaran tepat waktu	100	%	
			persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	100	%	
			Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu	100	%	
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyampaian Laporan Daftar Barang Milik Daerah tepat waktu	100	%	1.215.148.000
			persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	80	%	
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	persentase Peningkatan Potensi Target Pajak Daerah	8	%	710.187.000

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah dalam RPD/RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	100	%	
			persentase realisasi penerimaan pajak daerah	95	%	
			Penyampaian Laporan Pendapatan Daerah tepat waktu	100	%	
			Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	95	%	
		Program Kepegawaian Daerah	Cakupan Pengembangan SDM Aparatur	38,11	%	1.848.770.500
			Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur dan layanan Aparatur	86,32	%	
Program Prioritas 7.5: Menjaga stabilitas keamanan nasional						
	Kegiatan Prioritas 7.5: 1. Penguatan keamanan dalam negeri 2. Penguatan kemampuan pertahanan dibarengi <i>confidence building measures</i> 3. Penguatan keamanan laut 4. Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat 5. Penguatan keamanan dan ketahanan siber	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	100	%	200.000.000
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan	persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai	41,55	%	24.177.304.000
			persentase Angkutan umum yang memenuhi standar minimal pelayanan	30	%	
			persentase potensi titik parkir yang tertangani	98,25	%	
			persentase Terminal Tipe C Yang Aktif	100	%	
			persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	100	%	
			persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	99,61	%	

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah dalam RPD/RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
			persentase penerangan jalan di ruas jalan kabupaten	33,48	%	
			persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Temanggung	63,58	%	
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Ketersediaan data statistik sektoral	100	%	127.833.000
		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	persentase penilaian resiko keamanan informasi	33,3	%	70.000.000
			persentase pelaksanaan prosedur pengamanan informasi pada perangkat daerah	30	%	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di kecamatan	100	%	2.039.868.490
			persentase realisasi penerimaan PBB	100	%	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang layak	100	%	18.462.970.900
			Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang terfasilitasi dan aktif	100	%	
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	persentase penanganan laporan kejadian gangguan kantibnas dan bencana alam	100	%	340.789.900
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase penyelesaian pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa	100	%	408.905.700
			Persenatase jumlah desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu	100	%	

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Program Daerah dalam RPD/RKPD yang Mendukung PN	Indikator Program	Target	Satuan	Anggaran
			persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKPDes tepat waktu	100	%	
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	persentase Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100	%	320.000.000
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik politik dan keamanan daerah	100	%	595.000.000

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat dukungan program daerah dalam RPD 2024-2026 dan dukungan program daerah RKPD 2024 untuk mendukung program prioritas/kegiatan prioritas pada PN RKP Tahun 2024 yang secara rekapitulasi dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini:

Tabel 5. 19
Dukungan Program Daerah dalam RKD Tahun 2024-2026 dan Dukungan Program Daerah RKPD Tahun 2024 terhadap Program Prioritas/Kegiatan Prioritas Masing-Masing PN RKP Tahun 2024

No	Jumlah Program Prioritas/Kegiatan Prioritas RKP Tahun 2024			Dukungan Program Daerah RPD/RKPD Tahun 2024			
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	RPD Tahun 2024-2026		RKPD Tahun 2024	
				Program Daerah	Persentase	Program Daerah	Persentase
1	PN 1	8	45	46	100%	46	100%
2	PN 2	1	5	8	100%	8	100%
3	PN 3	7	29	33	100%	33	100%
4	PN 4	4	20	14	100%	14	100%
5	PN 5	5	21	24	100%	24	100%
6	PN 6	3	11	14	100%	14	100%
7	PN 7	5	20	40	100%	40	100%

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2023, data diolah.

Ketersediaan dukungan program daerah dalam RPD untuk mendukung program prioritas dalam PN 1 sebesar 100%, PN 2 sebesar 100%, PN 3 sebesar 100%, PN 4 sebesar 100%, PN 5 sebesar 100%, PN 6 sebesar 100% dan PN 7 sebesar 100%. Selain itu, tingkat dukungan program daerah RKPD terhadap program prioritas pada PN 1 sebesar 100%, PN 2 sebesar 100%, PN 3 sebesar 100%, PN 4 sebesar 100%, PN 5 sebesar 100%, PN 6 sebesar 100% dan PN 7 sebesar 100%.

5.1.3 Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan pembangunan berkolaborasi dengan semua unsur baik pemerintah maupun non-pemerintah yang berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Unsur yang terlibat antara lain Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Non-Pemerintah,

Akademisi, media massa, perusahaan, komunitas, dan masyarakat (*penta helix*).

Selain mendukung program prioritas Agenda Pembangunan Nasional, kebijakan pembangunan daerah juga menerapkan konsep tematik, holistik, integratif, dan spasial dengan prioritas pada kegiatan yang berdaya ungkit besar pada pemantapan reformasi birokrasi, percepatan pengurangan kemiskinan, pemantapan kapasitas dan daya saing ekonomi kerakyatan dan pemerataan pembangunan wilayah dan lingkungan hidup. Gambaran kebijakan tersebut dapat dilihat secara rinci pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. 20
Rekapitulasi Dukungan Program dan Anggaran Terhadap Prioritas
Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Prioritas Kabupaten Temanggung Tahun 2024	Jumlah Program Yang Mendukung	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	Peningkatan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Perumahan dan Permukiman	8	717.393.915.100	1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Pendidikan 3. Dinas Sosial 4. DPRKPLH
2	Pemulihan Ekonomi	20	78.529.360.099	1. Dinsos 2. Dinperinaker 3. Dinkopdag 4. Dinbudpar 5. BPBD 6. DKPPP 7. DPM
3	Pemantapan Reformasi Birokrasi	27	578.635.625.737	1. BKPSDM 2. Bappeda 3. Inspektorat 4. BPKPAD 5. Dinas Kominfo 6. Dindukcapil 7. Bakesbangpol 8. DPM 9. Sekretariat daerah 10. Dinpusip 11. Sekreatariat DPRD 12. Satpol PP Damkar
JUMLAH			1.374.558.900.936	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2023, data diolah

Tabel 5. 21

Dukungan Program Daerah Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung: Peningkatan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Perumahan dan Permukiman

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran		
1	DPRKPLH	1	Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman	1	Program Kawasan Permukiman	persentase rumah layak huni	95,54	%	8.560.738.800
						persentase kawasan kumuh perkotaan	4,84	%	
						persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100	%	
						persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	100	%	
2	Dinas Sosial	2	Sosial	2	Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	888.694.000
						Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	
						Jumlah Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	
						Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang	100	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran		
					memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti				
			3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	100	%	19.307.024.350	
					persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	100	%		
					Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	100	%		
					persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang berkelanjutan	50	%		
					persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	48	%		
			4	Program Penanganan bencana	persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	100	%		270.000.000
4	Dinas Pendidikan	4	Pendidikan	5	Program Pengelolaan Pendidikan	persentase APM PAUD (5-6 tahun)	81,35	%	215.448.883.450
					persentase APK PAUD (0-6 tahun)	42,43	%		
					persentase APK PAUD (4-6 tahun)	77,17	%		

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
				persentase APK PAUD (5-6 tahun)	89,05	%	
				persentase Pendidik PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4 Pendidikan Guru PAUD/Bimbingan Konseling/Psikologi	100	%	
				persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	49,14	%	
				persentase Jumlah Kepala Satuan PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%	
				Rasio Jumlah Pengawas dan Penilik PAUD	0,02	Angka	
				persentase ruang kelas TK Negeri dalam kondisi baik	100	%	
				persentase APM SD Sederajat	98,5	%	
				persentase APK SD Sederajat	100	%	
				Angka Putus Sekolah SD Sederajat	0,02	Angka	
				Rasio Siswa/Guru SD	1:28	Angka	
				Rasio Siswa/Rombel SD	1:28	Angka	
				persentase Pendidik SD memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4	100	%	
				persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	55	%	
				persentase Kepala SD memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4,	100	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
				memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak			
				persentase tenaga penunjang lain di SD yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%	
				Rasio Jumlah Pengawas SD	0,1	Angka	
				persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	90,49	%	
				persentase APM SMP Sederajat	88,5	%	
				persentase APK SMP Sederajat	98,7	%	
				Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	98,7	%	
				Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	0,18	Angka	
				Rasio Siswa/Guru SMP	1:32	Angka	
				Rasio Siswa/Rombel SMP	1:32	Angka	
				persentase Pendidik SMP memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4	100	%	
				persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	66	%	
				persentase Kepala SMP memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%	
				persentase tenaga penunjang lain di SMP yang	100	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	
				memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat				
				Rasio Jumlah Pengawas SMP	0,07	Angka		
				persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	95,92	%		
				persentase Pendidik Kesetaraan memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4 sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu	100	%		
				persentase Kepala Satuan Pendidikan Non Formal memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4	100	%		
				persentase tenaga penunjang lain di Satuan Pendidikan Non Formal yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%		
				persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	88	%		
				persentase SDM lembaga kursus yang sudah mendapatkan pelatihan dari DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri)	17	%		
5	Dinas Kesehatan	5	Kesehatan	6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Peorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			
					Angka Kematian Ibu (AKI)	73	per 100.000 KH	470.446.155.500
					Angka Kematian Bayi (AKB)	13,5	per 1000 KH	
					Cakupan Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	100	%	
					Prevalensi anemia pada ibu hamil	15,8	% maksimal	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
				Cakupan Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100	%	
				Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100	%	
				persentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	100	%	
				persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
				Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani	100	%	
				Angka Kematian Neonatal	10,5	per 1.000 KH	
				Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	%	
				Angka Kematian Balita	16	per 1.000 KH	
				Prevalensi ballita gizi buruk	0,5	%	
				Prevalensi Stunted (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-24 bulan)	14	% maksimal	
				persentase bayi umur 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	82,5	% minimal	
				persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
				persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
				Cakupan warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%	
				persentase fasyankes rujukan yang memenuhi standar mutu	62	%	
				persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
				persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	
				persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	%	
				persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	%	
				persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	%	
				Incident Rate DBD (Demam Berdarah Dengue)	8	Maks per 100.000 penduduk	
				Presentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	82	%	
				persentase rumah sehat	82,3	%	
				persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	100	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	
			7	Program Peningkatan kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan SDM kesehatan yang memenuhi standar	23,1	%	2.000.000.000
			8	Program sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan Minuman	Cakupan puskesmas melaksanakan pelayanan farmasi sesuai standar	100	%	472.419.000
Jumlah								717.393.915.100

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah.

Tabel 5. 22

Dukungan Program Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung : Pemulihan Ekonomi

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran		
1	DPM	1	Penanaman Modal	1	Program Promosi Penanaman Modal	persentase promosi penanaman modal	25	%	60.000.000
2	Dinsos	2	Sosial	2	Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	888.694.000
						Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	
						Jumlah Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	
						Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100	%	
		3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	100	%	19.307.024.350		

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran		
				persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	100	%			
				Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	100	%			
				persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang berkelanjutan	50	%			
				persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	48	%			
			4	Program Penanganan bencana	persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	100	%	270.000.000	
3	Dinperinaker	3	Perindustrian	5	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	persentase IKM Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	71,62	%	310.000.000
					persentase Pembinaan IKM Tembakau Lembutan	15,36	%		
		4	Tenaga Kerja	6	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	72	%	850.000.000
						persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina	80	%	
				7	Program Penempatan Tenaga Kerja	persentase pencari kerja yang ditempatkan	35	%	160.000.000
						persentase pencari kerja yang mendapat	30	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran		
				penyuluhan dan bimbingan jabatan					
				persentase pencari kerja yang dilatih melalui perluasan kesempatan kerja	1	%			
				persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur	90	%			
4	Dinbudpar	5	Kebudayaan	8	Program Pengembangan Kebudayaan	persentase kelompok Budaya yang Teregister	4,1	%	11.076.226.500
						persentase kelompok kesenian yang produktif	38	%	
						persentase pelestarian Sejarah Lokal	7,49	%	
						persentase Pelestarian Cagar Budaya	9,18	%	
		6	Pariwisata	9	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	0,03	%	567.925.000
						Lama Tinggal Wisatawan	1	hari	
						persentase Peningkatan Desa Wisata	13,26	%	
						persentase Peningkatan pelaku Ekraft	9,5	%	
5	Dinkopdag	6	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	10	Program Pengembangan UMKM	persentase UMKM yang difasilitasi	0,92	%	331.370.000
		7	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	11	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	persentase UMKM berbasis Desa/Kelurahan	4,45	%	204.500.000
		8	Perdagangan	12	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	persentase fasilitasi pelaku usaha informal	13,71	%	1.161.303.300
						persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik	67	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	
				persentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital	1,5	%		
				persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	75	%		
			13	Program Pengembangan Ekspor	cakupan pelaku usaha yang di bina	1,15	%	100.000.000
			14	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Ketersediaan informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	70	%	220.000.000
6	DKPPP	9	Pertanian	15	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian			
				Produktivitas padi	61,25	Kuintal/ha		
				Produktivitas jagung	54,5	Kuintal/ha		
				Produktivitas bawang putih	60,5	Kuintal/ha		
				Produktivitas bawang merah	68	Kuintal/ha		
				Produktivitas cabai rawit	50	Kuintal/ha		
				Produktivitas cabai besar	65	Kuintal/ha		
				Produktivitas tembakau	6,2	Kuintal/ha		
				Produktivitas kopi robusta	7,1	Kuintal/ha		
				Produktivitas kopi arabika	6,5	Kuintal/ha		
				Produktivitas ternak sapi	177,4	Kg/Ekor		
				Produktivitas ternak domba	13,7	Kg/Ekor		
				Produktivitas ternak kambing	13,7	Kg/Ekor		
				Produktivitas ternak ayam ras pedaging	0,75	Kg/Ekor		
				Produktivitas ternak ayam petelur	10,88	Kg/Ekor		
				persentase kelahiran pedet	55,5	%		
							22.029.320.649	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran		
			16	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	persentase Prasarana yang dimanfaatkan sesuai fungsinya	100	%	11.560.933.900	
			17	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian	41	%	550.000.000	
			18	Program Penyuluhan Pertanian	persentase Kelompok Tani yang naik kelas	1,3	%	4.549.896.400	
		10	Kelautan dan Perikanan	19	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	22,08	kg/kapita/tahun	623.783.000
				20	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produktivitas ikan nila	1,2	kg/m2	1.980.383.000
					Produktivitas ikan lele	12,6	kg/m2		
7	BPBD	11	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	21	Program Penanggulangan Bencana	persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	%	1.728.000.000
					persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	%		
					persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	%		
Jumlah								78.529.360.099	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah.

Tabel 5. 23

Dukungan Program Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung : Pemantapan Reformasi Birokrasi

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran
1	BKPSDM	1	Kepegawaian	1	Program Kepegawaian Daerah	Cakupan Pengembangan SDM Aparatur	41,39	%	1.848.770.500
						Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur dan layanan Aparatur	86,5	%	
		2	Pendidikan dan Pelatihan	2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Cakupan pembinaan SDM aparatur	96,18	%	1.944.399.000
2	BAPPEDA	3	Penelitian dan Pengembangan	3	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian	100	%	1.170.000.000
						Persentase inovasi daerah yang dikembangkan	100	%	
3	Inspektorat	4	Inspektorat Daerah	4	Program Penyelenggaraan Pengawasan	persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	61	%	550.215.000
						persentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	48	%	
						persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD dan pengadaan barang/jasa	63	%	
						persentase penanganan aduan masyarakat	100	%	
						persentase tindak lanjut hasil temuan	100	%	
						5	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya	
		Persentase perangkat daerah yang diusulkan masuk zona integritas	100	%					

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran		
				Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) / Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)					
				Persentase tindak lanjut aduan Whistle blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	100	%			
				Kompilasi level komponen dukungan pengawasan dan komponen aktifitas pengawasan serta kualitas pengawasan	3	Level			
4	BAPPEDA	5	Perencanaan	6	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	100	%	1.069.782.500
					Persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu	95	%		
				7	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pembangunan manusia	90	%	1.715.000.000
					Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	90	%		
					Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang ekonomi dan sumber daya alam	90	%		
					Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang infrastruktur	90	%		

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran
5	BPKPAD	7	Keuangan	8	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan pengalokasian anggaran belanja mandatory spending dalam APBD	100	%	409.278.434.633
						persentase dokumen penganggaran tepat waktu	100	%	
						persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	100	%	
						Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu	100	%	
6	Dinkominfo	8	Komunikasi dan Informatika	9	Program Aplikasi Informatika	persentase kinerja infrastruktur TIK yang baik	100	%	8.915.398.360
						persentase layanan publik secara elektronik	50	%	
		9	Persandian	10	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	persentase penilaian resiko keamanan informasi	33,3	%	70.000.000
						persentase pelaksanaan prosedur pengamanan informasi pada perangkat daerah	30	%	
		10	Statistik	11	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Ketersediaan data statistik sektoral	100	%	127.833.000
7	Dindukcapil	11	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12	Program Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	99,82	%	20.000.000
8	Dindukcapil	12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	persentase terpeliharanya Sarpras SIAK untuk pelayanan Administrasi Kependudukan	94,9	%	500.000.000
						persentase Pelaksanaan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital	0,8	%	
9	Bakesbangpol	13	Kesatuan Bangsa dan Politik	14	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	persentase pelaksanaan pendidikan politik	80	%	51.468.669.650

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran		
10	DPM	14	Penanaman Modal	15	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan	100	%	20000000
						persentase perusahaan yang bermitra	50	%	
				16	Program Promosi Penanaman Modal	persentase promosi penanaman modal	25	%	60.000.000
				17	Program Pelayanan Penanaman Modal	persentase Pelayanan Perizinan secara Elektronik	100	%	3.350.000.000
						persentase Perizinan yang diterbitkan tepat waktu	100	%	
						persentase Pengaduan masyarakat yang tertangani	100	%	
18	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pengendalian Penanaman Modal	12	%	415.200.000				
11	Sekretariat Daerah	15	Sekretariat Daerah	19	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	36.916.215.201
						Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Pimpinan Daerah	100	%	
						Persentase SAKIP Perangkat Daerah berpredikat BB	17	%	
						Persentase pemenuhan pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah	100	%	
				20	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	persentase Kerjasama yang diimplementasikan	100	%	33.673.324.700
						persentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat Waktu	100	%	
						persentase perangkat daerah yang menyampaikan LPPD dan LKPJ tepat waktu	100	%	
						persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	90	%	
						persentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	60	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran	
					persentase produk hukum yang difasilitasi	100	%		
					persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	100	%		
					persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi	100	%		
					persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi	100	%		
				21	Program Perekonomian dan Pembangunan	persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	100	%	1.585.452.900
					persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	100	%		
					persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	80	%		
					persentase paket pekerjaan selesai tepat waktu	100	%		
					persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu	100	%		
					persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	100	%		
					persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (tender)	100	%		
					persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (PL > 100 juta)	100	%		
					persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	50	%		
12	Dinpusip	16	Kearsipan	22	Program Pengelolaan Arsip	Persentase arsip vital konvensional yang dialih mediakan	55	%	

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang	Program	Indikator	Target	Satuan	Anggaran		
					Persentase audit internal kearsipan	66,67	%		
13	Sekretariat DPRD	17	Sekretariat DPRD	23	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	persentase jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas	90	%	12.854.445.193
						persentase kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang dilaksanakan sesuai rencana	95	%	
						persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	100	%	
						persentase kegiatan peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	100	%	
14	Satpol PP Damkar	18	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Dugandungan Masyarakat	24	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	persentase Satlinmas yang teratih	3,46	%	2.554.660.000
						persentase pengaduan yang berkaitan dengan Trantibum yang ditindaklanjuti	100	%	
						persentase penegakan Perda/Perbup	100	%	
			25	Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	75	%	1.963.333.600	
					persentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100	%		
					persentase Bangunan/Gedung/Lingkungan yang menjadi prioritas inspeksi	3,08	%		
26	Program Penanggulangan Bencana	persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	%	1.728.000.000				
		persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	%					

No	Perangkat Daerah	Urusan/Bidang		Program		Indikator	Target	Satuan	Anggaran
						persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	%	
15	Dinkominfo	20	Komunikasi dan Informatika	27	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif	35	%	4.035.570.500
						persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik	100	%	
						persentase tindak lanjut laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo	85	%	
								Jumlah	578.635.625.737

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah.

Adapun rekapitulasi pagu anggaran prioritas pembangunan daerah dijabarkan untuk setiap prioritas pembangunan daerah dan pagu anggaran prioritas pembangunan daerah dijabarkan untuk setiap program prioritas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5. 24
Total Pagu Anggaran untuk Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Pagu Anggaran
1	Peningkatan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan, Pendidikan, Sosial, dan Perumahan dan Permukiman	Program pengelolaan pendidikan	215.448.883.450
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	470.446.155.500
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	9.929.055.750
		Program kawasan permukiman	8.560.738.800
Jumlah			704.384.833.500
2	Pemulihan Ekonomi	Program perlindungan dan jaminan sosial	19.307.024.350
		Program pelatihan dan produktivitas tenaga kerja	850.000.000
		Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	204.500.000
		Program pengembangan daya tarik destinasi wisata	567.925.000
		Program penyediaan dan pengembangan sarana prrtanian	22.029.320.649
		Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	40.000.000
		Program pengembangan iklim penanaman modal	20.000.000
Jumlah			43.018.769.999
3	Pemantapan Reformasi Birokrasi	Program Kepegawaian Daerah	1.848.770.500
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	550.215.000
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.069.782.500
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	409.278.434.633
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	500.000.000
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	20.000.000
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.554.660.000
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	4.035.570.500
Jumlah			419.857.433.133

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2023, data diolah.

5.1.4 Super Kebijakan Pembangunan Daerah yang Menerapkan Konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS)

Pemerintah Kabupaten Temanggung menerapkan konsep tematik, holistik, integratif dan spasial dalam setiap kebijakan pembangunan daerah.

Konsep Tematik

Penerapan konsep tematik telah diterapkan dalam pembangunan daerah, hal ini dapat dilihat dari adanya prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan pada setiap tahunnya dan sesuai dengan arah kebijakan daerah.

Konsep tematik juga diwujudkan dalam penetapan prioritas pembangunan daerah di Kabupaten Temanggung, pada tahun 2024 adalah : (1) Peningkatan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan, Pendidikan, Sosial, dan Perumahan dan Permukiman, (2) Pemulihan ekonomi, dan (3) Pemantapan Reformasi Birokrasi

Konsep Holistik

Tingkat penerapan konsep holistik terkait perencanaan yang komprehensif, Pemerintah Kabupaten Temanggung menerapkan konsep holistik yaitu perencanaan yang komprehensif dari hulu ke hilir, antara lain gerakan konservasi lingkungan, gerakan penanganan kemiskinan, gerakan penanganan stunting.

Konsep Integratif

Penerapan konsep integratif juga dilakukan baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa kebijakan pembangunan daerah yang melibatkan semua perangkat daerah, antara lain kegiatan penanganan kemiskinan melalui 1 perangkat daerah 1 desa dampingan, penanganan stunting yang melibatkan semua perangkat daerah, kegiatan SDGs yang didukung banyak program dan anggaran di semua perangkat daerah.

Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah juga dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Temanggung berkolaborasi dengan aktor non pemerintah baik dari sisi anggaran, sumber daya manusia dan pelaksanaan kegiatan, yaitu kegiatan penanganan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan (SDGs), penanganan stunting,

penanganan anak usia sekolah tidak sekolah, pelaksanaan kabupaten sehat, TMMD dan masih banyak lainnya. Penerapan konsep integratif terkait pelibatan stakeholders di luar OPD di daerah Kabupaten Temanggung diantaranya aktor non pemerintah yang dilibatkan adalah akademisi, tim penggerak PKK, lembaga amil zakat, BAZNAS, komunitas tertentu, kelompok masyarakat, media massa, TJLSP dan masih banyak lagi. Selain itu, terdapat pula pemanfaatan media informasi kreatif dalam proses perencanaan dengan melibatkan media sosial/media massa.

Konsep Spasial

Penerapan konsep Spasial juga diterapkan dalam kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Temanggung. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kegiatan penanganan stunting, kemiskinan dan infrastruktur yang dilaksanakan di semua kecamatan dengan salah satu tujuannya tidak ada kesenjangan antar wilayah, dan hasilnya pemetaan juga dapat dilihat dalam bentuk peta/spasial.

Tabel 5. 25

Keruntutan Kebijakan Pembangunan Daerah RKPD 2024 yang Menerapkan Konsep Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS)

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2024: MENINGKATKAN KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA, PEMULIHAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
1	Peningkatan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Dasar Bidang Kesehatanm Pendidikan, Sosial, dan perumahan dan permukiman	1. Program Pengembangan Permukiman	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	DPUPR
			Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	DPUPR
			Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	DPUPR
		2. Program Kawasan Permukiman	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	DPRKPLH
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	DPRKPLH
			Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	DPRKPLH
			Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	DPRKPLH

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2024: MENINGKATKAN KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA, PEMULIHAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
		3. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pembangunan Puskesmas Pengembangan Puskesmas	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
		4. Program pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan pendidikan jenjang pendidikan dasar	Dinas Pendidikan
		5. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Pembangunan, Peningkatan dan Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	DPUPR
			Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	DPUPR
2	Pemulihan Ekonomi	1. Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Dinsos
		2. Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinsos
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Dinsos
		3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Dinsos
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinsos
			Pembinaan Lanjut Usia Terlantar Potensial	Dinsos
		4. Program Penanganan Bencana	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Dinsos
		5. Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Dinperinaker
		6. Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja	Dinperinaker
			Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Dinperinaker
			Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Dinperinaker
			Job Fair/Bursa Kerja	Dinperinaker
		7. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinkopdag
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinkopdag			

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2024: MENINGKATKAN KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA, PEMULIHAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
			Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dinkopdag
		8. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Dinkopdag
			Pemantauan harga stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Dinkopdag
			Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Dinkopdag
		9. Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Dinkopdag
		10. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Dinkopdag
		11. Program Pengembangan Ekspor	Pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kabupaten/kota	Dinkopdag
		12. Program Standardisasi dan Perlindungan konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Dinkopdag
			Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Dinkopdag
		13. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Dinperinaker
		14. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bappeda
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Bappeda

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2024: MENINGKATKAN KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA, PEMULIHAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
			(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappeda
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bappeda
		15.Program Pengembangan Daya Tarik Destinasi Wisata	Pengelolaan data tarik wisata kabupaten	Dinbudpar
		16.Program Pemasaran Pariwisata	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Dinbudpar
			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinbudpar
			Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri	Dinbudpar
		17.Program Pengendalian Penduduk	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	DPPPAPPKB
		18.Program Pembinaan	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode	DPPPAPPKB

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2024: MENINGKATKAN KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA, PEMULIHAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
		Keluarga Berencana (KB)	Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
			Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	DPPPAPPKB
			Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	DPPPAPPKB
			Pembinaan Terpadu Kampung KB	DPPPAPPKB
		19.Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DPPPAPPKB
			Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DPPPAPPKB
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	DPPPAPPKB
			Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DPPPAPPKB
		20.Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air	DPUPR
			Rehabilitasi/Pemeliharaan /Pembinaan Petani Pemakai Air	DPUPR
			Penyusunan DED Irigasi	DPUPR
			Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi	DPUPR
			Pembangunan Turap / Talud / Bronjong	DPUPR
			Fasilitasi DAK Penugasan Sub Bidang Irigasi	DPUPR
		21.Program Kawasan Permukiman	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi	DPRKPLH

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2024: MENINGKATKAN KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA, PEMULIHAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
			Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	DPRKPLH
			Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	DPRKPLH
			Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	DPRKPLH
			Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	DPRKPLH
		22.Program Penanggulangan Bencana	Penanganan pasca Bencana Kabupaten	BPBD
		23.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pembangunan jamban keluarga	Dinas Kesehatan
			Pembangunan septic tank	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		24.Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	DKPPP
			Sarana Pendukung Lumbung Pangan Masyarakat - Lantai Jemur	DKPPP
			Sarana Pendukung Lumbung Pangan Masyarakat - Rice Milling Unit (RMU)	DKPPP
			Fasilitasi dan distribusi akses pangan	DKPPP
		25.Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari Tani pekarangan	DKPPP
			Pemberdayaan lumbung Pangan masyarakat	DKPPP
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	DKPPP
			Pengisian gudang cadangan pangan dalam antisipasi kerawanan pangan	DKPPP
			Pengembangan Konsumsi Pangan B2SA	DKPPP
			Pendampingan P2KP	DKPPP
		26.Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Pengembangan prasarana pertanian	DKPPP
			Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Bagian Perekonomian

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2024: MENINGKATKAN KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA, PEMULIHAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
		27.Program Perekonomian dan Pembangunan	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Bagian Perekonomian
		28.Program Penataan Desa	Penyediaan Prasarana dan Sarana Transportasi antar Wilayah	Dinpermades
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Dindikpora
			Bantuan siswa miskin SMP/MTs	Dindikpora
			Fasilitasi bantuan beasiswa bagi siswa miskin	Dindikpora
			Bantuan siswa miskin masuk sekolah	Dindikpora
			Fasilitasi kegiatan BOS dan PIP SMP	Dindikpora
			BOS tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Dindikpora
		29.Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten	DPM
		30.Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Dinkopdag
		31.Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan <i>matchmaking</i> dan pameran investasi	DPM
		32.Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Dinas Perhubungan
			Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dinas Perhubungan
		33.Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dinperinaker
		34.Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dinbudpar
			Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinbudpar
			Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinbudpar
			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinbudpar
		35.Program Peningkatan Diversifikasi dan	Upaya Khusus Mendukung Ketahanan Pangan	DKPPP

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2024: MENINGKATKAN KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA, PEMULIHAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
		Ketahanan Pangan Masyarakat		
		36.Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengembangan Kawasan Hortikultura	DKPPP
			Pengembangan Tanaman Kopi	DKPPP
			Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) Padi Unggul	DKPPP
			Pengembangan Padi Organik	DKPPP
			Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP2TT) Jagung	DKPPP
			Pengembangan Sayuran dan Tanaman Obat	DKPPP
			Pengembangan Buah unggulan	DKPPP
			Pengadaan Alat Pertanian Perkebunan dan Pelatihan pendidikan	DKPPP
			Pengembangan Sistem pembenihan Mandiri Tanaman Perkebunan	DKPPP
			Pengembangan Sistem Pembenihan Buah Unggulan	DKPPP
			Fasilitasi Pengembangan Informasi Pertanian Perkebunan dan Hortikultura (Statistik Pertanian)	DKPPP
			Pengelolaan Database Pertanian	DKPPP
			Perawatan Kebun dinas dan Kebun entres	DKPPP
			Optimalisasi Kebun Pemda	DKPPP
			Intensifikasi Tanaman Cengkeh	DKPPP
		Introduksi dan Diversifikasi Komoditas Pertanian berpotensi	DKPPP	
		37.Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Fasilitasi Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian (PSP)	DKPPP
			Fasilitasi DAK Pertanian	DKPPP
			Fasilitasi Temu Usaha pelaku pasar Komoditas Hortikultura	DKPPP
			Fasilitasi Temu Usaha pelaku pasar Komoditas Perkebunan	DKPPP
			Fasilitasi Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian (PSP)	DKPPP
			Diseminasi Teknologi Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	DKPPP

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2024: MENINGKATKAN KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA, PEMULIHAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
			Diseminasi Teknologi Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan	DKPPP
			Promosi atas hasil produksi Tanaman Hortikultura	DKPPP
			Promosi atas hasil produksi Tanaman Perkebunan	DKPPP
			Peningkatan mutu Hasil Produksi dan pasca panen Hortikultura	DKPPP
			Peningkatan mutu Hasil Produksi dan pasca panen Perkebunan	DKPPP
			Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	DKPPP
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian	DKPPP
		38.Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian Hama Tikus	DKPPP
			Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Pangan	DKPPP
			Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Hortikultura	DKPPP
			Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dalam Menunjang Sistem Manajemen Lingkungan Pertanian di Daerah Tembakau	DKPPP
		39.Program Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kinerja Penyuluhan	DKPPP
			Fasilitasi Pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan Informasi Teknologi Pertanian	DKPPP
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani	DKPPP
			Visualisasi dan Display Hasil Penyuluhan	DKPPP
			Penumbuhan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Ekonomi Petani	DKPPP
		40.Program Penanggulangan Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	BPBD
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	BPBD
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	BPBD
			Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	BPBD
			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk	BPBD

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2024: MENINGKATKAN KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA, PEMULIHAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
			Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	BPBD
			Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	BPBD
			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten Temanggung	BPBD
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana di Kabupaten Temanggung	BPBD
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana di Kabupaten Temanggung	BPBD
3	Pemantapan Reformasi Birokrasi	1. Program Kepegawaian Daerah	Persentase penyusunan formasi pegawai	BKPSDM
			Persentase penyelesaian usulan pensiun PNS tepat waktu	BKPSDM
			Persentase penyelesaian usulan kenaikan pangkat tepat waktu	BKPSDM
			Persentase Keterisian Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan jabatan pengawas	BKPSDM
			Persentase Perempuan pada Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan jabatan pengawas	BKPSDM
			Persentase Pelanggaran disiplin ASN	BKPSDM
			Persentase Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin ASN	BKPSDM
			Persentase Pelaksanaan Updating Data kepegawaian	BKPSDM
		2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDM
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan	BKPSDM

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2024: MENINGKATKAN KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA, PEMULIHAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
			Urusan Pemerintahan Umum	
		3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Bappeda
			Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Bappeda
			Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Bappeda
			Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Bappeda
		4. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	Inspektorat
			Nilai maturitas SPIP	Inspektorat
			Persentase perangkat daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) / Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	Inspektorat
			Persentase tindak lanjut aduan Whistle blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	Inspektorat
			Nilai Survey Penilaian Integritas	Inspektorat
		5. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Nilai maturitas SPIP	Inspektorat
			Persentase perangkat daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) / Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	Inspektorat
			Persentase tindak lanjut aduan Whistle blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	Inspektorat
			Nilai Survey Penilaian Integritas	Inspektorat
			Prosentase penanganan aduan masyarakat	Inspektorat
		6. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya	Bappeda
			Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Bappeda
			Monitoring Program dan Daerah Kegiatan Perangkat Daerah	Bappeda

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2024: MENINGKATKAN KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA, PEMULIHAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
		7. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bappeda
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappeda
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bappeda
			8. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan perubahan KUA dan Perubahan PPAS
		Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD		BPKPAD
		Penyusunan dan Review		BPKPAD

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2024: MENINGKATKAN KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA, PEMULIHAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
			DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD	
			Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	BPKPAD
			Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	BPKPAD
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BPKPAD
			Koordinasi Penyusunan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKPAD
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota	BPKPAD
			Pelaksanaan Pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	BPKPAD
		9. Program Aplikasi Informatika	Penatalaksanaan dan Pengawasan <i>e- government</i> dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinkominfo
			Penatalaksanaan dan Pengawasan <i>e- government</i> dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinkominfo
			Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Dinkominfo
			Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Dinkominfo
			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dinkominfo
		10. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten	Dinkominfo
		11. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Dinkominfo

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2024: MENINGKATKAN KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA, PEMULIHAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinkominfo
		12.Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Cakupan ketersediaan data makro daerah	Dinkominfo
		13.Program Pencatatan Sipil	Pencatatan, penata usahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dindukcapil
			Peningkatan dalam pelayanan Pencatatan sipil pengumpulan data kependudukan	Dindukcapil
		14.Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dindukcapil
		15.Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Pelaksana Koordinasi di bidang pendidikan politik,etika budaya politik, peningkatan demokrasi,fasilitas kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik,pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik	Badan Kesbangpol
		16.Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Fasilitasi pengembangan kawasan investasi dan kebijakan penanaman modal	DPM
			Pengkajian potensi investasi pariwisata	DPM
			Pengkajian potensi investasi UMKM	DPM
			Pengkajian potensi investasi pertanian	DPM
			Pengembangan potensi unggulan daerah	DPM
		17.Program Promosi Penanaman Modal	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan perizinan	DPM
			Sosialisasi kebijakan Penanaman modal kepada masyarakat dan dunia usaha dan Peraturan Perizinan	DPM
			Diseminasi promosi investasi	DPM
		18.Program Pelayanan Penanaman Modal	Fasilitasi percepatan pelayanan perizinan	DPM
			Peningkatan pelayanan perizinan satu pintu	DPM
			Penyempurnaan sarana dan prasarana perizinan	DPM
			Fasilitasi Pengaduan dan advokasi	DPM

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2024: MENINGKATKAN KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA, PEMULIHAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
		19.Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Penyelenggaraan Temu Usaha	DPM
			Pengawasan dan pengendalian penanaman modal dan perizinan	DPM
			Monev PATEN	DPM
			Monev dan Pelaporan LKPM	DPM
		20.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Bagian Organisasi
			Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Bagian Organisasi
			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi
			Persentase perangkat daerah berpredikat B dalam pembuatan LkjIP	Bagian Organisasi
			Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan kepala daerah	Bagian Forkompim
			Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan kepala daerah	Bagian Pembangunan, Bagian PBJ
		21.Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Bagian Hukum
			Fasilitasi Bantuan Hukum	Bagian Hukum
			Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Bagian Hukum
			Penataan Administrasi Pemerintahan	Bagian Pemerintahan
			Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Bagian Pemerintahan
			Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Bagian Pemerintahan
			Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Bagian Kesra
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Bagian Kesra
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Bagian Kesra
		22.Program Pengelolaan Arsip	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Dinpusip
			Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Dinpusip
		23.Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi DPRD	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Sekretariat DPRD

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2024: MENINGKATKAN KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA, PEMULIHAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
			Pembahasan rancangan peraturan daerah	Sekretariat DPRD
			Penyelenggaraan Kajian Perundang undangan	Sekretariat DPRD
			Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademik	Sekretariat DPRD
			Pembahasan KUA dan PPAS	Sekretariat DPRD
			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Sekretariat DPRD
			Pembahasan APBD	Sekretariat DPRD
			Pembahasan APBD Perubahan	Sekretariat DPRD
		24.Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	Satpol PP Damkar
			Rasio linmas per RT	Satpol PP Damkar
			Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	Satpol PP Damkar
		25.Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten	Satpol PP Damkar
			Tingkat Waktu Tanggap (<i>response time rate</i>)	Satpol PP Damkar
			Cakupan penanganan bencana non kebakaran kabupaten	Satpol PP Damkar
			Persentase aparatur yang memenuhi standar kualifikasi	Satpol PP Damkar
		26.Program Penanggulangan Bencana	Cakupan desa tangguh bencana	BPBD
			Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	BPBD
			Persentase Tertanganinya korban bencana pada masa tanggap darurat bencana	BPBD
			Persentase desa mitigasi terhadap desa rawan bencana	BPBD
			Persentase tertanganinya pemulihan kerusakan fisik akibat bencana pada pasca bencana	BPBD

No	Arah Kebijakan/ Prioritas Daerah	Program Pendukung	Indikator Sub Kegiatan	Pelaksana
ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2024: MENINGKATKAN KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA, PEMULIHAN EKONOMI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
			Persentase tertanganinya korban bencana pada pasca bencana	BPBD
		27.Program Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan kebijakan perekonomian	Bagian Perekonomian

Sumber : Bappeda, data diolah, 2023.

5.1.5 Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Dalam Rangka Penangan Dampak Pandemi

Kabupaten Temanggung tidak luput terkena dampak dari pandemi covid -19. Berbagai sektor terdampak pandemi covid terutama sektor ekonomi. Untuk itu Pemerintah Daerah mengarahkan kebijakan untuk pemulihan dan stabilisasi akibat pandemi covid-19. Kebijakan diarahkan untuk pemulihan UMKM di Kabupaten Temanggung. Kebijakan tersebut diambil untuk mendukung Pemerintah Pusat dalam melaksanakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Fokus Kabupaten Temanggung dalam pemulihan ekonomi selain Pemulihan UMKM juga bersinergi untuk mengentaskan kemiskinan.

Meskipun pada tahun 2022 ekonomi Kabupaten Temanggung mulai mengalami pemulihan dengan Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,20% dan sudah melebihi pertumbuhan ekonomi sebelum covid pada tahun 2019 yaitu 5,05%. Pemerintah Kabupaten Temanggung tetap mengarahkan kebijakan untuk penguatan ekonomi kerakyatan dengan berbasis UMKM seperti Pelatihan kewirausahaan kepada masyarakat desa, pelatihan untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBe) dan pemberian bantuan langsung tunai. Berikut program untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Temanggung:

Tabel 5. 26

Program yang Mendukung Pemulihan Ekonomi Dampak Pandemi Covid di Kabupaten Temanggung

No	Program	Anggaran	Perangkat Daerah
1	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	22.029.320.649	DKPPP
2	Pengelolaan Sumber daya Air	20.045.987.800	DPUPR
3	Kawasan permukiman	8.560.738.800	DPRKPLH

No	Program	Anggaran	Perangkat Daerah
4	Perekonomian dan Pembangunan	1.585.452.900	Bag Perekonomian
5	Pengembangan UMKM	331.370.000	DINKOPDAG
6	Pemberdayaan UMKM	204.500.000	DINKOPDAG
7	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	25.000.000	DINKOPDAG
8	Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	25.000.000	DINKOPDAG
9	Pelayanan penanaman Modal	3.350.000.000	DPM
10	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	220.000.000	DINKOPDAG
11	Pelatihan Kerja dan produktivitas tenaga kerja	850.000.000	DINPERINAKER
TOTAL		57.227.370.149	

Sumber : Bappeda, 2022

Dari tabel diatas berbagai kebijakan untuk pemulihan ekonomi difokuskan kepada sektor yang langsung berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat seperti penyediaan air dan kawasan permukiman layak untuk rumah tangga, pelatihan kerja, pengendalian inflasi dengan stabilisasi harga barang dan kebutuhan pokok, serta pengembangan dan pemberdayaan UMKM sebagai masyarakat yang terdampak sekaligus juga yang terkuat menghadapi krisis ekonomi.

Dampak pandemi covid di Kabupaten Temanggung salah satunya adalah peningkatan kemiskinan. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Temanggung selain berfokus kepada pemulihan ekonomi juga diarahkan untuk menangani pengentasan kemiskinan. Berikut program untuk mendukung pengentasan kemiskinan di Kabupaten Temanggung:

Tabel 5. 27
Program yang Mendukung Pengentasan Kemiskinan Dampak Pandemi Covid
di Kabupaten Temanggung

No	Program	Anggaran	Perangkat Daerah
1.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	19.307.024.350	DINSOS
2.	Pengelolaan dan pengembangan air minum	9.929.055.750	DPUPR
3.	Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.980.383.000	DKPPP
4.	Pengelolaan Pendidikan	215.448.883.450	DINDIKPORA
5.	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	920.000.000	DINDIKPORA
6.	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	7.465.000.000	DINDIKPORA
7.	Pengembangan kebudayaan	11.076.226.500	DINBUDPAR
8.	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	567.925.000	DINBUDPAR
9.	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	470.446.155.500	DINKES
TOTAL		737.140.653.550	

Sumber : Bappeda, 2022

Berkaitan dengan penanganan dampak pandemic Covid-19 pada pemulihan UMKM dan pengentasan kemiskinan, terdapat beberapa stakeholder yang terlibat melalui sinergitas *pentahelix* antara lain Pemerintah Kabupaten Temanggung, TJSPLP/pihak swasta, TP PKK, LazisMU, LazisNU, BAZNAS, BUMD, BUMN, akademisi, dan masyarakat.

5.1.6 Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Terhadap Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu kabupaten yang termasuk dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur. Pemerintah Kabupaten Temanggung sangat mendukung kegiatan tersebut dan mengalokasikan program kegiatan terhadap pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata di kawasan pariwisata di Kawasan Pariwisata Borobudur sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 5. 28
Dukungan Program dan Kegiatan Kabupaten Temanggung Terhadap
Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Borobudur Tahun
2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PELAKSANA
1	Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Pendataan potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	204.500.000	Dinkopdag
2	Program Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	11.076.226.500	Dinbudpar
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan egovernment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	8.915.398.360	Dinkominfo
4	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota	Pemeliharaan Berkala Jalan	60.930.827.100	DPUPR
5	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	4.549.896.400	DKPPP
6	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST /SPA	17.871.980.000	DPRKPLH

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PELAKSANA
7	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	799.999.950	DPRKPLH
8	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1.715.000.000	Bappeda
JUMLAH				106.063.828.310	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2023, data diolah.

Pengembangan Borobudur sebagai destinasi pariwisata super prioritas selain mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, juga membutuhkan dukungan dari daerah sekitarnya, salah satunya adalah Kabupaten Temanggung. Potensi yang mendukung pengembangan Borobudur yang berada di Kabupaten Temanggung salah satunya adalah event yang dilaksanakan secara rutin di Kawasan Borobudur yaitu pengambilan air suci, persemayaman air suci di Candi Mendut dan perayaan Hari Raya Waisak di Candi Borobudur. Sejumlah Biksu yang berasal dari 11 majelis agama Buddha di Indonesia, mengikuti ritual pengambilan air suci (berkah) untuk perayaan Hari Raya Waisak di Mata Air Jumprit Temanggung persisnya di Desa Tegalrejo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung. Air berkah tersebut akan disemayamkan di Candi Mendut dan akan digunakan dalam perayaan detik-detik Waisak di Candi Borobudur.

Air di Umbul Jumprit memang bukan air biasa. Bagi Umat Budha, air Umbul Jumprit dianggap sebagai air suci pembersih jiwa manusia. Harapan pengambilan air suci ini untuk seluruh manusia di dunia agar sadar bahwa jiwa ini bagaikan jiwa Sang Buddha. Penuh cinta kasih tanpa memandang aliran dan agama. Salah seorang Wakil Bhikkhu, Dwi Virya, mengatakan dalam agama Buddha air suci mempunyai makna filosofis yang sangat tinggi.

Pemerintah Kabupaten Temanggung berkomitmen untuk melestarikan Mata Air Jumprit, salah satunya dengan memberikan

dukungan terhadap akses menuju Mata Air Jumprit. Tahun 2022 melalui anggaran APBN akan dilaksanakan preservasi dan revitalisasi kawasan umbul jumprit dengan anggaran Rp5.000.000.000,00 untuk penataan bangunan taman beserta kelengkapannya serta menata jaringan perpipaan air bersih dengan anggaran Rp.13.000.000.000,00. Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Temanggung mengusulkan melalui Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota yaitu pembangunan dua ruas jalan. Anggaran sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar) untuk ruas jalan Dakaran-Sibajak dan anggaran sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar) untuk ruas jalan Muntung-Jumprit. Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 juga mendapatkan alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan belas miliar) untuk penataan destinasi wisata Umbul Jumprit dan penataan jaringan perpipaan air bersih yang ada di mata air Jumprit.

5.1.7 Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Terhadap Pembangunan Pintu Tol Bawen-Yogyakarta

Pada tahun 2022, Provinsi Jawa Tengah memiliki agenda pembangunan jalan tol ruas Bawen-Yogyakarta dengan pintu tol di Desa Soropadan Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung. Peluang tersebut ditangkap oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui kegiatan penataan ruang yaitu peninjauan kembali dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung 2011-2031 agar keberadaan pintu tol ini memungkinkan tumbuhnya ekonomi baru serta mendukung pengembangan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Temanggung. Harapannya Kabupaten Temanggung tidak sebatas dilewati tetapi bisa menjadi daerah tujuan.

5.1.8 Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Terhadap Aksi Konvergensi Stunting

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep 42/M.PPPN/HK/04/2020 Tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Kementerian Dalam Negeri, pada tahun 2022 Kabupaten Temanggung menjadi kabupaten percontohan penanganan perkawinan anak usia dini

dan pencegahan stunting oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kegiatan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan adalah 1) Rapat Koordinasi; 2) Sosialisasi dan 3) *Forum Group Discussion* (FGD)

Selain itu juga dilakukan penelitian secara khusus oleh Prof. Dr. Paulus Wirutomo, M.Sc dan tim di Desa Wadas Kecamatan Kandangan sebagai desa dengan kasus stunting tertinggi dan Desa Tanurejo Kecamatan Bansari sebagai desa dengan kasus stunting rendah. Universitas Diponegoro Semarang juga melakukan penelitian tentang indeks resiko stunting dan determinan penurunan kejadian stunting tahun 2018-2021 di Kabupaten Temanggung. Guna menunjang kegiatan sebagaimana di maksud, maka dukungan kegiatan yang bersumber dari APBD sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 5. 29
Program Daerah yang Mendukung Aksi Konvergensi Stunting Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	PELAKSANA
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah/Kota	470.446.155.500	Dinas Kesehatan
		2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
2	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	1. Orientasi Pengelola dan Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4.420.900.000	DPPPAPPKB
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1. Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	19.307.024.350	Dinas Sosial
		2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		
4	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	20.000.000	Dindukcapil
5	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan dana BOP PAUD	215.448.883.450	Dindikpora
Jumlah Total			709.642.963.300	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah.

5.1.9 Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Terhadap SDGs

Pemerintah Kabupaten Temanggung juga berkomitmen dalam mendukung keberhasilan program pembangunan berkelanjutan/SDGs, pengarusutamaan tata kelola Pemerintahan yang baik, dan pengarusutamaan gender dan didukung oleh sebagian besar perangkat daerah berserta lembaga non pemerintah. Program daerah yang mendukung pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan (SDGs), pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik, dan pengarusutamaan gender sebagaimana tercantun dalam tabel berikut:

Tabel 5. 30

Program Daerah yang Mendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dan Pengarusutamaan Gender

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Pendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan	Pendukung Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Pendukung Pengarusutamaan Gender
I	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan			
1	Program Pengelolaan Pendidikan	tujuan 1 tujuan 2 tujuan 4	V	V
II	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan			
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	tujuan 1 tujuan 2 tujuan 3 tujuan 6 tujuan 13	V	V
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	tujuan 3	V	V
3	Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	tujuan 3	V	V
III	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	tujuan 6	V	
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	tujuan 1 tujuan 6		V

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Pendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan	Pendukung Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Pendukung Pengarusutamaan Gender
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	tujuan 1	V	
4	Program Pengembangan Permukiman	tujuan 1	V	V
5	Program Penataan Bangunan Gedung	Tujuan 9	V	
6	Program Penyelenggaraan Jalan	tujuan 9	V	
7	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tujuan 9 Tujuan 11 Tujuan 13	V	
8	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Tujuan 9	V	
9	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Tujuan 9	V	
IV	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman			
1	Program Pengembangan Perumahan	tujuan 1 tujuan 6		V
2	Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh	tujuan 1 tujuan 6 tujuan 11		V
V	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat			
1	Program Penanggulangan Bencana	tujuan 1 tujuan 11 tujuan 13	V	
2	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana			V
3	Program Pemeliharaan Ketenteraman dan ketertiban Umum			V
VI	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial			
1	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	tujuan 1 tujuan 2 tujuan 3	V	V
2	Program Rehabilitasi Sosial	tujuan 3	V	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Pendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan	Pendukung Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Pendukung Pengarusutamaan Gender
3	Program Pemberdayaan Sosial			V
VII	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja			
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	tujuan 1 tujuan 8	V	V
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	tujuan 8	V	V
3	Program Hubungan Industrial	tujuan 8 tujuan 10	V	
VIII	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	tujuan 5 tujuan 16	V	V
2	Program Perlindungan Perempuan	tujuan 16 tujuan 5 tujuan 10	V	V
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	tujuan 3		V
4	Program Pemenuhan Hak Anak	tujuan 16	V	
5	Program Perlindungan Khusus Anak	tujuan 10	V	
IX	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan			
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	tujuan 2 tujuan 13	V	
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	tujuan 2 tujuan 8 tujuan 13	V	
X	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup			
1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	tujuan 6 tujuan 9 tujuan 12 tujuan 13	V	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Pendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan	Pendukung Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Pendukung Pengarusutamaan Gender
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	tujuan 13	V	
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	tujuan 6 tujuan 11 tujuan 13 tujuan 15	V	
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	tujuan 6 tujuan 12 tujuan 13	V	
5	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	tujuan 6	V	
6	Program Pengelolaan Persampahan	tujuan 1 tujuan 12 tujuan 11 tujuan 13	V	V
XI	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil			
1	Program Pencatatan Sipil	tujuan 1 tujuan 16 tujuan 17	V	V
2	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	tujuan 16	V	V
3	Program Pendaftaran Penduduk	tujuan 16	V	V
XII	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa			
1	Program Penataan Desa	tujuan 10	V	
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	tujuan 10	V	
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	tujuan 10	V	
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	tujuan 10	V	
5	Program Pembinaan dan Fasilitas Perencanaan,			V

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Pendukung Pengarus tamaan Pembangunan Berkelanjutan	Pendukung Pengarus tamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Pendukung Pengarus utamaan Gender
	evaluasi, pengelolaan keuangan dan pembangunan desa			
6	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat			V
XIII	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana			
1	Program Pengendalian Penduduk	tujuan 1 tujuan 3 tujuan 5		V
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana	tujuan 1 tujuan 3 tujuan 5		V
3	Program Pemberdayaan Peningkatan Keluarga Sejahtera	tujuan 3	V	V
XIV	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal			
1	Program Pengembangn Iklim Penanaman Modal	tujuan 8 tujuan 9	V	
2	Program Pengembangan Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	tujuan 8	V	
3	Program Pelayanan Penanaman Modal			V
XV	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika Publik			
1	Program nformasi dan Komunikasi Publik	tujuan 16	V	V
2	Program Aplikasi Informatika	tujuan 4 Tujuan 9	V	V
XVI	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan			
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Tujuan 3 Tujuan 11	V	
XVII	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi			

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Pendukung Pengarus tamaan Pembangunan Berkelanjutan	Pendukung Pengarus tamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Pendukung Pengarus tamaan Gender
1	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Tujuan 8		V
XVIII	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga			
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	tujuan 1 tujuan 4 tujuan 8	V	
XIX	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan			
1	Program Pengembangan Kebudayaan	tujuan 8	V	
2	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Tujuan 11	V	
3	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan		V	
4	Program Pembinaan Perpustakaan			V
XX	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan			
1	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	tujuan 2 tujuan 8	V	
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Tujuan 8	V	
XXI	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata			
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	tujuan 8	V	
2	Program Pemasaran Pariwisata	tujuan 8	V	
3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	tujuan 8	V	
XXII	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian			
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	tujuan 2 tujuan 13	V	

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Pendukung Pengarus tamaan Pembangunan Berkelanjutan	Pendukung Pengarus tamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Pendukung Pengarus utamaan Gender
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Tujuan 13	V	
3	Program Pengendalian bencana Pertanian	Tujuan 13	V	
4	Program Penyuluhan Pertanian	Tujuan 13	V	
XXIII	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan			
1	Program Pengembangan Ekspor	tujuan 17	V	
2	Program standardisasi dan perlindungan konsumen	Tujuan 12	V	
3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan			V
XXIV	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi			
1	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	tujuan 8		V
XXV	Sekretariat Daerah			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tujuan 1 tujuan 4	V	
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Tujuan 12 tujuan 16 tujuan 17	V	V
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	tujuan 16 tujuan 8	V	V
4	Program Administrasi Umum	tujuan 16	V	
XXVI	Perencanaan			
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tujuan 11	V	V
2	Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	tujuan 1 tujuan 11 tujuan 17	V	V
3	Program Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam			V

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Pendukung Pengarus tamaan Pembangunan Berkelanjutan	Pendukung Pengarus tamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Pendukung Pengarus utamaan Gender
XXVII	Keuangan			
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	tujuan 16 tujuan 17	V	
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tujuan 16	V	
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tujuan 16 Tujuan 17	V	
XXVIII	Kepegawaian			
1	Program Kepegawaian Daerah		V	
XXIX	Pendidikan Dan Pelatihan			
1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	tujuan 5 tujuan 16	V	V
XXX	Penelitian Dan Pengembangan			
1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	tujuan 1 tujuan 9	V	
XXXI	Inspektorat Daerah			
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan		V	V
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		V	
XXXII	Kecamatan			
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		V	
2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		V	
XXXIII	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
1	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	tujuan 5		V

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program	Pendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan	Pendukung Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Pendukung Pengarusutamaan Gender
2	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik sosial	Tujuan 3	V	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2023, data diolah.

Berdasarkan pemetaan Indikator SDG's dalam dokumen perencanaan daerah terdapat indikator tujuan, indikator sasaran, indikator program, dan indikator yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah. Beberapa indikator SDG's yang bukan merupakan kewenangan daerah otomatis tidak ada dukungannya di Renja maupun RKPD. Hasil pemetaan indikator SDG's sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. 31
Pemetaan Indikator SDG's dalam Dokumen Perencanaan Daerah

No	Spesifikasi Indikator	Pilar Sosial	Pilar Ekonomi	Pilar Lingkungan	Pilar Hukum dan Tata Kelola	Jumlah Indikator
1	Indikator Kinerja Tujuan	1	4	-	-	5
2	Indikator Kinerja Sasaran	8	4	4	3	19
3	Indikator Kinerja Program	60	7	9	14	90
4	Indikator Pada Renstra PD	4	8	18	6	36
5	Indikator Bukan Kewenangan	6	5	-	4	15
Jumlah		79	28	31	27	165

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah.

5.1.10 Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Terhadap Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Pemerintah Kabupaten Temanggung juga berkomitmen mendukung proses adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. 32
Program Daerah yang Mendukung Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

NO	PROGRAM	ANGGARAN	PELAKSANA
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	470.446.155.500	Dinas Kesehatan
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	1.000.000.000	DKPPP
3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	22.029.320.649	DKPPP
4	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	11.560.933.900	DKPPP
5	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	550.000.000	DKPPP
6	Program Penyuluhan Pertanian	4.549.896.400	DKPPP
7	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	750.000.000	DPRKPLH
8	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	799.999.950	DPRKPLH
9	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1.300.000.000	DPRKPLH
10	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	15.000.000	DPRKPLH
11	Program Pengelolaan Persampahan	17.871.980.000	DPRKPLH
Jumlah Total		530.873.286.399	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2023, data diolah.

5.2 PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan daerah tahun 2024 disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Temanggung disusun dalam rangka memenuhi sasaran dan arah kebijakan RPD Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang RPD Perubahan Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan nasional sekaligus mempedomani tema pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2024 yaitu Meningkatkan kualitas pembangunan manusia, pemulihan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu juga berdasarkan permasalahan dan hasil evaluasi capaian pembangunan daerah.

5.2.1 Kegiatan Prioritas Per Program Berdasarkan Urusan dan Bidang

Program dan kegiatan prioritas yang direncanakan dalam RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan

a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1) Bidang Pendidikan

➤ Program Pengelolaan Pendidikan

Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diarahkan pada kegiatan pencapaian target angka rata-rata lama sekolah, pengurangan angka putus sekolah SD dan SMP sederajat, peningkatan kondisi fasilitas pendidikan ruang kelas, oencapaian target SMP dengan akreditasi minimal, pencapaian target kelulusan peserta pendidikan kesetaraan, peningkatan jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan, serta pengurangan Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (AUSTS).

2) **Bidang Kesehatan**

- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan penurunan angka kematian bayi; pelayanan ibu hamil, ibu bersalin dan kesehatan balita sesuai standar; penurunan angka kematian balita; penurunan angka kematian neonatal; peningkatan cakupan anak usia sekolah dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar; dan penurunan jumlah rumah tidak sehat.

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan pada kegiatan pelatihan dalam rangka pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan.

- Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini diarahkan pada kegiatan pemenuhan akreditasi utama fasilitas kesehatan tingkat pertama

- Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diarahkan pada kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi tentang keamanan pangan sebagai langkah untuk peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor serta peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat.

3) **Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan dan pembangunan bendung dan jaringan irigasi.

- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagai upaya meningkatkan akses air minum layak menuju akses air minum aman.

- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
Program ini diarahkan pada kegiatan penambahan jalan kabupaten yang dilengkapi dengan drainase agar meminimalisir resiko kerusakan jalan.
 - Program Penataan Bangunan Gedung
Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung serta rehabilitasi bangunan gedung.
 - Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
Program ini diarahkan pada kegiatan pemeliharaan dan perbaikan trotar di sejumlah titik di Temanggung.
 - Program Penyelenggaraan Jalan
Program ini diarahkan pada kegiatan pembangunan, pelebaran, rehabilitasi, pemeliharaan jalan dan jembatan di sejumlah titik di Temanggung.
 - Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Program ini diarahkan pada kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR), penyusunan dokumen pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah serta dokumen penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang.
- 4) **Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**
- Program Pengembangan Perumahan
Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan rumah susun. Program ini dilakukan dalam rangka mewujudkan rumah susun yang bersih, sehat dan layak huni sehingga tercapai peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
 - Program Kawasan Permukiman
Program ini diarahkan pada kegiatan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
- 5) **Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**
- Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan pada penanganan kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan; penanganan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; serta penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

➤ Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini diarahkan pada peningkatan sarana dan prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan kebakaran agar sesuai dengan jangkauan wilayah.

➤ Program Penanggulangan Bencana

Program ini diarahkan pada Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana serta Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dalam upaya meningkatkan kinerja dalam merespon laporan kejadian bencana pada saat waktu tanggap.

6) **Bidang Sosial**

➤ Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan sosialisasi tentang teknis pemberian penerbitan ijin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang dari masyarakat serta pembinaan dan pelatihan PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) dan fasilitasi program-program kegiatan PSM.

➤ Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Program ini diarahkan pada Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dan pemberian stimulan bagi korban.

➤ Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar

Panti Sosial dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.

➤ Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan pemenuhan pelayanan pemerlu jaminan dan perlindungan sosial dan pemberian bantuan pengembangan ekonomi masyarakat.

➤ Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan pada Kegiatan pemenuhan kebutuhan Sosial bagi Korban Bencana Alam dan Sosial dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana.

➤ Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini diarahkan pada fasilitasi kebutuhan dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional di Kabupaten.

b. **Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar**

1) **Bidang Tenaga Kerja**

➤ Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi untuk memperkaya skill bagi tenaga kerja yang belum memenuhi standar kompetensi.

➤ Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada kegiatan penyuluhan dan bimibingan serta pelatihan keterampilan bagi pencari kerja guna ikut serta menekan angka TPT.

➤ Program Hubungan Industrial

Program ini diarahkan pada kegiatan mediasi Perselisihan Hubungan Industrial dan pembinaan kepada Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

2) **Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**

➤ Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kabupaten dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten untuk menggaungkan potensi perempuan dan mengurangi paham atau budaya patriarki di masyarakat.

➤ Program Perlindungan Perempuan

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan dan mediasi bagi Perempuan Korban Kekerasan serta Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dengan pelayanan, pengaduan dan penjangkauan korban.

➤ Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini diarahkan pada kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi Kesetaraan Gender dan perlindungan anak bagi keluarga guna meningkatkan ketahanan keluarga.

➤ Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini diarahkan pada penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak.

➤ Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini diarahkan pada kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak dengan sosialisasi dan advokasi upaya pencegahan kekerasan terhadap anak.

3) Bidang Pangan

➤ Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan seperti lumbung pangan, rantai jemur dan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya

➤ Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemutakhiran Peta analisis Kerentanan serta Ketahanan Pangan dan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan.

➤ Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan kelembagaan keamanan pangan serta peningkatan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan.

4) **Bidang Pertanahan**

➤ Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelesaian Sengketa, konflik dan perkara Tanah Garapan.

5) **Bidang Lingkungan Hidup**

➤ Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini difokuskan untuk kegiatan penyusunan dokumen telaahan kebijakan yang mengatur penggunaan lahan sesuai dengan fungsinya.

➤ Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini difokuskan pada kegiatan pengujian parameter kualitas lingkungan hidup yang meliputi media tanah, air dan udara kemudian hasilnya akan dituangkan dalam dokumen hasil uji yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penentuan arah kebijakan .

➤ Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

Program ini difokuskan pada kegiatan pemeliharaan hutan kota , taman kota, dan terpenuhinya RTH

➤ Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program ini difokuskan pada kegiatan fasilitasi izin penyimpanan sementara limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan.

- Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Program ini difokuskan untuk pada kegiatan pengawasan terhadap usaha yang harus memiliki Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi.
- Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Program ini difokuskan pada kegiatan Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup serta fasilitasi sarana prasarana kegiatan adiwiyata (tempat sampah, biopori, tanaman)
- Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Program ini difokuskan pada kegiatan penilaian terhadap kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam rangka PPLH
- Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Program ini difokuskan pada kegiatan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat terhadap PPLH
- Program Pengelolaan Persampahan Program ini difokuskan pada kegiatan pemeliharaan kebersihan, pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan, peningkatan kinerja pengelola persampahan, dan pemilahan sampah yang selanjutnya akan diolah.

6) **Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**

- Program Pendaftaran Penduduk Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang meliputi penerbitan KTP dan KIA di Kabupaten Temanggung.
- Program Pencatatan Sipil Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil.
- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini difokuskan pada kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan, dan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

7) **Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**

➤ Program Penataan Desa

Program ini difokuskan pada kegiatan fasilitasi sarana dan prasarana desa untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan manajemen desa sebagai upaya mengembangkan kemandirian serta kesejahteraan desa.

➤ Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini difokuskan pada kegiatan pencegahan ketimpangan antar desa dengan meningkatkan kerjasama antar desa

➤ Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini difokuskan pada kegiatan fasilitasi perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, pengelolaan aset desa, dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.

➤ Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini difokuskan pada kegiatan pendampingan serta peningkatan kapasitas sumber daya pengelola/lembaga kemasyarakatan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) guna identifikasi potensi desa swasembada dalam rangka pembangunan desa.

8) **Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**

➤ Program Pengendalian Penduduk

Program ini difokuskan pada kegiatan Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) dan Pengolahan serta Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB.

➤ Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang pentingnya KB serta batasan PUS melalui pemberian Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana), promosi program bangga kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang

- Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini difokuskan pada kegiatan pengadaan BIB KIT pada 20 locus stunting serta Pembinaan PKBR di PIK Remaja dan BKR.

9) **Bidang Perhubungan**

- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan kapasitas sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, Sosialisasi SOP berkendara Melalui Media Banner, Flyer, dan Pamflet, dan Pengelolaan Terminal tipe C.

10) **Bidang Komunikasi Dan Informatika**

- Program Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan pelayanan komunikasi dan informatika untuk masyarakat, fasilitasi akses internet di area publik yang ada, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pelaku PPID.

- Program Aplikasi Informatika

Program ini difokuskan pada kegiatan Pembangunan jaringan fiber optik antar kecamatan, pengelolaan pusat data pemerintah daerah, dan pengembangan aplikasi.

11) **Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah**

- Program Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi

Program ini difokuskan pada kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

- Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
Program ini difokuskan pada kegiatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi melalui pendidikan dan latihan koperasi.
- Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi, sosialisasi dan pendampingan pembiayaan serta pemasaran usaha koperasi.
- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
Program ini difokuskan pada kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan, dan pelatihan bagi pelaku Usaha Mikro.
- Program Pengembangan UMKM
Program ini difokuskan pada kegiatan fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil.

12) **Bidang Penanaman Modal**

- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Program ini difokuskan pada kegiatan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal.
- Program Promosi Penanaman Modal
Program ini difokuskan pada kegiatan menginformasikan tentang potensi dan peluang investasi penanaman modal yang ada pada daerah guna menarik investor.
- Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem yang terintegrasi.

➤ Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan pelaksanaan penanaman modal serta Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan, pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

13) **Bidang Kepemudaan Dan Olahraga**

➤ Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan kapasitas pemuda, Pelatihan pembinaan pemuda (pelatih TUP/BB tingkat SMA), dan Pembentukan Forum koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.

➤ Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan dan pelatihan olahraga, pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi, pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga yang representatif, Pembinaan cabang olah raga prestasi kejurnas, Haornas, dan Porseni Pondok Pesantren, dan Penyusunan sistem informasi pendataan keolahragaan dan kepemudaan.

➤ Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program ini difokuskan pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan.

14) **Bidang Statistik**

➤ Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan pengelolaan data statistik sektoral, peningkatan validitas data produsen, dan fasilitasi koordinasi pemerintah daerah dan BPS guna sinkronisasi data.

15) **Bidang Persandian**

- Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan kapasitas SDM dalam melaksanakan pentest untuk mengoptimalkan kualitas keamanan informasi Pemerintah Daerah dan meningkatkan jumlah sistem elektronik yang dilakukan pengujian kerentanan dan penilaian risiko.

16) **Bidang Kebudayaan**

- Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan jumlah pelaku/kelompok seni dan budaya yang produktif melalui pengembangan kualitas SDM, serta kegiatan pembinaan sejarah Kabupaten Temanggung melalui penggalian sejarah lokal temanggung melalui narasumber ahli.

17) **Bidang Perpustakaan**

- Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini difokuskan pada kegiatan pembudayaan gemar membaca di kalangan masyarakat, serta pengelolaan perpustakaan desa/kelurahan, sekolah, TBM (Taman Bacaan Masyarakat) dan perpustakaan daerah untuk meningkatkan jumlah kunjungan dan peminjam di perpustakaan.

- Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Program ini difokuskan pada kegiatan monitoring dalam rangka pengumpulan naskah kuno penambahan koleksi nasional di wilayah Kabupaten Temanggung.

18) **Bidang Kearsipan**

- Program Pengelolaan Arsip

Program ini difokuskan pada kegiatan perbaikan dalam pengelolaan arsip untuk meningkatkan indeks manajemen kearsipan.

c. **Urusan Pemerintahan Pilihan**

1) **Bidang Kelautan dan Perikanan**

- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan produksi perikanan tangkap di perairan umum melalui pengembangan kapasitas nelayan kecil.

➤ Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini difokuskan pada kegiatan swasembada pada ikan konsumsi, pengembangan kapasitas kelompok pembudi daya ikan kecil, dan penyediaan prasarana pembudidayaan ikan.

➤ Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Program ini difokuskan pada penyusunan dokumen hasil pengawasan sumber daya perikanan tangkap di dilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan di wilayah Kabupaten Temanggung.

➤ Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini difokuskan pada kegiatan penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko, penyediaan ikan untuk konsumsi dan pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil.

2) Bidang Pariwisata

➤ Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini difokuskan pada kegiatan perencanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan destinasi wisata dan kegiatan pembinaan atau pendampingan desa wisata.

3) Bidang Pertanian

➤ Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan produktivitas tanaman pangan melalui pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan

- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini difokuskan pada kegiatan pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B, penyediaan peta lahan LP2B dan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya.

- Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini difokuskan pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis, kegiatan pelayanan jasa laboratorium dan medik veteriner untuk meningkatkan produktivitas hasil peternakan.

- Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini difokuskan pada kegiatan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan petani dalam pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) penyebab bencana pertanian.

- Program Penyuluhan Pertanian

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan kapasitas SDM dan lembaga penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa, penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, dan pembentukan sekolah lapang kelompok tani.

4) Bidang Perdagangan

- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini difokuskan pada kegiatan perbaikan dan pembangunan sarana prasarana di pasar daerah, perbaikan pada sarana prasarana pendukung pasar untuk memperlancar informasi dan komunikasi antara pasar dengan dinas dan penertiban pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan.

- Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Program ini difokuskan pada kegiatan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar daerah dan penyusunan laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan, kegiatan pengendalian pengawasan pasar untuk mengantisipasi kenaikan harga/inflasi bahan pokok di masyarakat serta pelaksanaan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang.
- Program Pengembangan Ekspor
Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan dan pengembangan pelaku usaha produk ekspor unggulan.
- Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
Program ini difokuskan pada kegiatan metrologi legal berupa tera ulang alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan.

5) Bidang Perindustrian

- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
Program ini difokuskan pada kegiatan fasilitasi pembinaan IKM unggulan daerah, pameran produk IKM, dan pembinaan industri penghasil cukai.

d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1) Sekretariat Daerah

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program ini difokuskan pada kegiatan penyempurnaan rumusan tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja utama pada setiap level organisasi agar lebih berorientasi hasil dan memiliki indikator yang relevan maupun terukur

sehingga ada keselarasan dalam penjabaran kinerja mulai dari level Kabupaten, Perangkat Daerah, hingga individu dan penyusunan SAKIP.

- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Program ini difokuskan pada kegiatan fasilitasi penyusunan produk hukum, fasilitasi bantuan hukum, koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam pendokumentasian perundangan di JDIH secara tepat waktu, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pelayanan publik oleh masing-masing perangkat daerah, dan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang memenuhi standar.
- Program Perekonomian dan Pembangunan
Program ini difokuskan pada kegiatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan mempersiapkan secara baik perencanaan dari OPD serta kebijakan dari masing masing kepala OPD dalam pelaksanaan kegiatan, pengoptimalan dalam penggunaan *e-procurement* terhadap belanja pengadaan, pencatatan non-tender atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang selesai tepat waktu, kerjasama yang efektif dengan dewan pengawas dalam pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja BUMD.

2) **Sekretariat DPRD**

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program ini difokuskan pada kegiatan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan keuangan dan kesejahteraan anggota DPRD, serta pemenuhan kegiatan tertib administrasi.
- Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
Program ini difokuskan pada kegiatan percepatan pembahasan dan penetapan Peraturan Daerah dan

Peraturan DPRD, optimalisasi kegiatan aspirasi DPRD, serta fasilitasi Tugas DPRD.

e. **Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**

1) **Perencanaan**

- Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan ketercapaian kinerja pembangunan daerah, kegiatan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, serta fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah

- Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini difokuskan pada kegiatan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di semua perangkat daerah agar terwujud konsistensi perencanaan pembangunan.

2) **Penelitian dan Pengembangan**

- Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan kapasitas SDM penelitian dan pengembangan, kegiatan fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan daerah, kegiatan penjangkaran dan fasilitasi kreaativitas dan inovasi, serta kegiatan pemetaan daya saing daerah

3) **Keuangan**

- Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini difokuskan pada kegiatan fasilitasi penyusunan IKPD, kegiatan penyusunan dan pengelolaan keuangan serta perbendaharaan daerah sehingga dokumen penganggaran tepat waktu, serta kegiatan koordinasi dan

komunikasi dengan perangkat daerah terkait dalam mewujudkan konsistensi penganggaran dengan perencanaan.

➤ Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini difokuskan pada kegiatan inventarisasi dan penataan barang milik daerah.

➤ Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini difokuskan pada kegiatan pengelolaan pendapatan daerah dan kegiatan peningkatan pendapatan asli daerah.

4) **Kepegawaian**

➤ Program Kepegawaian Daerah

Program ini difokuskan pada kegiatan pelayanan terhadap kebutuhan dan kesejahteraan pegawai di semua perangkat daerah, kegiatan fasilitasi dan motivasi pegawai perempuan dalam beberapa jabatan struktural, kegiatan optimalisasi updating pegawai secara mandiri, dan kegiatan fasilitasi sistem merit di lingkungan pegawai.

5) **Pendidikan dan Pelatihan**

➤ Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi kepesertaan pegawai dalam pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional

f. **Unsur Pengawasan Urusan pemerintahan**

1) **Inspektorat Daerah**

➤ Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan program pemerintah dan kegiatan pencegahan korupsi

➤ Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini difokuskan pada kegiatan pendampingan dan asistensi terhadap semua pelaksana program pemerintah

g. **Unsur Kewilayahan**

1) **Kecamatan**

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini difokuskan pada kegiatan optimalisasi pelayanan publik di kecamatan, pengadaan sarana dan prasarana kecamatan, serta kegiatan peningkatan kapasitas SDM kecamatan

- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Program ini difokuskan pada kegiatan penguatan kelembagaan desa, kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kelurahan, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat

- Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Program ini difokuskan pada kegiatan penegakan Perda, dan kegiatan fasilitasi ketenteraman dan ketertiban umum

- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa serta kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat terkait kepemilikan KPT-Elektronik dan pembayaran PBB.

h. **Pemerintahan Umum**

1) **Kesatuan Bangsa dan Politik**

- Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program ini difokuskan pada kegiatan sosialisasi dan pengembangan wawasan kebangsaan pada masyarakat semua elemen.

- Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
Program ini difokuskan pada kegiatan pendidikan politik terutama bagi pemilih pemula.
- Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan dan pengaawasan organisasi kemasyarakatan.
- Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Program ini difokuskan pada kegiatan pencegahan perkembangan aliran sesat, kegiatan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, kegiatan pembinaan terhadap penghayat aliran kepercayaan, kegiatan monitoring dan evaluasi
- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan dan penanganan konflik sosial.

5.2.2 Pagu Indikatif Per Program Berdasarkan Urusan dan Bidang

Berikut adalah rekapitulasi pagu indikatif pada setiap program berdasarkan urusannya di RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024. Secara rinci untuk penjabaran program/kegiatan/sub kegiatan beserta indikator kinerja dan pagunya dituangkan dalam lampiran RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

Tabel 5. 33
Rekapitulasi Anggaran Per Urusan dan Per Bidang

NO	URUSAN	TOTAL ANGGARAN	PERUBAHAN ANGGARAN
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIN YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.521.220.051.357	1.287.055.292.440
1	PENDIDIKAN	710.867.543.288	731.553.219.198

NO	URUSAN	TOTAL ANGGARAN	PERUBAHAN ANGGARAN
2	KESEHATAN	627.692.832.423	417.032.810.462
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	132.034.798.488	84.270.252.390
4	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	9.762.538.800	7.559.200.990
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	14.504.279.500	15.726.200.026
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	26.358.058.858	30.913.609.374
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	278.932.509.678	224.829.574.842
1	TENAGA KERJA	7.263.603.435	8.427.472.749
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	605.000.000	250.000.000
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	40.335.826.698	25.478.820.754
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	34.037.295.756	25.279.403.334
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.485.914.809	6.610.020.415
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.413.362.609	7.943.528.258
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	11.448.817.000	12.331.180.671
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	42.430.038.358	35.730.928.000
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	16.977.694.343	10.457.835.628
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	15.534.094.454	15.516.014.203
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	7.134.154.974	7.430.680.943
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	8.835.000.000	3.520.000.000
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	127.833.000	102.832.800
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	70.000.000	100.000.000
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	15.400.929.742	16.106.227.229

NO	URUSAN	TOTAL ANGGARAN	PERUBAHAN ANGGARAN
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	4.245.599.797	5.517.430.312
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	420.000.000	199.300.000
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.714.166.000	150.000.000
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	567.925.000	154.250.000
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	39.040.725.949	26.296.332.043
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	16.534.527.754	16.817.317.503
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	310.000.000	410.000.000
III	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		115.140.438.235
1	SEKRETARIAT DAERAH	71.029.992.401	61.758.675.360
2	SEKRETARIAT DPRD	48.442.805.978	53.381.762.875
IV	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		39.242.263.657
1	PERENCANAAN	8.575.073.555	1.733.282.500
2	KEUANGAN	437.038.562.939	31.586.749.829
3	KEPEGAWAIAN	6.129.371.663	4.959.231.928
4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.944.399.000	609.000.000
5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.170.000.000	353.999.400
V	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.524.492.597	8.468.351.436
1	INSPEKTORAT DAERAH	6.524.492.597	8.468.351.436
VI	UNSUR KEWILAYAHAN	76.566.579.949	70.362.713.742
1	KECAMATAN	76.566.579.949	70.362.713.742
VII	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	56.312.325.525	36.045.284.885
1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	56.312.325.525	36.045.284.885
Jumlah Total		2.504.481.427.161	2.155.377.732.617

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2023, data diolah.

Tabel 5. 34
Rencana Pembiayaan Per Urusan dan Program

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF	Perubahan Anggaran
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIN YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.521.220.051.357	1.287.055.292.440
A	PENDIDIKAN				710.867.543.288	731.553.219.198
1	Program Pengelolaan Pendidikan	persentase APM PAUD (5-6 tahun)	81,35	%	215.448.883.450	189.348.476.380
		persentase APK PAUD (0-6 tahun)	42,43	%		
		persentase APK PAUD (4-6 tahun)	77,17	%		
		persentase APK PAUD (5-6 tahun)	89,05	%		
		persentase Pendidik PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4 Pendidikan Guru PAUD/Bimbingan Konseling/Psikologi	100	%		
		persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	49,14	%		
		persentase Jumlah Kepala Satuan PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%		
		Rasio Jumlah Pengawas dan Penilik PAUD	0,02	Angka		
		persentase ruang kelas TK Negeri dalam kondisi baik	100	%		
		persentase APM SD Sederajat	98,5	%		

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF	Perubahan Anggaran
		persentase APK SD Sederajat	104,87	%		
		Angka Putus Sekolah SD Sederajat	0,02	Angka		
		Rasio Siswa/Guru SD	0,061111	Angka		
		Rasio Siswa/Rombel SD	0,061111	Angka		
		persentase Pendidik SD memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4	100	%		
		persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	61,27	%		
		persentase Kepala SD memilikikualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%		
		persentase tenaga penunjang lain di SD yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%		
		Rasio Jumlah Pengawas SD	0,1	Angka		
		persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	90,49	%		
		persentase APM SMP Sederajat	88,5	%		
		persentase APK SMP Sederajat	98,7	%		
		Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	98,7	%		
		Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	0,18	Angka		
		Rasio Siswa/Guru SMP	0,063889	Angka		
		Rasio Siswa/Rombel SMP	0,063889	Angka		

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF	Perubahan Anggaran
		persentase Pendidik SMP memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4	100	%		
		persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	66	%		
		persentase Kepala SMP memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	100	%		
		persentase tenaga penunjang lain di SMP yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%		
		Rasio Jumlah Pengawas SMP	0,07	Angka		
		persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	95,92	%		
		persentase Pendidik Kesetaraan memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4 sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu	100	%		
		persentase Kepala Satuan Pendidikan Non Formal memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4	100	%		
		persentase tenaga penunjang lain di Satuan Pendidikan Non Formal yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	100	%		
		persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	88	%		

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF	Perubahan Anggaran
		persentase SDM lembaga kursus yang sudah mendapatkan pelatihan dari DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri)	17	%		
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	100	%	495.418.659.838	542.204.742.818
B	KESEHATAN				627.692.832.423	417.032.810.462
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	73	per 100.000 KH	470.446.155.500	249.485.207.909
		Angka Kematian Bayi (AKB)	13,5	per 1000 KH		
		Cakupan Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	100	%		
		Prevalensi anemia pada ibu hamil	13,44	% maksimal		
		Cakupan Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100	%		
		Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100	%		
		persentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	100	%		
		persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%		
		Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani	100	%		
		Angka Kematian Neonatal	9,15	per 1.000 KH		

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF	Perubahan Anggaran
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	%		
		Angka Kematian Balita	15,6	per 1.000 KH		
		Prevalensi ballita gizi buruk	0,31	%		
		Prevalensi <i>Stunted</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-24 bulan)	14	% maksimal		
		persentase bayi umur 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	82,5	% minimal		
		persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%		
		persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%		
		Cakupan warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	%		
		persentase fasyankes rujukan yang memenuhi standar mutu	62	%		
		persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%		
		persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%		

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF	Perubahan Anggaran
		persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	%		
		persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	%		
		persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	%		
		<i>Incident Rate</i> DBD (Demam Berdarah Dengue)	8	Maks per 100.000 penduduk		
		Presentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	82	%		
		persentase rumah sehat	87,5	%		
		persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	98,2	%		
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	persentase Puskesmas dengan SDM kesehatan yang memenuhi standar	23,1	%	2.000.000.000	1.327.703.000
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Cakupan puskesmas melaksanakan pelayanan farmasi sesuai standar	100	%	472.419.000	445.344.000
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang kesehatan	persentase Rumah Tangga Sehat (PHBS Rumah Tangga) Strata Utama dan Paripurna	84,51	%	467.719.000	2.867.179.400
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	154.306.538.923	162.907.376.153

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF	Perubahan Anggaran
C	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				132.034.798.488	84.270.252.390
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	persentase jaringan irigasi kondisi baik	59,32	%	20.045.987.800	10.234.706.800
		Cakupan Area Layanan Daerah Irigasi	97,97	%		
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	95,5	%	9.929.055.750	8.645.297.000
		Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	100	%		
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)	100	%	5.000.000.000	10.469.879.000
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	persentase saluran drainase kondisi baik	69,4	%	1.850.000.000	1.351.000.000
5	Program Penataan Bangunan Gedung	persentase terbangunnya gedung pemerintah	100	%	16.928.046.000	4.200.000.000
6	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	persentase Trotoar Kondisi Baik	73,93	%	3.210.000.000	2.820.000.000
7	Program Penyelenggaraan Jalan	persentase Jalan Kondisi Mantap	89,29	%	60.930.827.100	33.003.168.000
		persentase Jembatan dalam kondisi baik	93,75	%		
		persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan	18,61			

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF	Perubahan Anggaran
8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	89,5	%	629.974.000	950.000.000
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	13.510.907.838	12.596.201.590
D	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				9.762.538.800	7.559.200.990
1	Program Pengembangan Perumahan	persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	4,46	%	1.201.800.000	962.076.200
		Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	88,3	%		
2	Program Kawasan Permukiman	persentase rumah layak huni	95,54	%	8.560.738.800	6.597.124.790
		persentase kawasan kumuh perkotaan	4,84	%		
		persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100	%		
		persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	100	%		
E	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				14.504.279.500	15.726.200.026

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF	Perubahan Anggaran
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	persentase Satlinmas yang teratih	3,46	%	2.540.064.400	3.480.713.000
		persentase pengaduan yang berkaitan dengan Trantibum yang ditindaklanjuti	100	%		
		persentase penegakan Perda/Perbup	100	%		
2	Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (<i>Respon Time Rate</i>) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	75	%	1.963.333.600	1.602.679.000
		persentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100	%		
		persentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran oleh relawan kebakaran	100	%		
		persentase Bangunan/Gedung/Lingkungan yang menjadi prioritas inspeksi	3,08	%		
3	Program Penanggulangan Bencana	persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	%	1.728.000.000	1.203.174.000
		persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	%		
		persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	%		

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF	Perubahan Anggaran
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	8.272.881.500	9.439.634.026
F	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				26.358.058.858	30.913.609.374
1	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	100	%	200.000.000	190.000.000
2	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	100	%	30.000.000	20.000.000
3	Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	888.694.000	874.667.400
		Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%		
		Jumlah Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%		
		Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100	%		

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF	Perubahan Anggaran
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	100	%	19.307.024.350	21.783.062.415
		persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	100	%		
		Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	100	%		
		persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang berkelanjutan	50	%		
		persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	48	%		
4	Program Penanganan Bencana	persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	100	%	270.000.000	1.770.000.000
5	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	100	%	200.000.000	200.000.000
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	5.462.340.508	6.075.879.559
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				278.932.509.678	224.829.574.842
A	TENAGA KERJA				7.263.603.435	8.427.472.749
1	Program Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja	persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	72	%	850.000.000	800.000.000

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF	Perubahan Anggaran
		persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina	80	%		
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	persentase pencari kerja yang ditempatkan	35	%	160.000.000	440.000.000
		persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	30	%		
		persentase pencari kerja yang dilatih melalui perluasan kesempatan kerja	1	%		
		persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur	90	%		
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	6.253.603.435	7.187.472.749
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				605.000.000	250.000.000
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	2,65	%	35.000.000	35.000.000
		Rasio Perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan renja PD	100	%		

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF	Perubahan Anggaran
2	Program Perlindungan Perempuan	persentase kasus kekerasan terhadap anak perempuan	0,0029	%	60.000.000	75.000.000
		persentase kasus kekerasan terhadap perempuan	0,0029	%		
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	persentase desa sayang ibu dan bayi	62,28	%	25.000.000	35.000.000
		persentase pelayanan ramah anak di rumah sakit dan puskesmas	100	%		
4	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kabupaten Layak Anak	Madya	Kategori	60.000.000	10.000.000
5	Program Perlindungan Khusus Anak	persentase kasus kekerasan terhadap anak	0,004	%	425.000.000	95.000.000
C	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				40.335.826.698	25.478.820.754
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rasio ketersediaan pangan	100	%	1.000.000.000	-
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	persentase penanganan kerawanan pangan	56	%	50.000.000	-
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman	90	%	75.000.000	-
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	39.210.826.698	25.478.820.754

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF	Perubahan Anggaran
D	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				34.037.295.756	25.279.403.334
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	100	%	750.000.000	200.000.000
		persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	100	%		
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	52,7	Angka	799.999.950	442.955.150
		Indeks Kualitas Udara	83,82	Angka		
		persentase Luas Lahan Kritis Tertangani terhadap Total Luas Lahan Kritis	0,067	%		
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	persentase Luas RTH Milik Pemerintah Daerah yang Tertangani	63,9	%	1.300.000.000	2.050.000.000
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	persentase usaha yang memiliki Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3	100	%	15.000.000	-

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF	Perubahan Anggaran
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	100	%	50.000.000	35.738.800
6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan	28,6	%	100.000.000	-
7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	100	%	50.000.000	50.000.000
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100	%	10.000.000	-
9	Program Pengelolaan Persampahan	persentase sampah yang tertangani	60,21	%	17.871.980.000	9.164.999.700
		Cakupan layanan persampahan	64,71	%		
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	13.090.315.806	13.335.709.684
F	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				6.485.914.809	6.610.020.415
1	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan KK, KTP el, KIA	87	%	750.000.000	750.000.000

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF	Perubahan Anggaran
2	Program Pelayanan dan Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	99,82	%	20.000.000	-
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	persentase terpeliharanya Sarpras SIAK untuk pelayanan Administrasi Kependudukan	94,9	%	500.000.000	270.000.000
		persentase Pelaksanaan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital	0,8	%		
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	5.215.914.809	5.590.020.415
G	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				8.413.362.609	7.943.528.258
1	Program Penataan Desa	Persentase Peraturan Desa Tentang Pungutan yang sesuai dengan Kewenangan Desa	50	%	25.000.000	15.000.000
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	persentase Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES	8	%	25.000.000	-
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kepatuhan Pelaporan Aset Desa dalam Aplikasi Sipades	50	%	4.203.000.000	3.848.000.000
		Persentase laporan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh BPD	70	%		
		Persentase penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	100	%		
		persentase pengisian kekosongan Perangkat Desa	37	%		

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF	Perubahan Anggaran
		persentase Desa Cepat Berkembang berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa	38,34	%		
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	persentase Desa yang menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	3,7	%	507.000.000	523.500.000
		persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum	50	%		
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	3.653.362.609	3.557.028.258
H	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				11.448.817.000	12.331.180.671
1	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki data mikrokeluarga	100	%	406.000.000	423.256.000
		Persentase Pasangan Usia Subur yang Ingin BerKB yang Tepenuhi (<i>unmetneed</i>)	10,5	%		
		Persentase Pasangan Usia Subur yang Istrinya dibawah Usia 20 Tahun	2	%		
		Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19 tahun)	12,6	%		
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Pasangan Usia Subur(PUS) yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	88,5	%	6.621.917.000	7.301.754.000
		Persentase Kepesertaan KB Aktif	75,75	%		

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF	Perubahan Anggaran
		Persenatase Keberhasilan Pemakaian Kontrasepsi Jangka Panjang	46,1	%		
		Persentase Kampung KB Berkembang dan Mandiri	37,88	%		
3	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga	55,98	%	4.420.900.000	4.606.170.671
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				42.430.038.358	35.730.928.000
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai	41,55	%	24.177.304.000	17.865.464.000
		persentase Angkutan umum yang memenuhi standar minimal pelayanan	30	%		
		persentase potensi titik parkir yang tertangani	98,25	%		
		persentase Terminal Tipe C Yang Aktif	100	%		
		persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	100	%		
		persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	99,61	%		
		persentase penerangan jalan di ruas jalan kabupaten	33,48	%		
		persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Temanggung	63,58	%		

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF	Perubahan Anggaran
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	18.252.734.358	17.865.464.000
J	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				16.977.694.343	10.457.835.628
1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif	35	%	4.035.570.500	3.243.331.100
		persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik	100	%		
		persentase tindak lanjut laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo	85	%		
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	persentase kinerja infrastruktur TIK yang baik	100	%	8.915.398.360	2.046.932.300
		persentase layanan publik secara elektronik	50	%		
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	4.026.725.483	5.167.572.228
K	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				15.534.094.454	15.516.014.203
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi	persentase koperasi sehat	36	%	25.000.000	15.000.000

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF	Perubahan Anggaran
2	program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi	persentase kenaikan koperasi cukup sehat menjadi sehat	1,74	%	25.000.000	-
3	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	persentase UMKM berbasis Desa/Kelurahan	4,45	%	204.500.000	25.000.000
4	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	persentase pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif	91,43	%	250.000.000	-
5	program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	persentase koperasi tidak aktif yang diusulkan untuk dibubarkan	100	%	25.000.000	-
6	Program Pengembangan UMKM	persentase UMKM yang difasilitasi	0,92	%	331.370.000	50.000.000
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	14.673.224.454	15.426.014.203
L	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				7.134.154.974	7.430.680.943
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan	100	Milyar	20.000.000	7.000.000
		persentase perusahaan yang bermitra	50	%		
2	Program Promosi Penanaman Modal	persentase promosi penanaman modal	25	%	60.000.000	7.000.000

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF	Perubahan Anggaran
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	persentase Pelayanan Perizinan secara Elektronik	100	%	3.350.000.000	3.246.999.800
		persentase Perizinan yang diterbitkan tepat waktu	100	%		
		persentase Pengaduan masyarakat yang tertangani	100	%		
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	persentase pengendalian penanaman modal	12	%	415.200.000	404.961.000
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	persentase Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	100	%	10.000.000	-
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	3.278.954.974	3.764.720.143
M	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				8.835.000.000	3.520.000.000
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	persentase organisasi pemuda yang aktif	85	%	920.000.000	200.000.000
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	persentase pelatih olahraga bersertifikat	96,45	%	7.465.000.000	3.070.000.000
		persentase prestasi olahraga	60	%		
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	persentase gugus depan yang aktif	100	%	450.000.000	250.000.000
N	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				127.833.000	102.832.800

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF	Perubahan Anggaran	
1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Ketersediaan data statistik sektoral	100	%	127.833.000	102.832.800	
0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					70.000.000	100.000.000
1	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	persentase penilaian resiko keamanan informasi	33,3	%	70.000.000	100.000.000	
		persentase pelaksanaan prosedur pengamanan informasi pada perangkat daerah	30				
P	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					15.400.929.742	16.106.227.229
1	Program Pengembangan Kebudayaan	persentase kelompok Budaya yang Teregister	4,1	%	11.076.226.500	10.855.000.000	
		persentase kelompok kesenian yang produktif	38	%			
		persentase pelestarian Sejarah Lokal	7,49	%			
		persentase Pelestarian Cagar Budaya	9,18	%			
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	4.324.703.242	5.251.227.229	
Q	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					4.245.599.797	5.517.430.312

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF	Perubahan Anggaran
1	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase pertumbuhan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan	0,025	%	405.000.000	1.181.189.000
		persentase pertumbuhan jumlah peminjam di perpustakaan	40	%		
		Persentase perpustakaan yang aktif	34	%		
2	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Penelusuran Naskah Kuno	100	%	15.000.000	-
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	3.825.599.797	4.336.241.312
R	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				420.000.000	199.300.000
1	Program Pengelolaan Arsip	Persentase arsip vital konvensional yang dialih mediakan	55	%	420.000.000	199.300.000
		Persentase audit internal kearsipan	66,67	%		
S	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				2.714.166.000	150.000.000
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	persentase nelayan perairan umum yang terbina	10	%	90.000.000	-
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produktivitas ikan nila	1,2	kg/m2	1.980.383.000	150.000.000

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF	Perubahan Anggaran
		Produktivitas ikan lele	12,6	kg/m2		
3	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	persentase peningkatan lokasi penebaran benih ikan	10	%	20.000.000	-
4	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	22,08	%	623.783.000	-
T	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				567.925.000	154.250.000
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	0,03	%	567.925.000	154.250.000
		Lama Tinggal Wisatawan	1	Hari		
		persentase Peningkatan Desa Wisata	13,26	%		
		persentase Peningkatan pelaku Ekraft	9,5	%		
U	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				39.040.725.949	26.296.332.043
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas padi	61,25	Kuintal/ha	22.029.320.649	17.007.101.143
		Produktivitas jagung	54,5	Kuintal/ha		
		Produktivitas bawang putih	60,5	Kuintal/ha		
		Produktivitas bawang merah	68	Kuintal/ha		
		Produktivitas cabai rawit	50	Kuintal/ha		
		Produktivitas cabai besar	65	Kuintal/ha		

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF	Perubahan Anggaran
		Produktivitas tembakau	6,2	Kuintal/ha		
		Produktivitas kopi robusta	7,1	Kuintal/ha		
		Produktivitas kopi arabika	6,5	Kuintal/ha		
		Produktivitas ternak sapi	177,4	Kg/Ekor		
		Produktivitas ternak domba	13,7	Kg/Ekor		
		Produktivitas ternak kambing	13,7	Kg/Ekor		
		Produktivitas ternak ayam ras pedaging	0,75	Kg/Ekor		
		Produktivitas ternak ayam petelur	10,88	Kg/Ekor		
		persentase kelahiran pedet	55,5	%		
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	persentase Prasarana yang dimanfaatkan sesuai fungsinya	100	%	11.560.933.900	8.317.730.900
3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	persentase penanganan penyakit hewan	85	%	350.575.000	721.500.000
		persentase pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	75	%		

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF	Perubahan Anggaran
4	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian	41	%	550.000.000	-
5	Program Penyuluhan Pertanian	persentase Kelompok Tani yang naik kelas	1,3	%	4.549.896.400	250.000.000
V	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				16.534.527.754	16.817.317.503
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	persentase fasilitasi pelaku usaha informal	13,71	%	1.161.303.300	1.161.303.300
		persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik	67	%		
		persentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital	1,5	%		
		persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	75	%		
2	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	persentase Ketersediaan informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	70	%	220.000.000	210.000.000
4	Program Pengembangan Ekspor	cakupan pelaku usaha yang di bina	1,15	%	100.000.000	-
3	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang	98,37	%	190.000.000	20.000.000

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF	Perubahan Anggaran
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	14.673.224.454	15.426.014.203
W	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				310.000.000	410.000.000
1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	persentase IKM Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	71,62	%	310.000.000	410.000.000
		persentase Pembinaan IKM Tembakau Lembutan	15,36	%		
III	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				119.472.798.379	115.140.438.235
A	SEKRETARIAT DAERAH				71.029.992.401	61.758.675.360
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	36.916.214.801	31.898.562.527
		Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Pimpinan Daerah	100	%		
		Persentase SAKIP Perangkat Daerah berpredikat BB	17	%		
		Persentase pemenuhan pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah	100	%		
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	persentase Kerjasama yang diimplementasikan	100	%	33.673.324.700	28.473.785.700

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF	Perubahan Anggaran
		persentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat Waktu	100	%		
		persentase perangkat daerah yang menyampaikan LPPD dan LKPJ tepat waktu	100	%		
		persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	90	%		
		persentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	60	%		
		persentase produk hukum yang difasilitasi	100	%		
		persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	100	%		
		persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi	100	%		
		persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi	100			
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	100	%	1.585.452.900	1.386.327.133

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF	Perubahan Anggaran
		persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	100	%		
		persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	83,33	%		
		persentase paket pekerjaan selesai tepat waktu	100	%		
		persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu	100	%		
		persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	100	%		
		persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (tender)	100	%		
		persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (PL > 100 juta)	100	%		

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF	Perubahan Anggaran
		persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	97	%		
B	SEKRETARIAT DPRD				48.442.805.978	53.381.762.875
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	35.588.360.785	32.000.881.724
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	persentase jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas	90	%	12.854.445.193	21.380.881.151
		persentase kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang dilaksanakan sesuai rencana	95	%		
		persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	100	%		
		persentase kegiatan peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	100			
IV	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				454.857.407.157	39.242.263.657
A	PERENCANAAN				8.575.073.555	1.733.282.500
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	100	%	1.069.782.500	1.189.782.500

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF	Perubahan Anggaran
		persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu	95	%		
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pembangunan manusia	90	%	1.715.000.000	543.500.000
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	90	%		
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang ekonomi dan sumber daya alam	90	%		
		Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja perangkat daerah terhadap renstra perangkat daerah sub bidang infrastruktur	90	%		

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF	Perubahan Anggaran
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	5.790.291.055	
B	KEUANGAN				437.038.562.939	31.586.749.829
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan pengalokasian anggaran belanja <i>mandatory spending</i> dalam APBD	100	%	409.278.434.633	6.408.388.943
		persentase dokumen penganggaran tepat waktu	100	%		
		persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	100	%		
		Cakupan Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	100	%		
		Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu	100	%		
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyampaian Laporan Daftar Barang Milik Daerah tepat waktu	100	%	1.215.148.000	1.100.551.400
		persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	80	%		

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF	Perubahan Anggaran
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	persentase Peningkatan Potensi Target Pajak Daerah	8	%	710.187.000	675.509.500
		persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	100	%		
		persentase realisasi penerimaan pajak daerah	95	%		
		Penyampaian Laporan Pendapatan Daerah tepat waktu	100	%		
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	25.834.793.306	23.402.299.986
C	KEPEGAWAIAN				6.129.371.663	4.959.231.928
1	Program Kepegawaian Daerah	Cakupan Pengembangan SDM Aparatur	41,39	%	1.848.770.500	433.999.500
		Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur dan layanan Aparatur	86,5	%		
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	4.280.601.163	4.525.232.428
D	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				1.944.399.000	609.000.000
1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Cakupan Pembinaan SDM Aparatur	96,18	%	1.944.399.000	609.000.000
E	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				1.170.000.000	353.999.400

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF	Perubahan Anggaran
1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian	100	%	1.170.000.000	353.999.400
		persentase kreativitas dan inovasi daerah yang diterapkan atau diimplementasikan	100	%		
V	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				6.524.492.597	8.468.351.436
A	INSPEKTORAT DAERAH				6.524.492.597	8.468.351.436
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	61	%	550.215.000	662.215.000
		persentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	48	%		
		persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD dan pengadaan barang/jasa	63	%		

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF	Perubahan Anggaran
		persentase penanganan aduan masyarakat	100	%		
		persentase tindak lanjut hasil temuan	100			
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	100	%	380.921.000	363.000.000
		persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	100	%		
		persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya	20	%		
		Kompilasi level komponen dukungan pengawasan dan komponen aktifitas pengawasan serta kualitas pengawasan	3	Level		
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	5.593.356.597	7.443.136.436
VI	UNSUR KEWILAYAHAN				76.566.579.949	70.362.713.742
A	KECAMATAN				76.566.579.949	70.362.713.742
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	55.314.044.959	54.889.969.602
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di kecamatan	100	%	2.039.868.490	2.039.847.190

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF	Perubahan Anggaran
		persentase realisasi penerimaan PBB	95	%		
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang layak	100	%	18.462.970.900	12.342.412.750
		Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang terfasilitasi dan aktif	100	%		
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	persentase penanganan laporan kejadian gangguan kantibnas dan bencana alam	100	%	340.789.900	340.789.650
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase penyelesaian pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa	100	%	408.905.700	749.694.550
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu	100	%		
		persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKPDes tepat waktu	100	%		
VII	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				56.312.325.525	36.045.284.885
A	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				56.312.325.525	36.045.284.885
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	80	%	850.000.000	415.000.000
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	persentase pelaksanaan pendidikan politik	80	%	51.468.669.650	30.460.469.000

No	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	PAGU INDIKATIF	Perubahan Anggaran
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	persentase ormas yang mendapatkan pembinaan	13,33	%	30.000.000	-
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,Sosial dan Budaya	persentase Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100	%	320.000.000	185.000.000
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik dan keamanan daerah	100	%	595.000.000	317.500.000
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%	3.048.655.875	4.667.315.885
JUMLAH TOTAL					2.504.481.427.161	2.155.377.732.617

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2022, data diolah.

Selain itu, juga terdapat dukungan pembiayaan non APBD yang mendukung program prioritas pemerintah daerah diantaranya USAID IUWASH Tangguh, Baznas, APBN, dll. Sebagai contoh, Kabupaten Temanggung mendapatkan Program USAID IUWASH Tangguh Tahun 2022 - 2027 (5 Tahun). Program tersebut bertujuan untuk mencapai target air minum dan sanitasi aman serta perubahan perilaku hygiene. Untuk mencapai tujuan tersebut sampai dengan Maret 2023 sudah dilakukan beberapa kegiatan antara lain (1) Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Tahun 2022-2027, (2) Penyusunan Raperbup Pengelolaan Air Limbah Domestik, (3) Penyusunan *Governance Index* dan *Sanitation Index* Tahun 2022-2027, (4) Rangkaian kegiatan bersama masyarakat untuk perubahan perilaku hygiene dan peningkatan akses air minum sanitasi di lokasi percontohan Kabupaten Temanggung, (5) *Workshop* kesadaran bagi pemangku kepentingan Pengelolaan Sumber Daya Air mengenai Adaptasi Perubahan Iklim, (6) *Workshop* operasional dan pemeliharaan bagi penerima manfaat SPALDS/T, (7) *Training* enumerator dan survei Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) : Penyusunan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) oleh PDAM, Penyusunan Rencana Bisnis oleh PDAM, Kajian Delineasi Mata Air yang digunakan oleh PDAM baru dilakukan di satu lokasi yaitu mata air Tuk Mulyo, Pandemulyo, *Training* pemicuan untuk kader di lokasi percontohan dan *Training* pembuatan jamban untuk KSM yang mendapat DAK.

Selain itu, dalam mendukung pembangunan daerah dibutuhkan kolaborasi antara Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah yang terdiri dari Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dan Lembaga Sosial lainnya. Khusus untuk TJSLP Kabupaten Temanggung telah menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 126 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. TJSLP dan Lembaga Sosial lainnya sudah mendukung pembangunan daerah dan perannya dapat dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat di berbagai

bidang. Pemerintah Kabupaten Temanggung mengapresiasi kebijakan Forum TJSLP dan Lembaga sosial lainnya yang telah berperan aktif mendukung pembangunan di Kabupaten Temanggung di berbagai bidang. Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung bersama Forum TJLSP melaksanakan kegiatan pertemuan bersama membahas agenda kegiatan pembangunan daerah yang memerlukan kerjasama dengan TJSLP secara rutin tiap tiga bulan sekali. TJSLP di Kabupaten Temanggung berkomitmen sebagian laba untuk program pembangunan daerah, dengan 2 (dua) mekanisme, yaitu dapat menyalurkan sendiri atau dikumpulkan melalui Forum TJSLP. Pemerintah Daerah berfungsi menyediakan *database* baik berupa program/kegiatan, lokus, dan calon penerima manfaat.

Pada Tahun 2021 Forum TJSLP dan juga Lembaga Non Pemerintah Lainnya (Baznas, Lazisnu, Lazismu, dan masyarakat) telah memberikan kontribusi di berbagai bidang sebesar Rp7.419.872.220,00 (tujuh miliar empat ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh rupiah) yang terdiri dari Rp5.287.911.824,00 (lima miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) digunakan untuk penanganan kemiskinan dan Rp2.131.960.396,00 (dua miliar seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah) digunakan untuk bantuan tanaman konservasi, bantuan kesehatan, bantuan sembako dan bantuan RTLH. Pada tahun 2023, TJSLP berkomitmen membantu Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk penanganan kemiskinan dan stunting.

Forum TJSLP merupakan investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan dan bukan lagi dilihat sebagai sarana biaya, melainkan sebagai sarana meraih keuntungan serta mengoptimalkan peran serta masyarakat, terutama pelaku usaha dalam mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Temanggung, sehingga dapat mewujudkan kesamaan persepsi, komitmen dan kepedulian perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Temanggung serta mampu mewujudkan program TJSLP yang terarah

dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Kabupaten Temanggung.

BAB VI

PENUTUP

Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dilakukan karena menjadi dasar dalam proses penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Dalam rangka menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, diperlukan penyesuaian dokumen perencanaan dengan kondisi perkembangan terkini.

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II, menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan. Perubahan RKPD Tahun 2024 memuat penyesuaian-penyempaan tersebut sebagai upaya untuk menjamin konsistensi antara dokumen RPJMD dan RKPD dengan dokumen PPAS sehingga pelaksanaan program-program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program/kegiatan sekaligus sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024, penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024, dan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

Implementasi semua program pembangunan daerah Kabupaten Temanggung akan terwujud apabila didukung komitmen semua pihak sehingga terwujud pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Temanggung pada tahun 2024.

Pj. Bupati Temanggung

Hary Agung Prabowo